Sensus Penduduk 2020

#MencatatIndonesia
#SP2020.

Katalog: 1205015

DOKUMENTASI KOMPREHENSIF SENSUS PENDUDUK 2020

Volume 2, 2023

BADAN PUSAT STATISTIK

UNFPA

https://www.bps.go.id

Katalog: 1205015

DOKUMENTASI KOMPREHENSIF SENSUS PENDUDUK 2020

Volume 2, 2023

https://www.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK

UNFPA

Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020

Volume 2, 2023

Katalog: 1205015
Nomor Publikasi: 04100.2314
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman: xxxii+204 halaman

Penyusun Naskah:
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penyunting:
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembuat Kover:
Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:
Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:
www.canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://www.bps.go.id

TIM PENYUSUN

Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020

Volume 2, 2023

Pengarah:
Ateng Hartono

Penanggung Jawab:
Ali Said

Penyunting:
Sri Wahyuni • Estiana Yesie Prastiwi • Uray Naviandi • Diah Ikawati
Ari Purbowati • Purnama Cahya Sari Silalahi • Parwoto

Penulis:
Sri Wahyuni • Estiana Yesie Prastiwi • Uray Naviandi • Diah Ikawati
Dendi Handiyatmo • Dwi Trisnani • Apriliani Nurida Dwi Aswarawati
Elfrida Zoraya • Ari Purbowati • Wida Siddhikara Perwitasari • Putricia Synthesa
Nur Amalia Ramadhani • Yogo Aryo Jatmiko • Ikhsan Fahmi
Uluan Raja Sitorus • Afika Choirrun Nisa • Putu Rima Ayu Padini
Arief Pratama • Astrid Masitha Shabrina • Ervina Nafia Sari
Rahmah Wikratul Yumni • Kurniati Bachrun • Neny Aditina • Riyadi Solih
Rizky Dwi Yuniarvi • Putri Ilhami Firdaus • Wuri Hariyati • Yenny Eviyanty
Bambang Windujati • Dwi Purwanto • Aulia Ilmawati • Wahyu Ashari
Isnaeni Noviyanti • Irvan Rahman Saleh • Nauval Tama Pratikto
Ndaru Nuswantari • Muhlis Rajapriana • Sulisetyo Puji Widodo
Synthia Natalia Kristiani • Syukriyah Delyana
Sari Seftiani • Luh Kitty Katherina • Intan Adhi Perdana Putri

Penata Letak:
Putricia Synthesa • Putu Rima Ayu Padini • Bellia Mega Sari • Ervina Nafia Sari

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

KATA SAMBUTAN

Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020 memperkenalkan pendekatan inovatif yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penggunaan sensus berbasis register yang menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar pelaksanaan sensus. Pendekatan ini merupakan alternatif dari metode sensus tradisional yang telah digunakan sebelumnya. Dengan menggunakan data administrasi kependudukan yang sudah ada, sensus berbasis register ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi dan akurasi pengumpulan data penduduk.

Pengumpulan data Sensus Penduduk 2020 dilakukan melalui penggunaan *short form* dan *long form*. *Short form* digunakan untuk mengumpulkan informasi dasar mengenai jumlah penduduk dan karakteristik terpilih. Sementara itu, *long form* bertujuan untuk memberikan rincian yang lebih komprehensif mengenai berbagai aspek seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, disabilitas, dan perumahan. UNFPA Indonesia bangga telah memberikan dukungan kepada BPS Indonesia dalam kedua tahap sensus ini untuk memastikan keberhasilan Sensus Penduduk 2020.

Sensus Penduduk tahun 2020 menghadapi berbagai tantangan terkait pandemi, namun BPS berhasil mengatasi hal tersebut dengan menerapkan berbagai solusi inovatif. Solusi-solusi ini diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dan pembelajaran dalam melaksanakan sensus dan survei di masa depan. UNFPA memberikan dukungan kepada BPS dalam mendokumentasikan secara komprehensif seluruh proses Sensus Penduduk 2020, baik *short form* ataupun *long form*.

Publikasi ini mencatat semua tahapan dalam sensus, mulai dari persiapan hingga analisis dan diseminasi. Tujuannya adalah menjadi sumber berharga bagi pemahaman pelaksanaan sensus, dan pembelajaran dari pengalaman nyata serta pengetahuan mengenai proses tersebut. Dokumentasi ini akan berfungsi sebagai panduan dan referensi untuk sensus penduduk dan survei ekstensif di masa depan, dengan tujuan memastikan transparansi kepada publik.

Dokumentasi lengkap ini juga untuk menunjukkan dedikasi dan komitmen BPS dalam melaksanakan sensus penduduk yang inovatif dan mampu beradaptasi terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia selama pandemi Covid-19. Sebagai mitra bagi BPS Indonesia, UNFPA terus mendukung BPS memperkuat data kependudukan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun individu yang tertinggal dalam pembangunan nasional yang inklusif.

Jakarta, Desember 2023
UNFPA Representative

Hassan Mohtashami

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) telah berhasil menyelenggarakan salah satu kegiatan besar dari program prioritas nasional yaitu Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yang merupakan sensus penduduk ketujuh setelah Indonesia merdeka. SP2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, banyak tantangan yang dihadapi mulai dari tahapan persiapan sampai diseminasi, yang pada akhirnya melahirkan inovasi-inovasi. Setiap tahapan dalam pelaksanaan SP2020 penting untuk didokumentasikan secara lengkap sebagai pembelajaran dalam pelaksanaan sensus atau survei BPS pada masa yang akan datang.

Penyusunan **Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020** bertujuan untuk mencatat secara lengkap seluruh rangkaian kegiatan SP2020 baik kegiatan SP Online (15 Februari - 29 Mei 2020), Pendataan Penduduk Lengkap (SP September 2020) maupun *Long Form* SP2020 (1 – 30 Juni 2022). Buku ini menyajikan pengalaman serta strategi seluruh tahapan pelaksanaan SP2020 mulai dari tahapan persiapan, pendataan lapangan, pengolahan, serta analisis dan diseminasi. Dokumentasi ini juga didukung dengan lampiran berupa dokumen arsip *softcopy* yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh pihak yang berkepentingan.

Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak baik internal maupun eksternal BPS. Buku dokumentasi ini merupakan karya dari berbagai pihak yang terdiri dari berbagai unit kerja baik teknis maupun administrasi yang tergabung dalam Tim Pelaksana Sensus Penduduk 2020. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kemudian, secara khusus disampaikan terima kasih kepada UNFPA yang telah memfasilitasi hingga terbitnya buku **Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020** ini.

Semoga pengalaman-pengalaman yang termuat dalam buku ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan sensus atau survei-survei selanjutnya.

Jakarta, Desember 2023
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adiningsih Widyasanti

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk ke-7 yang diselenggarakan setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya Sensus Penduduk telah dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Pelaksanaan SP2020 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui "*Principles and Recomendations for Population and Housing Censuses*" (UN, 2008).

Dalam perjalanannya, pelaksanaan SP2020 dihadapkan pada berbagai tantangan dinamika sosial dan kependudukan Indonesia yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, pada SP2020 diterapkan beberapa inovasi yang belum pernah dilaksanakan pada sensus-sensus sebelumnya. Salah satunya adalah perubahan metodologi dari metode tradisional menjadi metode kombinasi (*Combined Method*), yakni menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sebagai data dasar. Selain itu, untuk menjawab tantangan masyarakat yang semakin *mobile*, semakin sadar dengan isu-isu keamanan data individu, dan semakin skeptis terhadap program-program pemerintah, maka untuk pertama kalinya dilaksanakan Sensus Penduduk Online agar masyarakat dapat dengan mudah mengisi kuesioner dari mana saja dan kapan saja, sehingga proses pendataan menjadi lebih praktis dan efisien.

https://www.bps.go.id

Adapun pelaksanaan SP2020 dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pendataan *Short Form* pada tahun 2020 dan pendataan *Long Form* pada tahun 2021. Pendataan *Short Form* adalah pendataan seluruh penduduk menggunakan kuesioner sederhana yang bertujuan untuk mendapatkan data jumlah penduduk beserta karakteristiknya. Sementara itu, pendataan *Long Form* adalah pendataan secara sampel sebagai lanjutan dari pendataan *Short Form* dengan menggunakan kuesioner yang lebih panjang dan kompleks untuk menghasilkan parameter demografi dan indikator *Sustainable Deveopment Goals* (SDG's) yang relevan khususnya di bidang kependudukan, seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, disabilitas, dan perumahan.

Pada awal tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global yang mengakibatkan pelaksanaan SP2020 menjadi terkendala, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi teknis lapangan. Kebijakan *refocussing* anggaran SP2020 dan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membuat tim pelaksana SP2020 harus melakukan perubahan strategi

seperti memperpanjang periode pelaksanaan Sensus Penduduk Online dan menyesuaikan moda pengumpulan data dengan membagi wilayah pendataan menjadi tiga Zona, yaitu Zona 1 (wilayah *Drop Off Pick Up* (DOPU)), Zona 2 (wilayah Non-DOPU), dan Zona 3 (wilayah wawancara). Selain itu, jadwal pendataan *Long Form* juga terpaksa bergeser dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Dengan dukungan dari *the United Nations and Population Fund* (UNFPA), BPS melakukan pendokumentasian SP2020 secara komprehensif, yang mencakup semua tahapan kegiatan SP2020 baik *Short Form* maupun *Long Form*. Selain merupakan bentuk pertanggungjawaban BPS kepada publik, dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi penyelenggaraan sensus dan survei-survei di masa yang akan datang.

Dokumentasi ini dibagi menjadi empat bab, baik untuk pendataan *Short Form* dan *Long Form,* yaitu Persiapan, Pelaksanaan, Pengolahan, serta Analisis dan Diseminasi yang disajikan dalam bentuk materi tertulis yang dicetak ataupun *softfile*.

https://www.bps.go.id

RINGKASAN KEGIATAN SENSUS PENDUDUK 2020 INDONESIA

Topik	*Short Form* SP2020	*Long Form* SP2020
(1)	(2)	(3)
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik	Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik
Konsep Dasar	Seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Pendataan penduduk tunawisma dan awak kapal berbendera Indonesia pada Hari Sensus.	Konsep "*de jure*" atau konsep "dimana seseorang biasanya menetap/bertempat tinggal" (*usual residence*) dan konsep "*de facto*" atau konsep "dimana seseorang berada pada saat pendataan". Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur.
Kuesioner dan Buku Pedoman	SP2020-DP, SP2020-DP1, SP2020-DP2, SP2020-DPD: daftar penduduk yang digunakan untuk konfirmasi keberadaan penduduk kepada Ketua/Pengurus SLS. SP2020-C1, Lembar pendamping SP2020-C1: kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data penduduk dan perumahan. SP2020-TF: kuesioner untuk mendata penduduk khusus seperti yang bertempat tinggal di wilayah non SLS, santri/anak didik di pesantren, penduduk yang tinggal di panti asuhan, narapidana, penduduk yang tinggal di barak militer, penduduk di rumah sakit/rumah sakit jiwa/panti jiwa/panti jompo. Buku Pedoman: Buku 1A – Buku 1J. Suplemen Buku Pedoman: Buku 1A, Buku 1C, Buku 1D, Buku 1F yang dibedakan ke dalam zona 1, zona 2, dan zona 3.	LF.SP2020-P: daftar *prelist* yang berisi nama-nama keluarga dalam cakupan Blok Sensus yang dimutakhirkan keberadaan dan informasinya. SP2020-C2: kuesioner untuk pendataan individu dan rumah tangga sampel yang terdiri dari moda PAPI, CAPI, CATI, dan CAWI. SP2020-V: kuesioner untuk memverifikasi kejadian kematian maternal dalam rumah tangga sampel yang terdiri dari moda PAPI, CAPI, dan CATI. Buku Pedoman: Buku 1 – Buku 8. Suplemen Buku Pedoman: Suplemen 1 – Suplemen 8.

https://www.bps.go.id

Topik	*Short Form* SP2020	*Long Form* SP2020
(1)	(2)	(3)
Jadwal Tahunan	2018: pengadaan perangkat TIK (pengolahan data dan komunikasi), pendataan Podes 2018, persiapan pemetaan dan pemutakhiran muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020, Pilot SP2020, Uji Coba PES SP2020. 2019: pengadaan perangkat TIK (pengolahan data dan komunikasi), pemetaan dan pemutakhiran muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020, Gladi Bersih SP2020, Gladi Bersih PES SP2020, penyusunan bahan publisitas SP2020, klasifikasi desa urban rural, pelatihan Intama SP2020, pengadaan instrumen, penyusunan buku pedoman administrasi dan non teknis. 2020: pengadaan perangkat TIK (pengolahan data dan komunikasi), publisitas SP2020, pendataan *Short Form* SP2020, pengolahan SP2020 (SP2020-DP), Penjaminan Kualitas SP2020, PES SP2020, persiapan diseminasi. 2021: pengolahan lanjutan SP2020 (pengolahan data kuesioner SP2020-C1), penyusunan integrasi data spasial Wilkerstat dan muatan hasil SP2020.	2021: *workshop* Intama *Long Form* SP2020, pelatihan Innas *Long Form* SP2020, Uji Coba *Long Form* SP2020, Uji Coba *Multimode Data Collection Long Form* SP2020. 2022: *Refreshing* Intama *Long Form* SP2020, *Refreshing* Innas *Long Form* SP2020, Pelatihan Inda *Long Form* SP2020, Pelatihan Petugas *Long Form* SP2020, Pelaksanaan *Long Form* SP2020, Penjaminan Kualitas *Long Form* SP2020, Publisitas *Long Form* SP2020, diseminasi *Long Form* SP2020, analisis profil penduduk *Long Form* SP2020, pengolahan *Long Form* SP2020. 2023: rilis hasil *Long Form* SP2020 dalam bentuk *booklet* dan publikasi, analisis tematik kependudukan (analisis mendalam hasil *Long Form* SP2020), penghitungan proyeksi penduduk nasional, provinsi, kabupaten/kota hasil SP2020.
Organisasi dan Petugas Lapangan	Zona 1 dan Zona 2: Petugas lapangan terdiri dari Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) dan Petugas Sensus. Seorang Koseka membawahi sekitar 15 Petugas Sensus. Kemudian, seorang Petugas Sensus bertugas di sekitar 10 SLS atau setara dengan sekitar 600 KK. Zona 3: Petugas lapangan terdiri dari Koseka dan Petugas Sensus. Seorang Koseka membawahi 15 Petugas Sensus. Kemudian, seorang Petugas Sensus bertugas di 5 SLS atau setara dengan sekitar 300 KK.	Petugas lapangan terdiri dari Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Koordinator Tim (Kortim), dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL). Satu koseka membawahi sekitar 3 (tiga) orang Kortim. Satu Kortim membawahi sekitar 3 (tiga) orang PPL. Satu PPL bertugas pada sekitar 5 (lima) blok sensus (BS). Masing-masing BS terdiri dari 16 rumah tangga sampel.

https://www.bps.go.id

Topik	*Short Form* SP2020	*Long Form* SP2020
(1)	(2)	(3)
Pelatihan Petugas	Pelatihan dilaksanakan secara berjenjang: *Workshop* Intama, Pelatihan Innas, Pelatihan Koseka, Pelatihan Petugas.	Pelatihan dilaksanakan secara berjenjang pada tahun 2021 dan 2022. 2021: *Workshop* Intama, Pelatihan Innas 2022: *Refreshing* Intama, *Refreshing* Innas, Pelatihan Inda, Pelatihan Petugas.
Pendataan	Sensus Penduduk Online dilaksanakan mulai 15 Februari – 29 Mei 2020. Pelaksanaan lapangan Zona 1 dan Zona 2: selama 15 hari di bulan September 2020. Pelaksanaan lapangan Zona 3: selama 30 hari di bulan September 2020. Pendataan tunawisma dan awak kapal berbendera Indonesia dilaksanakan pada Hari Sensus yang dimulai tanggal 15 September 2020 pukul 21.00 WIB sampai dengan tanggal 16 September 2020 pukul 06.00 WIB.	Pemutakhiran daftar penduduk dimulai serempak pada 15 – 31 Mei 2022. Selanjutnya, pendataan rumah tangga sampel dilaksanakan mulai 1 – 30 Juni 2022.
Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui Dashboard SP2020. Dashboard SP2020 memuat berbagai macam informasi seperti progres pendataan SLS, progres dokumen, dan jumlah penduduk.	Monitoring dan evaluasi pada pendataan *Long Form* SP2020 adalah Dashboard *Long Form* SP2020 yang menggunakan sistem *dynamic weighting*. Dengan sistem *dynamic weighting* memungkinkan penghitungan penimbang atau bobot dihitung secara otomatis berdasarkaan data yang masuk sehingga dapat dilakukan evaluasi secara *real time*. Selain itu, monitoring terkait pemasukan dan kualitas data mikro dapat dilakukan melalui fitur eksplorasi yang terdapat pada *sandbox*.
Evaluasi Kualitas	Survei Pasca Sensus (*Post Enumeration Survey*, PES) dilakukan 16 Oktober - 15 November 2020 untuk mengevaluasi cakupan	PK *Long Form* SP2020 sebagai *early warning system* yang dilaksanakan untuk mendapatkan indikasi kesalahan pada isian/konten dan tingkat

https://www.bps.go.id

Topik	*Short Form* SP2020	*Long Form* SP2020
(1)	(2)	(3)
	(*coverge*) dan kecermatan isian (*content*) SP2020. Penjaminan Kualitas (PK) *Short Form* SP2020 dilaksanakan sebagai *early warning system* untuk mendeteksi kesalahan SOP agar dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menyebar luas.	indikasi pelanggaran SOP Petugas Lapangan pada tahapan kegiatan Pemutakhiran, Pendataan Rumah Tangga Sampel, dan Pendataan Rumah Tangga dengan menggunakan Moda CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*).
Pengolahan Data	Pengolahan SP2020-DP menggunakan aplikasi *Data Capture*. Kemudian, pengolahan SP2020-C1 dilakukan dengan dua cara yaitu *Data Capture* dan *Data Entry*.	Kegiatan *Long Form* SP2020 dilakukan dengan *multi moda data collection* (MMDC) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan *Paper Assisted Personal Interviewing* (PAPI), *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI), *Computer Assisted Personal Web Interviewing* (CAWI) dan *Computer Assisted Personal Telephone Interviewing* (CATI). Untuk wilayah PAPI, moda pengolahan dilakukan dengan *Data Capture* dan/atau *Data Entry*.
Analisis	Analisis yang dihasilkan dari *Short Form* SP2020 adalah analisis profil penduduk SP2020. Publikasi ini memuat empat tema utama, yaitu dinamika penduduk di Indonesia, anak investasi masa depan bangsa, penduduk usia produktif sebagai aktor utama pembangunan nasional, dan penduduk lanjut usia di Indonesia.	Hasil pendataan *Long Form* SP2020 dianalisis dan dipublikasikan dalam publikasi analisis tematik kependudukan. Analisis ini bertujuan menganalisis tema yang menarik dan bermanfaat bagi pemerintah mengenai isu kependudukan di Indonesia.
Diseminasi	Ragam produk diseminasi dari hasil *Short Form* SP2020 antara lain Berita Resmi Statistik dan Infografis, Leaflet, Data Web BPS, dan Publikasi Tematik.	Ragam produk diseminasi dari hasil *Long Form* SP2020 antara lain Buklet, Berita Resmi Statistik dan Infografis, Leaflet, Data Web BPS, Publikasi Proyeksi Penduduk 2020-2050, Publikasi Khusus (Estimasi Parameter Demografi, Indikator SDGs, dan Indikator RPJMN), Publikasi Tematik, dan Data Mikro

https://www.bps.go.id

DOKUMENTASI SP2020 DALAM BENTUK *SOFT FILE*

http://s.bps.go.id/Dokumentasi_File_SP2020

***Short Form* SP2020**	
1	Buku Pedoman dan Suplemen *Short Form* SP2020
2	Kuesioner *Short Form* SP2020
Long Form SP2020	
1	Buku Pedoman dan Suplemen *Long Form* SP2020
2	Kuesioner *Long Form* SP2020

Publikasi Hasil SP2020 yang berupa Analisis Profil Penduduk Indonesia dan Analisis Tematik SP2020 dapat diakses pada **https://www.bps.go.id**

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

DAFTAR ISI

Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020

Volume 2, 2023

KATA SAMBUTAN v

KATA PENGANTAR vii

RINGKASAN EKSEKUTIF ix

RINGKASAN KEGIATAN SENSUS PENDUDUK 2020 INDONESIA xi

DOKUMENTASI SP2020 DALAM BENTUK *SOFT FILE* xv

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xxiii

DAFTAR GAMBAR xxv

DAFTAR LAMPIRAN xxix

BAGIAN 1 *SHORT FORM* SP2020 1

BAB 1 PERSIAPAN *SHORT FORM* SP2020 5

1.1 Latar Belakang dan Tujuan 5

1.2 Perencanaan Umum 9

1.2.1 Rapat Pimpinan 9

1.2.2 Rapat Rutin Tim Teknis 10

1.2.3 Laporan Berkala Progres Persiapan SP2020 11

1.2.4 Rapat Pimpinan Daerah 12

1.2.5 Rapat Interkementerian/Lembaga 13

1.2.6 *Technical Assistance Australian Bureau of Statistics* dan *United Nation* 13

1.2.7 Penjadwalan Kegiatan 15

1.2.8 *Study Visit* ke Lembaga Statistik Negara Lain 16

1.2.9 Usulan Anggaran dan Biaya 17

1.2.10 Organisasi 18

1.3 Persiapan Teknis 19

1.3.1 Pendataan Potensi Desa 19

https://www.bps.go.id

1.3.2 Pemetaan Satuan Lingkungan Setempat 19
1.3.3 Konstruksi Kuesioner dan Buku Pedoman 22
1.3.4 Pengembangan Konsep, Definisi, dan Klasifikasi 26
1.3.5 Uji Coba dan Gladi Bersih Pelaksanaan *Short Form* SP2020 27
1.3.6 Penyiapan Basis Data Kependudukan 28
1.3.7 Penyusunan Daftar Penduduk 29
1.3.8 *Matching* Master Satuan Lingkungan Setempat (SLS) 29
1.3.9 Pelatihan Instruktur 30
1.3.10 Tata Kelola SP2020 30
1.4 Pengadaan Instrumen dan Perlengkapan Pendukung 34
1.4.1 Pencetakan Instrumen 34
1.4.2 Pengadaan Perlengkapan 34
1.4.3 Pengiriman dan Penyimpanan Logistik 35
1.5 Publisitas dan Dukungan terhadap *Short Form* SP2020 35
1.5.1 Apel Siaga SP2020 35
1.5.2 *Monitoring* dan Analisis Reputasi SP2020 36
1.5.3 Publisitas di Media Elektronik, Media Cetak, Media Sosial, dan Lainnya 36
1.5.4 Publisitas di Bioskop 37
1.5.5 Publisitas di Alat Transportasi 38
1.5.6 Publisitas di Bandara 38
1.5.7 Publisitas di Media Luar Ruang 39
1.5.8 Aneka Lomba Publisitas 39
1.5.9 Produksi Konten 40
1.5.10 Pemanfaatan *WhatsApp Group* (WAG) 40
1.5.11 *Social Media Center* 40
1.5.12 Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri 41
1.5.13 Surat Edaran Kementerian PAN RB 42
1.5.14 Komitmen Dukungan Kementerian/Lembaga 43
1.6 Rencana Pendataan Wilayah Elit dan Apartemen 45
1.7 Rencana Analisis 45

https://www.bps.go.id

1.8 Rencana Diseminasi 47
BAB 2 PELAKSANAAN *SHORT FORM* SP2020 51
2.1 Sensus Penduduk Online 51
2.2 Sensus Penduduk September 2020 53
2.2.1 Pembelajaran Koseka dan Petugas Sensus 53
2.2.2 Pemeriksaan Daftar Penduduk 54
2.2.3 Verifikasi Lapangan 55
2.2.4 Pendataan Penduduk 56
2.3 Penjaminan Kualitas 59
2.4 Monitoring dan Evaluasi 60
2.5 Pelaksanaan *Post Enumeration Survey* (PES) 61
2.6 Kajian Kualitatif *Short Form* SP2020 61
BAB 3 PENGOLAHAN *SHORT FORM* SP2020 67
3.1 Pengolahan Sensus Penduduk Online 67
3.2 Pengolahan SP2020-DP 67
3.2.1 Aplikasi *Mobile Capture* SP2020 68
3.2.2 Sistem Pengelolaan *Mobile Capture* SP2020 69
3.2.3 Web Validasi *Mobile Capture* SP2020 69
3.2.4 Entri SP2020-DP 70
3.2.5 Pemrosesan Data SP2020-DP 71
3.3 Pengolahan SP2020-C1 72
3.3.1 Perangkat yang Digunakan 72
3.3.2 *Data Capture* 74
3.3.3 Data Entri 76
3.3.4 Kompilasi Data 77
3.4 Kendala dan Tindak Lanjut 78
BAB 4 ANALISIS DAN DISEMINASI HASIL *SHORT FORM* SP2020 81
4.1 Analisis PES 81
4.1.1 Kesalahan Cakupan 81
4.1.2 Kesalahan Isian 82
4.2 Diseminasi Hasil *Short Form* SP2020 82

https://www.bps.go.id

4.2.1 Seremonial Rilis 82
4.2.2 Ragam Produk Diseminasi *Short Form* SP2020 85
4.2.3 Analisis Kajian Kualitatif *Short Form* SP2020 90
DAFTAR PUSTAKA 95
BAGIAN 2 *LONG FORM* SP2020 97
BAB 1 PERSIAPAN *LONG FORM* SP2020 101
1.1 Latar Belakang dan Tujuan 101
1.2 Perencanaan Umum 101
1.2.1 Rapat Pimpinan 101
1.2.2 Rapat Rutin Tim Teknis 102
1.2.3 Laporan Berkala Progres Persiapan 102
1.2.4 Rapat Pimpinan Daerah 103
1.2.5 Rapat Interkementerian/Lembaga 103
1.2.6 Penjadwalan Kegiatan 104
1.2.7 Usulan Anggaran dan Biaya 105
1.2.8 Organisasi 106
1.3 Persiapan Teknis 107
1.3.1 Konstruksi Kuesioner dan Buku Pedoman 107
1.3.2 Pengembangan Konsep, Definisi, dan Klasifikasi 112
1.3.3 Uji Coba Pelaksanaan *Long Form* SP2020 115
1.3.4 Penyiapan Sampel BS dan Rumah Tangga *Long Form* SP2020 115
1.3.5 Pelatihan Instruktur dan Petugas 116
1.3.6 Penggunaan *Multimode Data Collection* 118
1.4 Penyiapan Logistik 121
1.5 Publisitas dan Dukungan *Long Form* SP2020 121
1.5.1 Koordinasi Sekretariat SP2020 121
1.5.2 Publisitas di Media Elektronik, Media Cetak, Media Online, dan Media Sosial 123
1.5.3 Publisitas melalui *WA Blast* 126
1.5.4 Pemanfaatan *WhatsApp Group* (WAG) 127
1.5.5 Monitoring Media Massa 127

https://www.bps.go.id

1.6 Rencana Analisis 128
1.7 Rencana Diseminasi 128
BAB 2 PELAKSANAAN *LONG FORM* SP2020 131
2.1 Pemutakhiran 131
2.2 Pendataan Rumah Tangga 132
2.3 Verifikasi Kematian Maternal 133
2.4 Penjaminan Kualitas 133
2.5 Monitoring dan Evaluasi 134
2.6 Layanan Komunikasi Pelaksanaan *Long Form* SP2020 (CATI) 134
2.7 Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020 137
BAB 3 PENGOLAHAN *LONG FORM* SP2020 143
3.1 Infrastruktur Pengolahan 143
3.2 Aplikasi Pengolahan 144
3.3 Pelaksanaan Pengolahan 147
3.3.1 Persiapan 147
3.3.2 Pengolahan Pra Komputer 147
3.3.3 *Data Capture* dan Data Entri 148
3.3.4 Integrasi dan Eksplorasi 148
3.3.5 Revalidasi dan Imputasi 149
3.3.6 Penghitungan Indikator 149
3.4 Kendala dan Tindak Lanjut 149
BAB 4 ANALISIS DAN DISEMINASI HASIL *LONG FORM* SP2020 153
4.1 Seremonial Rilis 153
4.1.1 Rilis Hasil *Long Form* SP2020 153
4.1.2 Rilis Data Mikro *Long Form* SP2020 154
4.1.3 Rilis Hasil Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020 154
4.2 Ragam Produk Diseminasi *Long Form* SP2020 157
4.2.1 Berita Resmi Statistik (BRS) dan Infografis 158
4.2.2 Buklet 158
4.2.3 Leaflet 159
4.2.4 *Website* Sensus Penduduk 160

https://www.bps.go.id

4.2.5 Publikasi Proyeksi Penduduk 2020-2050 163
4.2.6 Publikasi Penduduk Indonesia Hasil *Long Form* SP2020 164
4.2.7 Publikasi Kajian Fertilitas Remaja Umur 10-14 Tahun di Indonesia (Hasil *Long Form* SP2020) 165
4.2.8 Publikasi Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020 166
4.2.9 Publikasi Mortalitas di Indonesia 166
4.2.10 Publikasi Pembangunan Kependudukan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Wilayah 166
4.2.11 Analisis Tematik Kependudukan Hasil *Long Form* SP2020 167
4.2.12 Analisis Kajian Kualitatif Hasil *Long Form* SP2020 170
DAFTAR PUSTAKA 173
LAMPIRAN 176

https://www.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Bagian 1 *Short Form* SP2020

Tabel 1 Penyesuaian Tata Kelola SP2020 di Tahun 2020 7

Tabel 2 Penyesuaian Target SP2020 di Tahun 2020 8

Tabel 3 Penyesuaian Jadwal Kegiatan SP2020 di Tahun 2020 8

Tabel 4 Tahapan Kegiatan Pemetaan Tahun 2016-2020 21

Tabel 5 Dokumen Pendataan SP September 2020 24

Tabel 6 Pembagian Itemized Tender Pengadaan Perlengkapan SP2020 34

Tabel 7 Daftar Institusi yang Menandatangani Komitmen Dukungan SP2020 44

Tabel 8 Tema Analisis Profil 46

Tabel 9 Ragam Produk Diseminasi Hasil SP2020 85

Tabel 10 Ragam Produk Diseminasi Analisis Kualitatif Hasil *Short Form* SP2020 92

Bagian 2 *Long Form* SP2020

Tabel 11 Jadwal Pelaksanaan *Long Form* SP2020 104

Tabel 12 Daftar Kuesioner *Long Form* SP2020 108

Tabel 13 Daftar Buku Pedoman *Long Form* SP2020 109

Tabel 14 Ragam Produk Diseminasi Hasil *Long Form* SP2020 157

Tabel 15 Ragam Produk Diseminasi Analisis Kualitatif Hasil *Long Form* SP020 170

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Bagian 1 ***Short Form* SP2020**

Gambar 1 Pelaksanaan Rapat Tim Persiapan SP2020 11

Gambar 2 Contoh *Traffic Light Report* SP2020 12

Gambar 3 Peserta Berdiskusi saat Rateknas Kepala BPS Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 13

Gambar 4 Asistensi Teknis *Australian Bureau of Statistics* 14

Gambar 5 Kunjungan Tim BPS ke ABS pada Tahun 2017 17

Gambar 6 Peta WS yang Diberi Noktah dan Nomor Bangunan 20

Gambar 7 Proses *Matching* SLS 29

Gambar 8 Proses Bisnis Pengumpulan Data Sensus Penduduk 2020 31

Gambar 9 Tahapan Proses Bisnis Sensus Penduduk 2020 September pada Zona 1 32

Gambar 10 Tahapan Proses Bisnis Sensus Penduduk 2020 September pada Zona 2. 33

Gambar 11 Tahapan Proses Bisnis Sensus Penduduk 2020 September pada Zona 3. 33

Gambar 12 Surat Dukungan Menteri Dalam Negeri terhadap Pelaksanaan SP2020 42

Gambar 13 Surat Dukungan Menpan RB terhadap Pelaksanaan SP2020 43

Gambar 14 Jadwal Kegiatan Analisis 2017-2023 46

Gambar 15 Workshop Analisis Profil Tahun 2022 dengan Narasumber Atalia Praratya Ridwan Kamil 47

Gambar 16 Presiden RI Joko Widodo mengisi SP Online didampingi Kepala BPS Kecuk Suhariyanto 51

Gambar 17 Ngibar SP Online di Provinsi NTT 52

Gambar 18 Mekanisme *Login* SP Online 52

Gambar 19 Pemeriksaan Daftar Penduduk bersama Ketua/Pengurus SLS 55

Gambar 20 Pelaksanaan Pendataan Penduduk Sensus Penduduk September 2020 57

https://www.bps.go.id

Gambar 21 Pendataan Tuna Wisma dan Pendataan Awak Kapal Berbendera Indonesia 58
Gambar 22 Rapat Koordinasi Pendataan Penduduk Indonesia di Luar Negeri secara Daring 59
Gambar 23 Menu Beranda *Dashboard* SP2020 60
Gambar 24 Tampilan *Dashboard Monitoring* PES SP2020 61
Gambar 25 Halaman Login Aplikasi *Mobile Capture* 68
Gambar 26 Sistem Pengelolaan *Mobile Capture* Berbasis Web 69
Gambar 27 Halaman Utama Web Validasi *Mobile Capture* SP2020 70
Gambar 28 Halaman *Login* Program Entri SP2020-DP 71
Gambar 29 Rancangan Arsitektur Pengolahan 73
Gambar 30 Proses Bisnis Pengolahan SP2020 *Data Capture* 74
Gambar 31 Pemotongan Dokumen SP2020-C1 dengan *Guillotine* 75
Gambar 32 Penggunaan Lisensi *Data Capture* 76
Gambar 33 Pengolahan SP2020-Data Entri 77
Gambar 34 Rilis Bersama Hasil *Short Form* SP2020 83
Gambar 35 Diseminasi Analisis Tema Khusus di Lokasi Penelitian 84
Gambar 36 Berita Resmi Statistik Hasil *Short Form* SP2020 86
Gambar 37 Infografis Hasil *Short Form* SP2020 86
Gambar 38 Tampilan *Website* Sensus Penduduk 88
Gambar 39 Tabulasi Data Hasil *Short Form* SP2020 pada Halaman *Website* Sensus 89
Gambar 40 Buklet Potret *Short Form* SP2020 90
Gambar 41 Peta Lokasi Penelitian Kerjasama Kajian Kualitatif *Short Form* SP2020 91
Gambar 42 Berita Media *Online* Terkait Diseminasi Analisis Tema Khusus 93

Bagian 2 *Long Form* SP2020

Gambar 43 Pembukaan *Refreshing* Instruktur Nasional *Long Form* SP2020 117
Gambar 44 Pelatihan Instruktur Daerah *Long Form* SP2020 117
Gambar 45 Pelatihan Petugas *Long Form* SP2020 118
Gambar 46 Mekanisme Pendataan *Long Form* SP2020 119

https://www.bps.go.id

Gambar 47 Prosedur Pendataan SP2020-C2 Wilayah PAPI 119
Gambar 48 Prosedur Pendataan SP2020-C2 Wilayah CAPI 120
Gambar 49 Koordinasi Sekretariat *Long Form* SP2020 melalui Grup Kaizala. 122
Gambar 50 Sosialisasi *Long Form* SP2020 di Kompas TV 123
Gambar 51 Sosialisasi Sensus Penduduk Lanjutan di Radio Elshinta 123
Gambar 52 Publisitas *Long Form* SP2020 di Media Cetak 124
Gambar 53 Publisitas *Long Form* SP2020 di Media *Online* Kompas 125
Gambar 54 Publisitas *Long Form* SP2020 di Media Sosial dengan Konten #RabuSP 125
Gambar 55 Publisitas *Long Form* SP2020 melalui WA Blast 126
Gambar 56 Pemanfaatan *WhatsApp Group* (WAG) untuk Sosialisasi Sensus Penduduk Lanjutan 127
Gambar 57 Pelaksanaan Pemutakhiran *Long Form* SP2020 131
Gambar 58 Pelaksanaan Pendataan *Long Form* SP2020 133
Gambar 59 Ruang *Call Center* BPS Pusat di Gedung 5 Lantai 8 135
Gambar 60 Petugas CATI-CAWI Sedang Mewawancara Responden 136
Gambar 61 Tangkapan Layar Halaman Muka Kuesioner C2-CATI 136
Gambar 62 Tangkapan Layar *Wallboard* CRM (*Customer Relationship Management*) BPS 137
Gambar 63 Pengawasan Proses Pendataan CATI-CAWI oleh Deputi Bidang Statistik Sosial 137
Gambar 64 Peta Praktik Ekonomi Hijau di 34 Provinsi 138
Gambar 65 Infrastruktur Pengolahan *Long Form* SP2020 143
Gambar 66 Diagram Alur Pengolahan *Long Form* SP2020 144
Gambar 67 Tampilan Aplikasi FASIH-Mobile Versi 2.2.0 146
Gambar 68 Tampilan *Dashboard Long Form* SP2020 147
Gambar 69 Rilis Hasil *Long Form* SP2020 153
Gambar 70 Diseminasi Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020 di Region Penelitian 155
Gambar 71 Penyerahan Kertas Kerja dan Naskah Kebijakan dari BRIN kepada BPS 155
Gambar 72 Kepala BRIN dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS dalam Acara *Opening Ceremony* InaRi Expo 2022 156

https://www.bps.go.id

Gambar 73 Pameran Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020 di InaRI Expo 2022 156
Gambar 74 Berita Resmi Statistik Hasil *Long Form* SP2020 158
Gambar 75 Buklet Hasil *Long Form* SP2020 159
Gambar 76 *Leaflet* Hasil *Long Form* SP2020 160
Gambar 77 Tampilan *Website* Sensus Penduduk 162
Gambar 78 Tabulasi Data Hasil *Long Form* SP2020 pada *Website* Sensus 163
Gambar 79 Publikasi Proyeksi Penduduk 2020-2050 Hasil SP2020 164
Gambar 80 Publikasi Penduduk Indonesia Hasil *Long Form* SP2020 165
Gambar 81 Publikasi Analisis Tematik Kependudukan 169
Gambar 82 Publikasi Tematik Hasil *Long Form* SP2020 pada *Website* Sensus 169

https://www.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Bagian 1 ***Short Form* SP2020**

Lampiran 1 Jadwal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) SP2020 177

Lampiran 2 Jenis Dokumen Penjaminan Kualitas (PK) SP2020 181

Lampiran 3 Rancangan Tabulasi Analisis SP2020 182

Lampiran 4 Tim Penulis Analisis Profil Penduduk Hasil *Short Form* SP2020 ..184

Lampiran 5 Daftar Narasumber dalam Kegiatan Analisis Profil Penduduk SP2020 185

Lampiran 6 Kegiatan Pendampingan Penyusunan Publikasi dan Supervisi FGD Analisis SP2020 di Provinsi 186

Lampiran 7 Rincian Tema yang Dibahas pada Analisis Profil Penduduk Indonesia 187

Bagian 2 ***Long Form* SP2020**

Lampiran 8 Jadwal Pelaksanaan Uji Coba Penjaminan Kualitas (PK) *Long Form* SP2020 188

Lampiran 9 Jenis Dokumen Uji Coba Penjaminan Kualitas (PK) *Long Form* SP2020 Pendataan Lapangan 189

Lampiran 10 Jenis Dokumen Uji Coba Penjaminan Kualitas (PK) *Long Form* SP2020 *Editing* 190

Lampiran 11 Jadwal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pemutakhiran *Long Form* SP2020 191

Lampiran 12 Jadwal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020 192

Lampiran 13 Jadwal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pendataan CATI *Long Form* SP2020 193

Lampiran 14 Dokumen yang Digunakan pada Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pemutakhiran *Long Form* SP2020 194

https://www.bps.go.id

Lampiran 15 Dokumen yang Digunakan pada Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020 195

Lampiran 16 Dokumen yang Digunakan pada Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pendataan CATI *Long Form* SP2020 196

Lampiran 17 Daftar Narasumber dan Materi yang Disampaikan dalam Penulisan Analisis Tematik Kependudukan III 197

Lampiran 18 Tim Penulis Analisis Tematik Kependudukan Hasil *Long Form* SP2020 198

Lampiran 19 Rincian Tema yang Dibahas pada Analisis Tematik Kependudukan Buku 1 (Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas) 200

Lampiran 20 Kumpulan Foto SP2020 203

https://www.bps.go.id

Gambaran Umum SP2020

Sensus Penduduk 2020
#MencatatIndonesia

SP2020 terbagi menjadi dua jenis pendataan, yaitu ***Short Form*** dan ***Long Form***. Pendataan ***Short Form*** dilakukan pada tahun 2020 dalam dua periode, yaitu **SP Online** dan **SP September 2020**. Sementara pendataan ***Long Form*** yang awalnya direncanakan pada tahun 2021 menjadi tahun 2022 karena adanya pandemi.

2018

Persiapan SP2020
SP2020 direncanakan menggunakan ***Traditional Method***

2019

Perubahan Metode Sensus menjadi *Combined Method*

2020

Pelaksanaan *Short Form* SP2020

SP Online
15 Februari-31 Maret 2020 menjadi 15 Februari-29 Mei 2020

SP September 2020
1-31 Juli 2020 menjadi 1-30 September 2020

Penyesuaian Akibat Covid-19

1. Perubahan jadwal *Short Form* SP2020
2. Penyesuaian tata kelola SP September 2020

2021

JANUARI 2021
SHORT FORM
SP2020
RILIS

2022

Pelaksanaan *Long Form* SP2020

***Long Form* SP2020**
[15 Mei-30 Juni 2022]

2023

JANUARI 2023
LONG FORM
SP2020
RILIS

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAGIAN 1

SHORT FORM

SP2020

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 1

PERSIAPAN *SHORT FORM* SP2020

https://www.bps.go.id

BAB 1 PERSIAPAN *SHORT FORM* SP2020

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Sensus penduduk memegang peranan penting dan strategis dalam penyediaan data kependudukan. Kekuatan data hasil sensus penduduk terletak pada kemampuannya dalam menyediakan statistik dasar secara komprehensif dengan beragam kompleksitas perubahannya beserta parameternya sampai wilayah administrasi terkecil. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) diamanatkan untuk melaksanakan sensus penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Selain amanat Undang-Undang, penyelenggaraan sensus penduduk juga merupakan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui "*Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses*" (UN, 2008). Indonesia melaksanakan sensus penduduk pada tahun 2020. Bagi Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk yang ke-7 setelah era kemerdekaan dimana sensus penduduk sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Tujuan pelaksanaan SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju "SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA". Tujuan selanjutnya adalah untuk mengumpulkan data-data terkait parameter demografi maupun data sosial lainnya untuk mendukung penyiapan proyeksi penduduk, evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan *monitoring* pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, SP2020 dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama, untuk mendapatkan data dasar kependudukan dilakukan pendataan penduduk menggunakan kuesioner *Short Form* dan instrumen lainnya pada tahun 2020. Tahap kedua dilaksanakan pendataan menggunakan kuesioner *Long Form* dengan output berupa indikator demografi (kelahiran, kematian, migrasi), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan dan indikator sosial lainnya.

Pelaksanaan SP2020 dirancang dengan mengusung beberapa inovasi baru. Selain untuk meminimalkan kebutuhan anggaran, namun juga menjawab tantangan era revoluasi Industri 4.0 yang menuntut perkembangan teknologi dimana pelaksanaannya tidak bisa semata hanya mengandalkan cara tradisional sebagaimana sensus-sensus sebelumnya. Dua inovasi penting yang menggiring kemajuan sensus penduduk di Indonesia adalah penggunaan metode kombinasi dimana data administrasi kependudukan (adminduk) dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dimanfaatkan sebagai data dasar. Inovasi ini dilatarbelakangi adanya semangat Indonesia untuk menuju Satu Data Kependudukan.

https://www.bps.go.id

Inovasi selanjutnya adalah pendekatan *multi-mode data collection* yang dibagi menjadi 2 tahapan yaitu sensus penduduk online dan sensus penduduk wawancara. Sensus penduduk online dilaksanakan berbasis web atau disebut juga sebagai *Computer-Aided Web Interviewing* (CAWI), sedangkan sensus penduduk wawancara dilaksanakan dengan berbagai moda, yaitu moda gawai atau disebut juga *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI), dan moda kertas atau disebut juga *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI).

Pada tahun 2020, pendataan *Short Form* dilakukan dalam dua tahap, yaitu Sensus Penduduk Online (SP Online) dan Sensus Penduduk September 2020. Pertama kali dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, melalui pelaksanaan SP Online, penduduk Indonesia dapat memperbarui data kependudukannya secara mandiri melalui website yang ditentukan. SP Online diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan fenomena transisi demografi tahap ketiga, yang ditandai dengan masyarakat yang semakin *mobile*, cenderung individualistis, semakin sadar terhadap isu-isu terkait privasi individu, dan semakin skeptis terhadap program-program pemerintah. SP Online memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyediaan data dan informasi statistik. Penduduk dapat mengisi secara mandiri dimanapun dan kapanpun tanpa harus menyediakan waktu khusus untuk bertemu dengan petugas sensus. SP Online juga dapat membangun budaya baru di masyarakat terhadap arti pentingnya pemutakhiran data, dimulai dari kepedulian terhadap data pribadinya. Selain itu, SP Online diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam proses pengumpulan data. Informasi terkait keberadaan penduduk yang diperoleh melalui SP Online ini selanjutnya dimutakhirkan kembali pada saat SP September 2020 melalui pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan, dan pendataan penduduk.

https://www.bps.go.id

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) sebagai pandemi yang berimplikasi pada munculnya kebijakan pemerintah untuk mencegah perkembangan dan meminimalisir dampak persebaran Covid-19. Pemberlakuan *physical distancing* dan penetapan beberapa wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta *refocusing* anggaran untuk penanggulangan pandemi, berdampak besar pada pelaksanaan kegiatan SP2020. Ketika sebanyak 31 negara memutuskan untuk menunda atau memperpanjang periode sensus, BPS bersama 13 negara lainnya berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaan SP2020 dengan beberapa penyesuaian.

Tabel 1 Penyesuaian Tata Kelola SP2020 di Tahun 2020

Rencana Awal	Penyesuaian	Hasil/Dampak
(1)	**(2)**	**(3)**
Sensus Penduduk Online		
15 Februari–31 Maret 2020	15 Februari–29 Mei 2020	Jumlah Penduduk Respon: 51,36 Juta Penduduk (19,05 persen)
Sensus Penduduk		
Periode: Juli 2020	Periode: September 2020	
Wawancara di semua wilayah: - **CAPI** - **PAPI**	Pembagian wilayah menjadi 3 zona: - Zona 2 Zona 2 (74,76 persen): *Ground check* - Zona 1 (23,72 persen): *Ground check* + DOPU - Zona 3 (1,52 persen): *Ground check* + Wawancara	Variabel yang dihasilkan di Zona 2 sangat terbatas menyebabkan tantangan pada diseminasi data
Jumlah petugas +/- 400,000	Jumlah petugas +/- 208,000	Beban petugas bertambah
Pelatihan petugas tatap muka	Pembelajaran jarak jauh secara online & mandiri	Pemahaman petugas akan bervariasi
Kelengkapan petugas: Rompi, Tas dan ATK	Rompi, Tas, & ATK + Alat Pelindung Diri (masker, *face shield*, sarung tangan, *hand sanitizer* dan *rapid test*)	Anggaran tambahan untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19

https://www.bps.go.id

BPS melakukan penyesuaian tata kelola SP2020 (sesuai Perka BPS Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 43 Tahun 2020 Tentang *Masterplan* dan *Network Planning* Sensus Penduduk Tahun 2020) dan juga penyesuaian output SP2020 agar sensus penduduk bisa tetap diselenggarakan seoptimal mungkin dengan tetap berpegang pada tujuan besar SP2020. BPS melakukan penyesuaian moda pendataan yang digunakan saat tahapan pendataan di lapangan dan wilayah pendataan dibagi ke dalam 3 zona, yaitu Zona 1 (wilayah DOPU), Zona 2 (wilayah Non-DOPU), serta Zona 3 (wilayah wawancara).

Tabel 2 Penyesuaian Target SP2020 di Tahun 2020

Target Awal	Penyesuaian Target
(1)	(2)
Output dari Daftar Penduduk (SP2020-DP) **Penduduk Indonesia menurut:** - Jenis Kelamin - Status Domisili (*de facto* vs *de jure*) - Kepemilikan NIK	**Output dari Daftar Penduduk (SP2020-DP)** Penduduk Indonesia menurut: - Jenis Kelamin - Status Domisili - Kepemilikan NIK
Output dari *Short Form* (SP2020-C1) - Karakteristik perumahan: 5 pertanyaan - Pertanyaan individu (semua umur): 13 pertanyaan - Pertanyaan individu (usia 5+): 17 pertanyaan	**Output dari *Short Form* (SP2020-C1)** Tidak bisa terpenuhi

https://www.bps.go.id

Dengan adanya penyesuaian tata kelola pelaksanaan sensus penduduk, maka BPS juga melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan. SP Online yang semula akan dilaksanakan sampai tanggal 31 Maret 2023 diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Hal ini diikuti dengan penyesuaian tahapan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan pendataan di lapangan yang semula akan diselenggarakan pada Juli 2020, kemudian disesuaikan pelaksanaannya menjadi September 2020 (SP September).

Tabel 3 Penyesuaian Jadwal Kegiatan SP2020 di Tahun 2020

Kegiatan	Waktu	
	Sebelum Tata Kelola Baru	Setelah Tata Kelola Baru
(1)	(2)	(3)
SP Online	15 Feb-31 Maret 2020	15 Feb-29 Mei 2020
Penyiapan Daftar Penduduk	April-Minggu I Mei 2020	29 Mei-30 Juni 2020
Pra Lapangan		
Pencetakan Dokumen	Mei 2020	1-31 Juli 2020
Pelatihan Instruktur Nasional	Mei 2020	3-7 Agustus 2020
Rekrutmen Petugas	Minggu III April-IV Mei (petugas: Koseka, Kortim, PCL)	22 Juli-14 Agustus 2020 (Koseka, Petugas Sensus)
Pelatihan Koseka	2–26 Juni 2020 (pelatihan koseka bersamaan dengan pelatihan Inda dan TF)	18-21 Agustus 2020 (pelatihan online)

Lanjutan Tabel 3

Kegiatan	Waktu	
	Sebelum Tata Kelola Baru	Setelah Tata Kelola Baru
Briefing Petugas Task Force	2–26 Juni 2020 (pelatihan TF bersamaan dengan Inda dan Koseka)	18-21 Agustus 2020 (pelatihan online)
Pembelajaran Mandiri	-	22-29 Agustus 2020
Pelaksanaan Lapangan		
Pemeriksaan Daftar Penduduk	1–31 Juli 2020	1-30 September 2020
Verifikasi Lapangan	1–31 Juli 2020	1-30 September 2020
Pendataan Penduduk	1–31 Juli 2020 (Pendataan lapangan wawancara)	1-30 September 2020 (Pengisian Data Mandiri/ DOPU dan Pendataan lapangan wawancara)
Kegiatan Pendukung		
Penjaminan Kualitas (PK)	1–31 Juli 2020	1-7 September 2020
PES	Agustus 2020	16 Okt–15 Nov 2020
Hari Sensus	31 Juli 2020	15 September 2020
Pengolahan Daftar Penduduk	Agust-November 2020	Okt–Desember 2020

https://www.bps.go.id

1.2 Perencanaan Umum

1.2.1 Rapat Pimpinan

Komitmen untuk menyelenggarakan SP2020 dibahas dalam rapat pimpinan BPS sejak awal tahun 2017. SP2020 merupakan kegiatan besar yang harus dipersiapkan secara matang baik dalam bidang teknis maupun non teknis. Rapat yang dipimpin Kepala BPS (KBPS) merupakan forum tertinggi untuk semua kebijakan strategis terkait SP2020. Topik yang dibahas dalam rapat awal pimpinan antara lain mengenai persiapan SP2020, antara lain: penyusunan *Network Planning*, pemetaan wilayah, moda pendataan, pelaksanaan bulan sensus, dan isu privasi sebagai salah satu isu penting dalam perencanaan SP2020.

Pengumpulan data pada SP2020 dirancang menggunakan metode kombinasi. Untuk itu, BPS melakukan studi terkait metode kombinasi dari negara-negara lain yang sudah berpengalaman dan berkoordinasi dengan Kemendagri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PAN/Bappenas), dan para *expert*.

Sementara itu, keberhasilan SP2020 pun tak luput dari publisitas yang efektif. Menyadari hal ini, maka salah satu topik perencanaan SP2020 yang dibahas adalah rencana strategis publisitas SP2020 secara menyeluruh. Kampanye SP2020 dirancang menyesuaikan perkembangan zaman. Sosialisasi kepada para *stakeholder* bukan hanya terkait dukungan penyelenggaraan, tetapi juga pemanfaatan *output* SP2020.

1.2.2 Rapat Rutin Tim Teknis

Pimpinan BPS membentuk Tim Pelaksana Kegiatan SP2020 pada tahun 2018 yaitu Tim Pelaksana Persiapan Kegiatan SP2020, dan kemudian beralih menjadi Tim Pelaksana Kegiatan SP2020. Tim Pelaksana Kegiatan SP2020 terdiri dari Pengarah; Bidang Instrumen Pendataan; Bidang Manajemen Sensus Penduduk Online; Bidang Manajemen Pencacahan Lapangan; Bidang Metodologi; Bidang Teknologi Informasi dan Pengolahan; Bidang Diseminasi; Bidang Perencanaan Anggaran; Bidang Keuangan; Bidang Logistik, Pengadaan, dan Perlengkapan; Bidang Hubungan Kelembagaan, Publisitas, dan Hukum; Bidang Analisis dan Kualitas Data; serta Bidang Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko. Tim Pelaksana Kegiatan SP2020 disahkan dengan terbitnya SK KBPS Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 dan seiring dengan perkembangan kegiatan dilakukan beberapa perubahan dan diperbarui dengan SK KBPS Nomor 704 Tahun 2020 Tanggal 9 November 2020.

Pada tahun 2018 juga dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan SP2020 (Sekretariat SP2020) berdasarkan SK KBPS Nomor 32 Tahun 2018 Tanggal 10 Januari 2018 dan diperbarui setiap tahun anggaran. Sekretariat SP2020 berperan penting dalam pelaksanaan SP2020, mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan. Sekretariat SP2020 bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan SP2020, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi.

Sekretariat SP2020 mengoordinasikan seluruh kegiatan teknis SP2020, termasuk menyelenggarakan rapat koordinasi dan pertemuan lainnya yang diperlukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan SP2020, menyusun notula, mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan SP2020, melakukan *monitoring*, mengontrol capaian seluruh kegiatan yang dilakukan dan membuat laporan terkait kegiatan pelaksanaan SP2020. Untuk memfasilitasi rapat Tim Pelaksana Kegiatan SP2020 secara berkala, dilaksanakan rapat setiap Rabu (Rabu SP).

Sesuai dengan arahan pimpinan, pembentukan Sekretariat SP2020 juga dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun tugas rutin Sekretariat SP2020 adalah merencanakan dan memfasilitasi rapat-rapat teknis Tim Pelaksana Kegiatan SP2020 secara berkala.

https://www.bps.go.id

Gambar 1 Pelaksanaan Rapat Tim Persiapan SP2020

https://www.bps.go

1.2.3 Laporan Berkala Progres Persiapan SP2020

Progres persiapan *Short Form* SP2020 dilaporkan kepada pimpinan dan seluruh tim dalam bentuk laporan berkala, yaitu SPekan dan *Traffic Light Report*. SPekan digunakan untuk memberikan informasi mengenai resume dan tindak lanjut singkat mengenai kegiatan yang dilakukan dalam seminggu.

Traffic Light Report dibuat untuk mengetahui ringkasan progres setiap dua minggu yang dilengkapi dengan warna status laporan, status dan kegiatan (per bidang), serta risiko dan masalah yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. *Traffic Light Report* menyajikan informasi yang lebih lengkap dan evaluatif dibandingkan SPekan, yakni menampilkan warna status laporan yang terdiri dari hijau, kuning, dan merah. Status laporan berwarna hijau jika kegiatan berjalan sesuai jadwal, berwarna kuning jika kegiatan terlambat sampai 20 persen dibandingkan jadwal yang sudah ditetapkan, dan berwarna merah jika kegiatan terlambat sampai lebih dari 20 persen dibandingkan jadwal yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, *Traffic Light Report* juga dilengkapi dengan ringkasan eksekutif yang berisi rangkuman tentang daftar kegiatan yang dilakukan, progres kegiatan, rencana jangka pendek, potensi risiko, dan masalah yang telah terjadi maupun potensi masalah yang akan terjadi. Selain itu, dalam ringkasan eksekutif juga mencantumkan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan beserta status ketepatan waktu pelaksanaannya.

SENSUS PENDUDUK 2020	Status Report : YELLOW
	Tanggal laporan: 27 Februari 2019

Current Status	Ringkasan
 G = Sesuai Jadwal Y = Terlambat sampai dengan 20% R = Tertunda > 20%	Laporan spesifik periode ini. Kegiatan utama yang sudah dilakukan pada periode ini antara lain: • Pelaksanaan kerjasama dengan FRI, KPI, dan Kompas untuk mendukung sosialisasi dan upaya meningkatkan respon rate self updating • Pengambilan keputusan final tahapan pendataan Combined Method (Proses Bisnis dengan 7 tahapan dan canvassing yang dilakukakan terhadap responden kode 4&8) • Membuat rancanan anggaran berdasarkan skenario tahapan yang telah disepakati oleh Pimpinan • Sosialisasi dan internalisasi kegiatan SP2020 kepada BPS Daerah melalui Indonesia Census Film Festival • Rateknas Pemantapan SP2020 • Pelatihan instruktur survei pemetaan wilkerstat Kegiatan utama yang akan dilakukan: • Persiapan Gladi Bersih SP2020 • Breakdown detil proses bisnis SP2020 • Merancang SOP, khususnya terkait *Coverage* dan *Respon Rate* • Finalisasi variabel dalam kuesioner • Perbaikan buku pedoman • Rapat konsolidasi dan *high level meeting* dengan Bappenas dan Dukcapil terkait ketersediaan data dasar dan pemanfaatan data SP2020 • Pengadaan perangkat infrastruktur TIK • Memantau perkembangan Ranperpres *Civil Register and Vital Statistics* (CRVS) yang digagas oleh Bappenas hingga ditandatangani oleh Presiden • Penyusunan manajemen risiko dan pemanfaatan manajemen proyek untuk SP2020 • Melakukan penyesuaian strategi publisitas SP2020

Gambar 2 Contoh *Traffic Light Report* SP2020

https://www.bps.go.id

1.2.4 Rapat Pimpinan Daerah

Dalam rangka persiapan SP2020 dilakukan rapat pimpinan BPS Pusat dan BPS Daerah untuk menyatukan visi dan misi, mengatur rencana berjalannya kegiatan, identifikasi risiko dan masalah yang mungkin terjadi dari berbagai daerah. Pada rapat pimpinan tersebut juga dilakukan pembahasan terkait fenomena-fenomena pendukung berdasarkan kajian sensus penduduk sebelumnya dari masing-masing provinsi yang kemudian dijadikan bekal untuk pelaksanaan SP2020. Dengan adanya pemahaman yang sama di jajaran BPS tentunya akan membuat penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis SP2020 menjadi lebih terukur, sistematis, dan bersinergi.

Rapat Teknis Nasional (Rateknas) Kepala BPS Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 merupakan salah satu agenda besar yang dilakukan dalam rangka menyambut SP2020. Rateknas 2019 yang melibatkan Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Statistik Sosial, dan Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik seluruh BPS Provinsi di Indonesia disajikan dalam bentuk *workshop* dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi dan memantapkan kesiapan BPS Daerah dalam pelaksanaan SP2020.

Gambar 3 Peserta Berdiskusi saat Rateknas Kepala BPS Kabupaten/Kota pada Tahun 2019

https://www.bps.go.id

1.2.5 Rapat Interkementerian/Lembaga

Sejak tahapan perencanaan kegiatan SP2020, BPS telah melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dengan mengundang perwakilan K/L pada rapat interkementerian/lembaga. Rapat dihadiri oleh Kementerian PAN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan K/L lainnya. Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk mendapatkan masukan dan *insight* mengenai rancangan kegiatan SP2020 sekaligus koordinasi terkait kebutuhan data.

1.2.6 *Technical Assistance Australian Bureau of Statistics* dan *United Nation*

Kegiatan SP2020 mendapat apresiasi dan dukungan dari Lembaga Internasional. Selama persiapan *Short Form* SP2020, *Australian Bureau of Statistics* (ABS) dan *United Nation* (UN) memberikan asistensi teknis dalam bentuk *workshop* kepada BPS. Asistensi teknis ABS dilaksanakan sebanyak empat kali, sedangkan asistensi teknis UN dilaksanakan satu kali selama masa persiapan.

Asistensi teknis ABS pertama terkait desain pelaksanaan Pilot SP2020. Diskusi antara ABS dengan BPS menyepakati bahwa penyusunan kalimat pertanyaan pada kuesioner disesuaikan dengan moda pengumpulan datanya yaitu PAPI, CAPI, atau

CAWI. Selain itu, perlu disusun strategi bagaimana mekanisme pelaporan progres pendataan pada wilayah PAPI khususnya untuk daerah dengan sinyal lemah.

Selanjutnya, asistensi teknis ABS yang kedua lebih menekankan pada hasil dan evaluasi pelaksanaan Pilot SP2020 yang mencakup pengolahan, evaluasi, interpretasi hasil Pilot SP2020, dan penilaian terhadap kualitas data. Pokok bahasan lain yang dibahas adalah desain kuesioner Pilot SP2020, penggunaan hasil Pilot SP2020 untuk menginformasikan metode, rencana, dan proses pengumpulan data multimoda.

Asistensi ABS yang ketiga terkait penyusunan manajemen risiko SP2020 yang meliputi identifikasi seluruh penyebab, dampak, kontrol pencegahan, dan kontrol mitigasi dari seluruh risiko pada setiap tahapan penyelenggaraan SP2020. Selain itu, ditekankan pula bahwa komunikasi dan diskusi yang baik antar tim penting untuk memitigasi suatu risiko.

Asistensi ABS yang keempat berfokus pada pembahasan persiapan SP2020 yang telah dilakukan oleh BPS sampai dengan tahun 2019. Pokok pembahasan mencakup seluruh persiapan mengenai manajemen lapangan, kuesioner, teknologi informasi, dan inovasi pendataan menggunakan CAWI atau pendataan mandiri.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UN juga memberikan asistensi kepada BPS dalam bentuk *workshop* selama empat hari pada tahun 2019. Asistensi yang diberikan meliputi persiapan pendataan mandiri, manajemen lapangan, publisitas, kualitas data, analisis data, instrumen, dan *Post Enumeration Survey* (PES). Selain itu, pada *workshop* tersebut juga terdapat sesi *knowledge sharing* Lembaga Statistik Turki mengenai pengalamannya dalam penyelenggaraan sensus berbasis data registrasi.

https://www.bps.go.id

Gambar 4 Asistensi Teknis *Australian Bureau of Statistics*

1.2.7 Penjadwalan Kegiatan

1. Penentuan Bulan dan Hari Sensus

Hari sensus merupakan pendataan yang dilakukan secara serentak di satu hari untuk mendata tunawisma, awak kapal berbendera Indonesia maupun penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap. Sebelum adanya tata kelola baru, Hari Sensus dijadwalkan pada 31 Juli 2020 mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 06.00 di 1 Agustus 2020. Namun, setelah adanya tata kelola baru, Hari Sensus dilakukan pada 15 September 2020 mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 06.00 di 16 September 2020.

2. Jadwal Kegiatan

Pada rancangan awal pelaksanaan SP2020, pendataan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pendataan dengan *Short Form* dan *Long Form* yang akan dilakukan pada tahun yang sama yaitu tahun 2020. Pendataan *Short Form* akan dilakukan bulan April 2020, sedangkan pendataan *Long Form* dilakukan pada bulan September 2020.

Pada Forum Diskusi Pakar Demografi dan BPS pada tanggal 22 April 2019 diputuskan bahwa pemilihan variabel *Short Form* dilakukan dengan sangat selektif menyesuaikan penerapan metode kombinasi pada SP2020. Sementara itu, parameter demografi disediakan melalui pendataan *Long Form*.

Pada perkembangan selanjutnya, pelaksanaan *Short Form* dan *Long Form* SP2020 tidak jadi diselenggarakan pada tahun yang sama. Dilakukan perubahan jadwal dimana pendataan *Short Form* dilaksanakan pada tahun 2020 dan *Long Form* pada tahun 2021.

https://www.bps.go.id

3. Kerangka Kerja/*Network Planning*

Network Planning (NWP) SP2020 merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terpadu yang memuat jadwal, program kegiatan, segala sumber daya yang digunakan, dan pola hubungan antar kegiatan termasuk identifikasi risiko, sehingga rangkaian kegiatan dapat diatur secara runtut, teratur, dan dapat di*monitoring* setiap progres pencapaiannya. NWP SP2020 ditetapkan dan disahkan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (Perka KBPS). NWP *Short Form* SP2020 pertama kali ditetapkan pada tahun 2017 dan mengalami perubahan seiring dengan perubahan rancangan pelaksanaan *Short Form* SP2020, seperti penyesuaian metodologi sensus, tahapan kegiatan, dan proses bisnis pelaksanaan kegiatan SP2020 karena pandemi Covid-19.

1.2.8 *Study Visit* ke Lembaga Statistik Negara Lain

Salah satu rangkaian kegiatan perencanaan SP2020 adalah mengirimkan delegasi BPS ke lembaga statistik di negara lain untuk belajar secara langsung mengenai penyelenggaraan sensus penduduk di negara-negara tersebut. Lembaga statistik yang dikunjungi selama periode 2017-2019 antara lain *Australian Bureau of Statistics* (ABS), *Statistics Korea* (KORSTAT), dan *Department of Statistics Malaysia* (DOSM).

Kunjungan pertama delegasi BPS ke ABS merupakan diskusi *high level* terkait tantangan dan arahan dalam penyusunan strategi pelaksanaan SP2020 di BPS yang ditujukan untuk memperoleh pendampingan dari ABS dalam pelaksanaan SP2020 dan *sharing knowledge* tentang Sensus Penduduk 2016 beserta persiapan menghadapi Sensus Penduduk 2021 di Australia. Dari hasil kunjungan ini diperoleh informasi mengenai tata kelola pelaksanaan sensus penduduk yang telah dilakukan oleh ABS, gambaran pelaksanaan sensus penduduk Australia tahun 2016, model pendataan, rancangan kuesioner, *data assurance*, manajemen program dan anggaran, *command centre*, strategi kampanye, dan pemetaan. Selain itu, dari kunjungan tersebut pun disepakati adanya lima kegiatan asistensi teknis ABS yang akan ditindaklanjuti bersama.

Kunjungan kedua delegasi BPS ke ABS bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dalam hal persiapan SP2020, khususnya terkait penjaminan kualitas dan manajemen risiko di seluruh tahapan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM). Informasi yang diperoleh selama kunjungan seperti identifikasi risiko (*risk management*) dari setiap tahapan sensus penduduk, serta penjaminan kualitas (*quality assurance*) untuk menghasilkan data penduduk yang berkualitas selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk penyusunan *Risk Management* dan *Quality Assurance* SP2020.

https://www.bps.go.id

Sementara itu, kunjungan delegasi BPS ke KORSTAT ditujukan untuk mempelajari hal-hal terkait implementasi metode kombinasi dan *register-based census* yang dilaksanakan di Korea Selatan, terutama hal-hal mengenai: 1) metodologi sensus dan penggunaan variabel, konsep, dan definisi; 2) pemanfaatan *multimode data collection*, termasuk CAWI, CAPI, PAPI, dan CATI; 3) dukungan teknologi informasi untuk sensus; 4) strategi terbaik untuk koordinasi dan publisitas dalam kegiatan sensus; dan 5) perencanaan kegiatan dan perancangan kebutuhan biaya. Hasil yang diperoleh dari kunjungan ini, diantaranya adalah pentingnya perencanaan yang matang sehubungan dengan perubahan metodologi sensus, penerapan teknologi mutakhir untuk menunjang sensus, penerapan *multimode data collection*, dan publisitas yang memadai untuk meningkatkan *response rate* sensus.

Lebih lanjut, kunjungan delegasi BPS ke DOSM bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengembangan sensus multimoda; penerapan teknologi baru seperti CAPI, CAWI, dan CATI; dan hal terkait koordinasi diantara para pemangku kepentingan untuk menyiapkan *register-based census*. Hasil pembelajaran dari

kunjungan ke kantor DOSM utamanya adalah informasi tentang penyusunan *business process register/address-based census*, pemeliharaan *address register* untuk kerangka sampel statistik, pemetaan, dan *updatting frame*, serta tata organisasi DOSM.

Gambar 5 Kunjungan Tim BPS ke ABS pada Tahun 2017

https://www.bps.go

1.2.9 Usulan Anggaran dan Biaya

Usulan anggaran yang diajukan dan disetujui diawal untuk kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2020 untuk seluruh satuan kerja BPS adalah sebesar Rp4,15 triliun. Namun, setelah dilakukan revisi, anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp1,19 triliun. Anggaran dimaksud diperuntukkan untuk kegiatan:

1. Pengadaan Perangkat TIK;
2. Publisitas SP2020;
3. Pendataan *Short Form* SP2020;
   a. Koordinasi Dan Konsolidasi;
   b. Penyiapan Basis Data;
   c. Pelaksanaan Sensus Mandiri;
   d. Pelaksanaan Lapangan;
4. PES SP2020;
5. Pengolahan SP2020;
6. Penjaminan Kualitas Daftar Penduduk dan SP2020-C1 (CAPI/PAPI); dan
7. Diseminasi SP2020.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran kegiatan SP2020 mengacu pada Pedoman Administrasi Keuangan SP2020 yang memberikan panduan bagi para penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan pada satker Badan Pusat Statistik, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota dalam mengelola administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan SP2020.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan *refocusing* postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, BPS termasuk sebagai salah satu instansi pemerintah yang harus melakukan penghematan dan penyesuaian anggaran yang berimplikasi pada tata kelola SP2020 yang harus mengalami penyesuaian. Selanjutnya, Deputi Bidang Statistik Sosial menerbitkan Surat Nomor B-183/BPS/4000/07/2020 Tanggal 16 Juli 2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Pimpinan Eselon I terkait Tata Kelola Baru SP2020 yang menyebutkan bahwa SP2020 tetap dilaksanakan pada Bulan September 2020 dengan penerapan protokol kesehatan khusus. Adapun dasar BPS Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota adalah surat dari Menteri Dalam Negeri.

Sehubungan dengan diterapkannya tata kelola baru pada pelaksanaan SP2020, maka Pedoman Administrasi Keuangan SP2020 pun disesuaikan untuk setiap tahapan proses bisnis yang baru, terutama akun belanja kegiatan yang menyangkut pandemi Covid-19. Sementara mengenai kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku (SBM, aturan perjadin, aturan paket *meeting*, aturan perpajakan dan lain sebagainya), yang dapat dilihat pada PAK SP2020. Sebagai tambahan, setiap akun pada bisnis proses tata kelola baru dan ketentuan yang menyertainya atau perubahan aturannya dituangkan dalam Pedoman Administrasi Keuangan SP2020-Lanjutan (PAK SP2020-Lanjutan).

https://www.bps.go.id

1.2.10 Organisasi

Struktur organisasi SP2020 disusun agar pelaksanaan SP2020 serta pengawasan dan pemeriksaan lapangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dan setiap pihak yang terlibat mengetahui tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak masing-masing. SP2020 merupakan salah satu kegiatan besar BPS dalam dekade 2010 – 2020 yang melibatkan banyak unit kerja di lingkungan BPS, seperti Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Informasi Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Biro Humas dan Hukum, Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Umum, serta Inspektorat Wilayah I, II, dan III.

Pada tingkat daerah, struktur organisasi SP2020 selain terdiri dari personel BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota juga melibatkan gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota, dan camat di tingkat kecamatan. Selanjutnya, *Task Force* (TF) di bawah koordinasi BPS Kabupaten/Kota bertugas mendata di wilayah khusus. Penanggung jawab teknis SP2020 pada tingkat kecamatan adalah Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) yang dibantu oleh Petugas Sensus.

1.3 Persiapan Teknis

1.3.1 Pendataan Potensi Desa

Podes untuk mendukung sensus penduduk dilaksanakan pada tahun berakhiran delapan. Podes 2018 merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur, potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki administrasi setingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Tujuan pelaskanaan Podes 2018 adalah: 1) menyediakan data yang mendukung perencanaan kegiatan SP2020; 2) sebagai sarana untuk pemutakhiran *Master File Desa* (MFD); 3) menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah; 4) menyediakan data bagi keperluan pemutakhiran klasifikasi/tipologi desa, misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir-non pesisir, dan sebagainya; 5) sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik; 6) menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil; 7) menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana, dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis; dan 8) menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa.

https://www.bps.go.id

1.3.2 Pemetaan Satuan Lingkungan Setempat

Peta memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang terlaksananya kegiatan SP2020. Pada pelaksanaan kegiatan lapangan, peta digunakan untuk menelusuri wilayah kerja dan sebagai panduan petugas untuk membantu identifikasi wilayah sehingga pada saat pendataan tidak ada yang terlewat cacah atau tercacah ganda. Dalam pelaksanaan SP2020, petugas dibekali dengan instrumen Peta WS (Peta Wilayah SLS). Peta WS tersebut digunakan sebagai panduan petugas untuk mengenali batas-batas wilayah kerjanya. Saat pendataan lapangan SP2020, pada peta tersebut digambar titik/noktah dan diberi nomor bangunan pada setiap bangunan berpenghuni (Gambar 6).

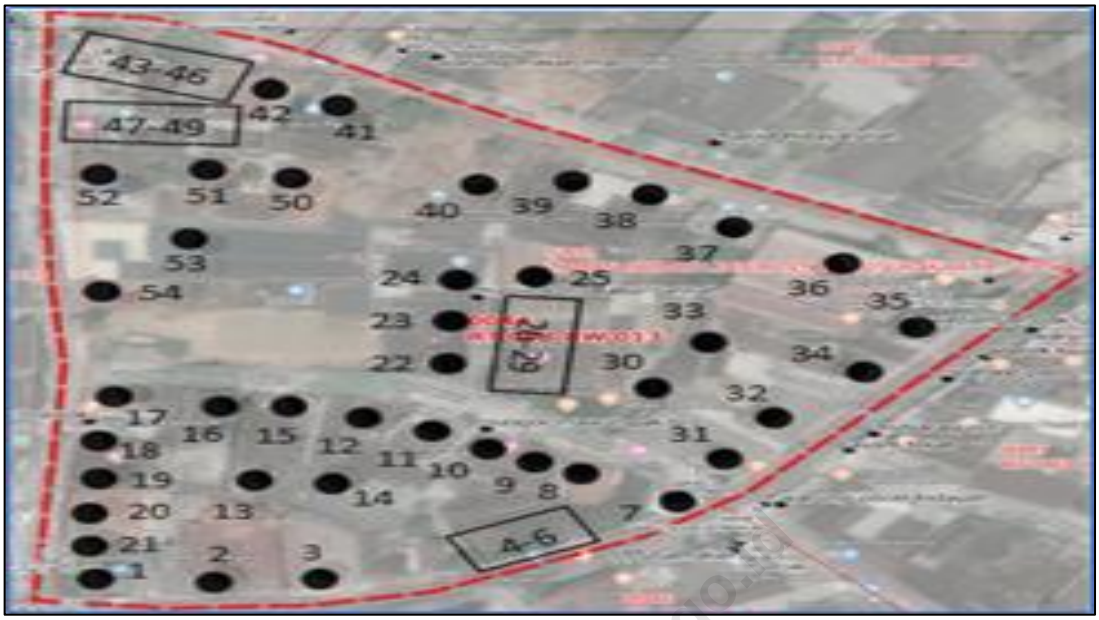

Gambar 6 Peta WS yang Diberi Noktah dan Nomor Bangunan

Untuk pertama kalinya, tahun 2020, peta WS digunakan BPS untuk kegiatan sensus. Peralihan dari Blok Sensus ke SLS bukanlah hal yang mudah. SLS sebagai cakupan wilayah tugas pendataan ternyata sangat cepat mengalami perubahan batas atau mengalami pemekaran/penggabungan wilayah. Petugas lapangan harus paham dalam membaca peta dan harus mampu melakukan perbaikan Peta WS sesuai keadaan di lapangan.

Selain itu, jika peta Blok Sensus dapat dikenali dengan batas jelas, sehamparan, dan mempunyai muatan dalam jumlah yang sudah ditentukan, sebaliknya peta SLS memiliki batas yang kurang jelas, tidak sehamparan, dan muatannya pun beragam. Oleh karena itu, untuk mempermudah petugas dalam mendata di lapangan, maka dalam implementasinya, SLS dengan muatan cukup besar dibagi menjadi beberapa sub-SLS.

Dalam melakukan penyempurnaan peta, BPS mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Dalam peraturan tersebut, arahan strategis menuju satu peta mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pada Tabel 4 disajikan tahapan kegiatan terkait Pemetaan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dilakukan BPS untuk mewujudkan satu peta berbasis SLS yang digunakan pada kegiatan SP2020.

https://www.bps.go.id

Tabel 4 Tahapan Kegiatan Pemetaan Tahun 2016-2020

Tahun	Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2016	Studi Penyiapan Kerangka Wilkerstat di Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Depok dan Kota Bekasi	Studi ini merupakan cikal bakal dari seluruh kegiatan persiapan Pemetaan SP2020.
2017	*Workshop Capacity Building GIS For 2020 Population Census*	Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memperbaiki kualitas peta, mengembangkan pemanfaatan peta, menyajikan data statistik berdasarkan lokasi geografis secara interaktif, serta meningkatkan kemampuan analisis geospasial.
2018	Tahap persiapan pemetaan dan pemutakhiran muatan wilkerstat. Kegiatan yang dilakukan adalah: 1. Uji Coba Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020; 2. Penyusunan Peta Dasar dan Informasi Muatan Wilkerstat SP2020.	Kegiatan Uji Coba Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dilaksanakan di 6 kabupaten/kota. Hasil uji coba digunakan untuk menyusun pedoman, *Standard Operasional of Procedure* (SOP) dan organisasi lapangan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020.
2019	Pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020.	Pelaksanaan kegiatan lapangan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dilakukan untuk seluruh wilayah di 514 kabupaten/kota. Hasil pengolahan kegiatan tersebut adalah kerangka induk yang digunakan untuk SP2020.
	Pengadaan Layanan Peta Digital	Layanan *Geocoding, Places Details, Dynamic Maps* (google) yang dibutuhkan dalam aplikasi wilkerstat berbasis android untuk mendukung petugas pemeta di lapangan.
	Pengadaan Software ArcGIS	Software yang digunakan untuk menunjang pembuatan peta di 34 provinsi.
2020	Tersedianya kerangka geospasial SP2020.	Peta Wilkerstat dari level provinsi sampai SLS.

https://www.bps.go.id

Output dari kegiatan SP2020 dari sisi geospasial antara lain:

1. Pada tahun 2019 (kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020) dihasilkan peta digital SLS yang kemudian dibentuk menjadi peta digital blok sensus pada tahun 2020;
2. Pada tahun 2020, saat pendataan SP2020, dihasilkan gambar titik/noktah bangunan beserta nomor bangunan pada Peta WS, yang kemudian dibuat secara digital pada tahun yang sama. Hasil digitalisasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendataan yang lain.

1.3.3 Konstruksi Kuesioner dan Buku Pedoman

Penyusunan Kuesioner SP2020 dimulai dengan beberapa langkah persiapan, seperti meninjau kuesioner sensus penduduk sebelumnya khususnya SP2010, mempelajari rekomendasi PBB mengenai SP2020, mencermati kuesioner sensus penduduk negara lain, serta berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang dinilai berpotensi sebagai pengguna hasil SP2020. Penyesuaian konsep penduduk juga dilakukan dari jangka waktu 6 bulan menjadi 1 tahun bagi penduduk yang menempati suatu wilayah/berniat tinggal di suatu wilayah pendataan.

Pertanyaan pada kuesioner SP2020 sudah mempertimbangkan secara menyeluruh saran atau masukan dari kandidat pengguna data. Pertimbangan tidak hanya terkait dengan aspek substansi tetapi juga non-substansi, seperti ketersediaan anggaran, bahasa pertanyaan yang mudah dipahami, fisibilitas pendataan di lapangan dan pengolahannya.

Penyusunan narasi pertanyaan dan format kuesioner SP2010 dilakukan setelah proses diskusi mendalam dan uji coba di lapangan. Hal utama yang diperhatikan dalam menyusun narasi pertanyaan adalah kejelasan setiap kata atau istilah yang digunakan dalam kuesioner. Sementara, dalam merancang format kuesioner, hal-hal yang menjadi pertimbangan antara lain kesesuaian antara format dan rencana perekaman data (untuk yang menggunakan *scanner*), serta kejelasan atau kemudahan bagi petugas lapangan, khususnya pencacah.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyesuaian pada beberapa instrumen pendataan. Misalnya, kuesioner pada tahap pemeriksaan Daftar Penduduk yang semula hanya menggunakan satu kuesioner untuk seluruh wilayah (SP2020-DP), karena adanya pembagian zona, harus menggunakan kuesioner yang berbeda sesuai zona wilayahnya. SP2020-DP1 digunakan untuk melakukan pemeriksaan daftar penduduk pada wilayah Zona 1 DOPU sedangkan SP2020-DP2 digunakan di wilayah Zona 2 Non DOPU dan Zona 3 Wawancara. Dari hasil SP Online, terdapat penduduk yang tidak mengisi identitas SLS dan penduduk yang keberadaaannya tidak terdefinisi di dalam wilayah SLS BPS, sehingga dibangun kuesioner baru yang

https://www.bps.go.id

berisi daftar penduduk dengan kategori di atas, atau disebut kuesioner SP2020-DPD. Kuesioner ini memuat daftar penduduk pada tingkat Desa/Kelurahan dan digunakan oleh petugas sensus untuk melakukan konfirmasi keberadaannya kepada Ketua/pengurus SLS.

Selain itu, karena organisasi lapangan sudah tidak lagi melibatkan Koordinator Tim (Kortim) sebagai unsur petugas lapangan pada SP September 2020, maka Buku 1E Pedoman Kortim yang sudah disusun sebelumnya tidak lagi dipergunakan. Kuesioner SP2020-RP2 yang semula diperuntukkan bagi Kortim, selanjutnya disesuaikan isinya agar dapat digunakan bagi Petugas Sensus untuk mengetahui wilayah tugasnya. Kuesioner SP2020-RP3 yang semula diperuntukkan bagi petugas pendataan (PPL), direvisi menjadi rekap wilayah tugas *Task Force* (TF). Sehingga, kuesioner SP2020-RP4 yang semula diperuntukkan bagi petugas TF tidak lagi dipergunakan.

Pada tata kelola yang baru, kuesioner SP2020-C1 yang semula dipergunakan untuk mengumpulkan data penduduk di seluruh wilayah, akhirnya hanya dipergunakan di Zona 1 DOPU dan Zona 3 Wawancara. Sementara pada Zona 2 non DOPU tidak dilakukan pengumpulan data penduduk dan perumahan secara lebih rinci sebagaimana di zona lainnya. Demikian juga dengan kuesioner SP2020-RC1 hanya dipergunakan di Zona 1 dan Zona 3 untuk merekap dokumen SP2020-C1 di wilayah tersebut. Pada Zona 1 DOPU, pengisian kuesioner dilakukan oleh responden, sehingga perlu adanya dokumen yang berisi petunjuk pengisian kuesioner. Oleh karenanya, disusun dokumen yang disebut sebagai Lembar Pendamping SP2020-C1 yang berisi petunjuk singkat tata cara pengisian kuesioner. Dokumen ini disertakan pada daftar SP2020-C1 pada saat di-drop di rumah responden. Selain itu, pendataan penduduk pada SP September 2020 tidak lagi dilakukan dengan moda CAPI. Kuesioner yang diperuntukkan bagi petugas TF yang semula disebut SP2020-XC1, pada tata kelola yang baru berubah menjadi SP2020-TF. Untuk memantau penerimaan dan pengembalian dokumen pendataan dari Koseka ke Petugas Sensus, maka dibuat instrumen yang berfungsi sebagai kartu kendali. Instrumen tersebut terbagi menurut zona wilayah tugas, yakni SP2020- KD1 untuk petugas di Zona 1, SP2020-KD2 untuk petugas di Zona 2, dan SP2020-KD3 untuk petugas di Zona 3.

Oleh karena buku pedoman sudah dicetak dan didistribusikan ke daerah, maka untuk menuangkan perubahan dan penyesuaian tata kelola yang sudah ditetapkan, disusunlah buku suplemen. Buku Suplemen 1A memuat kegiatan sensus penduduk secara garis besar termasuk perubahan tata kelolanya, Buku suplemen ini disusun untuk mendukung informasi pada Buku Teknis BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota. Perubahan moda pembelajaran pada SP September 2020 juga berubah dari sebelumnya dirancang secara offline menjadi online. Pembelajaran online merupakan hal yang baru bagi BPS, sehingga memerlukan pedoman untuk penyelenggara kegiatan yang disajikan dalam bentuk Buku 1J

www.bps.go.id

Pedoman Pembelajaran SP2020. Selain itu, disusun pula suplemen bagi instruktur yang disebut Buku Suplemen 1C.

Buku suplemen bagi petugas lapangan disusun untuk memuat ralat maupun tambahan menyesuaikan perubahan tata kelola yang ada. Buku suplemen untuk Koseka dibedakan sesuai zona wilayah kerjanya, Buku Suplemen 1D Zona 1 DOPU diperuntukkan bagi Koseka yang bertugas di zona DOPU, Buku Suplemen 1D Zona 2 Non DOPU bagi Koseka di zona Non DOPU, dan Buku Suplemen 1D Zona 3 Wawancara. Demikian juga dengan buku suplemen bagi petugas pendataan yang semula disebut PCL, pada tata kelola yang baru ini dipergunakan nomenklatur baru yaitu Petugas Sensus. Beberapa penyesuaian pada buku pedoman untuk petugas pendataan tertuang pada Buku Suplemen 1F. Suplemen bagi petugas sensus juga dibedakan sesuai zona wilayah tugasnya.

Tabel 5 Dokumen Pendataan SP September 2020

Instrumen	Kegunaan
(1)	(2)
SP2020-DP	Berganti nama menjadi SP2020-DP1 dan SP2020-DP2
SP2020-DP1	Daftar Penduduk yang digunakan untuk konfirmasi keberadaan penduduk kepada Ketua/Pengurus SLS pada zona 1 DOPU
SP2020-DP2	Daftar Penduduk yang digunakan untuk konfirmasi keberadaan penduduk kepada Ketua/Pengurus SLS pada zona 2 Non DOPU/Zona 3 Wawancara
SP2020-DPD	Daftar Penduduk tingkat Desa/Kelurahan yang digunakan untuk konfirmasi keberadaan penduduk yang tidak diketahui alamat SLS-nya
SP2020-WA	Peta wilayah SLS sebagai panduan wilayah kerja Koseka
SP2020-WS	Peta wilayah SLS sebagai panduan wilayah kerja Petugas Sensus
SP2020-C1	Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data penduduk dan perumahan pada zona 1 DOPU dan zona 3 Wawancara
Lembar Pendamping SP2020-C1	Dokumen pendamping SP2020-C1 yang berisi petunjuk pengisian untuk Zona 1 DOPU
SP2020-RC1	Rekap dokumen SP2020-C1 hasil pendataan penduduk pada Zona 1 DOPU dan Zona 3 Wawancara
SP2020-CAPI	Tidak digunakan lagi
Website CAWI	Website pengisian Sensus Penduduk Online
SP2020-TF	Mendata berbagai kelompok penduduk di wilayah Non SLS yang ditentukan
SP2020-RP1	Daftar Rekap Wilayah Tugas Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka)
SP2020-RP2	Daftar Rekap Wilayah Tugas Petugas Sensus
SP2020-RP3	Daftar Rekap Wilayah Task Force
SP2020-RP4	Tidak digunakan lagi

https://www.bps.go.id

Lanjutan Tabel 5

Instrumen	Kegunaan
(1)	(2)
SP2020-KD1	Kartu kendali Petugas Sensus ke Koseka di Zona 1 DOPU
SP2020-KD2	Kartu kendali Petugas Sensus ke Koseka di Zona 2 Non DOPU
SP2020-KD3	Kartu kendali Petugas Sensus ke Koseka di Zona 3 Wawancara
Buku 1A	Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan Buku Suplemen 1A
Buku 1B	Pedoman Administrasi Keuangan
Buku 1C	Pedoman Instruktur (Instruktur Utama dan Instruktur Nasional), yang dilengkapi dengan Buku Suplemen 1C
Buku 1D	Pedoman Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), yang dilengkapi dengan Buku Suplemen 1D untuk Zona 1 DOPU, Zona 2 Non DOPU, dan Zona 3 Wawancara
Buku 1E	Tidak digunakan lagi
Buku 1F	Pedoman Pendataan, yang dilengkapi dengan Buku Suplemen 1F untuk Zona 1 DOPU, Zona 2 Non DOPU, dan Zona 3 Wawancara
Buku 1G	Pedoman Pengkodean
Buku 1H	Pedoman Task Force
Buku 1I	Pedoman Sensus Penduduk Online
Buku 1J	Pedoman Pembelajaran SP2020
Suplemen 1A	Suplemen Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota
Suplemen 1C	Buku Pedoman Instruktur (Instruktur Utama dan Instruktur Nasional)
Suplemen 1D Zona 1 DOPU	Suplemen Pedoman Koordinator Sensus Kecamatan Zona 1 DOPU
Suplemen 1D Zona 2 Non DOPU	Suplemen Pedoman Koordinator Sensus Kecamatan Zona 2 Non DOPU
Suplemen 1D Zona 3 Wawancara	Suplemen Pedoman Koordinator Sensus Kecamatan Zona 3 Wawancara
Suplemen 1F Zona 1 DOPU	Suplemen Pedoman Pendataan Zona 1 DOPU
Suplemen 1F Zona 2 Non DOPU	Suplemen Pedoman Pendataan Zona 2 Non DOPU
Suplemen 1F Zona 3 Wawancara	Suplemen Pedoman Pendataan Zona 3 Wawancara

https://www.bps.go.id

1.3.4 Pengembangan Konsep, Definisi, dan Klasifikasi

1. Konsep Penduduk dan Keluarga

Pendataan *Short Form* SP2020 menggunakan konsep "*de jure*" atau konsep "di mana seseorang biasanya menetap/bertempat tinggal" (*usual residence*) dan konsep "*de facto*" atau konsep "di mana seseorang berada pada saat pendataan". Penduduk yang dicatat pada daftar SP2020-DP2 adalah yang memenuhi konsep penduduk, yaitu yang benar-benar tinggal di wilayah SLS tersebut selama satu tahun atau lebih, atau bertujuan untuk menetap lebih dari satu tahun. Penduduk adalah semua orang (WNI dan WNA) yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari satu tahun.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada SP2020, orang asing disebut sebagai Warga Negara Asing (WNA).

Pada pelaksanaan *Short Form* SP2020, pendekatan yang dilakukan adalah keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK). Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam KK (UU No. 23 Tahun 2006). Termasuk anggota keluarga adalah ayah dan ibu; ayah, ibu, dan anak; ayah dan anak; ibu dan anak; serta orang lain yang tinggal bersama dalam satu rumah dan dianggap keluarga (UU No. 52 Tahun 2009), dan termasuk mereka yang belum memiliki kartu keluarga, tetapi memenuhi konsep keluarga.

https://www.bps.go.id

2. Klasifikasi Urban Rural

Status urbanitas desa/kelurahan menjelang SP2020 direklasifikasi berdasarkan data terkini dari Podes 2019. Kriteria desa perkotaan tahun 2020 merupakan penyempurnaan kriteria desa perkotaan tahun 2000. Kriteria yang membedakan klasifikasi desa perkotaan tahun 2020 dengan sebelumnya adalah tidak digunakannya lagi variabel bioskop, perubahan kriteria pada rumah tangga telepon dan rumah tangga pengguna listrik.

3. Kodifikasi Wilayah Administrasi

Kode wilayah administrasi dari tingkat provinsi sampai tingkat desa yang digunakan dalam SP2020 adalah kode standar BPS. Kode lengkap suatu desa/kelurahan terdiri dari 10 digit, yaitu: 2 digit pertama menunjukkan kode provinsi, 2 digit berikutnya kode kabupaten/kota, 3 digit selanjutnya kode kecamatan, dan 3 digit terakhir kode desa/kelurahan.

1.3.5 Uji Coba dan Gladi Bersih Pelaksanaan *Short Form* SP2020

Sebelum pelaksanaan *Short Form* SP2020, untuk mendapatkan pengalaman melaksanakan sensus yang sesungguhnya, terlebih dahulu diselenggarakan uji coba dan gladi bersih. Rangkaian uji coba dimulai dari Pilot SP2020 tahun 2018, kemudian dilanjutkan Uji Coba Metode Kombinasi dan Gladi Bersih tahun 2019.

Pilot SP2020 dilaksanakan di tujuh provinsi, yaitu Sumatera Utara (Kota Medan), Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Ilir), DKI Jakarta (Kota Jakarta Pusat), Jawa Barat (Kota Bandung), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Manggarai Barat), Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala), dan Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Tengah). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan semua tahapan SP2020, baik dari sisi teknis operasional maupun sisi administrasi. Hasil Pilot SP2020 mengidentifikasi semua kelebihan dan kekurangan iada setiap tahapan sensus. Selain itu, pada pelaksanaan Pilot SP2020 juga mencakup uji coba Penjaminan Kualitas (PK) dan *Post Enumeration Survey* (PES). PK sebagai sistem peringatan dini supaya kesalahan tidak terjadi secara luas dan PES untuk mengetahui cakupan pendataan.

Rangkaian selanjutnya setelah pelaksanaan Pilot SP2020 adalah Uji Coba Metode Kombinasi SP2020 pada awal tahun 2019. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pengalaman penggunaan metode kombinasi dalam sensus penduduk. Uji coba dilaksanakan di dua provinsi terpilih yaitu Jawa Barat (Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung) dan Kalimantan Selatan (Desa Mekarsari dan Desa Indah Sari, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala). Pemilihan kedua wilayah ini dilakukan dengan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Pilot SP2020 pada tahun 2018. Hasil uji coba memberikan rekomendasi untuk melakukan penyempurnaan tahapan dan instrumen metode kombinasi.

https://www.bps.go.id

Selanjutnya, untuk kepentingan penyempurnaan dan persiapan kegiatan *Short Form* SP2020, diselenggarakan Gladi Bersih SP2020 pada tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan di tiga wilayah yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi Maluku. Gladi Bersih SP2020 menghasilkan output yang dapat memberikan masukan dalam upaya penyempurnaan persiapan SP2020. Kegiatan ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan rancangan yang telah dibuat sehingga dapat disempurnakan sebelum *Short Form* SP2020 dilaksanakan. Selain itu, dari hasil Gladi Bersih ini dapat diidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi, sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat untuk pelaksanaan *Short Form* SP2020 yang sesungguhnya.

1.3.6 Penyiapan Basis Data Kependudukan

Berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, data dukcapil dapat digunakan sebagai data dasar untuk pelaksanaan SP2020. Data dasar digunakan sebagai prelist pada kegiatan SP Online. Tahapan prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Penarikan data adminduk dari Ditjen Dukcapil melalui *Virtual Private Network* (VPN)

   BPS diberi hak akses untuk menarik data adminduk melalui VPN. Data yang ditarik adalah data indentitas tempat tinggal atau alamat penduduk kondisi Semester 1 Tahun 2019 (provinsi sampai SLS terkecil). Data identitas ini dibutuhkan untuk menyesuaikan (*matching*) identitas tempat tinggal penduduk yang ada di Ditjen Dukcapil dengan identitas wilayah yang ada di BPS sehingga penduduk yang ada di Ditjen Dukcapil dapat terpetakan di wilayah kerja BPS. Kegiatan ini dimulai dari bulan Agustus s.d. Oktober 2019.

2. Penyerahan data penduduk dari Ditjen Dukcapil ke BPS

   Penyerahan data dari Ditjen Dukcapil dan BPS secara resmi dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Discovery Hotel Ancol dalam acara "Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan aparatur penyelenggara dan pelaksana Adminduk di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sekaligus dalam rangka Penyerahan Data Kependudukan Untuk Sensus Penduduk 2020". Data yang diperoleh memuat 266.534.838 individu dengan variabel kependudukan antara lain : Nomor KK. Alamat, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/bulan/tahun Lahir, Agama/Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Nama Ibu Kandung, Alamat Sekarang, dan No Akta Kelahiran.

3. Penyerahan data penduduk baru dan penduduk non aktif dari Ditjen Dukcapil ke BPS

   BPS mendapatkan data tambahan yaitu data penduduk baru dan penduduk non aktif. Dengan adanya data tambahan ini maka data yang digunakan adalah data di Semester 2 2019. Data penduduk baru merupakan penduduk tambahan antara Semester 1 dan Semester 2, sedangkan data non aktif merupakan data penduduk yang melakukan perekaman lebih dari satu kali atau data penduduk yang tidak ada aktivitas transaksi selama tujuh tahun. Data penduduk baru berjumlah 5,7 juta individu, sedangkan data penduduk non-aktif berjumlah 20,6 juta individu. Data tambahan ini diperoleh pada bulan Februari 2020.

http://www.bps.go.id

1.3.7 Penyusunan Daftar Penduduk

Penyusunan Daftar Penduduk (DP) dilakukan dengan menggunakan data adminduk yang telah dimutakhirkan melalui SP Online dan akan berfungsi sebagai *pre-list* yang akan dibawa petugas ke lapangan. Daftar penduduk memuat keterangan status penduduk. DP didistribusikan kepada para petugas berdasarkan wilayah tugasnya masing-masing. Setelah dilakukan penyesuaian tata kelola penyelenggaraan SP2020, Dokumen DP dibedakan menjadi SP2020-DP1 dan SP2020-DP2.

1.3.8 *Matching* Master Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

Kegiatan *matching* terbagi menjadi dua tahapan yaitu *matching* secara otomatis dan verifikasi manual. *Matching* otomatis dilakukan dengan cara mencocokkan kode dan nama wilayah Dukcapil ke kode dan nama wilayah BPS. Kegiatan *matching* (verifikasi) manual dilakukan oleh *operator matching* dengan mencocokkan satu persatu nama wilayah dengan traceholds matching tertentu. Gambaran tahapan *matching* ini secara umum dapat dilihat seperti pada Gambar 7 berikut.

https://www.bps.go.id

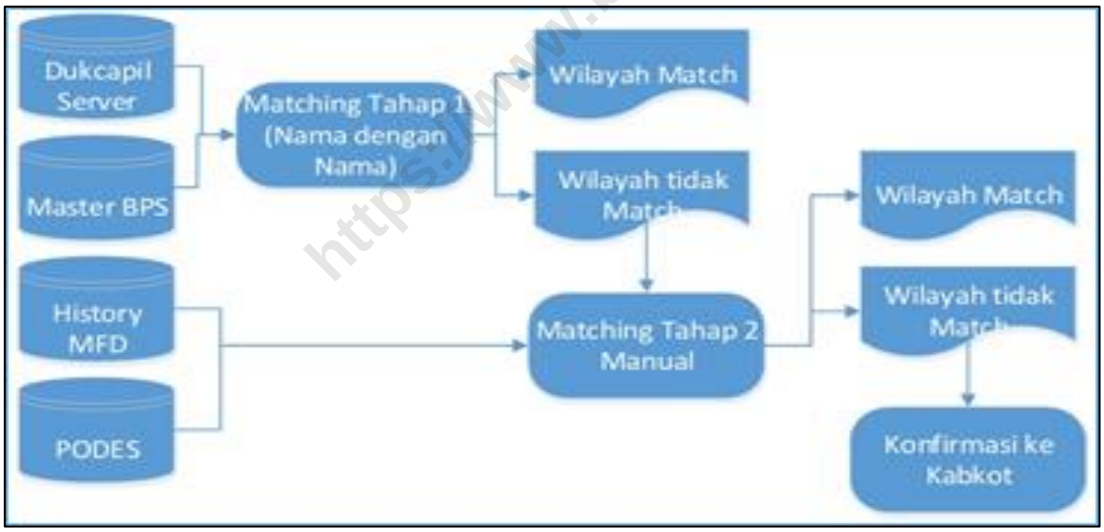

Gambar 7 Proses *Matching* SLS

Matching secara otomatis dilakukan dengan mencocokkan kode/nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Wilayah-wilayah yang *unmatch* proses *matching* dilakukan ulang. Semua kecamatan dan desa Dukcapil yang tidak ditemukan padanannya di master wilayah BPS kemudian ditelusuri dan dilakukan penyesuaian lagi berdasarkan informasi dari Permendagri mengenai pemekaran wilayah sehingga bisa diidentifikasi desa induk dan pecahannya untuk mencari padanannya ke kondisi master wilayah desa BPS. Selanjutnya dilakukan *matching*

SLS Dukcapil ke master SLS BPS dari hasil pemetaan dengan mencocokkan nama wilayah Dukcapil dengan nama dari master wilayah BPS. Jika masih ditemukan SLS dari data Dukcapil yang sama sekali tidak bisa ditelusuri padanannya pada master SLS BPS, maka informasi SLS BPS-nya dibiarkan kosong (RT 0, RW 0, dusun 0, ataupun nama dusun yang sama dengan nama desa).

1.3.9 Pelatihan Instruktur

Semula dirancang bahwa pelatihan dilaksanakan secara tatap muka, namun karena adanya pandemi Covid-19 dilakukan penyesuaian skema pelatihan dengan berbagai metode (online/jarak jauh, mandiri, dan tatap muka). Pelatihan isntruktur dilakaukan bertahap, sebagai berikut:

1. Briefing Instruktur Utama (Intama)

   Kegiatan Briefing Intama dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom selama dua hari berturut-turut yaitu pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 08.00 s.d. 18.00 WIB dan 30 Juli 2020 pukul 08.00 s.d. 20.00 WIB.

2. Pembelajaran Instruktur Nasional (Innas)

   Pembelajaran Innas dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 4 s.d. 5 Agustus 2020. Setiap kelas pembelajaran Innas dipandu oleh 2 (dua) orang intama dan peserta sekitar 20-30 orang. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung melalui Zoom yang ditautkan pada BPS Learning Portal/LMS. *Learning Management System* (LMS) memfasilitasi untuk melakukan presensi, penyimpanan materi/bahan ajar, serta pelaksanaan kuis dan pendalaman.

https://www.bps.go.id

1.3.10 Tata Kelola SP2020

Proses bisnis SP2020 telah dipersiapkan sebaik mungkin melalui berbagai kajian dan uji coba. Penetapan Covid-19 sebagai pandemi global berdampak termasuk pada pelaksanaan SP2020 yang tidak lagi dapat dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah dirancang sebelumnya. Untuk mematuhi protokol kesehatan yakni kebijakan *physical distancing*, pengumpulan data tidak dilakukan dengan wawancara secara tatap muka (kecuali di beberapa wilayah khusus). Penetapan tata kelola baru Sensus Penduduk 2020 didasarkan pada Perka BPS Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Masterplan dan *Network Planning* Sensus Penduduk Tahun 2020, dengan keputusan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan SP2020 diundur dari Juli 2020 menjadi September 2020 dengan penekanan khusus pada penerapan protokol kesehatan.

2. Skenario tata kelola baru SP2020 yang diterapkan pada Bulan September 2020:
   a. Wilayah CAPI (246 Kabupaten/Kota) melaksanakan proses bisnis pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan dengan *door-to-door*, tanpa melaksanakan pendataan penduduk.
   b. Wilayah PAPI (268 Kabupaten/Kota) melaksanakan proses bisnis pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan, dan dilanjutkan dengan pendataan penduduk (DOPU). Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, pendataan penduduk dilakukan dengan wawancara.
   c. Penggunaan Daftar Penduduk (DP) digital sebagai instrumen pendukung DP Cetak yang dibawa Petugas Sensus di lapangan.

Selanjutnya ditetapkan tujuh tahapan proses bisnis SP2020 sebagai berikut:

Gambar 8 Proses Bisnis Pengumpulan Data Sensus Penduduk 2020

1. Koordinasi dan konsolidasi
   Sosialisasi, publisitas, dan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dari tingkat pusat sampai desa dengan tujuan untuk menjaring dukungan dan kolaborasi dalam menyukseskan SP2020

2. Penyiapan basis data dasar
   BPS bersama dengan Ditjen Dukcapil bersama-sama menyiapkan data administrasi kependudukan menurut SLS terkecil sebagai basis data dasar penduduk yang digunakan pada SP Online.

3. Sensus Penduduk Online
   Pengisian kuesioner sensus penduduk melalui moda CAWI secara mandiri.

4. Penyusunan Daftar Penduduk (DP)
   Penyiapan SP2020-DP berdasarkan basis data kependudukan yang telah dimutakhirkan dari hasil SP Online.

5. Pemeriksaan Daftar Penduduk (DP)
   Memastikan keberadaan penduduk di suatu SLS bersama Ketua/Pengurus SLS dengan mengisi kolom cek pada SP2020-DP dan mengisi Daftar Penduduk Baru/Tambahan.

6. Verifikasi lapangan
   Kegiatan untuk memastikan keberadaan penduduk langsung ke lapangan.

7. Pendataan Penduduk
   Kegiatan pendataan menggunakan SP2020-C1 pada penduduk yang belum melakukan SP Online dan yang sudah SP Online namun perlu dicacah ulang serta penduduk baru yang tidak terdaftar pada dokumen SP2020-DP.

Wilayah pendataan selanjutnya dibagi dalam 3 (tiga) zona. Pengelompokan zona wilayah dilakukan pada tingkat kabupaten/kota berdasarkan kriteria CAPI/PAPI yang sudah diidentifikasi pada tahun 2019 serta kondisi khusus pada wilayah tertentu. Pembagian zona wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zona 1 (DOPU).

Dilakukan di wilayah PAPI (227 kabupaten/kota). Pendataan lapangan secara DOPU dengan memanfaatkan kuesioner SP2020-C1 yang telah dicetak sebelumnya. Dari tujuh tahapan proses bisnis, petugas sensus bertugas di tiga tahap terakhir, yaitu pemeriksaan DP, verifikasi lapangan, dan pendataan penduduk. Pendataan penduduk dilakukan dengan cara pengisian kuesioner secara mandiri oleh penduduk untuk kemudian diambil oleh Petugas Sensus ketika sudah selesai diisi.

https://www.bps.go.id

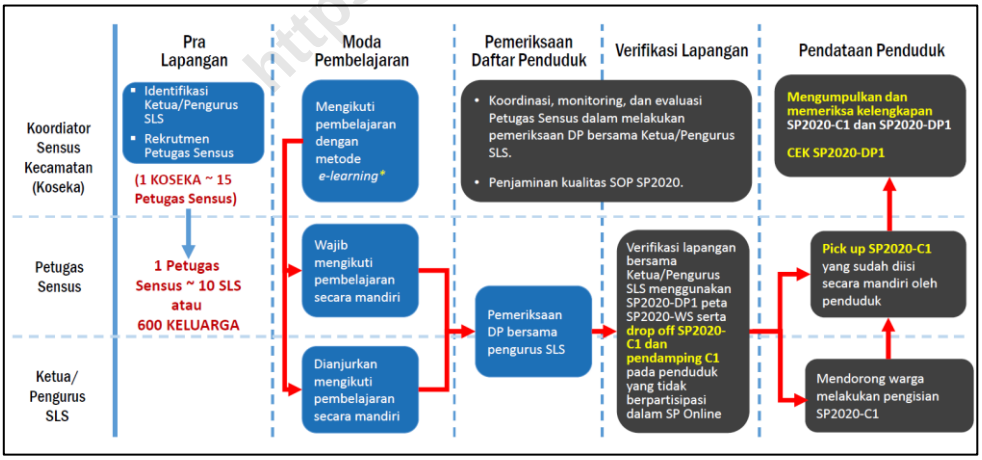

Gambar 9 Tahapan Proses Bisnis Sensus Penduduk 2020 September pada Zona 1

2. Zona 2 (Non-DOPU)

Dilakukan di wilayah CAPI (246 kabupaten/kota). Petugas sensus bertugas di dua tahap terakhir proses bisnis, yaitu pemeriksaan DP dan verifikasi lapangan. Pemeriksaan DP dilakukan secara door to door menggunakan daftar SP2020-D2 tanpa melakukan Tahap 7 (Pendataan Penduduk).

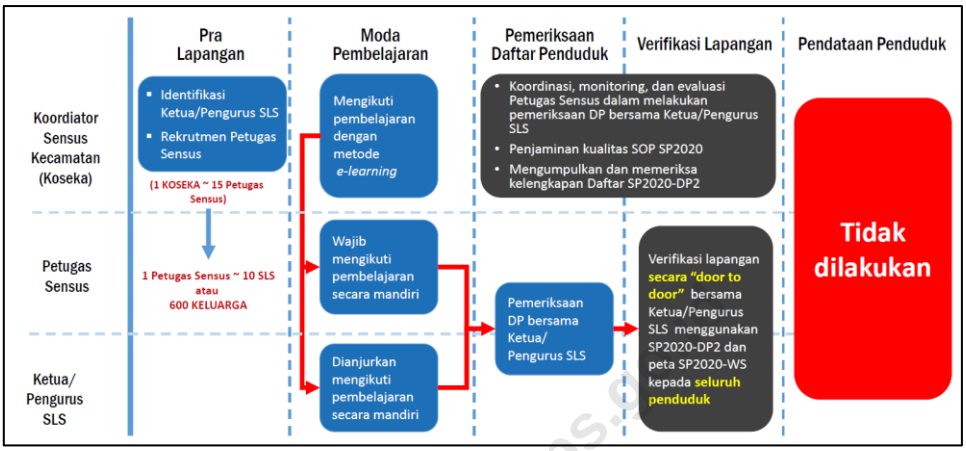

Gambar 10 Tahapan Proses Bisnis Sensus Penduduk 2020 September pada Zona 2

3. Zona 3: Wawancara

Dilaksanakan di 41 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Petugas sensus bertugas pada tiga tahap terakhir, yaitu pemeriksaan DP, verifikasi lapangan, dan pendataan penduduk. Pendataan penduduk dilakukan dengan mekanisme wawancara tatap muka kepada penduduk yang belum SP Online dan yang sudah SP Online namun perlu dicacah ulang menggunakan kuesioner SP2020-C1.

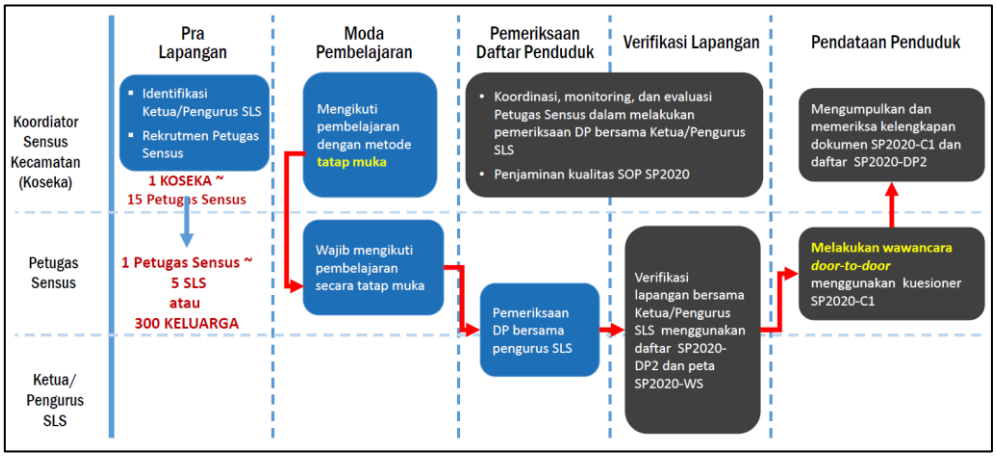

Gambar 11 Tahapan Proses Bisnis Sensus Penduduk 2020 September pada Zona 3

1.4 Pengadaan Instrumen dan Perlengkapan Pendukung

1.4.1 Pencetakan Instrumen

Instrumen SP2020 berupa kuesioner *scanner* dan kuesioner *non scanner*, boks, dan buku pedoman. Pengadaan kuesioner serta boks dilaksanakan oleh BPS Provinsi di wilayah PAPI pada tahun anggaran 2019. Proses pengadaan pencetakan instrumen SP2020 yang menggunakan strategi konsolidasi pengadaan pertama kali dilakukan oleh BPS berdasarkan rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 10200/D.41/09/2019 tanggal 18 September 2019.

Pengadaan instrumen dialokasikan untuk: 1) peserta pelatihan Inda yang terdiri dari calon Inda, Koseka, dan petugas *Task Force*; 2) peserta pelatihan petugas yang terdiri dari Petugas Sensus dan Koseka; 3) pelaksanaan lapangan; dan 4) cadangan di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota). Setelah pencetakan, pengiriman instrumen dilaksanakan dengan masa 60 hari kalender sejak tanda tangan kontrak (berakhir Desember 2019).

https://www.bps.go.id

1.4.2 Pengadaan Perlengkapan

Perlengkapan petugas terdiri dari rompi, tas, topi, *ballpoint*, pensil, pisau peruncing, penghapus, *name tag*/ID *card* petugas, *block note,* dan papan jalan yang dialokasikan untuk peserta pelatihan Inda, pelatihan petugas, dan cadangan (BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota). Pengadaan perlengkapan petugas SP2020 pada tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana juga pengadaan instrumen, menggunakan strategi konsolidasi pengadaan sesuai rekomendasi LKPP.

Pembagian *itemized* tender untuk mendapatkan tiga pemenang yang akan melaksanakan pengadaan 418.999 buah tas beserta ATK sebagai berikut:

Tabel 6 Pembagian Itemized Tender Pengadaan Perlengkapan SP2020

Pembagian Itemized	Jumlah Provinsi	Volume (Pcs)
(1)	(2)	(3)
Kelompok Wilayah 1	9 Provinsi	140.217
Kelompok Wilayah 2	14 Provinsi	139.336
Kelompok Wilayah 3	11 Provinsi	139.446

1.4.3 Pengiriman dan Penyimpanan Logistik

Pengiriman perlengkapan petugas SP2020 dari penyedia bervariasi, ada yang franco BPS Provinsi ada juga franco gudang BPS Provinsi dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender sejak tanda tangan kontrak (berakhir Desember 2019). Mengingat instrumen dan perlengkapan petugas SP2020 diadakan tahun 2019, namun penggunaannya baru pada pertengahan tahun 2020, maka harus dicatat sebagai Aset Lancar Barang Persediaan pada laporan keuangan BPS Tahun Aanggaran 2019. Volume yang besar dan keharusan menjaga agar tidak terjadi kerusakan memerlukan tempat penyimpanan besar dan terhindar dari risiko rusak yang disebabkan jamur, ngengat, maupun banjir. Kantor BPS Provinsi yang tidak memiliki ruang penyimpanan yang cukup, sehingga melakukan sewa gudang untuk melakukan penyimpanan logistik SP2020.

1.5 Publisitas dan Dukungan terhadap *Short Form* SP2020

Keberhasilan SP2020 membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam proses sosialisasinya. Berbagai bentuk sosialisasi dirancang oleh BPS untuk meningkatkan awareness masyarakat agar *response rate* dan kualitas data meningkat. Adapun bentuk sosialisasi SP2020 adalah sebagai berikut:

https://www.bps.go.id

1.5.1 Apel Siaga SP2020

Apel Siaga SP2020 memiliki tiga tujuan, yaitu 1) sebagai tanda formal statemen kesiapan BPS dalam penyelenggaraan SP2020; 2) sebagai bukti komitmen bagi seluruh insan BPS untuk secara aktif, kompak, dan serempak dalam menyukseskan SP2020; dan 3) sebagai wujud kesiapan BPS untuk melaksanakan SP2020.

Apel siaga SP2020 dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan. Pertama, apel siaga dengan audience dari internal BPS (Pusat). Apel ini diikuti oleh sebanyak 1.600 peserta, dan kepada seluruh peserta diberikan perlengkapan berupa kaos bertuliskan #MencatatIndonesia. Kedua, apel siaga yang diperuntukkan kepada stakeholder terkait yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Forum Kesestamaan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apel ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga sebanyak 400 peserta, dan kepada seluruh peserta juga diberikan perlengkapan berupa kaos #MencatatIndonesia. Pelaksanaan Apel Siaga SP2020 intenal dilakukan pada 14 Februari 2020 di lapangan parkir BPS (Pusat), dihadiri oleh seluruh pegawai.

1.5.2 *Monitoring* dan Analisis Reputasi SP2020

Di era digital ini arus informasi beredar begitu deras. Namun tak semua informasi yang beredar itu benar atau disebut hoax. Ketika sebuah informasi salah tapi dikabarkan secara berulang-ulang maka publik bisa menganggapnya sebuah kebenaran. Tidak menutup kemungkinan SP2020, sebagai kegiatan yang besar dan hanya terjadi 10 tahun sekali, disisipi konten hoax dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan analisis reputasi terkait informasi SP2020 yang beredar di masyarakat. Monitoring dan analisis reputasi memerlukan pihak ketiga yang berpengalaman dan kompeten di bidang tersebut yang mampu mendeskripsikan secara visual kabar, sentimen, maupun opini tentang SP2020 dan melakukan analisis. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menentukan langkah komunikasi yang diperlukan selanjutnya. Dalam hal ini BPS merekrut Astramaya atau yang lebih dikenal dengan nama Drone Emprit menjadi pihak ketiga yang melakukan monitoring dunia maya (media online dan media sosial) secara real time selama periode pendataan berlangsung. Hasil monitoring dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu monitoring media online dan monitoring sosial media. Dari hasil monitoring dilakukan analisis lebih mendalam yang tertuang dalam laporan harian.

https://www.bps.go.id

1.5.3 Publisitas di Media Elektronik, Media Cetak, Media Sosial, dan Lainnya

Publisitas SP2020 di televisi (TV) dilakukan dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM), *talkshow*, liputan *on news*, *blocking segment*, dan kuis. Pemilihan channel TV mempertimbangkan keterwakilan pada masing-masing kategori TV pemerintah, TV berita, dan TV Hiburan serta memperhatikan *rating*, *share*, banyaknya transmisi, dan *coverage* area tayang. Pada tahun 2020, publisitas SP2020 ditayangkan di 15 saluran TV tidak berbayar (TVRI, RCTI, GTV, MNC TV, iNews, SCTV, Indosiar, ANTV, TV One, Metro TV, Trans7, TransTV, RTV, Kompas TV, dan NET TV).

Radio juga merupakan salah satu media publisitas SP2020. Di tengah derasnya arus informasi melalui internet, radio masih memiliki kekuatan dibanding media lainnya, yaitu dari unsur 'kedekatan' dengan pendengar. Informasi yang disebarkan memuat informasi tentang tujuan dan manfaat kegiatan SP2020 dengan harapan agar masyarakat mau didata, sekaligus menciptakan branding SP2020 kepada masyarakat. Segmen yang disasar adalah seluruh masyarakat Indonesia dimana publisitas dibuat dalam berbagai versi agar bisa mewakili beragamnya responden SP2020. Delapan radio tersebut, antara lain: Prambors, Gen, Elshinta, Kantor Berita (KBR), POP, Iradio, Radio Dangdut Indonesia (RDI) serta radio RRI Pro3. Iklan SP2020

di media radio melalui radio *spot* dan *adlibs* yang disiarkan di acara-acara pilihan pendengar (acara dengan jumlah pendengar banyak) dan pada *prime time*.

Tak hanya di media elektronik, media cetak seperti koran dan majalah pun masih memiliki kekuatan tersendiri sebagai media publisitas SP2020. Media cetak mempunyai daya tarik visual, mudah diakses, dan harganya tidak terlalu mahal. Pesan dalam media cetak dapat dinikmati kapan saja sehingga informasi yang ada di dalamnya tidak cepat hilang dan dapat dibaca lagi berulang-ulang. Pemasaran melalui media cetak disampaikan dalam bentuk berita atau iklan. Beberapa media cetak yang dipilih antara lain Jawa Pos, Suara Merdeka, Pos Kota, The Jakarta Post, Republika, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, Kompas, dan Majalah Tempo. Iklan yang ditayangkan dalam media cetak dibagi menjadi dua, yakni dalam bentuk advertorial dan *display*. Advertorial berarti konten yang ditampilkan berupa artikel tentang SP2020, sedangkan iklan *display* menampilkan informasi terkait SP2020 dalam bentuk poster ataupun *banner*.

Kemudian, BPS juga menggunakan media sosial dalam menyosialisasikan kegiatan-kegiatannya ataupun untuk memberikan informasi terkait data-data terkait statistik. Media sosial dirasa sebagai media yang cukup efektif dan efisien karena selain lebih hemat biaya, media sosial juga mampu menjangkau khalayak secara luas. Publisitas di media sosial sudah dilakukan jauh sebelum pelaksanaan SP2020 di tahun 2020. Namun, sosialisasi terkait pelaksanaan SP Online di media sosial BPS pun semakin gencar dilakukan selama periode Januari-Juni, baik di Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Rubrik yang disajikan setiap harinya bervariasi, salah duanya Rabu SP (#RabuSP) dan Kreasi Negeri (#KreasiNegeri). Konten yang diunggah pun beragam, tidak hanya berupa banner/poster, tetapi juga berupa video dan quiz/games yang masih berhubungan dengan Sensus Penduduk.

https://www.bps.go.id

1.5.4 Publisitas di Bioskop

Sosialisasi SP2020 juga dilakukan di bioskop karena salah satu target dalam iklan SP Online adalah menyasar penduduk dengan status ekonomi menengah. Diasumsikan bahwa rata-rata pengunjung bioskop adalah penduduk dengan status ekonomi menengah.

Berdasarkan data dari indonesia.go.id, jumlah penonton di bioskop meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi peluang publisitas yang tidak boleh disia-siakan. Menurut filmindonesia.or.id, Cinema 21 merupakan grup bioskop terbesar dengan jumlah layar terbanyak di Indonesia. Ini berarti peluang jangkauan iklan ILM untuk menyasar masyarakat akan lebih besar dengan memasang iklan di Cinema 21.

Penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop ditayangkan setiap hari selama 31 hari terhitung mulai tanggal 1 s.d. 31 Maret 2020, di delapan bioskop (Summarecon

Bekasi XXI, Mega Bekasi XXI, Kelapa Gading XXI, Kemang Village XXI, AEON Mall BSD City XXI, CBD Ciledug XXI, Cibinong City XXI, dan Botani Square XXI).

1.5.5 Publisitas di Alat Transportasi

Alat transportasi massal menjadi media yang efektif dalam melakukan publisitas SP2020. Dilihat dari jenisnya, iklan di sarana transportasi publik mencapai jangkauan tinggi yakni 45 persen konsumen menyatakan bahwa mereka melihat iklan di media tersebut dalam satu minggu terakhir sebanyak 9 kali, sedangkan pada transportasi pribadi sebanyak 32 persen konsumen menyatakan bahwa melihat iklan di media tersebut dalam satu minggu terakhir sebanyak 8 kali. Terdapat tiga jenis transportasi massal yang ada di Jabodetabek: kereta listrik komuter (c*ommuter line*); bus Trans Jakarta; Mass Rapid Transit (MRT). Dilihat dari jumlah penumpang, maka transportasi commuter line dipilih untuk menayangkan iklan SP2020.

1.5.6 Publisitas di Bandara

Berdasarkan data BPS, total pergerakan penumpang (keberangkatan, kedatangan, dan transit) di seluruh bandara di Indonesia tahun 2018 mencapai 206,58 juta orang untuk penumpang domestik dan 35,94 juta orang untuk penumpang internasional (bps.go.id). Dengan Soekarno-Hatta Cengkareng menjadi bandara yang memiliki lalu lintas tertinggi di Indonesia, dengan jumlah penumpang 19,27 juta orang selama 2019 (bps.go.id).

Berdasarkan data rilis terbaru Airport Council International (ACI), pada tahun 2018, Bandara Soekarno-Hatta juga termasuk ke dalam salah satu dari 20 bandara tersibuk di dunia yakni mobilitas masyarakat pada bandara tersebut sangat tinggi. Karena itu, Bandara Soekarno-Hatta dipilih untuk menjadi salah satu lokasi penayangan ILM SP2020.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konten ILM dirancang dengan berbagai variasi untuk setiap segmentasi (media, usia, jenis kelamin, latar pendidikan, dan latar belakang ekonomi calon responden SP2020). Lokasi penempatan juga akan dikonsentrasikan di Jakarta, mengingat kota-kota besar lainnya untuk sosialisasi SP2020 telah dilakukan oleh BPS provinsi/kota/kabupaten terkait.

https://www.bps.go.id

1.5.7 Publisitas di Media Luar Ruang

Media luar ruang merupakan media yang diletakkan di luar ruangan yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan promosi pada suatu jasa. Meski jangkauanya tidak seluas media elektronik dan media cetak, tetapi media luar ruang seperti spanduk, baliho, reklame, iklan bus, atau kereta api, electronic board, bendera dan umbul-umbul, balon dan iklan pohon cukup memberi pengaruh pada orang yang berlalu lalang atau yang melihat media tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, penayangan media luar ruang harus mempertimbangkan lokasi yang strategis, Dalam hal ini, Jakarta dipilih sebagai tempat pemasangan billboard. Adapun sebagaimana telah dijelaskan, konten ILM dirancang dengan berbagai variasi untuk masing-masing segmentasi yang dibuat, yaitu berdasarkan media, usia, jenis kelamin, dan latar pendidikan, calon responden SP2020.

Tidak hanya di luar BPS, gelaran sensus penduduk tiap 10 tahun sekali ini juga harus terlihat dan terasa semaraknya di BPS. Selain untuk kalangan internal, informasi yang dipasang ditujukan untuk para tamu yang berkunjung ke kantor BPS.

https://www.bps.go.id

1.5.8 Aneka Lomba Publisitas

Dalam rangka sosialisasi SP2020, BPS juga mengadakan beberapa lomba. Selama pandemi, kegiatan publisitas yang biasanya dilakukan secara fisik dengan menghadirkan banyak orang dan harus berkumpul pada satu tempat tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, BPS mencoba membuat terobosan dengan membuat publisitas yang dikemas dalam bentuk lomba secara digital. BPS menggandeng Gen FM untuk melaksanakan lomba karaoke theme song SP2020 dengan harapan dapat menarik perhatian masyarakat yang lebih luas karena jumlah pendengar usia muda Gen FM termasuk yang terbesar.

Oleh Gen FM acar ini diberi nama Lomba Karaoke Jingle SP2020 dan dilakukan di kanal instagram Gen FM secara live yang dipandu oleh penyiar. Lomba ini diadakan mulai 19 s.d. 31 Maret 2020. Acara tersebut juga dipromosikan secara berkala melalui IG Feed dan Story Gen FM.

Perjalanan Mencatat Indonesia dalam pelaksanaan SP2020 pastinya menorehkan banyak cerita. Berbagai kisah itu perlu didokumentasikan agar tetap abadi. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan untuk mendokumentasikan hal tersebut adalah melaksanakan lomba. Lomba diperuntukkan bagi Petugas Sensus SP2020 (Petugas Lapangan dan Koseka). Seluruh Petugas Sensus mendapat kesempatan yang sama untuk meraih hadiah dan sertifikat bagi para pemenang.

1.5.9 Produksi Konten

Dewasa ini, video telah menjelma menjadi jenis konten yang sangat populer di dunia digital. Meningkatnya kepopuleran video di kalangan masyarakat pun membuat permintaan video semakin besar. Di tahun 2019, Hubspot mencatat 54% audiens lebih tertarik dan ingin mencari tahu lebih banyak soal suatu produk lewat konten berbentuk video (utamanya video advertising).

Karena itu, sosialisasi SP2020 juga disampaikan melalui pesan dalam format video pendek. Konten video lebih menarik karena terdapat kombinasi audio dan visual yang dapat memanjakan mata. Terlebih ketika *talen*t dalam video adalah *public figure* yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yang memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk dan mengarahkan opini di masyarakat.

1.5.10 Pemanfaatan *WhatsApp Group* (WAG)

Whatsapp atau lebih dikenal dengan WA merupakan platform media sosial yang menduduki posisi tertinggi kedua yang diakses oleh penduduk Indonesia. Menurut We Are Social, persentase pengguna WA di tahun 2020 mencapai 84 persen.

Tak salah jika media sosial ini menjadi salah satu kanal untuk menyebarluaskan SP2020. Ditambah lagi dengan adanya fasilitas Whatsapp Group (WAG) yang memberikan kesempatan lebih luas.

Konten yang disampaikan melalui WAG utamanya bersumber dari publisitas yang ditayangkan di media sosial. Penanggung jawab dari Humas BPS menyebarluaskan ke WAG-WAG yang berisi pegawai BPS di seluruh Indonesia dan pegawai non BPS. Selanjutnya para anggota grup diharapkan ikut menyebarluaskan informasi ke grup lainnya. Praktik ini terbukti cukup ampuh mengingat beberapa konten WAG tersebar hingga Ketua RT dan grup RT.

https://www.bps.go.id

1.5.11 *Social Media Center*

Interaksi masyarakat dan pemerintah di media sosial (medsos) kian populer ketimbang call centre sehingga membuat Bagian Humas BPS berinisiatif untuk membuat Media Sosial (Medsos) Centre. Medsos centre dibentuk dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan tim di media sosial mengenai pertanyaan yang sering muncul dan satu kata dalam menjawab pertanyaan yang masuk.

Tim Medsos Centre selama pelaksanaan SP September bertugas untuk mengorganisasi seluruh konten dan percakapan pad empat media sosial yang dikelola BPS yakni Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

1.5.12 Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri

Salah satu bentuk dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ikut menyosialisasikan SP2020 adalah surat edaran. Surat edaran dari Kemendagri tersebut memuat informasi mengenai tahapan besar pelaksanaan dari sensus penduduk sebagai berikut:

1. Sensus Penduduk Online

Sensus Penduduk Online memerlukan partisipasi aktif seluruh penduduk Indonesia untuk memutakhirkan data kependudukan secara mandiri melalui alamat website: http://sensus.bps.go.id. Kegiatan SP Online diselenggarakan pada 15 Februari s.d 31 Maret 2020. Pada tahapan ini, peran pemerintah daerah dan jajaran sampai ke tingkat Ketua RT/RW/ Dusun/nama lainnya (dan satuan lingkungan setempat kecil lainnya) menjadi sangat penting untuk menginformasikan kegiatan SP2020 dan mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam SP Online.

2. Sensus Penduduk Wawancara

Sensus Penduduk Wawancara merupakan kegiatan lanjutan SP2020 pada bulan Juli 2020. Pada tahap ini, petugas sensus bersama ketua atau pengurus RT/RT/Dusun/nama lainnya melakukan kegiatan verifikasi keberadaaan setiap penduduk dan penyisiran seluruh warga di masing-masing wilayah, agar tidak ada satupun penduduk yang terlewat Selanjutnya petugas sensus melakukan wawancara kepada penduduk yang belum berpartisipasi pada SP Online.

Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) mengimbau Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah beserta aparatnya dan ketua Satuan Lingkungan Setempat terkecil (RT/RW/Dusun/Nama lainnya) untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan SP2020 dalam bentuk:

a. Membantu menyosialisasikan dan mengajak seluruh jajaran di lingkungan kantor masing-masing serta penduduk di wilayahnya untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan SP online.
b. Mengimbau seluruh jajaran di wilayahnya untuk membantu petugas sensus pada saat pelaksanaan tahapan verifikasi lapangan dan sensus penduduk wawancara.

https://www.bps.go.id

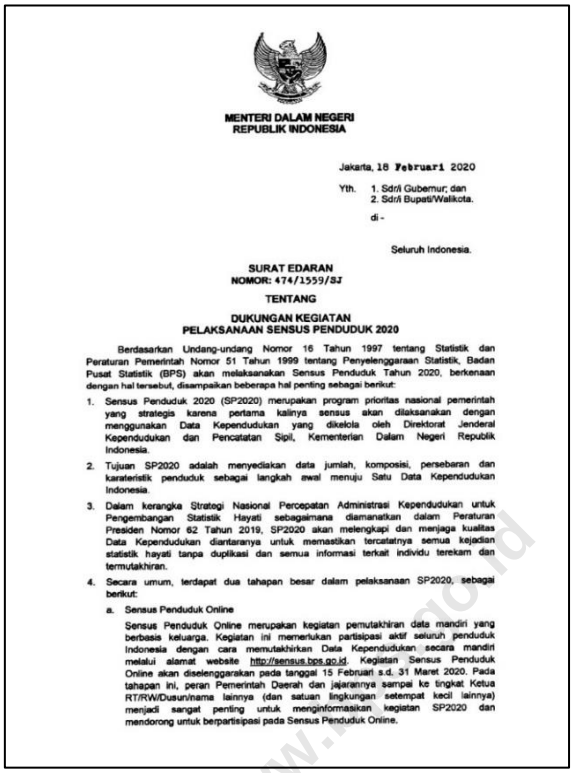

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Februari 2020

Yth. 1. Sdr/i Gubernur; dan
2. Sdr/i Bupati/Walikota.

di -

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: 474/1559/SJ

TENTANG

DUKUNGAN KEGIATAN
PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 2020

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Penduduk Tahun 2020, berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan program prioritas nasional pemerintah yang strategis karena pertama kalinya sensus akan dilaksanakan dengan menggunakan Data Kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Tujuan SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, persebaran dan karateristik penduduk sebagai langkah awal menuju Satu Data Kependudukan Indonesia.
3. Dalam kerangka Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019, SP2020 akan melengkapi dan menjaga kualitas Data Kependudukan diantaranya untuk memastikan tercatatnya semua kejadian statistik hayati tanpa duplikasi dan semua informasi terkait individu terekam dan termutakhiran.
4. Secara umum, terdapat dua tahapan besar dalam pelaksanaan SP2020, sebagai berikut:
   a. Sensus Penduduk Online
      Sensus Penduduk Online merupakan kegiatan pemutakhiran data mandiri yang berbasis keluarga. Kegiatan ini memerlukan partisipasi aktif seluruh penduduk Indonesia dengan cara memutakhirkan Data Kependudukan secara mandiri melalui alamat website http://sensus.bps.go.id. Kegiatan Sensus Penduduk Online akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari s.d. 31 Maret 2020. Pada tahapan ini, peran Pemerintah Daerah dan jajaranya sampai ke tingkat Ketua RT/RW/Dusun/nama lainnya (dan satuan lingkungan setempat kecil lainnya) menjadi sangat penting untuk menginformasikan kegiatan SP2020 dan mendorong untuk berpartisipasi pada Sensus Penduduk Online.

Gambar 12 Surat Dukungan Menteri Dalam Negeri terhadap Pelaksanaan SP2020

https://www.bps.go.id

1.5.13 Surat Edaran Kementerian PAN RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo "mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan pendataan *Long Form* SP2020 dengan memastikan keikutsertaan dan mengisikan data secara tepat dan akurat. Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 14/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Dukungan Pelaksanaan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 dan Partisipasi Aktif Aparatur Sipil Negara".

Kementerian PAN RB memberikan dua syarat dukungan untuk kegiatan sensus penduduk bagi ASN untuk mendukung dan mensosialisasikan kegiatan sensus penduduk 2020 di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal dan membatu petugas yang akan mendata dilapangan disekitar lingkungan tempat ASN tinggal. Dengan dukungan ASN seluruh Indonesia akan memudahkan informasi kegiatan sensus ini sampai ke masyarakat. Sehingga nantinya petugas yang melakukan pendataan dilapangan sudah diketahui oleh warga dan mendapatkan kemudahan dalam mendata masyarakat.

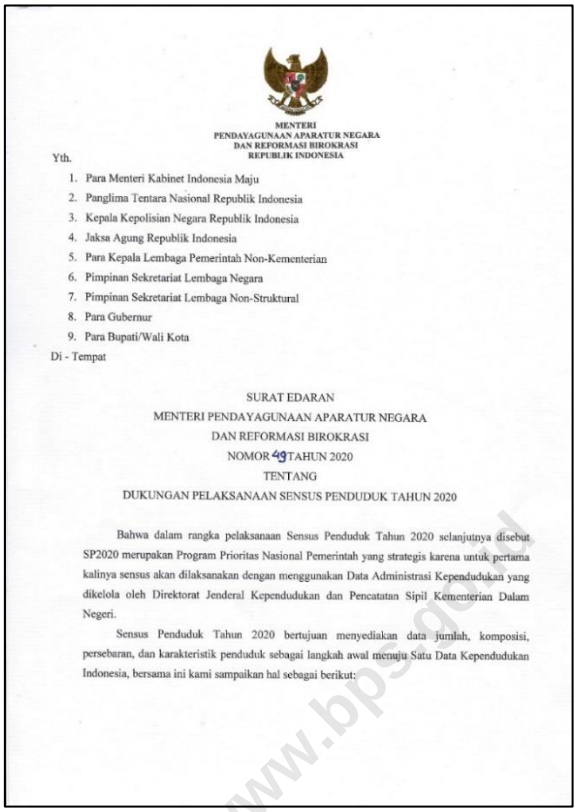

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Jaksa Agung Republik Indonesia
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
6. Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara
7. Pimpinan Sekretariat Lembaga Non-Struktural
8. Para Gubernur
9. Para Bupati/Wali Kota

Di - Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 selanjutnya disebut SP2020 merupakan Program Prioritas Nasional Pemerintah yang strategis karena untuk pertama kalinya sensus akan dilaksanakan dengan menggunakan Data Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Sensus Penduduk Tahun 2020 bertujuan menyediakan data jumlah, komposisi, persebaran, dan karakteristik penduduk sebagai langkah awal menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

Gambar 13 Surat Dukungan Menpan RB terhadap Pelaksanaan SP2020

https://www.bps.go.id

1.5.14 Komitmen Dukungan Kementerian/Lembaga

BPS membutuhkan kolaborasi dan dukungan oleh semua kementrian lembaga, BUMN dan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan pihak swasta untuk membantu menyosialisaikan kegiatan SP2020. Keterlibatan dan bantuan dari seluruh elemen bangsa ini diharapkan dapat turut menggaungkan SP2020 sehingga apabila ada petugas sensus yang datang mendata, masyarakat dengan tangan terbuka menerima petugas dengan baik dan memberikan jawaban yang benar.

Keterlibatan Kementerian, lembaga pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan organisasi international yang diwujudkan dalam bentuk komitmen dukungan untuk mendukung kegiatan SP2020 dan ada beberapa perjanjian kerjasama antara BPS dan K/L untuk mendukung pelaksanaan sensus SP2020.

Tabel 7 Daftar Institusi yang Menandatangani Komitmen Dukungan SP2020

NO	Nama K/L, Organisasi Keagamaan, Bumn, Organisasi Dan Undangan	Komitmen Dukungan	
		TTD	Paraf
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	√	
2	Kemenpar Bekraf	√	
3	Kemendikbud	√	
4	Kemenag	√	
5	KEMENDESA PDTT	√	
6	Kementerian Sosial RI	√	
7	Kemenkes	√	
8	Kemenlu	√	
9	Kemenko PMK	√	
10	Kemenkoperasi	√	
11	Kemenkeu	√	
12	Kemenpan RB	√	
13	BKPM	√	
14	Bappenas	√	
15	BPJS Ketenagakerjaan	√	
16	BPKP	√	
17	BKN	√	
18	BSN	√	
19	BPPT	√	
20	BKKBN		√
21	Dewan Ketahanan Nasional	√	
22	BRI syariah		√
23	Forstat	√	
24	Ombudsman	√	
25	Matakin	√	
26	LIPI	√	
27	RRI	√	
28	STMIK Muhammadiyah	√	
29	POLRI	√	
30	PT Pos Indonesia	√	
31	PT Pegadaian	√	
	JUMLAH	29	2

https://www.bps.go.id

Sebanyak lima Kementerian/Lembaga yang sudah menandatangani naskah MoU yaitu: Kemenko PMK, Ombudsman, Matakin, PT Pos Indonesia, dan PT Pegadaian. Sementara kementerian dan lembaga pemerintah, BUMN, Orgasisasi Keagamaan,

Organisasi Masyarakat yang sudah mendatangani komitmen dukungan ada sebanyak 29 unit. Dua Kementerian atau Lembaga, BKKBN dan BRI Syariah, hanya memberikan paraf komitmen dukungan. Empat kementerian atau lembaga yang tidak memberikan tanda tangan dan paraf Komitmen dukungan namun hadir dalam pertemuan, yaitu: KemenPUPR, KPPU, Kompas, dan Walubi dan ada dua kementerian atau lembaga yang tidak dapat hadir yaitu KPI dan Ristek.

1.6 Rencana Pendataan Wilayah Elit dan Apartemen

Petugas pendataan seringkali mengalami kesulitan untuk mewawancarai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah elit dan apartemen karena ketatnya sistem keamanan serta tingginya privasi dan mobilitas penghuninya. Sehingga disusunlah metodologi dan manajemen lapangan khusus untuk mendata penduduk yang bertempat tinggal di wilayah elit dan apartemen dengan tujuan untuk meningkatkan capaian respon penduduk di wilayah tersebut. Pelaksana mekanisme khusus pendataan wilayah elit dan apartemen ini adalah BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Statistik Bidang Sosial BPS provinsi dan diawasi oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI.

Tahapan kegiatan dimulai dengan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan perwakilan pengelola apartemen, dinas terkait serta asosiasi pengelola apartemen yang dilakukan pada periode SP Online atau setelah SP Online. BPS provinsi/kabupaten/kota memberikan gambaran umum pelaksanaan SP2020, "Ngibar" (Ngisi Bareng) SP Online dan penjelasan mengenai peran pengelola apartemen dalam pendataan SP2020 di apartemen. BPS menjelaskan tata cara pengisian aplikasi SP Online serta membantu jika terdapat kendala dalam pengisian data mandiri oleh penghuni apartemen.

Kesepakatan kerjasama juga dibuat dengan penyedia jasa untuk membantu BPS dalam melakukan sosialisasi SP2020 secara intensif di wilayah apartemen terkait. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media seperti Spanduk, Banner, Email Blast, Brosur/Flyer, TV Plasma, dan berbagai kegiatan pendukung lain seperti Posko/Booth, Bazar, Fun Bike, Demo Masak, yang mana kegiatan ini disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan dengan penyedia jasa.

1.7 Rencana Analisis

Rencana analisis yang dilakukan dari hasil *Short Form* 2020 berupa Analisis Profil Penduduk Nasional dan Analisis Profil Penduduk Provinsi yang disusun berdasarkan data dari SP2020-DP dan SP2020-C1. Kegiatan analisis diawali dengan penyusunan *Network Planning* pada tahun 2017, yang mencakup rangkaian kegiatan analisis

https://www.bps.go.id

SP2020 selama 2018 – 2022, rancangan anggaran, dan rancangan *output*. Seiring perjalanan rangkaian SP2020, terdapat penyesuaian jadwal kegiatan analisis karena penundaan pengumpulan data SP2020 pada masa pandemi Covid-19. Perubahan yang signifikan adalah kegiatan tahun 2020-2022. Analisis profil penduduk yang semula direncanakan terbit tahun 2021 akhirnya baru dapat direalisasikan tahun 2022. Sedangkan analisis tematik kependudukan yang semula direncanakan rilis tahun 2022 baru dapat direalisasikan tahun 2023. Berikut jadwal kegiatan analisis yang telah disesuaikan:

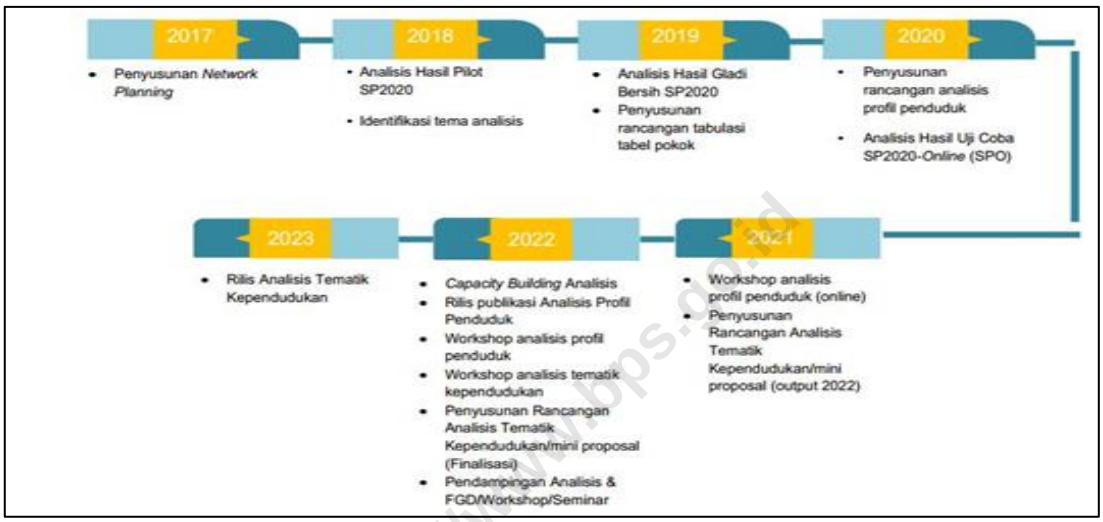

Gambar 14 Jadwal Kegiatan Analisis 2017-2023

https://www.bps.go.id

Merujuk dari hasil Pilot dan Gladi Bersih, tim analisis BPS Pusat mulai mengidentifikasi tema analisis. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan tujuan agar analisis yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Hasil Identifikasi Tema Analisis ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Tema Analisis Profil

Tema	Bahasan
(1)	(2)
Profil Anak	Pekerja Anak dan Pendidikan Jarak Kelahiran Anak Pencapaian Registrasi NIK terhadap Tingkat Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat
Profil Lansia	Pekerja Landia dan Faktor-faktornya
Profil Usia Produktif	Spatial Analysis Migran Suburbia-Post Suburbia Tren Usia KRT/Pasangan Pemberdayaan Gender Persebaran dan Pertumbuhan Migran Suku Jawa di Indonesia

Dalam upaya menghasilkan publikasi analisis profil penduduk yang berkualitas, Tim Analisis BPS Pusat melaksanakan workshop analisis profil penduduk. *Workshop* ini diikuti oleh tim analisis BPS Pusat dan Daerah, serta *subjectmatter* terkait. *Workshop* ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2021 secara online melalui Zoom dan pada tahun 2022 secara tatap muka di Bandung.

Gambar 15 Workshop Analisis Profil Tahun 2022 dengan Narasumber Atalia Praratya Ridwan Kamil

Upaya pematangan analisis profil penduduk diwujudkan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini dilaksanakan di BPS Provinsi dengan menggunakan anggaran yang dibebankan pada anggaran BPS Provinsi. Sedangkan tim analisis BPS Pusat mendampingi kegiatan ini dalam bentuk kegiatan supervisi dengan menggunakan anggaran BPS Pusat.

1.8 Rencana Diseminasi

Diseminasi data hasil SP2020 sangat berperan untuk memberikan fasilitas layanan data kepada berbagai segmen pengguna data hasil SP2020 dalam bentuk yang beragam seperti data dan metadata, website, event seminar/workshop/pameran, dan layanan data. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam persiapan diseminasi antara lain menyusun template yang akan digunakan untuk Publikasi Data Hasil SP2020, poster, brosur, leaflet, serta katalog dan lainnya. Seluruh produk dan kegiatan diseminasi statistik tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data hasil SP2020.

https://www.bps.go.id

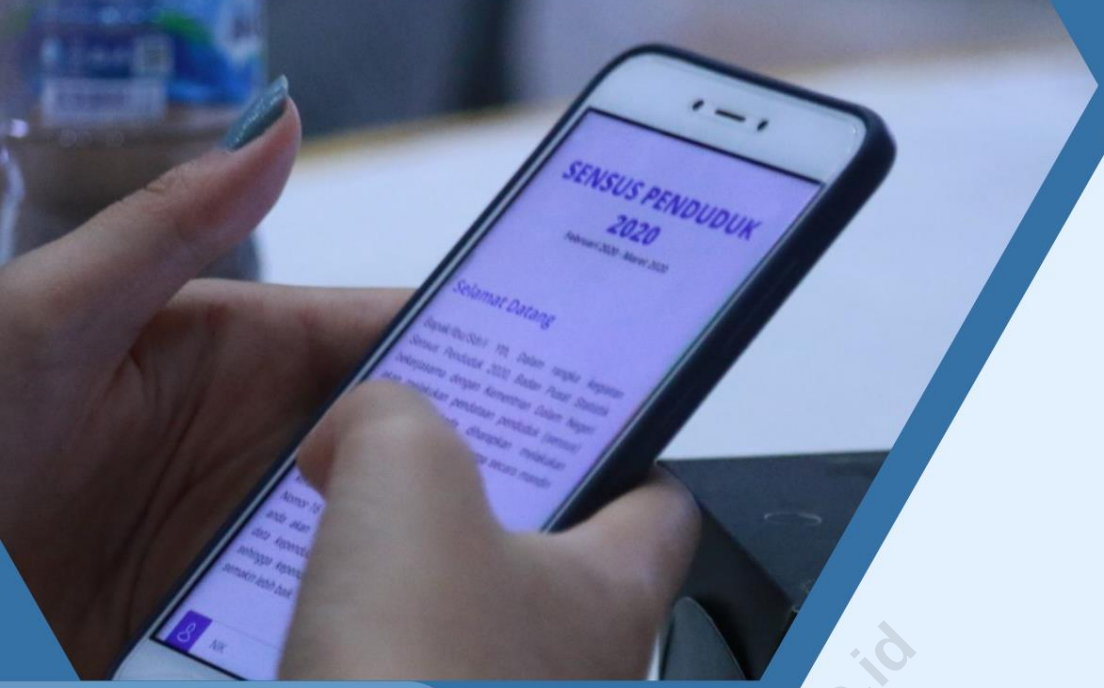

https://www.bps.go.id

BAB 2

PELAKSANAAN *SHORT FORM* SP2020

https://www.bps.go.id

BAB 2 PELAKSANAAN *SHORT FORM* SP2020

2.1 Sensus Penduduk Online

Dalam penyelenggaraan SP Online, BPS menggunakan *framework Integrated Collection Survey* (ICS). Mekanisme *login* yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 18.

Sensus Penduduk Online (SP Online) diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 2020. Masyarakat berpartisipasi dalam SP Online dengan melakukan pengisian data menggunakan moda *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI) melalui tautan sensus.bps.go.id. Sementara khusus untuk WNA, permintaan kode akses atau pertanyaan diajukan ke BPS melalui surel ke alamat joinsp2020@bps.go.id.

Adapun untuk mengakomodir pertanyaan dari masyarakat, BPS membangun *call center yang* dikelola secara mandiri dengan petugas berasal dari pegawai. Masyarakat dapat menghubungi petugas melalui *Public Switched Telephone Network* atau melalui *WhatsApp Call* atau melalui layanan *chat center* Tawk.to. Tak hanya itu, pertanyaan dan informasi seputar SP2020 dapat diakses melalui media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan YouTube resmi BPS atau mengirimkan surel ke alamat sp2020@bps.go.id.

https://www.bps.go.id

Gambar 16 Presiden RI Joko Widodo mengisi SP Online didampingi Kepala BPS Kecuk Suhariyanto

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan SP Online adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Ngisi Bareng "Ngibar" sebelum pandemi. Dalam hal ini, BPS mendapat dukungan dari Forum Pendidikan Tinggi Statistika (Forstat), Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia (IHMSI) dalam bentuk agen-agen sosialisasi dan pendampingan pada saat "Ngibar". Awalnya, SP Online dilaksanakan pada 15 Februari s.d 31 Maret 2020. Namun demikan, dikarenakan pandemi Covid-19, jadwalnya diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Setelah berlangsung selama 3,5 bulan, tercatat sebanyak 51,36 juta atau 19,05 persen penduduk berpartisipasi dalam SP Online.

"Ngibar" SP Online 2020 bersama Polda NTT

(19/03/2020) Bertempat di Aula Kantor Kepolisian Daerah Provinsi NTT puluhan personel Polda NTT berkumpul untuk melakukan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Penduduk Online 2020. Pengisian Sensus Penduduk Online secara bersama-sama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Wakil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTT dengan Kepala BPS Provinsi NTT sehari sebelumnya. Dipandu oleh Tim Mako SP2020 BPS NTT pengisian bersama ini berlangsung dengan dipenuhi antusias personel polda. Para personel tampak aktif dan tanggap dalam melakukan Pengisian Sensus Pendukduk Online 2020 tersebut. Dalam acara ini, hadir pula Kepala BPS Provinsi NTT bersama jajaran Kepala Bidang BPS Provinsi NTT.

Gambar 17 Ngibar SP Online di Provinsi NTT

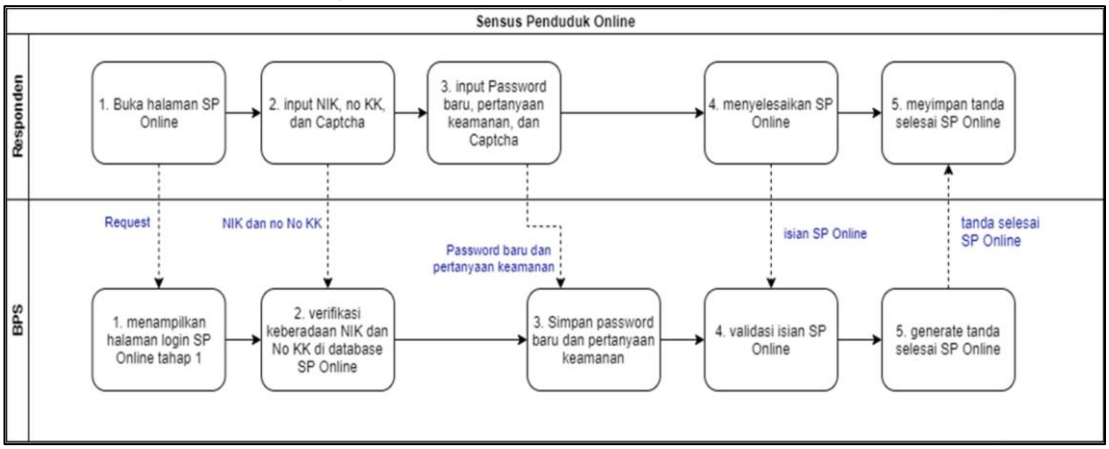

Gambar 18 Mekanisme *Login* SP Online

2.2 Sensus Penduduk September 2020

2.2.1 Pembelajaran Koseka dan Petugas Sensus

Pembelajaran Koseka

- Koseka di Zona 1 dan 2

Pelatihan atau pembelajaran untuk Koseka dilakukan dengan jarak jauh atau disebut sebagai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Peserta PJJ Koseka Zona 1 dan 2 adalah organik dan non organik yang telah direkrut oleh BPS Kabupaten/Kota di 33 provinsi. Metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan adalah melalui Kaizala, dan Googlemeet atau Zoom dan dilaksanakan dalam dua gelombang yaitu:

- Gelombang 1: 18 s.d. 19 Agustus 2020
- Gelombang 2: 24 s.d. 25 Agustus 202

Pada Zona 1 dan 2, pemahaman peserta diukur dengan kuis di setiap akhir sesi pembelajaran dan pendalaman materi di akhir pembelajaran.

- Koseka di Zona 3

Peserta dalam Pembelajaran Koseka dan Petugas Sensus di Zona 3 adalah organik dan non organik yang telah direkrut oleh BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat (kecuali Kota Jayapura). Pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Kelas dan gelombang Pembelajaran Koseka dan Petugas Sensus di Zona 3 menyesuaikan jumlah peserta di wilayahnya masing-masing yang diselenggarakan pada rentang 18 s.d. 25 Agustus 2020. Pada Zona 3 pemahaman peserta diukur dengan pendalaman materi di akhir pembelajaran Koseka dan Petugas Sensus.

https://www.bps.go.id

Pembelajaran Petugas Sensus

- Petugas Sensus di Zona 1 dan 2

Pembelajaran Petugas Sensus di Zona 1 dan 2 menggunakan metode pembelajaran mandiri yang dibantu berbagai media, yaitu:

- TVRI pada tanggal 26 s.d. 31 Agustus 2020. Petugas Sensus dapat memilih salah satu waktu untuk menonton tayangan dengan melaporkan ke Koseka masing-masing;
- RRI pada tanggal 31 Agustus s.d. 5 September 2020. Petugas Sensus dapat memilih salah satu waktu untuk mendengarkan siaran dengan melaporkan ke Koseka masing-masing dan sebelum kegiatan lapangan dimulai;
- Selain itu, agar Petugas Sensus dapat menyaksikan tayangan tersebut berulang-ulang, tim humas juga mengunggah konten pembelajaran SP2020 di media sosial Youtube BPS.

Selanjutnya, Koseka memimpin diskusi atau memberikan jawaban pada media komunikasi yang disepakati dengan Petugas Sensus terkait SP2020 pada periode kegiatan pembelajaran hingga lapangan. Kemudian di akhir diadakan pendalaman yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2020 untuk mengevaluasi pemahaman Petugas Sensus.

- Petugas Sensus di Zona 3

Pembelajaran Petugas Sensus di Zona 3 dengan metode pembelajaran tatap muka. Pada Zona 3, evaluasi pembelajaran peserta diukur dengan pendalaman materi di akhir pembelajaran bersama Koseka.

2.2.2 Pemeriksaan Daftar Penduduk

Kegiatan SP September 2020 diawali dengan pemeriksaan daftar penduduk oleh Petugas Sensus bersama dengan Ketua/Pengurus SLS atau warga yang ditunjuk, menggunakan daftar SP2020-DP1/daftar SP2020-DP2, dan daftar SP2020-DPD. Pemeriksaan dilakukan satu per satu terhadap penduduk yang terdaftar dalam SP2020-DP1/SP2020-DP2, kemudian memberikan tanda centang keberadaan penduduk sesuai dengan kondisi pada SLS tersebut. Petugas Sensus melakukan konfirmasi jenis kelamin/tahun lahir/NIK penduduk yang telah melakukan pengisian SP Online dengan status diragukan.

Petugas Sensus juga menanyakan keberadaan penduduk lain yang tinggal di SLS tersebut tetapi belum tercantum pada daftar SP2020-DP1/SP2020-DP2 dan menambahkannya pada daftar SP2020-DP1/SP2020-DP2 termasuk yang meninggal dan melengkapi informasinya. Jika terdapat daftar SP2020-DPD, maka Petugas Sensus juga harus mengkonfirmasi satu per satu keberadaan penduduk pada daftar tersebut. Apabila terdapat penduduk pada daftar SP2020-DPD yang dikenali oleh Ketua/Pengurus SLS atau warga yang ditunjuk dan tinggal di SLS tersebut, maka ditambahkan ke dalam daftar SP2020-DP1.

https://www.bps.go.id

Gambar 19 Pemeriksaan Daftar Penduduk bersama Ketua/Pengurus SLS

https://www.bps.go

2.2.3 Verifikasi Lapangan

Kegiatan verifikasi lapangan dilaksanakan setelah proses pemeriksaan daftar SP2020-DP1/SP2020-DP2 dan SP2020-DPD (jika ada) berdasarkan zona yang bersesuaian. Kegiatan ini dilakukan oleh Petugas Sensus dengan didampingi oleh Ketua/Pengurus SLS atau warga yang ditunjuk. Verifikasi lapangan dimulai dengan melakukan penelusuran wilayah SLS dan memastikan batas wilayah SLS menggunakan peta SP2020-WS. Petugas Sensus bersama Ketua/Pengurus SLS atau warga yang ditunjuk menentukan bangunan pertama yang akan dikunjungi, kemudian menggambar noktah dan memberikan nomor bangunan berpenghuni di peta SP2020-WS. Selanjutnya, menyalin nomor bangunan pada SP2020-DP1/SP2020-DP2 sesuai dengan penduduk yang tinggal pada bangunan tersebut.

Verifikasi lapangan pada zona 1 (DOPU) dilakukan pada penduduk yang tidak berpartisipasi dalam SP Online. Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar SP2020-DP1, Petugas Sensus bersama Ketua/Pengurus SLS atau warga yang ditunjuk mendatangi tempat tinggal penduduk yang nama atau keberadaannya diragukan. Kemudian dikonfirmasi mengenai jenis kelamin, tanggal lahir, atau NIK, serta informasi terkait anggota keluarga yang meninggal dunia. Selanjutnya, Petugas Sensus menyerahkan (*drop off*) kuesioner SP2020-C1 dan lembar pendamping SP2020-C1 kepada keluarga yang belum berpartisipasi dalam SP Online atau yang perlu didata ulang. Proses ini juga dilakukan pada zona 3 tetapi menggunakan daftar SP2020-DP2 tanpa menyerahkan (*drop off*) kuesioner SP2020-C1.

Sementara itu, verifikasi lapangan pada zona 2 (Non DOPU) dilakukan secara "*door to door*" kepada seluruh penduduk yang tinggal di setiap bangunan tempat tinggal. Petugas Sensus memverifikasi keberadaan setiap penduduk, menambahkan penduduk baru, memberikan nomor urut bangunan, menggambar noktah pada peta SP2020-WS, dan melengkapi alamat pada SP2020-DP2. Untuk Zona Khusus (zona merah atau daerah yang *lockdown)* verifikasi lapangan dilakukan bersama dengan Ketua/Pengurus SLS menggunakan daftar SP2020-DP1/SP2020-DP2 dan tidak secara *door to door*. Jika Ketua/Pengurus SLS tidak bersedia membantu/mengizinkan pelaksanaan SP2020 maka dibuat berita acara/surat pernyataan bahwa kegiatan pendataan penduduk tidak dapat dilaksanakan di wilayah tersebut.

2.2.4 Pendataan Penduduk

Pendataan penduduk dilakukan pada zona 1 DOPU (*Drop Off Pick Up*) dan zona 3 Wawancara. Pada zona 1 DOPU, Petugas Sensus atau dengan bantuan Ketua/Pengurus SLS mengambil kembali (*Pick Up*) dokumen SP2020-C1 yang telah diisi oleh responden. Pada zona 3 Wawancara, Petugas Sensus melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner SP2020-C1, sedangkan pada zona 2 (Non-DOPU) tidak dilakukan pendataan penduduk.

https://www.bps.go.id

Tahapan pendataan penduduk pada zona 1 DOPU antara lain; (1) Petugas Sensus mengambil (*pick up*) dokumen SP2020-C1 dari Ketua/pengurus SLS atau warga yang ditunjuk atau dari tempat tinggal penduduk; (2) Petugas Sensus mengupayakan semaksimal mungkin untuk memastikan kesesuaian jumlah penduduk pada dokumen SP2020-C1 dengan jumlah penduduk pada SP2020-DP1; (3) Petugas Sensus menyusun dokumen SP2020-C1 dalam satu SLS dan membuat rekapitulasinya ke dalam dokumen SP2020-RC1; dan (4) Ketua SLS melakukan pengesahan SP2020-DP1.

Adapun tahapan pendataan penduduk pada zona 3 Wawancara antara lain; (1) Petugas Sensus mengunjungi rumah penduduk yang belum mengisi SP *Online* atau yang sudah mengisi namun perlu didata ulang dan penduduk baru/penduduk tambahan; (2) Petugas Sensus melakukan wawancara tatap muka menggunakan dokumen SP2020-C1; (3) Petugas Sensus menyalin informasi penduduk baru yang ditemui ketika pendataan penduduk wawancara dari SP2020-C1 ke SP2020-DP2; (4) Petugas Sensus menyusun dokumen SP2020-C1 dalam satu SLS dan membuat rekapitulasinya ke dalam dokumen SP2020-RC1; dan (5) Ketua SLS melakukan pengesahan SP2020-DP2.

Daerah yang dikategorikan zona merah/daerah yang *lockdown* diberlakukan sebagai zona khusus yang dibuktikan dengan surat dari lembaga/pejabat yang

berwenang yang menerangkan bahwa wilayah tersebut merupakan zona merah/*lockdown*.

Gambar 20 Pelaksanaan Pendataan Penduduk Sensus Penduduk September 2020

Sementara itu, pada September 2020 juga dilakukan pendataan terhadap penduduk khusus; penduduk di wilayah elit dan apartemen; pendataan tunawisma dan awak kapal pada hari sensus; serta korps diplomatik dan TNI/POLRI yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri.

Pendataan Penduduk Khusus

Pendataan penduduk khusus meliputi penduduk yang belum tercakup pada data administrasi kependudukan atau penduduk yang terpencar bukan di wilayah administratif tempat ia terdaftar. Pendataan dilakukan dengan menggunakan kuesioner SP2020-TF oleh petugas *Task Force*.

Penduduk khusus meliputi anggota TNI, polisi, dan personel militer lainnya yang tinggal di barak militer atau *duty station*, mahasiswa serta santri perguruan tinggi di asrama, penduduk panti asuhan dan rumah sakit jiwa selama satu tahun atau lebih, narapidana dengan vonis satu tahun atau lebih, penghuni hunian sementara atau tenda, penghuni perahu atau yang hidup nomaden, penduduk di wilayah sulit dijangkau oleh petugas sensus, tahanan rumah tahanan, pengungsi atau WNA di Rumah Detensi Imigrasi, penduduk suku terasing, dan penghuni panti jompo, panti jiwa, dan panti lainnya yang tinggal selama satu tahun atau lebih.

Pendataan Tunawisma dan Awak Kapal

Pada hari sensus tanggal 15 September 2020 pukul 21.00 sampai dengan 16 September 2020 pukul 06.00 dilakukan pendataan penduduk yang 'ditemukan' secara defacto berada di wilayah territorial RI tetapi diduga kuat tidak di data di

https://www.bps.go

rumahtangga masing-masing, atau memang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tergolong dalam kelompok penduduk ini adalah awak kapal berbendera Indonesia yang tengah berlabuh dan penduduk tunawisma.

Pendataan tunawisma diawali dengan identifikasi lokasi pendataan oleh BPS kabupaten/kota berkoordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti: Dinas Sosial, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, petugas keamanan, dan lainnya. Pendataan dilakukan oleh Petugas *Task Force* dengan menggunakan Daftar SP2020-TF. Berbeda dengan tunaswisma, mekanisme pendataan awal kapal berbendera Indonesia dilakukan oleh Petugas *Task Force* BPS kabupaten/kota melalui koordinasi dengan petugas Pelabuhan dan dinas terkait.

Gambar 21 Pendataan Tuna Wisma dan Pendataan Awak Kapal Berbendera Indonesia

Pendataan Wilayah Elit dan Apartemen

Sistem keamanan yang ketat, privasi dan mobilitas penghuni yang tinggi di wilayah elit dan apartemen memerlukan mekanisme pendataan khusus. Pendataan wilayah elit dan apartemen dilaksanakan oleh pegawai BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Bidang Statistik Sosial BPS provinsi dan diawasi oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI. Terkait kesepakatan kerjasama yang dibuat dengan penyedia jasa dalam membantu BPS mensosialisasi SP2020, BPS provinsi/kabupaten/kota melakukan pengawasan untuk memastikan pengelola apartemen menjalankan SP2020 sesuai perjanjian kerjasama, memastikan data yang dikumpulkan lengkap dan

berkualitas, serta uji petik untuk mengecek kebenaran data yang diberikan oleh pengelola. BPS juga menyebarkan informasi mengenai sensus mandiri kepada penghuni apartemen dan membantu dalam pengisian sensus mandiri.

Pendataan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Pendataan anggota korps diplomatik dan TNI/POLRI yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri menggunakan email. Daftar email kedutaan diperoleh dari Kementerian Luar Negeri. BPS mengirim email kepada semua alamat, memberitahukan agar para diplomat dan TNI/POLRI mengisi kuesioner yang disiapkan dalam website.

Gambar 22 Rapat Koordinasi Pendataan Penduduk Indonesia di Luar Negeri secara Daring

2.3 Penjaminan Kualitas

Pada kegiatan SP September 2020 dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) sebagai *early warning system* dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi pada tahapan tertentu agar kesalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menyebar luas. PK SP2020 difokuskan untuk memeriksa SOP Petugas Sensus pada tahap awal pelaksanaan SP2020, yaitu pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan pada 1 (satu) SLS yang sudah terpilih menjadi sampel.

PK SP2020 dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota oleh Koseka yang sudah dilatih dengan menggunakan moda CAPI, kecuali 14 kabupaten/kota yang merupakan kabupaten pemekaran yang belum memiliki kantor BPS, *remote area,* wilayah tidak terjangkau sinyal telepon maupun internet, dan kantor BPS kabupaten/kota yang sedang melaksanakan WFH. PK SP2020 dilaksanakan secara serentak pada 4

September 2020, namun ada beberapa wilayah yang mengalami penyesuaian jadwal karena kendala administrasi dan atau teknis.

Semua dokumen hasil pendataan maupun sisa dokumen yang tidak terpakai (termasuk yang rusak) pada SP2020 dikumpulkan kembali ke BPS Kabupaten/Kota. Selanjutnya, BPS Kabupaten/Kota melaporkannya melalui Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Dokumen (SIPMEN).

2.4 Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan lapangan SP September 2020, BPS menyediakan *dashboard* SP2020 yang memuat berbagai macam informasi seperti progres pendataan SLS (belum dan sedang dikerjakan), progres dokumen (jumlah dokumen yang di *drop off* dan *pick up*), dan jumlah penduduk (penduduk menurut jenis kelamin, penduduk meninggal, penduduk yang bertempat tinggal sesuai KTP maupun yang tidak sesuai KTP). Selain itu, *dashboard* ini memuat informasi mengenai progres entri Daftar Penduduk (DP) yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota. Untuk mengurangi *load* data berlebihan terhadap *request* data dashboard, maka data yang ditampilkan pada dashboard diperbaharui secara berkala yaitu pada pukul 00.00 WIB setiap harinya.

Gambar 23 Menu Beranda *Dashboard* SP2020

https://www.bps.go.id

2.5 Pelaksanaan *Post Enumeration Survey* (PES)

Evaluasi kualitas data hasil SP2020 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan sensus. Dalam rangka mengukur kesalahan *non sampling* pada pelaksanaan SP2020, BPS melakukan evaluasi melalui *Post Enumeration Survey* (PES) yang dilaksanakan secara independen terhadap sensus. PES SP2020 dilaksanakan di 75 kabupaten/kota yang tersebar di 27 provinsi. Pendataan PES SP2020 dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober – 15 November 2020 yang mencakup penduduk yang bertempat tinggal tetap, termasuk pengungsi yang bertempat tinggal lebih dari satu tahun di SLS terpilih. Metode pendataan PES SP2020 adalah wawancara *(interview*) menggunakan CAPI dan melalui telepon atau *Computer Assisted Telephone Interviewing* (CATI). Dalam kegiatan lapangan PES SP2020, admin kabupaten/kota, admin provinsi, dan admin pusat dapat memantau progress pendataan lapangan pada *web monitoring*.

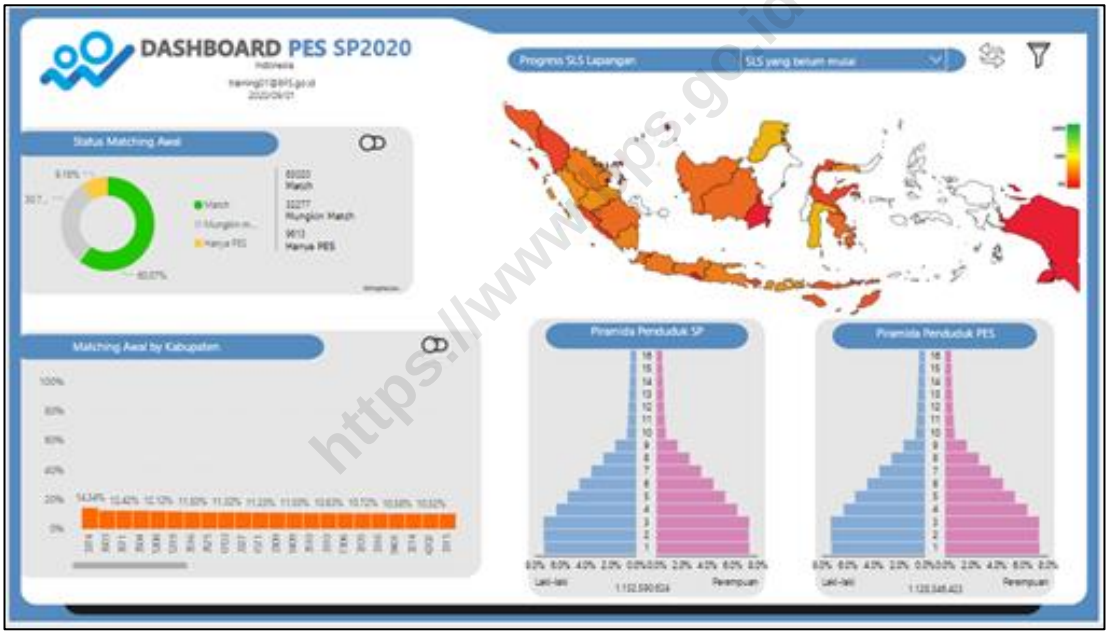

Gambar 24 Tampilan *Dashboard Monitoring* PES SP2020

2.6 Kajian Kualitatif *Short Form* SP2020

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh BPS pada rangkaian sensus kali ini yaitu dengan adanya Kajian Kualitatif *Short Form* SP2020. Hal ini menjadi sesuatu yang berbeda karena BPS yang selama ini identik dengan penyediaan data-data statistik mulai melihat dan menganggap bahwa cerita di balik angka-angka menjadi sesuatu yang penting dan menarik untuk didalami. Sehingga, kajian ini ditujukan untuk memperkaya data-data statistik yang dihasilkan dari sensus penduduk. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, untuk pertama kalinya, BPS berkolaborasi

dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kajian kualitatif yang bertemakan "Pandemi Covid-19 dari Perspektif Sosial Demografi".

Kolaborasi riset ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai pandemi Covid-19 dilihat dari perspektif sosial demografi. Riset ini ditujukan untuk mendukung penyusunan kebijakan pada masa pandemi maupun mempersiapkan kemungkinan akan datangnya kejadian yang sama di masa yang akan datang. Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa analisis sosial demografi harus dipertimbangkan untuk memahami pandemi Covid-19 sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penanganan sebaran kasus (Balbo dkk., 2020; Kalabikhina, 2020). Kemudian, dalam konteks evaluasi kebijakan pandemi tentang penyebaran Covid-19 dan dampak dari tindakan *lockdown* atau pembatasan mobilitas penduduk, dibutuhkan analisis menyeluruh melampaui indikator kesehatan semata (Balbo dkk., 2020). Kajian kualitatif ini juga ditujukan untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk 2020 *Long Form* yang diselenggarakan pada tahun 2022 yang akan mengumpulkan data penduduk lebih detail terkait dengan parameter demografi.

Atas dasar semangat kolaborasi dan kerja bersama, penelitian ini berjumlahkan 48 orang yang berasal dari BPS dan BRIN. Keanggotaan penelitian Analisis Tema Khusus Sensus Penduduk 2020 terdiri dari 24 peneliti yang berasal dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora-Badan Riset dan Inovasi Nasional (IPSH-BRIN) dan 24 orang dari Badan Pusat Statistik (BPS) baik dari statistisi maupun fungsional peneliti. Pelaksanaan penelitian terdiri dari enam tahapan, yakni (1) studi kepustakaan dan finalisasi penyusunan proposal; (2) penyusunan instrumen penelitian; (3) pengumpulan data lapangan; (4) pengolahan dan analisis data lapangan; (5) penyusunan kertas kerja (*working paper*); (6) diseminasi hasil penelitian.

https://www.bps.go.id

Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2021. Namun demikian, proses penyusunan proposal, instrumen penelitian dan persoalan administrasi terkait dengan kerja sama antar kedua lembaga telah dilakukan oleh Tim Peneliti BRIN sejak bulan Februari. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penanggung jawab kegiatan keseluruhan berada di Pusat Riset Kependudukan-BRIN. Hal menarik dalam kajian ini adalah adanya *transfer knowledge* mengenai riset kualitatif pada para statistisi dan peneliti yang ada di BPS dan begitupun sebaliknya, rekan dari BPS memberikan pengetahuannya pada peneliti BRIN tentang data-data statistik yang terkait dengan isu yang didalami.

Pelaksanaan riset kualitatif dalam situasi pandemi dihadapkan pada berbagai tantangan. Apalagi kegiatan lapangan (*fieldwork*) dilakukan saat kasus Covid-19 mengalami peningkatan dengan masuknya varian baru yaitu delta yang lebih mudah menular sehingga penyebaran jauh lebih cepat. Pada saat itu, mobilitas ke luar dari wilayah domisili diijinkan dengan beberapa persyaratan ketat sehingga

Tim peneliti tetap dapat melakukan riset ke-12 lokasi terpilih. Akan tetapi, tim peneliti dihadapkan pada situasi rentan tertular serta menularkan karena melakukan perjalanan. Selain itu, tim peneliti juga dihadapkan pada tantangan agar dapat diterima untuk melakukan pengumpulan data oleh para informan atau masyarakat di lokasi penelitian. Terlebih beberapa lokasi terpilih karena keberadaan masyarakat adat yang mana tim peneliti harus memastikan tidak membawa virus corona, namun juga memiliki kesulitan untuk dapat bertahan melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan rutin karena seringkali hal ini menjadi kendala untuk membangun kepercayaan mereka agar dapat diwawancarai.

Kunci Keberhasilan Analisis Tema Khusus SP2020

Tidak dapat dipungkiri bahwa sinergi kedua lembaga, baik BPS maupun BRIN untuk mensukseskan kegiatan riset ini sangatlah baik. Kolaborasi riset ini baru pertama kali dilakukan oleh kedua lembaga, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan sebuah riset kualitatif yang berkualitas dan terciptanya transfer pengetahuan yang menjadi salah satu ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama (PKS). Sementara itu, proses adaptasi dalam cara bekerja dan berpikir yang cenderung berbeda antara peneliti BRIN dengan statistisi serta peneliti BPS dapat berjalan dengan baik meski pada awalnya dihadapkan oleh berbagai tantangan. Maka dari itu, proses kolaborasi ini dianggap penting untuk didokumentasikan dengan baik dan menarik dalam sebuah video dokumenter. Video ini (https://www.youtube.com/watch?v=dNrtJiFXZlk) merupakan salah satu *output* yang disajikan dalam kegiatan diseminasi.

Secara umum, terdapat enam hal utama yang menjadi kunci kesuksesan kajian kualitatif ini, antara lain:

1. Perencanaan yang dimulai sejak dini. Meskipun penandatanganan perjanjian kerja sama di tengah tahun 2021 (Juni) dimana waktu riset tersisa 6 bulan sampai akhir tahun anggaran, namun Tim peneliti dari BRIN telah mempersiapkan kegiatan riset sejak awal tahun mengingat kegiatan riset membutuhkan perencanaan yang matang baik dari sisi substansi maupun administrasi. Hubungan baik yang terjalin antara kedua lembaga menjadi salah satu faktor proses penyusunan rencana riset di awal berjalan lancar.
2. Keberadaan perwakilan kantor-kantor BPS provinsi serta kabupaten/kota yang ada di setiap lokasi penelitian tidak jarang menjadi gerbang awal masuknya tim peneliti pada para narasumber/informan.
3. Pemanfaatan jejaring peneliti yang ada di lokasi penelitian untuk mempermudah proses pengumpulan data. Situasi pandemi Covid-19 secara langsung berdampak pada peningkatan kewaspadaan masyarakat untuk menerima dan berbicara cukup lama dengan orang luar, namun dengan jejaring yang dimiliki, setidaknya tim peneliti lebih mudah untuk mendapatkan

https://www.bps.go.id

"*trust*" dari masyarakat, khususnya informan/narasumber yang akan diwawancara.

4. Persiapan baik dalam hal teknis maupun non teknis mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19. Hal teknis mencakup substansi riset dimana temanya berkaitan dengan pandemi Covid-19 sehingga tim peneliti diharuskan memahami situasi pandemi Covid-19 dengan cepat khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat dan migran sebagai kelompok rentan. Sementara non teknis berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan untuk pelaksanaan riset, seperti kesiapan alat perlindungan tim peneliti agar terhindar dari paparan Covid-19 yang didukung oleh proses administrasi yang cepat.
5. Karakter riset kualitatif yang fleksibel turut mendukung kajian ini bisa berjalan dengan sukses, khususnya ketika melakukan pengumpulan data lapangan. Peneliti semakin dihadapkan pada kondisi ketidakpastian di lapangan akibat dari situasi pandemi Covid-19. Namun, dikarenakan sifat riset kualitatif yang sangat dinamis dan peneliti adalah instrumen utama, hal ini sangat membantu ketika menghadapi kesulitan dalam pengumpulan data. Tim Peneliti BRIN dapat mencari berbagai alternatif solusi dengan tetap berpegang pada tujuan penelitian.
6. Terakhir, kajian ini memiliki tim penelitian yang solid. Kolaborasi antara peneliti BRIN dengan statistisi BPS berjalan baik. Dalam waktu singkat, peneliti BRIN harus mentransfer pengetahuannya tentang kajian kualitatif pada para statistisi BPS yang terbiasa dengan metode kuantitatif dan angka. Proses pengumpulan data di lapangan selama 14 hari menjadi momen baik untuk membangun tim yang solid sehingga memudahkan proses transfer pengetahuan.

https://www.bps.go.id

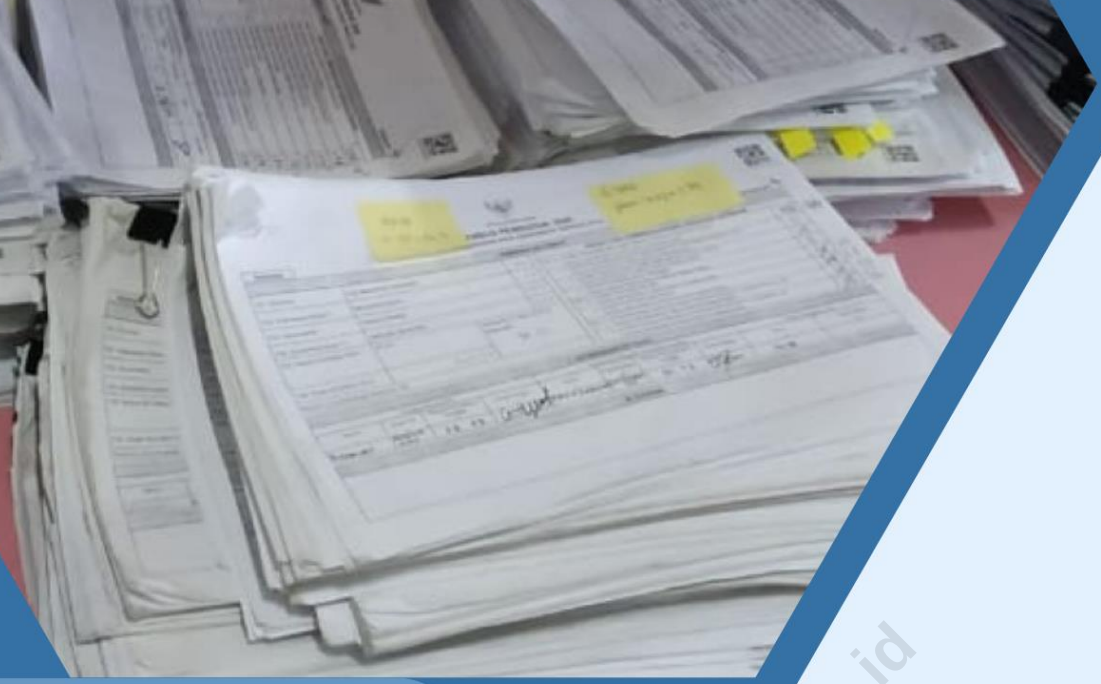

https://www.bps.go.id

BAB 3

PENGOLAHAN *SHORT FORM* SP2020

https://www.bps.go.id

BAB 3 PENGOLAHAN *SHORT FORM* SP2020

3.1 Pengolahan Sensus Penduduk Online

Sebelum dilakukan pengolahan secara keseluruhan, kualitas data SP Online diperiksa dan dianalisis berdasarkan data periode 15 Februari – 31 Maret 2020. Sebanyak 10 (sepuluh) persen data dari seluruh provinsi di Indonesia yang diteliti memiliki status isian dengan kategori berikut:

1. Data *clean* : data yang telah di-*submit* oleh responden dan lolos aturan validasi
2. Data ganda : data yang telah disubmit oleh responden sebanyak dua kali karena fitur *reset password*
3. Data *error* : data yang telah disubmit oleh responden dan tidak lolos aturan validasi (terdapat *missing* data atau data inkonsisten)
4. Data *draft* : data yang belum di-*submit* oleh responden (simpan sementara), tetapi datanya sudah tersimpan di *server*.

Analisis kualitas ini diterapkan pada seluruh data SP Online yang telah diterima selama periode SP Online dari 15 Februari – 29 Mei 2020 untuk mendapatkan data final yang akan diolah untuk SP2020-DP. Data SP Online yang telah final dijadikan bahan penyusunan Daftar Penduduk seperti yang dibahas pada subbab 1.3.7 (Penyusunan Daftar Penduduk).

https://www.bps.go.id

3.2 Pengolahan SP2020-DP

Pengelolaan dokumen SP2020-DP terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap pengolahan data pra-komputer dan tahap pengolahan data dengan komputer. Tahap pertama yaitu pengelolaan data sebelum data dimasukkan ke dalam komputer, terdiri dari beberapa langkah penting mencakup penerimaan dokumen (*receiving*), pengelompokkan dokumen (*batching*), serta penyuntingan atau pengkodean dokumen (*editing/coding*) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Selanjutnya, tahap kedua adalah pengolahan data menggunakan komputer. Proses ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari merekam ringkasan dokumen dengan menggunakan aplikasi *Mobile Data Capture*, memasukkan data SP2020-DP ke dalam sistem (*data entry*), hingga proses tabulasi data untuk analisis lebih lanjut.

3.2.1 Aplikasi *Mobile Capture* SP2020

Salah satu aplikasi yang digunakan untuk evaluasi dan pelaporan pendataan lapangan adalah *Mobile Capture*. Mobile Capture merupakan sistem untuk mengidentifikasi jumlah penduduk hasil SP September 2020 secara dini. Aplikasi ini berbasis android yang digunakan untuk mengolah data rekap Daftar Penduduk yang ada pada dokumen SP2020-DP1 pada wilayah PAPI dan SP2020-DP2 pada wilayah CAPI halaman 1. Pengolahan *Mobile Capture* ini dimaksudkan untuk menangkap informasi sementara pada halaman depan kuesioner SP2020-DP, diantaranya jumlah penduduk, jumlah penduduk yang meninggal, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, serta beberapa informasi lainnya.

Sebelum aplikasi *mobile capture* dipasang pada perangkat petugas, terdapat minimum *requirement* yang harus dipenuhi, yaitu: OS minimal Lollipop, RAM 1 GB, Free storage 500 MB, dan Camera 8 MP. Pegawai BPS yang bertugas dapat melakukan login ke aplikasi menggunakan SSO BPS, petugas mitra lama dapat melakukan login dengan memasukkkan email dan *password*, sedangkan mitra baru dapat melakukan login menggunakan *username* dan NIK (Gambar 25).

https://www.bps.go.id

Gambar 25 Halaman Login Aplikasi *Mobile Capture*

3.2.2 Sistem Pengelolaan *Mobile Capture* SP2020

Selain aplikasi *mobile capture* yang berbasis android, terdapat Sistem Pengelolan *Mobile Capture* SP2020 berbasis *web* yang digunakan untuk melakukan realokasi petugas SLS untuk membantu tugas dari Koseka dalam melakukan pengolahan halaman depan SP2020-DP (Gambar 26). Pada sistem pengelolaan *mobile capture* terdapat Fitur *Re-Assign* Petugas SLS. Fitur ini digunakan jika koseka mengalami kendala dalam proses *Mobile Capture* sehingga perlu petugas lain untuk membantu menyelesaikan tugasnya.

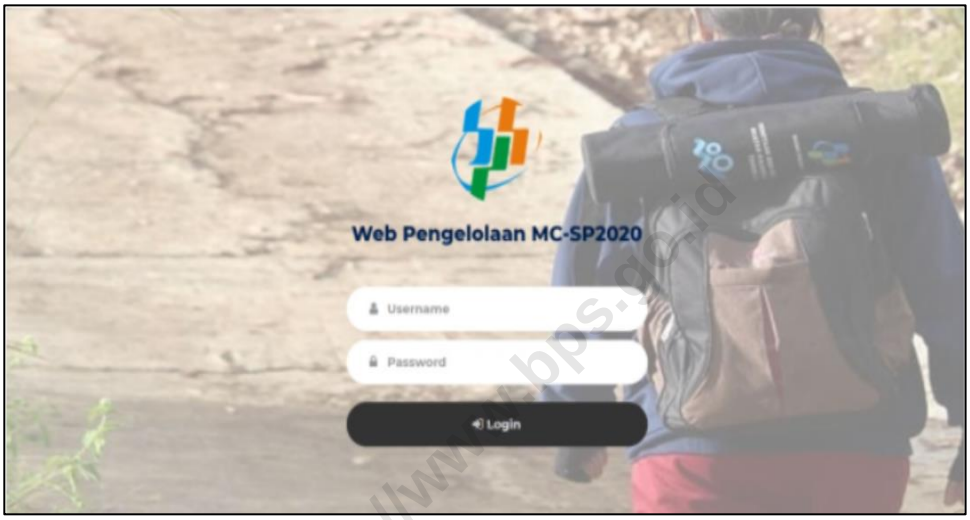

Gambar 26 Sistem Pengelolaan *Mobile Capture* Berbasis Web

https://www.bps.go.id

3.2.3 Web Validasi *Mobile Capture* SP2020

Data hasil *capture* SP2020-DP yang telah terkirim ke server pusat akan divalidasi kelayakan dan keterbacaan datanya. Tedapat petugas yang akan memvalidasi hasil *capture*. Petugas validasi akan mencocokan isian bagian kuesioner dengan *image*. Jika ada isian yang tidak sesuai namun pada bagian kedua hasil *capture* dapat terbaca dengan jelas, maka petugas akan menyalin secara manual datanya. Jika hasil *capture* tidak terbaca dengan jelas, maka petugas dapat melakukan *reject* dan petugas mobile capture akan mendapat notifikasi untuk memperbaiki foto halaman depan dokumen SP2020-DP. Aktivitas *reject* akan mempengaruhi juga progres pada dashboard monitoring. Kegiatan validasi hasil mobile *capture* SP2020 hanya berlangsung selama 63 hari dan diberhentikan karena dianggap kurang efektif.

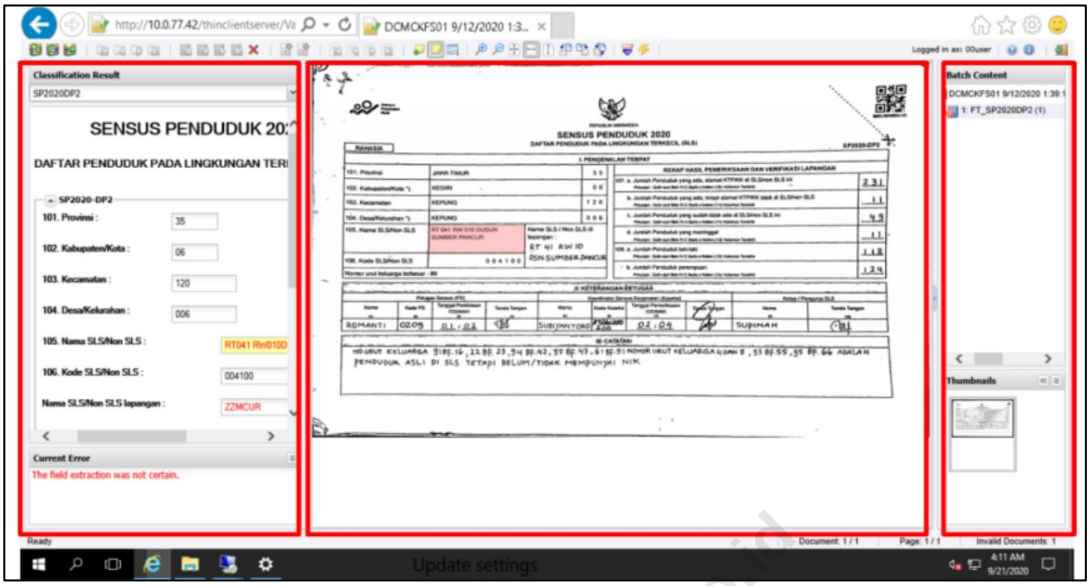

Gambar 27 Halaman Utama Web Validasi *Mobile Capture* SP2020

https://www.bps.go.id

3.2.4 Entri SP2020-DP

Entri dokumen SP2020-DP menggunakan platform *Integrated Collection System* berbasis *web*, yang dapat diakses melalui dpdigital.bps.go.id. Petugas melakukan entri DP dengan mengunakan akun yang telah terdaftar dalam manajemensp.bps.go.id. Platform tersebut menggabungkan proses online dan offline. Petugas entri memerlukan koneksi internet saat melakukan login dan mengirimkan data. Namun, jika terdapat kendala jaringan saat pengisian, proses entri dokumen SP2020-DP tetap dapat dilakukan secara *offline* dengan memanfaatkan penyimpanan *cache browser*. Menu Entri menampilkan daftar SLS yang harus di-entri oleh petugas sesuai dengan wilayah tugasnya. Pada halaman tersebut, terdapat juga *dashboard monitoring* yang memuat informasi penting seputar entri data. Platform ini menyerupai bentuk daftar kuesioner SP2020-DP kertas agar memudahkan petugas.

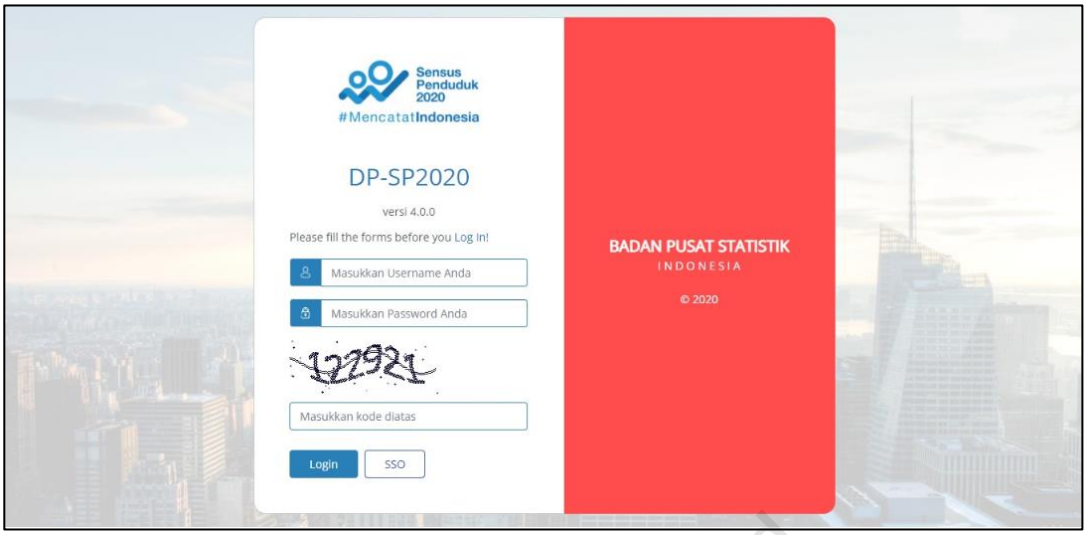

Gambar 28 Halaman *Login* Program Entri SP2020-DP

https://www.bps.go.id

3.2.5 Pemrosesan Data SP2020-DP

Proses pengolahan data dokumen SP2020-DP melibatkan beberapa proses, salah satunya adalah proses *matching* dan *pairing* dari berbagai sumber data, yaitu data adminduk, data SP Online, dan data hasil entri SP2020-DP (hasil SP September). Proses *matching* dan *pairing* data SP2020 terbagi menjadi empat tahap. Pertama adalah tahap *preprocessing* terdiri dari 2 proses yaitu integrasi data dan *cleaning* data. Proses integrasi data yaitu mengintegrasikan beberapa sumber data seperti data adminduk, data SP Online dan data entri SP2020-DP, sementara itu *cleaning* data adalah memeriksa validitas NIK, mengidentifikasi lewat cacah, dan mengidentifikasi penduduk ganda. Kedua adalah tahap klasifikasi data dari tiga sumber data sehingga menghasilkan beberapa kombinasi data. Selanjutnya, pada tahap ketiga data dikelompokkan ke dalam beberapa status seperti NIK valid, NIK tidak valid, data lewat cacah, dan *record* ganda. Berikutnya, pada tahap keempat, dilakukan *pairing* data secara probabilistik.

Variabel yang digunakan untuk menentukan status data adalah variabel NIK, nama, dan jenis kelamin. Status NIK valid adalah data yang ditemukan di data adminduk dan SP September. Status NIK tidak valid adalah data yang ditemukan pada SP Online dan SP September tetapi tidak *match* dengan NIK penduduk dari data adminduk. Status lewat cacah merupakan data adminduk ataupun data tambahan dari SP Online yang tidak ditemukan atau tidak *match* dengan data SP September. Sementara data ganda ditemukan di SP September dengan NIK yang duplikat.

Tahap berikutnya adalah *pairing* data secara probalistik, yang terdiri dari empat langkah. Pertama, memeriksa apakah data lewat cacah tersebut ditemukan di

tempat lain dengan informasi NIK yang kurang lengkap. Kedua, memeriksa apakah data lewat cacah tersebut sudah tercatat dengan NIK yang valid di wilayah lain. Ketiga, memeriksa apakah data dengan NIK tidak valid ini sudah tercatat (duplikat) di tempat lain. Keempat, memeriksa apakah data dengan NIK tidak valid ini merupakan entitas tunggal (tidak ada duplikat).

3.3 Pengolahan SP2020-C1

Pengolahan Data SP2020-C1 *Paper and Pencil based Interview* (PAPI) dilakukan di BPS Provinsi dalam rentang waktu 15 Juli - 31 Oktober 2021. Adanya kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing provinsi, dan kondisi kesehatan petugas di BPS Provinsi menyebabkan kendala pengolahan, sehingga BPS mengeluarkan surat Nomor B-210/03000/SS.4000/07/2021 tentang perubahan jadwal pengolahan yang memberi kewenangan kepada BPS Provinsi mengatur jadwal pengolahan dokumen SP2020-C1 dengan memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di wilayah/daerah masing-masing.

Sebelum dimulainya tahapan pengolahan SP2020-C1, persiapan yang dilakukan antara lain adalah pelatihan instruktur nasional (innas) pengolahan yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 secara online. Peserta pelatihan innas pengolahan melibatkan juga peserta dari 29 provinsi wilayah PAPI dengan materi yang disampaikan diantaranya terkait dengan penjelasan umum pengolahan SP2020-C1, topologi jaringan dan infrastruktur, serta tata cara dan teknik pengoperasian pengoalahan *data capture* dan *data entry*. Selain itu, dilakukan pengecekan infrastruktur pengolahan meliputi inventaris perangkat teknologi informasi, koneksi VPN/Internet, dan pengecekan persiapan pengolahan.

https://www.bps.go.id

3.3.1 Perangkat yang Digunakan

Pengolahan SP2020-C1 dilakukan dengan metode *Data Capture* dan *Data Entry*. Adapun dokumen yang diolah adalah (1) SP2020-RC1, yaitu rekap dokumen SP2020-C1 dalam wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dan (2) SP2020-C1, yaitu kuesioner individu dan perumahan yang dilakukan dengan metode DOPU (*Drop Off Pick Up)* pada zona 1 dan metode wawancara pada zona 3 yang dihimpun dalam satuan keluarga.

Perekaman dokumen menggunakan *data capture* dilakukan dengan menggunakan *scanner* dan software *data capture* sedangkan data entri dilakukan dengan aplikasi *inhouse* yang berbasis dekstop *client-server.* Pengolahan *data capture* menggunakan *scanner* yang telah ada pada pengadaan sebelumnya di BPS Provinsi, yaitu Fujitsu fi-5950, Server *Data Capture*, dan Server Validasi. Sedangkan pengolahan moda Data Entri, menggunakan aplikasi berbasis *desktop* (*Client-Server)* dengan spesifikasi komputer sebagai berikut: (1) memiliki monitor minimal 12 inch, dengan minimum resolusi 1366 x 768, (2) menggunakan *proccessor* minimal *single core,* (3) memori RAM minimal 2 GB, (4) Sistem Operasi Windows Windows 7/Windows 8/Windows 10/LINUX/MAC/Chrome OS, (5) Software Aplikasi : terinstall Aplikasi server, Aplikasi Client dan SQL Server 2019, dan (6) memiliki LAN/Wifi Card.

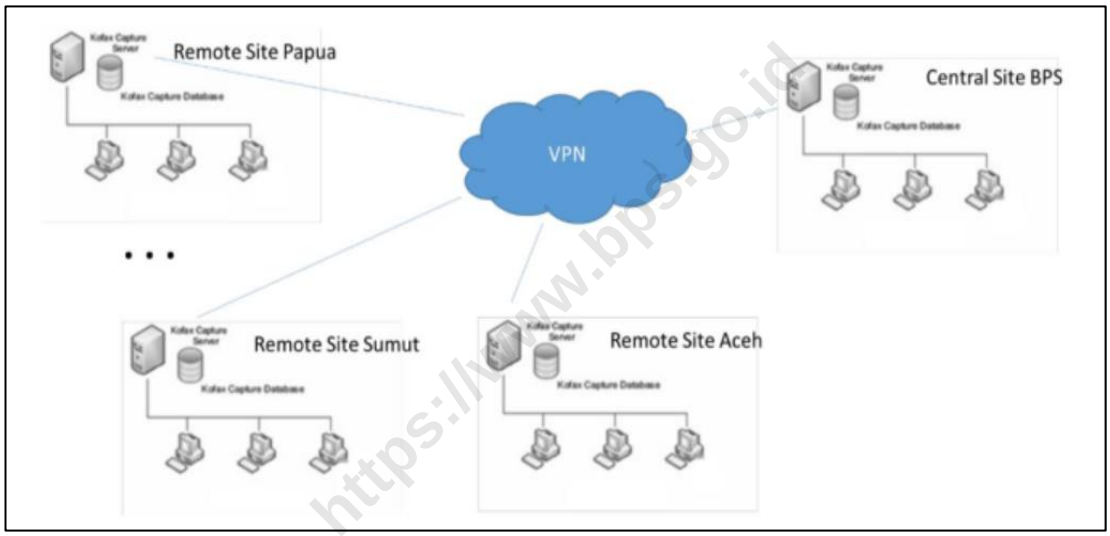

Gambar 29 Rancangan Arsitektur Pengolahan

Pada Gambar 29, tahapan pengolahan SP2020-Data Capture telah dirancang pada arsitektur pengolahan. Terdapat dua site pengolahan yaitu Central Site di BPS RI dan Remote Site di BPS Provinsi pada wilayah pengolahan PAPI. Central Site berperan untuk mengelola lisensi untuk didistribusikan ke masing-masing Remote Site sedangkan pengolahan data capture sepenuhnya dilakukan di masing-masing Remote Site.

3.3.2 *Data Capture*

Pada Gambar 30, proses pengolahan data dengan sistem *data capture* memiliki beberapa tahap proses yang sebaiknya dikerjakan di komputer yang terpisah. Proses bisnis pengolahan SP2020 data *capture* mengalami penyesuaian dengan pertimbangan efektifitas proses dan efisiensi anggaran.

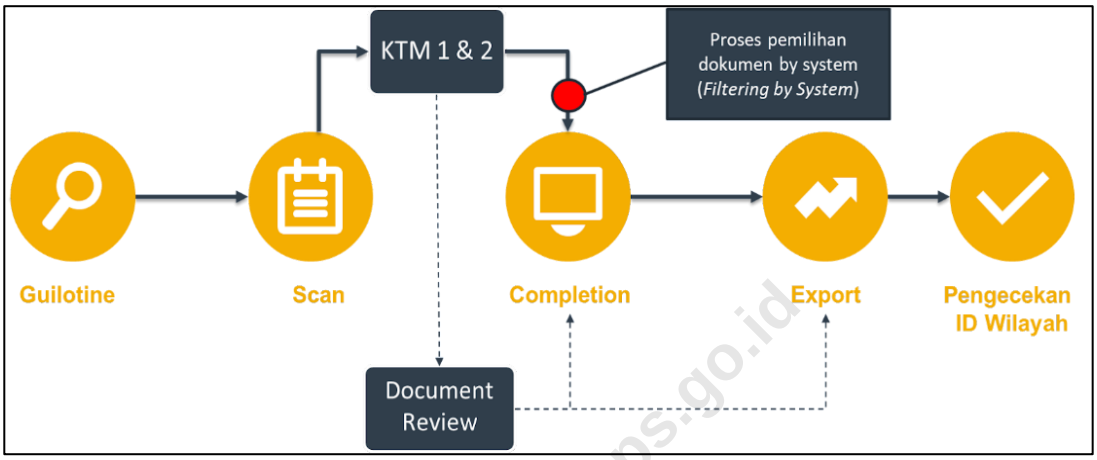

Gambar 30 Proses Bisnis Pengolahan SP2020 *Data Capture*

Setelah dokumen diterima oleh Bagian Tata Usaha, maka selanjutnya secara bertahap dilakukan pemotongan dokumen dengan *Guillotine*. Setelah dokumen dipotong, dilanjutkan dengan proses pemindaian pada PC yang terhubung dengan *scanner* Fujitsu fi-5950 (atau *scanner* yang mendukung proses *data capture* lainnya yang ada di pusat pengolahan provinsi). *Image* dokumen hasil *scan* akan melalui proses *classification* yaitu pada *Kofax Transformation Modul* (KTM) 1 dimana *image* diklasifikasikan sesuai layout kuesioner apakah jenis dokumen RC1, C1 hal 1, hal 2, dst. Modul ini berjalan otomatis dalam sistem sehingga tidak memerlukan operator. Kemudian dilanjutkan dengan proses *extraction* pada KTM 2, dimana proses disini akan mengubah gambar menjadi teks. Gambar yg diekstrak adalah gambar pada posisi yang sebelumnya telah di-*zoning*. KTM 1 dan 2 dilakukan seharusnya dilakukan pada PC yang terpisah (PC khusus KTM).

https://www.bps.go.id

Gambar 31 Pemotongan Dokumen SP2020-C1 dengan *Guillotine*

Proses selanjutnya adalah awal dari penyesuaian proses bisnis pengolahan dimana dilakukan *filtering* oleh mesin dan disebut *Auto Filtering*. Pada *Auto Filtering* ini sistem akan menghitung jumlah rata-rata *confidence score* (CS) dalam 1 dokumen. Jika suatu dokumen rata-rata CS di bawah *Threshold*, maka akan dilakukan *auto correction* oleh mesin sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan isian oleh operator. *Auto Filtering* ini dimaksudkan untuk dapat mempercepat proses pengolahan karena kualitas dokumen yang sangat bervariasi sebagai dampak dari penyesuaian proses bisnis lapangan pendataan dengan menggunakan DOPU, selain itu juga dapat mengurangi kebutuhan jumlah operator sehingga efisiensi proses ini dapat mendukung tercapainya efisiensi anggaran karena *refocussing* anggaran.

Data yang sudah melewati proses *auto filtering* diatas CS yang ditentukan selanjutnya akan melalui proses KTM Validation. Proses ini dilakukan oleh operator dan dilakukan pada PC *client*. Dengan mempertimbangkan kondisi isian dokumen hasil pendataan, maka proses perbaikan atau koreksi dari operator *Completion* atau KTM Validation di fokuskan hanya pada beberapa variabel inti berdasarkan informasi dari *Subject Matter*, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data hasil data *capture*.

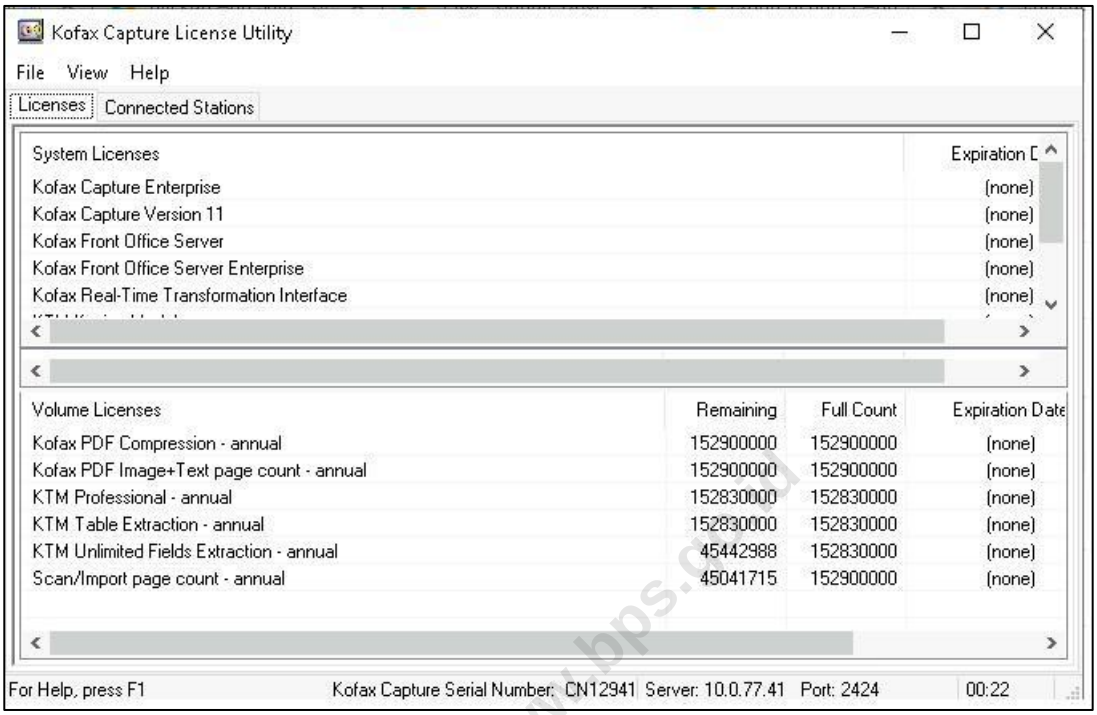

Gambar 32 Penggunaan Lisensi *Data Capture*

Setelah data melewati proses *Completion* dilanjutkan dengan proses *Export/Release* yang dilakukan di *PC Client* khusus untuk *export data*. Penanganan *error* terdapat pada modul *Document Review* dan *Quality Control*. Dari pengolahan *data capture* yang telah dilakukan, terdapat pemanfaatan barang persediaan di tahun 2019 yaitu Lisensi *Data Capture* sejumlah ± 106 juta lisensi seperti pada Gambar 32 terkait penggunaan lisensi *data capture* dari server di BPS.

3.3.3 Data Entri

Moda pengolahan PAPI selanjutnya adalah SP2020-Data Entri. Instalasi program merupakan salah satu kegiatan awal sebelum melakukan kegiatan entri data. Program aplikasi SP 2020 yang digunakan untuk melakukan manajemen *database* sama dengan aplikasi yang digunakan untuk melakukan perekaman data SP 2020. Program aplikasi SP 2020 membutuhkan komponen tambahan yaitu *Net Framework 4.0* dan *Report Viewer 2010*. Selain itu pada tahap persiapan juga dilakukan persiapan untuk melakukan validasi, yaitu (1) *create database* dan *import* file persiapan, (2) pengaturan koneksi database, (3) persiapan master petugas, dan (4) persiapan master operator. Setelah tahapan persiapan selesai

https://www.bps.go.id

dilakukan, proses entri data dan validasi siap silakukan. Gambaran pengolahan di BPS Provinsi dapat dilihat pada Gambar 33.

Gambar 33 Pengolahan SP2020-Data Entri

https://www.bps.go.id

3.3.4 Kompilasi Data

Proses kompilasi meliputi penggabungan *data* dan *image* pada *server* daerah yang disertai dengan email yang menyatakan kalau proses pengolahan di daerah sudah selesai. Kompilasi dilakukan untuk daerah *data entry*, *scan* atau campuran kedua metode. Ada dua jenis kompilasi pada pengolahan ini yaitu kompilasi untuk gambar hasil *data capture* dan kompilasi *database*. Kompilasi gambar hanya dilakukan untuk daerah yang menggunakan mode pengolahan *scanner*. Adapun tahapan penggabungan image hasil scan, yaitu: (1) *Image*/gambar dikirim menggunakan eksternal disk yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi ke BPS pusat, (2) Gambar yang diterima kemudian akan disalin di-*server* pusat dengan penamaan folder sesuai kode provinsi masing-masing. Kompilasi database digunakan menggabungkan data sql *server* yang ada di daerah untuk semua metode pengolahan. Data yang masih terpisah di daerah kemudian digabungkan pada *server* pusat dengan menggunakan aplikasi *in-house* mode server yang telah dibangun sebelumnya.

3.4 Kendala dan Tindak Lanjut

Kegiatan pengolahan dokumen SP2020-C1 telah dilakukan di 29 Provinsi dalam rentang waktu 15 Juli s.d. 31 Oktober 2021. Dua puluh empat (24) Provinsi melakukan pengolahan dengan menggunakan *data capture,* dan 5 provinsi melaksanakan pengolahan dengan data entri yaitu Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Lisensi data *capture* kurang maksimal termanfaatkan. Hal ini dikarenakan dengan metode DOPU dan juga wawancara di masa pandemi, tidak semua dokumen yang di *drop* kembali ke BPS dengan kuesioner terisi. Kompilasi data pengolahan dokumen SP2020 di BPS Provinsi telah dilakukan. Proses kompilasi meliputi penggabungan data dan *image* pada *server* daerah yang disertai dengan email yang menyatakan kalau proses pengolahan di daerah sudah selesai. Kondisi dokumen, pandemi dan kebijakan PPKM, kendala infrastruktur pengolahan menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian pengolahan.

Untuk pemanfaatan lisensi data *capture* lebih lanjut diperlukan beberapa pemeliharaan infrastruktur di BPS Provinsi, diantaranya adalah *scanner* dan *consummable part* nya dan pemeliharaan *scanner* sehingga akan memperlancar kegiatan pengolahan data di masa selanjutnya.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 4

ANALISIS DAN DISEMINASI HASIL *SHORT FORM* SP2020

https://www.bps.go.id

BAB 4 ANALISIS DAN DISEMINASI HASIL *SHORT FORM* SP2020

4.1 Analisis PES

4.1.1 Kesalahan Cakupan

Analisis kesalahan cakupan (*coverage error*) dilakukan pada penduduk (anggota keluarga) untuk estimasi level nasional. Analisis cakupan ini bertujuan untuk mengetahui adanya kesalahan cakupan (*coverage error*) penduduk. Kesalahan cakupan ini dapat berupa lewat cacah atau kurang cacah yang disebabkan petugas sensus hanya mencacah sebagian penduduk dari suatu wilayah tertentu; maupun penduduk yang tercacah ganda atau kelebihan cacah yang disebabkan petugas sensus melewati batas wilayah yang ada.

Analisis kesalahan cakupan penduduk dilakukan dengan metode *dual-system estimation* berdasarkan prosedur estimasi melalui informasi status *matched* penduduk. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil *matching* penduduk. Indikator kesalahan cakupan PES diperoleh berdasarkan estimasi dari data sampel sesuai dengan desain samplingnya.

Estimasi dari *dual-system* menunjukkan tingkat kesalahan cakupan bersih (*net coverage error rate*) *Short Form* SP2020 sebesar 1,42 persen. Pada SP2010 tingkat kesalahan cakupan bersih (*net coverage error rate*) sebesar 3,56 persen. Meskipun demikian, kedua angka ini tidak dapat dibandingkan karena prosedur penghitungan yang berbeda. Pada SP2010, jika seorang penduduk tidak ditemukan pada data di suatu blok sensus, dan dari hasil rekonsiliasi lapangan penduduk tersebut dinyatakan bertempat tinggal di blok sensus tersebut, maka penduduk tersebut langsung disimpulkan lewat cacah sensus. Pada *Short Form* SP2020, kasus penduduk yang tidak ditemukan pada data di suatu SLS terlebih dahulu dilakukan pencarian di SLS lain dengan memanfaatkan keberadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melakukan *matching* dengan data *Short Form* SP2020 keseluruhan.

Meskipun *coverage error* pada *Short Form* SP2020 relatif kecil, tetapi beberapa kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan cakupan tersebut perlu menjadi perhatian. Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan penyesuaian dalam metode pelaksanaan *Short Form* SP2020, sehingga pendataan lengkap untuk variabel lain yang tidak ada di data registrasi hanya dilakukan pada Zona 1 dan Zona 3. Sementara itu, pada Zona 2 hanya memutakhirkan Daftar Penduduk. Hal ini menyebabkan tidak memungkinkan penerapan prosedur

https://www.bps.go.id

combined 'census' approach secara sempurna, karena sebagian besar wilayah pendataan *Short Form* SP2020 terletak pada Zona 2.

4.1.2 Kesalahan Isian

Selain kesalahan cakupan (*coverage error*), PES juga mengevaluasi kesalahan isian (*content error*). Analisis kesalahan isian dilakukan pada penduduk yang berstatus *matched* antara data *Short Form* SP2020 dengan data PES *Short Form* SP2020. Analisis ini bertujuan mengukur kesalahan isian yang terjadi pada dataset pasangan penduduk yang *matched*, diantaranya ketidakkonsistenan antar variabel yang bersesuaian. Ada lima indikator yang digunakan dalam mengukur ketidakkonsistenan jawaban pada analisis kesalahan isian, yaitu: *Net Difference Rate* (NDR), *Index of Inconsistency* (IoI), *Aggregated Index of Inconsistency* (AIoI), *Gross Difference Rate* (GDR), dan *Rate of Agreement* (RoA).

Sumber data yang digunakan dalam melakukan analisis kesalahan isian diperoleh dari Daftar DP *Short Form* SP2020 dan hasil pendataan PES *Short Form* SP2020. Selanjutnya, penduduk yang ditemukan baik pada *Short Form* SP2020 maupun PES *Short Form* SP2020 (penduduk *matched*) menjadi unit analisis dalam pengukuran indikator kesalahan isian. Ukuran kesalahan isian disajikan untuk setiap karakteristik dan kategori-kategori dalam karakteristik.

Pada PES *Short Form* SP2020, karakteristik yang diukur tingkat kesalahan isiannya adalah jenis kelamin, kelompok umur, dan status hubungan dalam keluarga. Secara umum, tingkat kesalahan isian dari ketiga karakteristik tersebut relatif rendah dengan nilai *Aggregate Index of Inconsistency* (AIoI) di bawah 10 persen. Karakteristik jenis kelamin memiliki AIoI terendah sebesar 2,14 persen, sedangkan umur memiliki AIoI terbesar, yaitu sekitar 9 persen. Kesalahan isian untuk karakteristik jenis kelamin dan umur pada *Short Form* SP2020 lebih rendah dibandingkan SP2010. Dalam hal ini, pada SP2010 jenis kelamin memiliki AIoI sebesar 2,85 persen, sedangkan AIoI untuk karakteristik kelompok umur sebesar 19,95 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data administrasi kependudukan pada *Short Form* SP2020 memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akurasi pengumpulan karakteristik jenis kelamin dan umur.

4.2 Diseminasi Hasil *Short Form* SP2020

4.2.1 Seremonial Rilis

1. Rilis Hasil *Short Form* SP2020

Penyesuaian proses bisnis *Short Form SP2020* menyebabkan adanya penyesuaian *output* karena adanya beberapa tahapan kegiatan lapangan tidak dapat

https://www.bps.go.id

dilaksanakan sepenuhnya. Berdasarkan penyesuaian proses bisnis tersebut, *Short Form* SP2020 hanya menghasilkan jumlah penduduk Indonesia yang dirinci menurut jenis kelamin. Untuk mendiseminasikan hasil pendataan *Short Form* SP2020, BPS menyelenggarakan rilis hasil *Short Form* SP2020 pada 21 Januari 2021, secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini menjadi salah satu momen bersejarah, di mana *Short Form* SP2020 merupakan titik awal dalam *roadmap* mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, melalui integrasi data administrasi kependudukan sebagai basis data pelaksanaan SP2020. Rilis menjadi sarana diseminasi bersama antara BPS dan Kemendagri kepada masyarakat luas untuk menyampaikan data kependudukan Indonesia yang dihasilkan BPS dan Kemendagri.

Gambar 34 Rilis Bersama Hasil *Short Form* SP2020

2. Rilis Hasil Kajian Kualitatif *Short Form* SP2020

Kegiatan rilis hasil kajian kualitatif *Short Form* SP2020 dilakukan secara 2 tahap, di 12 provinsi yang menjadi lokasi kajian dan di level nasional. Rilis di 12 provinsi dilakukan secara serentak untuk mengonfirmasi temuan-temuan lapangan yang telah dianalisis dan dalam proses finalisasi penulisan kertas kerja. Kegiatan diseminasi di 12 lokasi kajian dilakukan dalam kurun waktu 14 November s.d. 1 Desember 2021. Dalam kegiatan diseminasi di daerah mengundang narasumber baik dari kalangan akademis maupun instansi pemerintah terkait. Selain itu, peserta diseminasi berasal dari berbagai instansi pemerintah terkait, lembaga nonpemerintah (NGO), praktisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan masyarakat adat, migran pekerja dan anak kos. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari BPS di level daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten serta dari BRIN.

Gambar 35 Diseminasi Analisis Tema Khusus di Lokasi Penelitian

Tahap kedua, rilis hasil penelitian secara nasional berlangsung di Auditorium BPS Jakarta. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk *launching* hasil penelitian dan pameran berupa *booth* yang menyajikan poster berisi cerita detail mengenai studi di 12 lokasi penelitian. Pada kegiatan ini juga, secara resmi diserahkan seluruh hasil penelitian berupa ringkasan eksekutif dan 12 kertas kerja oleh Kepala OR IPSH BRIN yaitu Prof. Ahmad Najib Burhani, M.A., M.Sc. kepada Deputi Statistik Sosial BPS

Bapak Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si. Diseminasi secara nasional dikemas lebih interaktif, tidak hanya seminar namun juga terdapat sesi di mana para tamu undangan dan peserta yang hadir dapat langsung mendapatkan cerita yang detail mengenai hasil penelitian di setiap lokasinya dari para peneliti.

Salah satu hal menarik dalam kajian ini adalah menampilkan hasil penelitian secara umum di 12 lokasi penelitian dalam bentuk video animasi. Tidak hanya dalam bentuk tulisan ilmiah, tim peneliti berupaya untuk membuat hasil penelitian dapat mudah dipahami oleh masyarakat umum melalui sebuah video menarik. Hal ini ditujukan agar hasil riset dapat juga diketahui khalayak yang lebih luas tidak hanya bagi para peneliti, akademisi, praktisi dan pemangku kepentingan semata. Hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk visual yang dibuat sederhana agar dapat mudah dipahami diharapkan dapat menjadi salah satu media agar diseminasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Video animasi hasil penelitian di 12 lokasi ini dirilis pertama kali pada saat kegiatan diseminasi nasional di Jakarta. Video tersebut dapat dilihat melalui kanal Youtube BRIN Indonesia dengan tautan: https://www.youtube.com/watch?v=WjDwmdOKd80.

https://www.bps.go.id

4.2.2 Ragam Produk Diseminasi *Short Form* SP2020

Pelaksanaan diseminasi atau *launching* hasil *Short Form* SP2020 diselenggarakan serentak baik di tingkat BPS pusat maupun BPS provinsi pada Januari 2023. Ragam produk diseminasi dari hasil *Short Form* SP2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Ragam Produk Diseminasi Hasil SP2020

Produk Diseminasi Hasil SP2020	Level Penyajian	Rilis
(1)	(2)	(3)
Berita Resmi Statistik (BRS) dan Infografis	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Januari 2021
Buklet Potret Sensus Penduduk	Nasional dan Provinsi	Januari 2021
Website Sensus Penduduk	Nasional dan Provinsi	Desember 2022
Analisis Profil Penduduk *Short Form* SP2020	Nasional dan Provinsi	Juni 2022
Analisis Tema Khusus *Short Form* SP2020	Nasional dan 12 Provinsi	Desember 2021

1. Berita Resmi Statistik (BRS) dan Infografis

Salah satu produk diseminasi hasil *Short Form* SP2020 disajikan dalam bentuk BRS, yang memuat data dan informasi mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut

generasi, komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif dan nonproduktif, rasio jenis kelamin, dan distribusi penduduk menurut pulau.

Gambar 36 Berita Resmi Statistik Hasil *Short Form* SP2020

Gambar 37 Infografis Hasil *Short Form* SP2020

2. *Website* Sensus Penduduk

Website Short Form SP2020 dapat diakses melalui tautan berikut: https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020, Website ini dibangun untuk mendiseminasikan hasil *Short Form* SP2020 secara menyeluruh serta mudah diakses oleh masyarakat luas. *Website* ini dikembangkan sendiri secara internal BPS dalam arti tidak menggunakan paket aplikasi diseminasi yang telah ada seperti CensusInfo ataupun DevInfo. Pertimbangannya, sumber daya yang tersedia di BPS memadai untuk mengembangkan sendiri produk yang dikehendaki.

Selain itu, dengan pendekatan ini maka pengembangan *Website Short Form* SP2020 merupakan wahana peningkatan kapasitas SDM internal BPS khususnya Direktorat Sistem Informasi Statistik. *Website* SP2020 merupakan bagian dari rencana besar (*grand design*) diseminasi hasil *Short Form* SP2020 yang mencakup antara lain:

a. Penyajian data (tabel, *query builder*, tabel perbandingan antarwilayah dan kegiatan);
b. Dokumentasi instrumen sensus (kuesioner, manual, dan lainnya);
c. Dokumentasi Komprehensif *Short Form* SP2020
d. Metadata (deskripsi lengkap terkait *Short Form* SP2020);
e. Media (foto, video, serta dokumentasi terkait kisah-kisah pelaksanaan *Short Form* SP2020 di seluruh Indonesia);
f. Produk lain yang terkait dengan *Short Form* SP2020 (Berita Resmi, Publikasi, Infografis, Leaflet, serta dokumen lainnya);

Website Short Form SP2020 dirancang dapat menyajikan data *Short Form* SP2020 dalam berbagai topik bahasan menurut wilayah geografis serta dilengkapi dengan perbandingan antar kegiatan. Dengan demikian pengunjung *website* ini memiliki keleluasaan untuk memilih topik dan wilayah geografis yang diinginkan.

Website ini difasilitasi dengan sejumlah fitur untuk mempermudah pengguna dalam mengeksplorasi data *Short Form* SP2020 dengan lebih fleksibel. Dengan tersedianya fitur *Query Builder* diharapkan dapat semakin mempermudah pengguna data untuk memanfaatkan data hasil *Short Form* SP2020 kapanpun dan di manapun.

Seluruh konten di dalam *website* resmi BPS juga dapat diakses dengan menggunakan mekanisme *machine to machine* melalui Web API (webapi.bps.go.id). Seluruh tabel statistik dalam website sensus BPS dapat diakses dalam beberapa format berbeda, termasuk dalam bentuk JSON yang bersifat *machine-friendly*.

https://www.bps.go.id

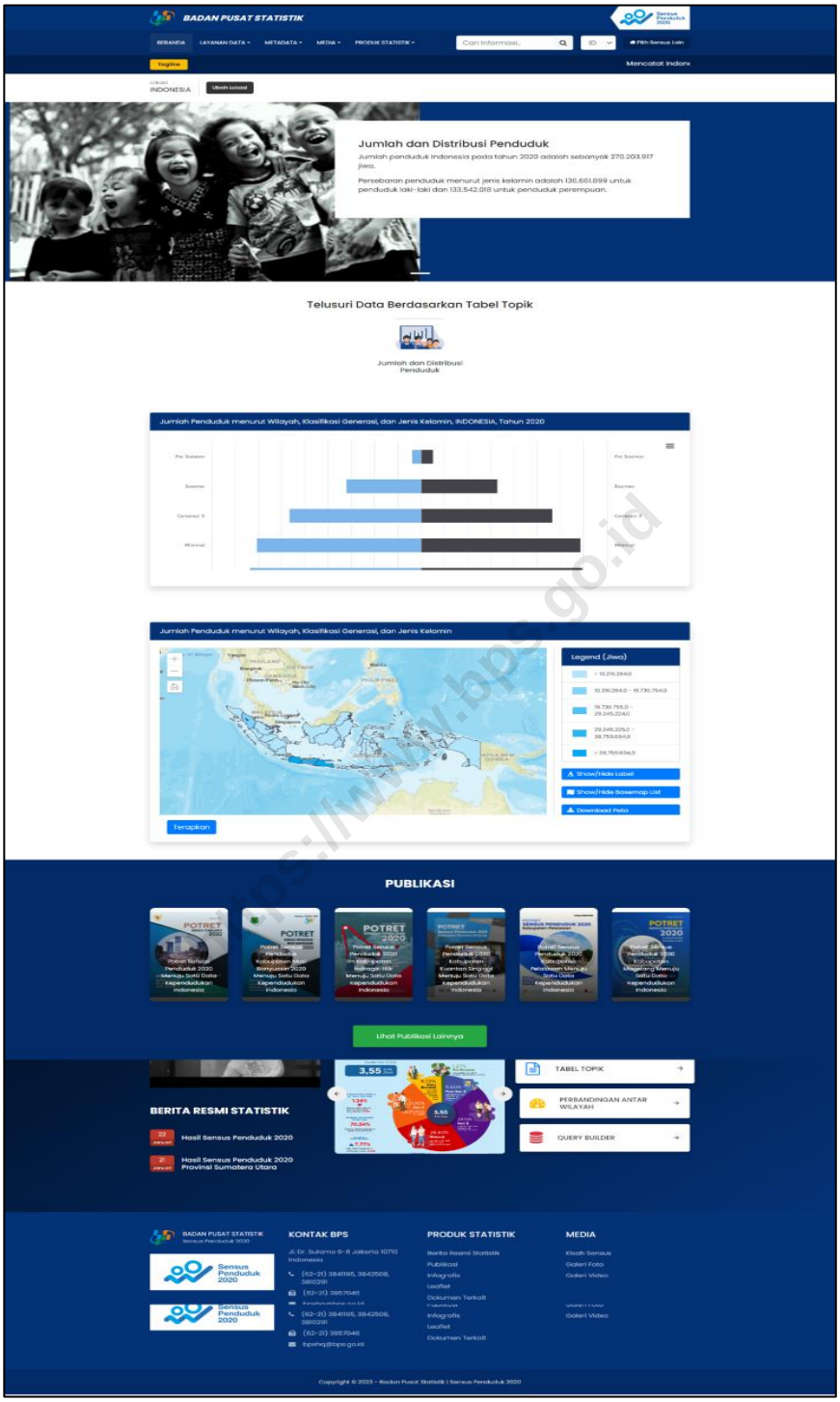

Gambar 38 Tampilan *Website* Sensus Penduduk

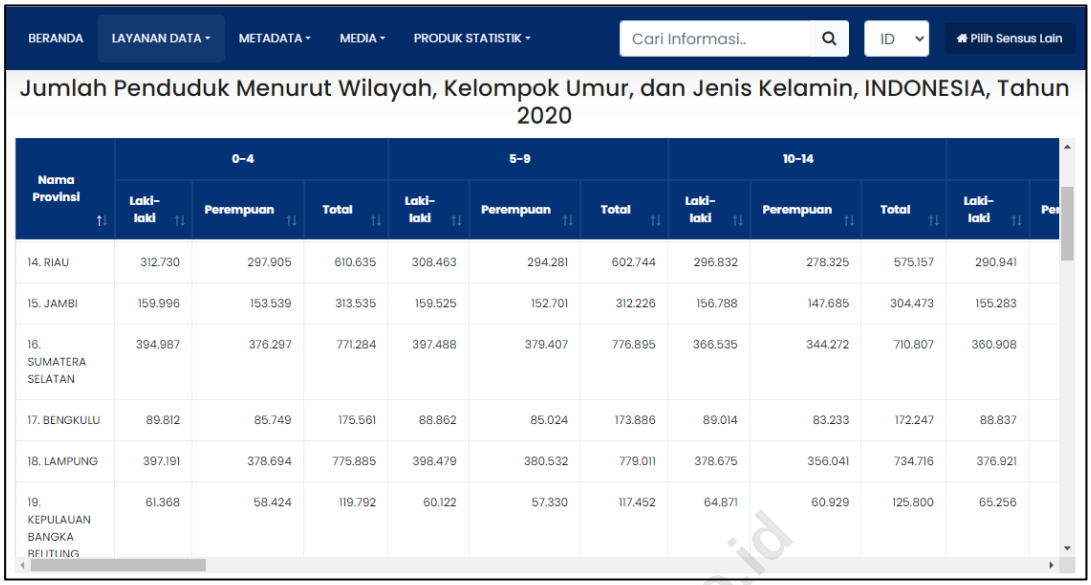

Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2020

Nama Provinsi	0-4			5-9			10-14			
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki
14. RIAU	312.730	297.905	610.635	308.463	294.281	602.744	296.832	278.325	575.157	290.941
15. JAMBI	159.996	153.539	313.535	159.525	152.701	312.226	156.788	147.685	304.473	155.283
16. SUMATERA SELATAN	394.987	376.297	771.284	397.488	379.407	776.895	366.535	344.272	710.807	360.908
17. BENGKULU	89.812	85.749	175.561	88.862	85.024	173.886	89.014	83.233	172.247	88.837
18. LAMPUNG	397.191	378.694	775.885	398.479	380.532	779.011	378.675	356.041	734.716	376.921
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	61.368	58.424	119.792	60.122	57.330	117.452	64.871	60.929	125.800	65.256

Gambar 39 Tabulasi Data Hasil *Short Form* SP2020 pada Halaman *Website* Sensus

https://www.bps.go.id

3. Buklet Potret *Short Form* SP2020

Potret Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia berisi perjalanan *Short Form* SP2020 di tengah tantangan pandemi Covid-19. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, pelaksanaan *Short Form* SP2020 menggunakan metode kombinasi yaitu dengan menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data pelaksanaan *Short Form* SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia. Buklet ini menyajikan agregat data dasar penduduk Indonesia sampai dengan level provinsi yang diperoleh dari pelaksanaan SP Online dan SP September tahun 2020. Cakupan data dasar dari angka hasil *Short Form* SP2020 mencakup jumlah penduduk menurut jenis kelamin, wilayah administrasi, berikut parameter-parameter turunannya seperti kepadatan penduduk, *sex ratio* dan laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan serta berbagai referensi penelitian di bidang kependudukan.

Gambar 40 Buklet Potret *Short Form* SP2020

4. Analisis Profil Penduduk Indonesia

Analisis Profil Penduduk Indonesia dan Analisis Profil Penduduk Provinsi keduanya diterbitkan secara serentak pada tanggal 24 Juni 2022 melalui *website* BPS. Publikasi ini memuat empat tema utama, yaitu dinamika penduduk di Indonesia, anak investasi masa depan bangsa, penduduk usia produktif sebagai aktor utama pembangunan nasional, dan penduduk lanjut usia di Indonesia.

4.2.3 Analisis Kajian Kualitatif *Short Form* SP2020

Kajian ini dilakukan di 12 provinsi terpilih di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai perwakilan dari wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah merupakan perwakilan wilayah Indonesia bagian tengah. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua sebagai lokasi di wilayah Indonesia bagian timur (Gambar 41). Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tiga hal, yakni (1) pembagian berdasarkan bagian barat, tengah, dan timur Indonesia; (2) zona risiko Covid-19; dan (3) keberadaan masyarakat adat pada beberapa lokasi, yaitu Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.

Gambar 41 Peta Lokasi Penelitian Kerjasama Kajian Kualitatif *Short Form* SP2020

https://www.bps.go.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kondisi sosial demografi terhadap kerentanan, yaitu dampak pandemi Covid-19 terhadap kecenderungan perubahan kondisi sosial demografi dan respons serta strategi adaptasi masyarakat selama pandemi. Komponen demografi yang dimaksud terdiri dari fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Berbeda dari kebiasaan yang dilakukan oleh BPS sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung (observasi), dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT). Penelitian ini juga didukung oleh data hasil survei dari BPS, seperti Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data statistik tersebut tidak hanya sebagai informasi awal, namun juga digunakan dalam proses analisis untuk menguatkan hasil kualitatif. Hasil kajian di 12 provinsi terpilih dapat diakses melalui tautan http://s.bps.go.id/hasilatk.

Tabel 10 Ragam Produk Diseminasi Analisis Kualitatif Hasil *Short Form* SP2020

Produk Diseminasi Hasil SP2020	Level Penyajian	Rilis
(1)	(2)	(3)
Kertas Kerja Kondisi Sosial Demografi Masyarakat Adat Suku Nuaulu di Kabupaten Maluku Tengah Pada Masa Pandemi Covid-19	Kabupaten	Desember 2021
Kertas Kerja Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Sosial Demografi Masyarakat Adat di Provinsi Bali Peluang Transformasi Menuju Bali Tangguh Berkelanjutan	Provinsi	Desember 2021
Kertas Kerja Masyarakat Marapu di Tengah Pandemi Covid-19: Kondisi Sosial Demografi, Respon dan Strategi Menghadapi Pandemi	Kabupaten	Desember 2021
Kertas Kerja Migran Kembali Dalam Masa Pandemi Covid-19 : Situasi Di Daerah Asal Sumatera Utara	Provinsi	Desember 2021
Kertas Kerja Pandemi Covid-19, Perubahan Demografi dan Strategi Adaptasi: Kasus Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Biak-Numfor	Kabupaten	Desember 2021
Kertas Kerja Sensus Penduduk 2020 dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Sosial Demografi (Studi Perubahan Sosial Demografi Pada Masyarakat Adat Tengger di Masa Covid-19)	Kabupaten	Desember 2021
Kertas Kerja Kondisi Ekonomi dan Sosial Demografi Masyarakat Perbatasan di Era Pandemi Covid-19: Kasus Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten	Desember 2021
Kertas Kerja Sensus Penduduk 2020 dan Pandemi Covid-19: Kondisi Sosial Demografi, Pengetahuan Lokal dan Budaya Orang Rimba di Jambi Sebelum dan Masa Covid-19	Kabupaten	Desember 2021
Kertas Kerja Menghadapi Multibencana: Perubahan Sosial Demografi Penyintas Bencana dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten	Desember 2021
Kertas Kerja Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Kesehatan di Kota Depok	Kota	Desember 2021
Kertas Kerja Kondisi Sosial Ekonomi dan Kesehatan Pekerja Migran pada Era Pandemi Covid-19: Kasus Kota Batam	Kota	Desember 2021
Kertas Kerja Situasi Sosial-Demografi Orang Tugutil di Halmahera Timur pada Masa Pandemi Covid-19	Kabupaten	Desember 2021
Video animasi hasil penelitian di 12 lokasi. https://www.youtube.com/watch?v=WjDwmdOKd80.	Nasional	Desember 2021

https://www.bps.go.id

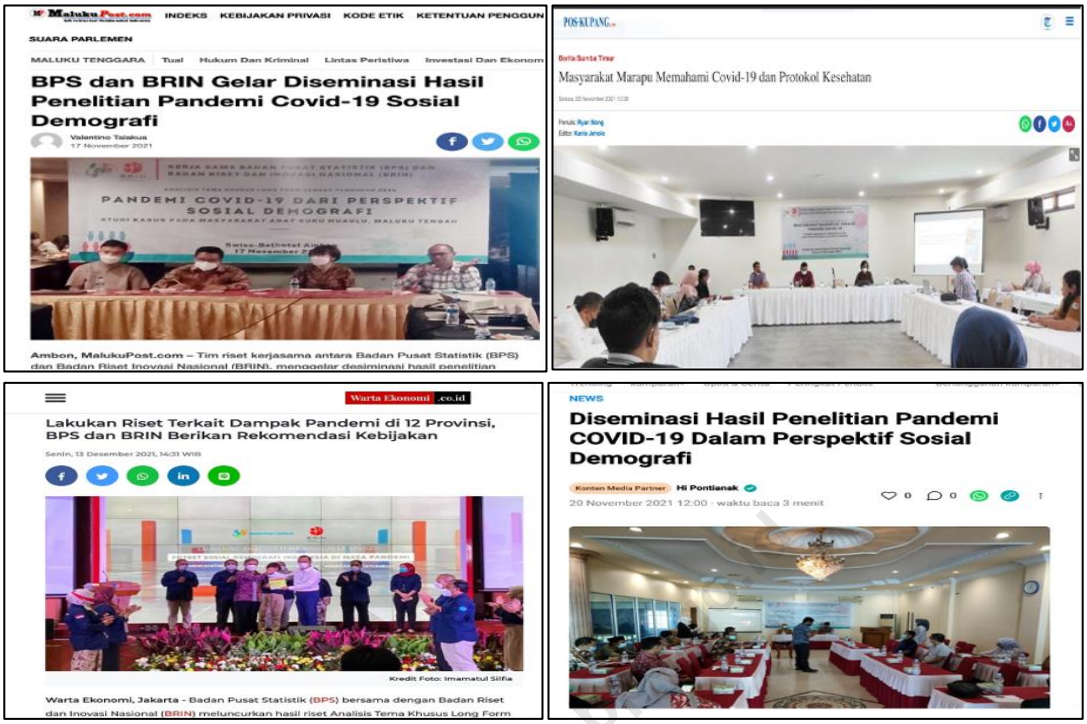

Gambar 42 Berita Media *Online* Terkait Diseminasi Analisis Tema Khusus

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2019). *Pedoman Pengkodean Sensus Penduduk 2020*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2012). *Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2010 Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Pedoman Pencacahan Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Pedoman Sensus Penduduk Online* . Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Pedoman Task Force Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Suplemen Pedoman Pencacahan Zona 1 DOPU Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Suplemen Pedoman Pencacahan Zona 2 Non DOPU Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Suplemen Pedoman Pencacahan Zona 3 Wawancara Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Suplemen Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 86 Tahun 2021 tentang Masterplan dan Network Planning Sensus Penduduk Tahun 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Pemerintah Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2013). *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

United Nations. (2017). *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses Revision 3*. New York: United Nations.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAGIAN 2

LONG FORM

SP2020

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 1

PERSIAPAN *LONG FORM* SP2020

https://www.bps.go.id

BAB 1 PERSIAPAN *LONG FORM* SP2020

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Dalam upaya untuk mendapatkan parameter demografi yang akurat perlu dilakukan kegiatan *Long Form* SP2020 dengan mendata penduduk secara sampel menggunakan kuesioner yang memuat pertanyaan lebih rinci. *Long Form* SP2020 mengusung empat misi besar sebagai *benchmark* indikator kependudukan Indonesia, potret demografi Indonesia setelah melewati gelombang ke-2 Pandemi Covid-19, evaluasi capaian pembangunan di bidang kependudukan pada SDGs dan RPJMN, serta dasar penentuan kebijakan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Diharapkan data *Long Form* SP2020 mampu menyediakan parameter kependudukan serta karakteristik penduduk Indonesia yang akurat dan berkualitas. BPS merumuskan beberapa hal yang menjadi tujuan kegiatan *Long Form* SP2020, yaitu:

1. Memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk.
2. Memperoleh data untuk penghitungan parameter demografi antara lain kelahiran, kematian, dan migrasi.
3. Sumber data dari indikator Angka Kematian Ibu.
4. Memperbarui data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk.
5. Menyediakan data karakteristik penduduk dan perumahan.
6. Sumber data dari indikator kependudukan untuk SDGs yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain.

https://www.bps.go.id

1.2 Perencanaan Umum

1.2.1 Rapat Pimpinan

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 menyebabkan adanya perubahan dalam pelaksanaan tata kelola kegiatan SP2020 termasuk pelaksanaan *Long Form* yang diundur menjadi tahun 2022. Dengan adanya keputusan terbaru terkait pelaksanaan kegiatan *Long Form* pada tahun 2022, pimpinan segera melakukan pembahasan terkait pelaksanaan kegiatan SP2020 ini. Pembahasan ini meliputi kesiapan pelaksanaan *Long Form* SP2020 baik secara teknis maupun administrasi. Kesiapan teknis meliputi sampel, moda pendataan, dan *monitoring*, sedangkan dari sisi administrasi meliputi keuangan, instrumen, hukum, dan publisitas.

1.2.2 Rapat Rutin Tim Teknis

Dengan adanya kegiatan pendataan *Long Form* SP2020 pada tahun 2022, pimpinan segera membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Berdasarkan SK KBPS Nomor 49 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 yang diperbarui sesuai dengan perkembangan saat pelaksanaan kegiatan dan terakhir diperbarui dengan SK KBPS Nomor 372 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022. Tim pelaksana kegiatan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 mencakup unsur Pengarah, Bidang Manajemen Pendataan dan Bidang Dokumentasi, Koordinasi dan Manajemen Risiko, Bidang Integrasi Data Kependudukan, Bidang Metodologi, Bidang Teknologi Informasi dan Pengolahan, dan Bidang Diseminasi, Bidang Perencanaan Anggaran, Bidang Keuangan, Bidang Logistik, Pengadaan, dan perlengkapan, Bidang Hubungan Kelembagaan, Publisitas, dan Hukum, serta Bidang Analisis dan Kualitas Data.

Keberadaan Sekretariat SP2020 pada tahun 2022 mengalami perubahan secara organisasi jika dibanding dengan pelaksanaan SP2020 sampai tahun 2020. Jika sebelumnya Sekretariat SP2020 berada di luar Tim Pelaksana Kegiatan SP2020, dalam pelaksanaan *Long Form* SP2020, Sekretariat SP2020 merupakan bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* SP2020 yaitu Bidang Dokumentasi, Koordinasi dan Manajemen Risiko.

Tugas Sekretariat SP2020 mencakup kompilasi dan dokumentasi setiap tahapan kegiatan *Long Form* SP2020, mengelola jembatan komunikasi antar bidang pada tim pelaksana *Long Form* SP2020 maupun BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, mengelola pusat layanan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan lapangan kegiatan, mengelola manajemen risiko, serta memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan progres pelaksanaan tahapan kegiatan *Long Form* SP2020. Sekretariat SP2020 menjembatani komunikasi antar bidang dalam Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* SP2020 dengan melaksanakan rapat antar bidang secara rutin.

https://www.bps.go.id

1.2.3 Laporan Berkala Progres Persiapan

Kegiatan *Long Form* SP2020 dalam rangka mendukung kelancaran tata kelola dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan *Long Form* SP2020 laporan berkala di sampaikan dalam beberapa hal yaitu:

1. Tata kelola dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan perkembangan kegiatan *Long Form* SP2020 dijalankan oleh Tim Bidang Dokumentasi, Komunikasi, dan Manajemen Risiko Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* SP2020, atau yang biasa dikenal sebagai Sekretariat SP2020;
2. Evaluasi dan pelaporan kegiatan *Long Form* SP2020 disusun secara berkala berdasarkan pelaksanaan proses bisnis *Long Form* SP2020, implementasi

jadwal kegiatan, serta hasil koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* SP2020;

3. Setiap Bidang pada Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* SP2020 diminta untuk mengutus satu orang *Liaison Officer* (LO) yang bertugas sebagai narahubung dan menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan;
4. Mengacu pada proses bisnis dan jadwal kegiatan *Long Form* SP2020, setiap Bidang pada Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* SP2020 diminta untuk menyusun jadwal kegiatan detail pada lingkup internal, yang dilengkapi dengan informasi identifikasi risiko dan mitigasinya.

1.2.4 Rapat Pimpinan Daerah

Dalam rangka persiapan kegiatan *Long Form* SP2020 tentunya dibutuhkan rapat pimpinan daerah untuk menyatukan visi misi, mengatur rencana berjalannya kegiatan, serta *sharing* risiko dan masalah yang mungkin terjadi dari berbagai daerah. Pembahasan komprehensif terkait fenomena-fenomena pendukung berdasarkan kajian sensus penduduk sebelumnya dari masing-masing provinsi diperlukan sebagai bekal untuk pelaksanaan *Long Form* SP2020.

https://www.bps.go.id

1.2.5 Rapat Interkementerian/Lembaga

Persiapan *Long Form* SP2020 melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah maupun non pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rapat persiapan maupun rapat koordinasi. Keterlibatan K/L ini meliputi dalam hal dukungan terhadap pelaksanaan *Long Form* SP2020 dan pada penyusunan pertanyaan kuesioner *Long Form* SP2020. Selain melibatkan K/L, pada persiapan *Long Form* SP2020 juga melibatkan para pakar atau akademisi terutama pada saat penyusunan alur pertanyaan kuesioner *Long Form* SP2020.

Rapat yang melibatkan beberapa K/L dan para pakar atau akademisi intens dilaksanakan dalam pembahasan pertanyaan kuesioner *Long Form* SP2020. BPS menghimpun kebutuhan dari beberapa K/L dalam penyusunan kuesioner dan masukan para pakar atau akademisi terkait alur yang sesuai pada pertanyaan kuesioner supaya dapat dihasilkan estimasi indikator yang tepat. Beberapa K/L yang terlibat dalam persiapan kuesioner *Long Form* SP2020 antara lain Kementerian Sosial, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

1.2.6 Penjadwalan Kegiatan

1. Identifikasi dan Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan *Long Form* SP2020 awalnya direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021. Namun, kegiatan *Long Form* SP2020 dihentikan pelaksanaannya karena keterbatasan anggaran akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, isu keselamatan petugas dilapangan akibat meningkatnya kasus infeksi Covid-19, serta potensi penolakan responden yang cukup tinggi. Setelah itu, pada tahun 2022, BPS memperoleh tambahan anggaran untuk melanjutkan pelaksanaan *Long Form* SP2020.

Persiapan pelaksanaan *Long Form* SP2020 dimulai dari tahun 2020 dan berlanjut sampai tahun 2021. Kemudian, rangkaian pelatihan dimulai sejak tahun 2021 namun karena kegiatan *Long Form* SP2020 ditunda maka rangkaian pelatihan dilanjutkan kembali pada Februari-Mei 2022. Kegiatan lapangan *Long Form* SP2020 dimulai dari pemutakhiran yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 31 Mei 2023 dan dilanjutkan pendataan sampel rumah tangga pada tanggal 1 – 30 Juni 2023. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pengolahan sampai akhirnya rilis hasil *Long Form* SP2020 pada Januari 2023. Secara rinci, jadwal pelaksanaan *Long Form* SP2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Jadwal Pelaksanaan *Long Form* SP2020

No	Waktu	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Persiapan		
1	2020-2021	1. Persiapan *Long Form* SP2020 2. Workshop Instruktur Utama (Intama) 3. Pelatihan Instruktur Nasional (Innas)
2	Januari–Februari 2022	Penerimaan Daftar Sampel
3	Februari 2022	Pengiriman file suplemen *Long Form* SP2020
4	22–23 Februari 2022	Pelaksanaan *Refreshing* Intama
5	14–16 Maret 2022	Pelaksanaan Refreshing Innas
6	21 Maret–2 April 2022	Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Daerah (Inda)
7	21 Februari–31 Maret 2022	Pelaksanaan rekrutmen petugas (Koseka, Kortim, PPL)
8	28 Maret–8 April 2022	Pendistribusian materi pelatihan petugas
9	21 Februari–31 Maret 2022	Pembelajaran Mandiri pra pelatihan petugas bagi Koseka, Kortim, dan PPL
10	10 April–14 Mei 2022	Pelaksanaan pelatihan petugas (Koseka, Kortim, PPL)
11	3–6 Mei 2022	Pelaksanaan pelatihan petugas CATI

https://www.bps.go.id

Lanjutan Tabel 11

No	Waktu	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Pelaksanaan Lapangan		
12	15 Mei – 30 Juni 2022	Koordinasi dengan pengurus SLS
13	15 – 31 Mei 2022	Pemutakhiran daftar penduduk
14	19 – 24 Mei 2022	Penjaminan kualitas pemutakhiran
15	23 – 31 Mei 2022	Tindak lanjut PK pemutakhiran
16	20 Mei – 8 Juni 2022	1. Entri daftar penduduk hasil pemutakhiran 2. Penarikan sampel ruta
17	1 – 30 Juni 2022	1. Pendataan ruta sampel 2. Pemeriksaaan hasil pendataan oleh Kortim 3. Melakukan verifikasi maternal oleh Kortim
18	15 Mei – 30 Juni 2022	Pengawasan dan supervisi kegiatan lapangan
19	6 – 14 Juni 2022	Penjaminan kualitas pendataan ruta sampel
20	13 – 22 Juni 2022	Tindak lanjut PK pendataan ruta sampel
21	22 Juni – 8 Juli 2022	Pelaporan BPS Daerah terkait kegiatan PK
Pengolahan		
22	5 Juni – 4 Juli 2022	Receiving dan batching dokumen hasil pendataan di BPS Kabupaten/Kota
23	10 Juni – 9 Juli 2022	Editing dan coding di BPS Kabupaten/Kota
24	15 Juni – 14 Juli 2022	Pengiriman dokumen SP2020-C2 dan SP2020-V ke BPS Provinsi
25	18 Juni – 17 Juli 2022	Pengolahan dokumen SP2020-C2 dengan data capture dan entri SP2020-V di BPS Provinsi

https://www.bps.go.id

2. Kerangka Kerja/*Network Planning*

NWP yang memuat penjelasan pelaksanaan *Long Form* SP2020 pertama kali ditetapkan pada tahun 2017. Kemudian, NWP tersebut diperbaiki karena terjadi perubahan jadwal pelaksanaan *Long Form* SP2020.

1.2.7 Usulan Anggaran dan Biaya

Usulan anggaran yang diajukan dan disetujui diawal untuk kegiatan *Long Form* SP2020 untuk seluruh satuan kerja BPS adalah sebesar Rp1,22 triliun namun anggaran yang ditetapkan setelah revisi adalah sebesar Rp186,06 miliar. Anggaran dimaksud diperuntukkan untuk kegiatan:

1. Pelaksanaan *Long Form* SP2020;
   a. Pelatihan Innas, Inda dan Petugas;
   b. Pelaksanaan lapangan;
   c. Penjaminan kualitas;
   d. Publisitas;

   e. Uji coba;
2. Pengolahan *Long Form* SP2020;
3. Diseminasi *Long Form* SP2020;
4. Analisis Profil Penduduk;
   a. Wokshop Analisis Profil Penduduk Nasional dan Provinsi;
   b. Analisis Profil Penduduk Nasional;
5. Penyusunan Integrasi Data Spasial Wilkerstat dan Muatan Hasil SP2020;

Sama hal nya dengan pelaksanan Kegiatan Pendataan *Short Form* SP2020, pada Pendataan *Long Form* SP2020 BPS juga menyusun Pedoman Administrasi Keuangan (PAK *Long Form* SP2020) sebagai panduan bagi para penanggungjawab kegiatan dan pengelola keuangan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam mengelola administrasi keuangan Kegiatan Pendataan *Long Form* SP2020.

1.2.8 Organisasi

https://www.bps.go.id

Struktur organisasi pendataan *Long Form* SP2020 disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pendataan *Long Form* SP2020 dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya karena pengawasan dan pemeriksaan lapangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan; setiap pelaku dalam organisasi mengetahui dengan pasti tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haknya masing-masing. Struktur organisasi pusat terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Sistem Informasi Statistik, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Humas dan Hukum, Inspektorat dan unit kerja terkait lainnya. Kemudian di tingkat daerah, struktur organisasi SP2020 selain terdiri dari personel BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota juga melibatkan gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota, dan camat di tingkat kecamatan.

Petugas lapangan terdiri dari Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Koordinator Tim (Kortim), dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL). Organisasi lapangan pendataan *Long Form* SP2020 sebagai berikut:

- Satu orang Koseka membawahi sekitar tiga orang Kortim dan dapat bekerja lintas kecamatan. Koseka diutamakan pegawai organik BPS yang ditugaskan menangani di kecamatan sampel.
- Satu orang Kortim membawahi sekitar tiga orang PPL. Kortim merupakan pegawai BPS atau mitra yang berpengalaman dalam kegiatan sensus/survei.
- Satu PPL bertugas pada sekitar lima Blok Sensus (BS).
- Masing-masing BS terdiri dari 16 rumah tangga sampel.

1.3 Persiapan Teknis

1.3.1 Konstruksi Kuesioner dan Buku Pedoman

1. Kuesioner *Long Form* SP2020

Berbeda dengan kuesioner *Short Form* yang menghasilkan data dasar penduduk, kuesioner *Long Form* menghasilkan data yang lebih spesifik terkait parameter-parameter kependudukan. Kuesioner *Long Form* mencakup berbagai pertanyaan yang lebih banyak dan lebih kompleks. Pertanyaan tersebut antara lain tentang kelahiran, kematian, migrasi, disabilitas, ketenagakerjaan, dan perumahan.

Penyiapan kuesioner *Long Form* SP2020 dilakukan sejak tahun 2018 yang disiapkan untuk pendataan di tahun 2021. Pelaksanaan pendataan *Long Form* SP2020 berubah dari tahun 2021 ke tahun 2022, sehingga memerlukan penyesuaian kuesioner pendataan *Long Form* SP2020 terutama pada referensi waktu pertanyaan terkait migrasi, kelahiran, kehamilan, kematian, dan kematian maternal. Perubahan ini dilakukan sejalan dengan masukan dari para pakar/praktisi dan *stake holder* terkait.

Narasi pertanyaan dan format kuesioner *Long Form* SP2020 disusun atau dirancang setelah didiskusikan secara luas dan mendalam serta diujicobakan di lapangan. Dalam merancang format kuesioner, hal-hal yang menjadi pertimbangan antara lain, kesesuaiannya dengan rencana perekaman data (yang menggunakan mesin *scanner*), serta kejelasan atau kemudahannya bagi petugas lapangan, khususnya PPL.

Selain Kuesioner *Long Form* SP2020 dibuat dalam versi PAPI dan CAPI, kuesioner ini juga dibuat dalam beberapa versi menyesuaikan dengan moda pendataan yang dilakukan, antara lain CATI dan CAWI. Penyempurnaan kuesioner *Long Form* SP2020 dilakukan hingga bulan Januari 2022. Daftar dan kuesioner yang digunakan dalam pendataan *Long Form* SP2020 adalah sebagai berikut:

https://www.bps.go.id

Tabel 12 Daftar Kuesioner *Long Form* SP2020

Kuesioner *Long Form* SP2020	Kegunaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
SP2020-RP1	Daftar Wilayah Tugas Koseka	Koseka
SP2020-RP2	Daftar Wilayah Tugas Kortim	Kortim
SP2020-RP3	Daftar Wilayah Tugas Petugas Pendataan Lapangan	PPL
LF.SP2020-DSBS	Daftar sampel wilayah blok sensus	Koseka
LF.SP2020-P	Daftar nama-nama keluarga dari hasil SP2020-DP dalam cakupan BS yang akan dimutakhirkan keberadaan dan informasinya	PPL dan Kortim
WB-2020	Peta wilayah BS sebagai panduan wilayah kerja	PPL
LF.SP2020-DSRT	Daftar Sampel Rumah Tangga dalam Blok Sensus	PPL dan Kortim
SP2020-C2	Kuesioner pendataan rumah tangga (PAPI)	PPL PAPI
	Kuesioner pendataan rumah tangga (CAPI)	PPL CAPI
	Kuesioner pendataan rumah tangga (CATI)	Petugas CATI
	Kuesioner pendataan rumah tangga (CAWI)	Responden (*Self Enumeration)*
SP2020-RC2	Rekap dokumen SP2020-C2	PPL
SP2020-V	Kuesioner Verifikasi Kematian maternal (PAPI)	Kortim PAPI
	Kuesioner Verifikasi Kematian maternal (CAPI)	Kortim CAPI
	Kuesioner Verifikasi Kematian maternal (CATI)	Petugas CATI

https://www.bps.go.id

2. Buku Pedoman dan Suplemen *Long Form* SP2020

Buku Pedoman *Long Form* SP2020 disusun untuk menjadi panduan bagi petugas lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan pendataan *Long Form* SP2020 berjalan sesuai dengan *standard operasional procedure* (SOP), mengikuti konsep definisi yang telah ditetapkan, serta berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Agar lebih efisien, buku pedoman di buat dalam beberapa versi sesuai dengan struktur organisasi lapangan. Bagi petugas lapangan, buku pedoman ini mencakup dua hal utama: 1) konsep dan definisi operasional yang relevan, khususnya yang tercantum dalam kuesioner dan 2) tata cara atau mekanisme pendataan di lapangan. Buku pedoman ini disusun tidak hanya untuk kegiataan

teknis pendataan tetapi juga untuk bagian lain dari rangkaian kegiatan pelaksanaan *Long Form* SP2020, seperti administrasi dan pengolahan.

Perubahan jadwal pada kegiatan *Long Form* SP2020 yang awalnya direncanakan pada tahun 2021 menjadi tahun 2022 memerlukan penyesuaian pada buku pedoman yang akan digunakan sebagai acuan persiapan dan pelaksanaan di lapangan. Buku pedoman telah dicetak dan terdistribusi ke daerah pada tahun 2021, sehingga untuk menuangkan perubahan dan penyesuaian tata kelola yang sudah ditetapkan perlu disusun suplemen buku pedoman. Berbeda dengan buku pedoman yang dicetak dan didistribusikan dalam bentuk *hardcopy*, buku suplemen tidak dicetak dan didistribusikan dalam bentuk *softfile*. Daftar buku pedoman dan buku suplemen yang digunakan dalam pendataan *Long Form* SP2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Daftar Buku Pedoman *Long Form* SP2020

Buku Pedoman	Suplemen	Kegunaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Buku 1 **Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Pendataan *Long Form* SP2020**	**Suplemen 1** Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Pendataan *Long Form* SP2020	Buku pedoman untuk BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota	Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, Tim Teknis BPS Provinsi, dan Tim Teknis BPS Kabupaten/Kota
Buku 2A **Pedoman Koseka Wilayah PAPI Pendataan *Long Form* SP2020**	**Suplemen 2A** Pedoman Koseka Wilayah PAPI Pendataan *Long Form* SP2020	Buku pedoman pelaksanaan lapangan bagi Koseka di wilayah PAPI	Koseka
Buku 2B **Pedoman Koseka Wilayah CAPI Pendataan *Long Form* SP2020**	**Suplemen 2B** Pedoman Koseka Wilayah CAPI Pendataan *Long Form* SP2020	Buku pedoman pelaksanaan lapangan bagi Koseka wilayah CAPI	Koseka
Buku 3A **Pedoman Koordinator Tim Wilayah PAPI Pendataan *Long Form* SP2020**	**Suplemen 3A** Pedoman Koordinator Tim Wilayah PAPI Pendataan *Long Form* SP2020	Buku pedoman pelaksanaan lapangan bagi Kortim dan pemeriksaan di wilayah PAPI	Kortim, Koseka

https://www.bps.go.id

Lanjutan Tabel 13

Buku Pedoman	Suplemen	Kegunaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Buku 3B **Pedoman Koordinator Tim Wilayah CAPI Pendataan *Long Form* SP2020**	**Suplemen 3B** Pedoman Koordinator Tim Wilayah CAPI Pendataan *Long Form* SP2020	Buku pedoman pelaksanaan lapangan bagi Kortim dan pemeriksaan di wilayah CAPI	Kortim, Koseka
Buku 4A **Pedoman Petugas Pendataan Lapangan wilayah PAPI *Long Form* SP2020**	**Suplemen 4A** Pedoman Petugas Pendataan Lapangan wilayah PAPI Pendataan *Long Form* SP2020	Buku pedoman pelaksanaan lapangan bagi PPL wilayah PAPI	Koseka, Kortim, dan PPL
Buku 4B **Pedoman Petugas Pendataan Lapangan wilayah CAPI *Long Form* SP2020**	**Suplemen 4B** Pedoman Petugas Pendataan Lapangan wilayah CAPI Pendataan *Long Form* SP2020	Buku pedoman pelaksanaan lapangan bagi PPL wilayah CAPI	Koseka, Kortim, dan PPL
Buku 5 **Pedoman Pengkodean Pendataan *Long Form* SP2020**		Buku pedoman untuk pengkodean jawaban pada kuesioner di wilayah PAPI atau CAPI	Kortim
Buku 6 **Pedoman Pelatihan Pendataan *Long Form* SP2020**	**Suplemen 6** Pedoman Pelatihan Pendataan *Long Form* SP2020	Buku pedoman untuk penyelenggaraan pelatihan *Long Form* SP2020	BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota
Buku 7 **Pedoman Pengolahan Pendataan *Long Form* SP2020**	**Suplemen 7** Pedoman Pengolahan Pendataan *Long Form* SP2020	Buku pedoman untuk pengolahan *Long Form* SP2020	BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota
Buku 10 **Panduan Petugas CATI Pendataan *Long Form* SP2020**		Buku pedoman bagi supervisor dan petugas CATI	Supervisor dan Petugas CATI

https://www.bps.go.id

3. Bahan Tayang/Bahan Ajar *Long Form* SP2020

Bahan ajar digunakan sebagai alat pendukung pelatihan yang dilakukan dalam rangka kegiatan pendataan *Long Form* SP2020. Bahan ajar digunakan oleh instruktur sebagai sarana menyampaikan materi yang ada dalam buku pedoman dan buku suplemen. Bahan ajar ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk memudahkan peserta pelatihan dalam memahami buku pedoman dan suplemen serta instrumen lain yang digunakan dalam pendataan *Long Form* SP2020 baik terkait konsep dan definisi serta tata cara pendataan lapangan.

Bahan ajar disusun berdasarkan diskusi instruktur utama (intama) dan masukan dari master intama. Bahan ajar dibuat berupa paparan dalam bentuk *power point*. Selain itu, juga dibuat video berupa contoh kasus dan cara pengisian kuesioner. Bahan ajar digunakan pada saat pelatihan dimulai dari pelatihan instruktur nasional (innas), pelatihan instruktur daerah (inda), hingga pelatihan petugas.

Pembuatan bahan ajar disesuaikan dengan moda pendataan yang digunakan yaitu CAPI dan PAPI. Oleh karena itu, bahan ajar dibuat menjadi tiga kategori yaitu wilayah CAPI, wilayah PAPI *scanner*, dan PAPI entri. Secara umum, ketiga jenis bahan ajar tersebut berisi materi yang sama yaitu berisi konsep dan definisi serta SOP pendataan *Long Form* SP2020. Perbedaan dari ketiga bahan ajar ini terletak pada tata cara pengisian dokumen pendataan.

a. Bahan ajar wilayah CAPI
   Pendataan di wilayah CAPI dilakukan dengan menggunakan aplikasi CAPI sehingga dalam bahan ajar disertakan juga materi yang memuat tata cara menggunakan aplikasi pendataan.
b. Bahan ajar wilayah PAPI *scanner*
   Pendataan di wilayah PAPI yang diolah dengan *scanner* dilakukan dengan kuesioner yang berbeda dengan kuesioner di wilayah PAPI yang diolah menggunakan program aplikasi data entri. Perbedaan ini terletak pada tata cara pengisiaan kuesioner yang diolah dengan menggunakan *scanner*, pemilihan jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner *scanner* dilakukan dengan memberikan tanda (*marking*) pada salah satu kode pilihan jawaban.
c. Bahan ajar wilayah PAPI entri
   Kuesioner yang diolah dengan menggunakan program aplikasi data entri, pemilihan jawaban dari pertanyaan di kuesioner dilakukan dengan menuliskan salah satu kode pilihan jawaban pada kotak/tempat yang tersedia.

https://www.bps.go.id

1.3.2 Pengembangan Konsep, Definisi, dan Klasifikasi

1. Konsep Penduduk dan Rumah Tangga

Pendataan *Long Form* SP2020 menggunakan konsep "*de jure*" atau konsep di mana seseorang biasanya menetap/bertempat tinggal (*usual residence*) dan konsep "*de facto*" atau konsep di mana seseorang berada pada saat pendataan. Konsep penduduk yang digunakan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, didata dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian satu tahun atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama satu tahun atau lebih, didata di mana mereka tinggal pada saat pendataan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

Konsep rumah tangga yang digunakan pada *Long Form* SP2020 mengacu pada konsep *household* yang digunakan secara internasional dalam pelaksanaan survei rumah tangga yaitu *housekeeping*, berdasarkan kesamaan pengelolaan makan/minum dan kebutuhan rumah tangga. Secara definisi, rumah tangga diartikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu. Orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga tersebut disebut sebagai kepala rumah tangga (KRT). Rumah tangga yang dicatat pada *Long Form* SP2020 hanya rumah tangga biasa. Daftar pemutakhiran (*prelist*) yang digunakan bersumber dari hasil SP2020 yang menggunakan konsep keluarga berdasarkan pendekatan kartu keluarga, sehingga perlu dilakukan konversi dari pendekatan keluarga menjadi rumah tangga.

https://www.bps.go.id

2. Klasifikasi Urban Rural

Seperti halnya SP September 2020, klasifikasi urban rural yang digunakan pada *Long Form* SP2020 disusun berdasarkan Perka BPS Nomor 120 Tahun 2020 tentang klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan di Indonesia 2020. Menjelang SP2020, status urbanitas desa/kelurahan direklasifikasi berdasarkan data terkini dari Podes 2019. Seperti dilakukan sebelumnya, kriteria desa perkotaan tahun 2020 merupakan penyempurnaan kriteria desa perkotaan tahun 2000. Kriteria desa perkotaan 2020 tetap menggunakan tiga indikator sebagai ukurannya, yaitu kepadatan penduduk per km^2, persentase keluarga pertanian, dan akses untuk mencapai fasilitas perkotaan. Yang membedakan kriteria desa perkotaan tahun 2020 dengan kriteria sebelumnya adalah tidak digunakannya lagi variabel bioskop, perubahan kriteria pada rumah tangga telepon, dan rumah tangga pengguna listrik.

Perubahan metode klasifikasi tersebut sudah melalui tahapan eksplorasi data, uji statistik, studi kasus, serta optimasi melalui simulasi secara numerik maupun grafik. Selain itu hasil yang didapat juga telah mempertimbangkan berbagai usul dan masukan *subject matter*, antara lain usulan penambahan variabel, pengurangan variabel, perubahan kriteria interval pada masing-masing *scoring* termasuk juga kewajaran perubahan kriteria rumah tangga pertanian serta pengaruh proporsi desa perkotaan perdesaan terhadap estimasi statistik.

3. Klasifikasi dan Kodifikasi Bahasa, Suku Bangsa, Kewarganegaraan, dan Agama/Kepercayaan

Dalam pendataan *Long Form* SP2020 dikumpulkan informasi mengenai bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, dan agama/kepercayaan responden yang dapat menggambarkan keanekaragaman dan kekayaan budaya masyarakat yang penting untuk mendeskripsikan identitas bangsa. Klasifikasi kode bahasa, suku bangsa, dan kewarganegaraan pada kuesioner *Long Form* SP2020 mengikuti kodifikasi pada kuesioner *Short Form* SP2020.

Kode negara dan kewarganegaraan terdiri dari empat digit, satu digit pertama menunjukkan kode luar negeri, tiga digit berikutnya menunjukkan urutan Negara. Sumber penentuan kode dan nama negara berasal dari *Standard Country or Area Codes for Statistical Use* (M49) *United Nations Statistics Division (UNSD)*. (https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/overview/).

Kode suku bangsa yang digunakan pada pendataan *Long Form* SP2020 terdiri dari lima digit, dengan dua digit pertama menunjukkan pulau/kepulauan asal suku, tiga digit berikutnya menunjukkan urutan nama suku. Kode dua digit pertama pulau/kepulauan asal suku tersebut adalah sebagai berikut:

10 Suku asal Sumatera
30 Suku asal Pulau Jawa
40 Suku asal Luar Negeri
50 Suku asal Pulau Bali dan Nusa Tenggara
60 Suku asal Kalimantan
70 Suku asal Sulawesi
80 Suku asal Pulau Maluku
90 Suku asal Papua
99 Tidak menunjukkan pulau/kepulauan asal suku
9999 5 Indonesia (untuk penduduk yang menyatakan sukunya Indonesia)
9999 6 Suku lainnya (untuk suku-suku yang tidak teridentifikasi asal pulaunya atau untuk suku lainnya yang berasal dari luar negeri)

Pertanyaan terkait bahasa dalam *Long Form* SP2020 mencakup bahasa yang pertama kali dikuasai (bahasa ibu) dan penggunaan bahasa daerah untuk

https://www.bps.go.id

komunikasi sehari-hari oleh responden. Kode bahasa daerah yang digunakan pada pendataan *Long Form* SP2020, diperoleh dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemedikbudristek yang dimodifikasi dan ditambahkan kode tertentu untuk bahasa lainnya. Kode bahasa daerah terdiri dari lima digit kode, dimana dua digit pertama menunjukkan pulau/kepulauan asal bahasa daerah, tiga digit berikutnya menunjukkan urutan nama bahasa daerah. Kode dua digit pertama pulau/kepulauan asal bahasa daerah tersebut adalah sebagai berikut:

01 Bahasa daerah asal Sumatera
02 Bahasa daerah asal Pulau Jawa dan Bali
03 Bahasa daerah asal Pulau Kalimantan
04 Bahasa daerah asal Pulau Sulawesi
05 Bahasa daerah asal Pulau Nusa Tenggara
06 Bahasa daerah asal Pulau Maluku dan Maluku Utara
07 Bahasa daerah asal Pulau Papua dan Papua Barat
07999 Bahasa daerah lainnya

Pada pendataan *Long Form* SP2020 dikumpulkan data mengenai agama/kepercayaan yang dianut oleh responden yang jawabannya bersifat tertutup sesuai dengan pengakuan responden, sehingga risiko salah kode relatif kecil. Pilihan jawaban yang disediakan untuk pertanyaan agama/kepercayaan yang dianut adalah: 1) Islam; 2) Kristen (termasuk Kristen Protestan, Advent, Pantekosta, Baptis, Kharismatik, dan lain-lain); 3) Katolik; 4) Hindu; 5) Budha; 6) Konghucu; 7) Penghayat Kepercayaan (termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Organisasi Aji Dipa, Organisasi Hak Sejati, Paguyuban Jaya Sampurna, dan lain-lain); dan 8) Agama/Kepercayaan Lainnya.

https://www.bps.go.id

4. Kodifikasi Wilayah Administrasi

Kode wilayah administrasi, dari tingkat provinsi sampai tingkat desa, yang digunakan dalam *Long Form* SP2020 adalah kode standar BPS. Menurut standar ini, kode-kode provinsi dan kabupaten/kota masing-masing memiliki dua digit, sedangkan kode-kode kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing tiga digit. Jelasnya, kode lengkap suatu desa/kelurahan akan memiliki sepuluh digit yang terdiri dari dua digit pertama menunjukkan kode provinsi, dua digit berikutnya kode kabupaten/kota, tiga digit berikutnya kode kecamatan, dan tiga digit terakhir kode desa/kelurahan. Penggunaan kode wilayah yang meliputi kode provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada Master File Desa (MFD) Tahun 2018 Semester 2.

1.3.3 Uji Coba Pelaksanaan *Long Form* SP2020

Pendataan *Long Form* SP2020 di masa pandemi memerlukan penyempurnaan moda pengumpulan data *Long Form* SP2020 menyesuaikan dengan keadaan yang memerhatikan keselamatan petugas dan masyarakat. Proses bisnis pendataan yang meminimalkan pendataan tatap muka perlu dikembangkan dengan penambahan moda non tatap muka, yaitu dengan menggunakan CATI, CAWI, maupun DOPU. Pendataan dengan menggunakan berbagai moda seperti PAPI, CAPI, CATI, CAWI, maupun DOPU disebut *multimode data collection*.

Sebelum pelaksanaan, dilakukan Uji Coba *Long Form* SP2020 untuk menyempurnakan proses bisnis pengumpulan data *Long Form* SP2020 dengan berbagai moda. Uji coba menghasilkan rekomendasi pada setiap tahapan pelaksanaan *Long Form* SP2020, identifikasi risiko dan mitigasi di setiap tahapan, dan pendetailan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan output yang dicapai.

https://www.bps.go.id

1.3.4 Penyiapan Sampel BS dan Rumah Tangga *Long Form* SP2020

Target populasi dalam pendataan *Long Form* SP2020 adalah seluruh rumah tangga dan penduduk di Indonesia. Unit observasi dari survei ini adalah rumah tangga, dengan unit analisis adalah rumah tangga dan individu. Unit sampling dari survei ini adalah rumah tangga (secondary sampling unit) dan blok sensus sebagai enumeration area (primary sampling unit). Penentuan ukuran sampel minimum untuk setiap kabupaten/kota dipengaruhi oleh keragaman populasi yang akan disurvei, tingkat ketepatan pendugaan yang diinginkan, level estimasi, dan biaya pengumpulan data.

Selanjutnya ditentukan jumlah sampel untuk *Long Form* SP2020 adalah sebesar 4.294.896 rumah tangga (mencakup 268.431 blok sensus). Pemilihan sampel yang digunakan pada *Long Form* SP2020 adalah *Stratified Two Stage Sampling* yang diawali dengan pemilihan sampel BS dan dilanjutkan dengan pemilihan sampel rumah tangga. Pada penentuan sampel rumah tangga dilakukan stratifikasi pada level rumah tangga berdasarkan informasi ada tidaknya kasus kematian yang diperoleh dari hasil pemutakhiran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peluang tercakupnya kasus kematian dalam sampel terpilih.

Sebelum digunakan untuk pendataan, BPS Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk melakukan identifikasi sampel BS dan melaporkan potensi kendala pelaksanaan survei pada tiap BS terpilih. Tahap selanjutnya adalah penetapan BS sampel untuk *Long Form* SP2020 yang tertuang dalam surat Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Nomor B-279/03100/VS.025/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Tanggapan Hasil Identifikasi Blok Sensus dengan Potensi Kendala pada Proses Bisnis Pemutakhiran LF.SP2020.

1.3.5 Pelatihan Instruktur dan Petugas

Pelatihan *Long Form* SP2020 pada tahun 2022 dilakukan secara berjenjang, dimulai dari *Refreshing* Intama, *Refreshing* Innas, Pelatihan Inda, dan Pelatihan Petugas. Untuk Intama dan Innas kegiatan bersifat *refreshing* karena sebenarnya pada tahun 2021 sudah pernah dilaksanakan *Workshop* Intama dan pelatihan Innas, namun karena *refocussing* anggaran terkait Covid-19 sehingga kegiatan *Long Form* SP2020 secara keseluruhan ditunda. Sedangkan untuk pelatihan Inda dan petugas baru dilaksanakan pada tahun 2022.

1. *Refreshing* Instruktur Utama

Kegiatan *Refreshing* Intama *Long Form* SP2020 diselenggarakan secara virtual melalui *zoom meeting*. Kegiatan ini secara umum dimaksudkan untuk melakukan pembahasan rancangan kebutuhan pelatihan *Long Form* SP2020 serta untuk menyiapkan Intama yang berkualitas dan mampu melatih Innas *Long Form* SP2020 dengan baik. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan agar para Intama memahami proses bisnis, manajemen lapangan dan organisasi lapangan LF SP2020; Intama memahami metodologi pendataan *Long Form* SP2020; Intama memiliki pemahaman terkait konsep definisi, tata cara pengisian kuesioner, dan keseluruhan SOP pelaksanaan lapangan *Long Form* SP2020; dan Intama memahami penggunaan aplikasi berbasis TI pada pendataan *Long Form* SP2020. Pada kegiatan ini juga dilakukan pemantapan pembahasan instrumen *Long Form* SP2020 dan pemantapan skema serta kebutuhan materi untuk pelatihan *Long Form* SP2020.

https://www.bps.go.id

2. *Refreshing* Instruktur Nasional

Refreshing Innas *Long Form* SP2020 diselenggarakan dengan metode pelatihan jarak jauh secara *online* oleh Pusdiklat-BPS melalui Warung Kompetensi Pegawai (WARKOP). WARKOP merupakan *Learning Management System* yang dikelola oleh Pusdiklat-BPS. Kegiatan ini secara umum dimaksudkan untuk melakukan pembahasan rancangan kebutuhan pelatihan *Long Form* SP2020 serta untuk menyiapkan Innas yang berkualitas dan mampu melatih Inda *Long Form* SP2020 dengan baik. Selain itu, secara khusus kegiatan ini bertujuan agar para Innas memahami proses bisnis, manajemen lapangan dan organisasi lapangan *Long Form* SP2020; Innas memahami metodologi pendataan *Long Form* SP2020; Innas memiliki pemahaman terkait konsep definisi, tata cara pengisian kuesioner, dan keseluruhan SOP pelaksanaan lapangan *Long Form* SP2020; Innas memahami penggunaan aplikasi berbasis TI pada pendataan *Long Form* SP2020; Pembahasan instrumen *Long Form* SP2020; serta pemantapan skema dan kebutuhan materi untuk pelatihan *Long Form* SP2020.

Gambar 43 Pembukaan *Refreshing* Instruktur Nasional *Long Form* SP2020

3. Pelatihan Instruktur Daerah

Kegiatan Pelatihan Inda *Long Form* SP2020 diselenggarakan melalui WARKOP Pusdiklat-BPS. Penyelenggara pelatihan Inda adalah masing-masing BPS Provinsi. Kegiatan ini bertujuan agar para Inda memahami proses bisnis, manajemen lapangan dan organisasi lapangan *Long Form* SP2020; Inda memahami metodologi pendataan *Long Form* SP2020; Inda memiliki pemahaman terkait konsep definisi, tata cara pengisian kuesioner, dan keseluruhan SOP pelaksanaan lapangan *Long Form* SP2020; Inda memahami penggunaan aplikasi berbasis TI pada pendataan *Long Form* SP2020; pembahasan instrumen *Long Form* SP2020; dan pemantapan skema dan kebutuhan materi untuk pelatihan *Long Form* SP2020.

Gambar 44 Pelatihan Instruktur Daerah *Long Form* SP2020

https://www.bps.go.id

4. Pelatihan Petugas

Pelatihan Petugas *Long Form* SP2020 diselenggarakan oleh masing-masing BPS Kabupaten/Kota. Pelatihan diselenggarakan secara luring di tempat pelatihan yang disediakan oleh panitia dari masing-masing BPS Kabupaten/Kota dengan skema pembiayaan dari masing-masing BPS Kabupaten/Kota. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pelatihan petugas *Long Form* SP2020 dilakukan pada beberapa wilayah sebagai sampel agar mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh terkait persiapan lapangan, jalannya pelatihan petugas tatap muka, serta jalannya proses bisnis *Long Form* SP2020 di daerah.

Gambar 45 Pelatihan Petugas *Long Form* SP2020

https://

1.3.6 Penggunaan *Multimode Data Collection*

Tahapan pendataan *Long Form* SP2020 dibedakan menjadi wilayah PAPI dan wilayah CAPI. Secara umum pada tiap wilayah tersebut tahapan pendataan dilakukan dari pemutakhiran kemudian dilanjutkan dengan pendataan SP2020-C2 oleh PPL dan dilakukan verifikasi kematian maternal menggunakan kuesioner SP2020-V oleh Kortim. Pada tahapan pemutakhiran di wilayah PAPI maupun CAPI, metode pengumpulan data yang digunakan adalah moda PAPI. Sementara itu, pada tahap pendataan rumah tangga sampel dengan menggunakan daftar SP2020-C2 oleh PPL, digunakan berbagai moda pengumpulan data antara lain:

1. PAPI (*Paper and Pencil Interviewing*),
2. CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*),
3. CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), dan
4. CAWI (*Computer Aided Web Interviewing*).

Pendataan *Long Form* SP2020 dengan berbagai moda tersebut, dilakukan dengan prosedur standar sebagai berikut:

1. Pendataan pada wilayah PAPI dilakukan semaksimal mungkin wawancara secara tatap muka. Jika responden tidak bersedia atau menolak didata secara tatap muka, maka responden akan diwawancara dengan metode CATI atau melakukan pengisian mandiri melalui CAWI.
2. Pendataan wilayah CAPI dilakukan semaksimal mungkin wawancara secara tatap muka. Jika responden tidak bersedia atau menolak didata secara tatap muka, maka responden akan diwawancara dengan metode CATI atau melakukan pengisian mandiri melalui CAWI.
3. Peralihan pendataan tatap muka menjadi moda CATI dan pengisian mandiri dengan CAWI harus dilengkapi dengan berita acara peralihan moda.

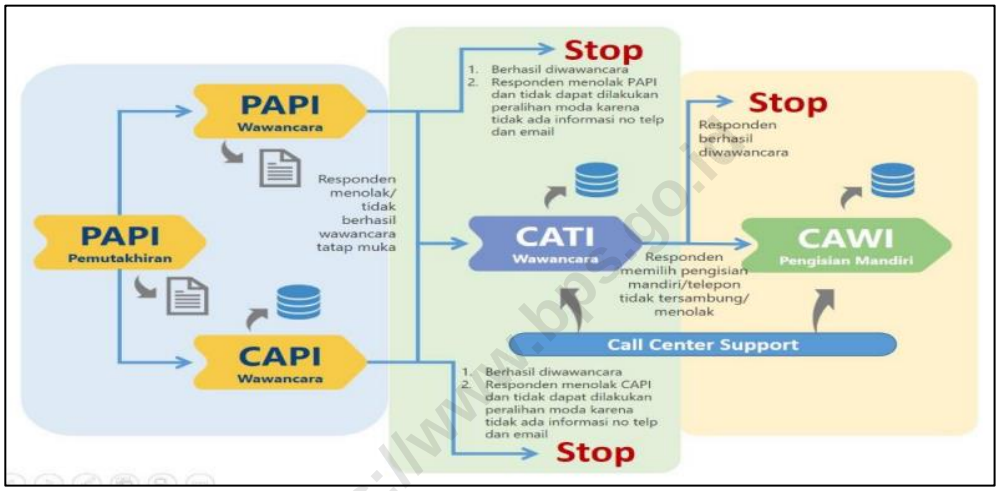

Gambar 46 Mekanisme Pendataan *Long Form* SP2020

https://www.bps.go.id

1. Skema Pendataan Pada Wilayah PAPI

Prosedur pendataan SP2020-C2 wilayah PAPI dapat dilihat pada gambar berikut ini :

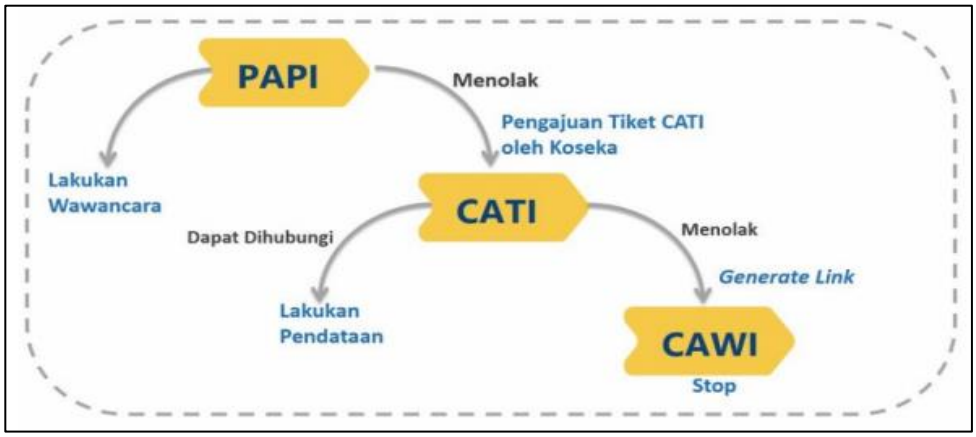

Gambar 47 Prosedur Pendataan SP2020-C2 Wilayah PAPI

Seluruh rumah tangga sampel terlebih dahulu diupayakan pendataan SP2020-C2 secara tatap muka menggunakan PAPI. Jika ada rumah tangga yang menolak atau tidak dapat ditemui dan sudah dilakukan kunjungan sebanyak tiga kali (PPL melengkapi bukti kunjungan dan melampirkan dalam berita acara) maka responden didata dengan moda CATI. Jika pendataan melalui CATI sudah diupayakan untuk dihubungi sebanyak lima kali, responden menolak didata atau nomor tidak terhubung, maka rumah tangga tersebut dikirim tautan CAWI untuk pengisian secara mandiri. Selanjutnya, pendataan SP2020-V dilakukan oleh Kortim mengikuti moda pendataan SP2020-C2.

2. Skema Pendataan Pada Wilayah CAPI

Prosedur pendataan SP2020-C2 wilayah CAPI dapat dilihat pada gambar berikut ini:

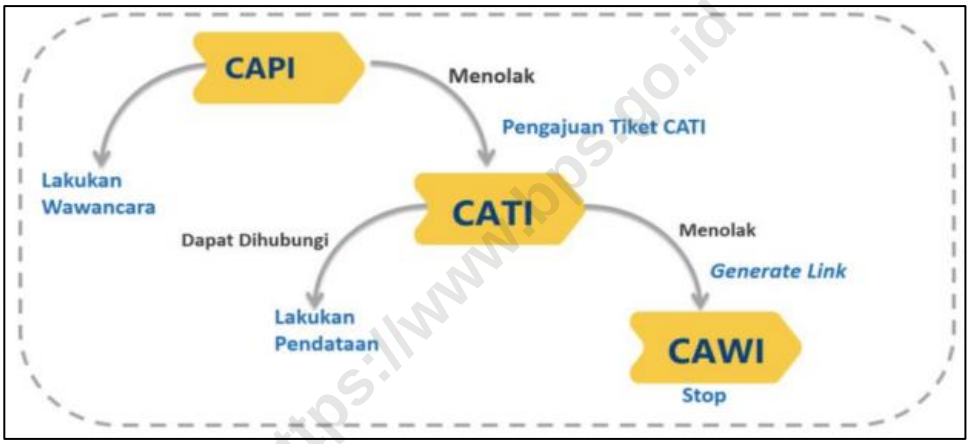

Gambar 48 Prosedur Pendataan SP2020-C2 Wilayah CAPI

Seluruh rumah tangga sampel terlebih dahulu diupayakan pendataan SP2020-C2 menggunakan CAPI. Jika ada rumah tangga yang menolak atau tidak dapat ditemui untuk dilakukan pendataan tatap muka menggunakan CAPI, dan sudah dilakukan kunjungan sebanyak tiga kali (PPL melengkapi bukti kunjungan dan melampirkan dalam berita acara) maka responden didata dengan moda CATI. Pada wilayah CAPI, tiket CATI akan otomatis terbentuk ketika Koseka memberikan *approval* terhadap kuesioner SP2020-C2 dengan pengisian hasil kunjungan tidak berhasil wawancara langsung. Jika pendataan melalui CATI sudah diupayakan dengan dihubungi sebanyak lima kali, atau responden menolak untuk didata atau nomor tidak terhubung, maka rumah tangga tersebut dikirim link CAWI untuk pengisian mandiri. Selanjutnya, pendataan SP2020-V dilakukan oleh Kortim mengikuti moda pendataan SP2020-C2.

https://www.bps.go.id

1.4 Penyiapan Logistik

Instrumen dan perlengkapan petugas dalam pendataan *Long Form* SP2020 digunakan untuk mendukung kegiatan pelatihan petugas dan pelaksanaan lapangan. Pengadaan instrumen (buku pedoman dan kuesioner) dilakukan di BPS Provinsi dan dikirim ke BPS Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu, perlengkapan petugas *Long Form* SP2020 tidak dilakukan pengadaan kembali, melainkan mengoptimalkan perlengkapan petugas yang telah diadakan pada persiapan *Short Form* SP2020 sebelumnya, sehingga untuk memenuhi kecukupan perlengkapan petugas di setiap wilayah, dilakukan realokasi perlengkapan petugas antar wilayah.

Adapun jenis instrumen dan perlengkapan petugas untuk pendataan *Long Form* SP2020 wilayah PAPI terdiri dari buku pedoman, kuesioner, alat tulis, tas, rompi, tanda pengenal, dan surat tugas. Sementara untuk wilayah CAPI petugas diberikan perlengkapan tambahan berupa *power bank*. Selain itu, untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, petugas dibekali dengan alat pelindung diri (APD) berupa *face shield* dan masker yang pengadaannya dilakukan oleh masing-masing BPS Kabupaten/ Kota.

https://www.bps.go.id

1.5 Publisitas dan Dukungan *Long Form* SP2020

Long Form SP2020 merupakan salah satu survei BPS yang memiliki sampel yang sangat besar mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga perlu publisitas atau sosialisasi secara masif. Dalam bahasa publisitas, supaya masyarakat umum lebih mudah memahami, *Long Form* SP2020 disebut juga dengan SP2020 Lanjutan. Berbagai bentuk sosialisasi dan dukungan selama *Long Form* SP2020 adalah sebagai berikut:

1.5.1 Koordinasi Sekretariat SP2020

Untuk mempermudah alur komunikasi, dibentuklah group Kaizala Sekretariat *Long Form* SP2020 yang berisi seluruh anggota Tim Sekretariat SP2020 pusat beserta *Liaison Officer* masing-masing bidang, dan Tim Sekretariat SP2020 daerah dari seluruh BPS Provinsi. Jalur komunikasi tersebut juga dimanfaatkan dengan baik dalam hal publisitas *Long Form* SP2020 yang terstruktur antara BPS Pusat ke BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota.

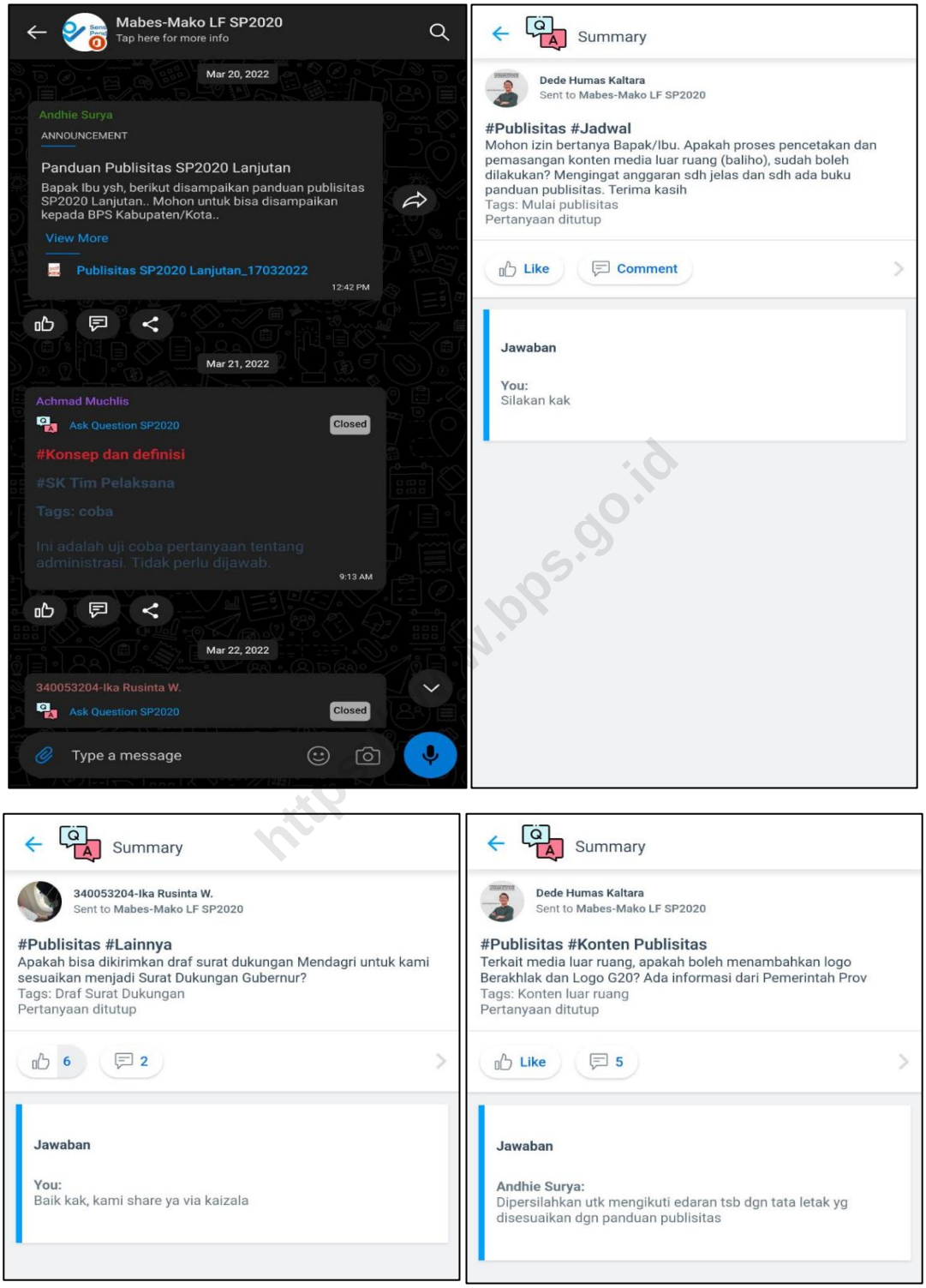

Gambar 49 Koordinasi Sekretariat *Long Form* SP2020 melalui Grup Kaizala

1.5.2 Publisitas di Media Elektronik, Media Cetak, Media Online, dan Media Sosial

Sosialisasi *Long Form* SP2020 melalui media televisi dilaksanakan di iNews TV, TVOne, dan Kompas TV. Narasumber yang hadir pada acara tersebut adalah Direktur Diseminasi Statistik BPS dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Selain melalui TV, sosialisasi juga dilakukan melalui radio yaitu di Radio Elshinta dan KBR dalam bentuk *talkshow*. Topik *talkshow* di Radio Elshinta adalah "Apa Saja Pertanyaan SP2020 lanjutan", sedangkan topik *talkshow* di radio KBR adalah "Bagaimana Jaminan Kerahasiaan Data SP2020 Lanjutan".

Gambar 50 Sosialisasi *Long Form* SP2020 di Kompas TV

Gambar 51 Sosialisasi Sensus Penduduk Lanjutan di Radio Elshinta

Sosialisasi *Long Form* SP2020 juga melalui media cetak yang dilakukan melalui harian Kompas yang merupakan salah satu media cetak terbesar di Indonesia. Artikel disajikan setengah halaman pada 23 Mei 2022 dengan judul "BPS Gelar Sensus Penduduk 2020 Lanjutan," dengan Kepala BPS sebagai narasumber utama. Salah satu pelengkap dari penayangan artikel di harian Kompas adalah publisitas konten *Long Form* SP2020 di IG Story akun koran Kompas @kompasklasika.

16

Sosok

Mateus Suwarsono

Pengabdian untuk Seni Etnis

PRIME

BPS Gelar Sensus Penduduk 2020 Lanjutan

Gambar 52 Publisitas *Long Form* SP2020 di Media Cetak

Sosialisasi *Long Form* SP2020 juga mencakup media online dalam bentuk artikel. Artikel pertama dengan judul "BPS Segera Adakan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan terhadap 4,3 juta Sampel Rumah Tangga" tayang di Kompas.com. Artikel lain terkait *Long Form* SP2020 juga ditayangkan di Antaranews.com dengan judul "BPS siap gelar Sensus Penduduk 2020 Lanjutan pada 2022". Satu lagi artikel yang dimuat di Antaranews.com adalah "BPS: SP2020 Lanjutan sempurnakan pendataan penduduk sebelumnya".

Gambar 53 Publisitas *Long Form* SP2020 di Media *Online* Kompas

Selanjutnya, publisitas di media sosial mempertahankan rubrikasi pada pelaksanaan SP2020 di tahun 2020, untuk keseragaman maka digunakan tagar #RabuSP dan #SP2020Lanjutan pada publisitas *Long Form* SP2020 di media sosial. Konten #RabuSP akan di *repost* oleh akun media sosial BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota untuk tujuan amplifikasi penyebarluasan informasi *Long Form* SP2020. Publisitas diawali dari *boost* konten yang di*posting* di akun media sosial resmi milik BPS (IG, FB, Youtube dan Tiktok). Konten yang di *boost* dapat berupa video maupun poster. Total konten yang di *boost* sebanyak empat video dan satu poster.

https://www.bps.go.id

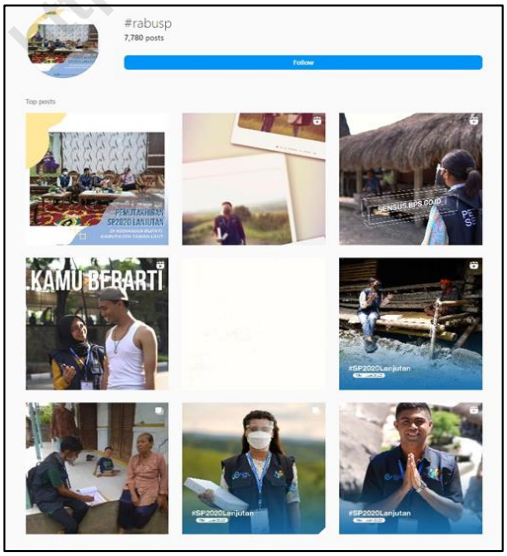

Gambar 54 Publisitas *Long Form* SP2020 di Media Sosial dengan Konten #RabuSP

1.5.3 Publisitas melalui *WA Blast*

WhatsApp Blast (WA Blast) menjadi salah satu kebaruan dalam strategi publisitas kegiatan sensus di BPS. Pesan melalui WA Blast dikirim ke sekitar 300 ribu rumah tangga sampel yang memiliki nomor WA. Pesan yang berisi tentang pemberitahuan bahwa yang bersangkutan merupakan sampel SP2020 Lanjutan dan ajakan untuk menerima dan memberikan jawaban yang benar serta jujur kepada petugas sensus bersifat persuasif dan partisipatif. Harapannya agar setiap rumah tangga mengetahui dan memahami kegiatan SP2020 Lanjutan. WA Blast dapat terlaksana dengan baik pada 6-17 Juni 2022.

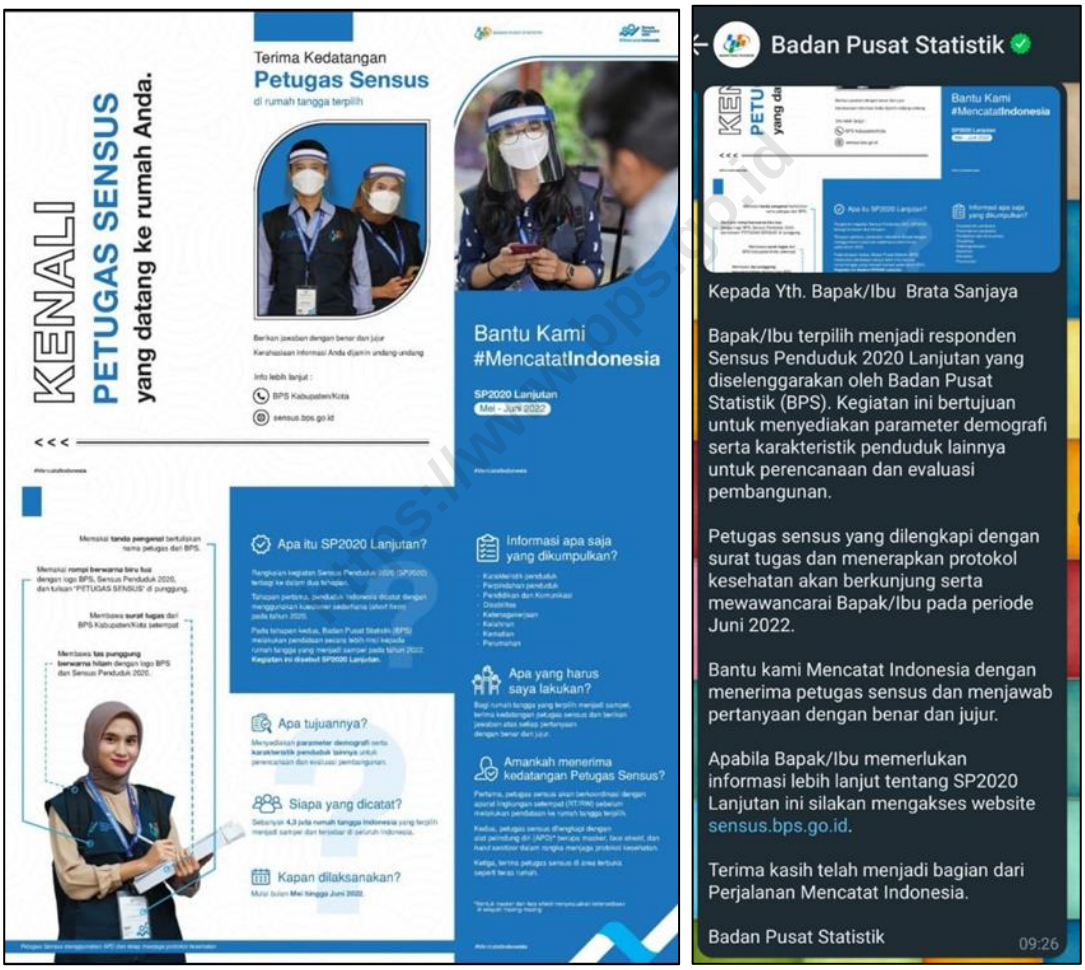

Gambar 55 Publisitas *Long Form* SP2020 melalui WA Blast

1.5.4 Pemanfaatan *WhatsApp Group* (WAG)

Pendataan *Long Form* SP2020 dilakukan pada responden terpilih di beberapa wilayah. Bagi wilayah yang terkena sampel, informasi terkait kegiatan tersebut dan perihal kedatangan petugas disebarluaskan melalui WAG aparat lingkungan setempat. Adapun gambaran informasi yang dikirimkan melalui WAG tersebut adalah sebagai berikut:

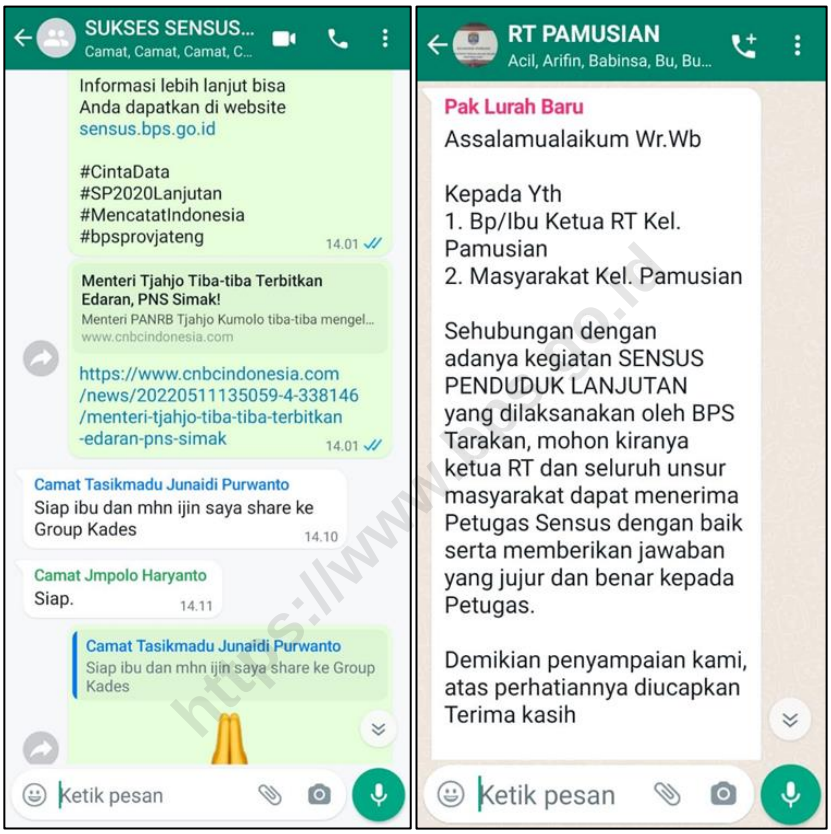

Gambar 56 Pemanfaatan *WhatsApp Group* (WAG) untuk Sosialisasi Sensus Penduduk Lanjutan

1.5.5 Monitoring Media Massa

Selama pelaksanaan *Long Form* SP2020, Bagian Humas BPS mengidentifikasi pemberitaan yang ada di media, baik yang berbayar maupun tidak, sebagai bagian dari *monitoring* isu.

1.6 Rencana Analisis

Rencana analisis yang dilakukan dari hasil *Long Form* 2020 berupa Analisis Profil Penduduk *Long form* SP2020 yaitu Analisis Profil Penduduk Nasional dan Analisis Profil Penduduk Provinsi. Selain itu, untuk melengkapi analisis hasil SP2020, dilakukan analisis yang mendalam terkait dengan tema kependudukan terkini yang sedang menjadi fokus pemerintah yaitu berupa Analisis Tematik Kependudukan (Analisis Mendalam Hasil *Long form*) yang terdiri dari Analisis Tematik Kependudukan Nasional dan Analisis Tematik Kependudukan Provinsi yang bersumber dari hasil pengolahan dari instrumen SP2020-C2.

1.7 Rencana Diseminasi

Diseminasi merupakan fase akhir dari rangkaian kegiatan statistik. Rencana diseminasi hasil *Long Form* 2020 yang dilakukan berupa rencana diseminasi data hasil SP2020, penyajian metadata (kegiatan, variabel, dan indikator), publikasi hasil SP2020, infografis, *website* SP2020, data mikro, dan pameran data hasil SP2020.

https://www.bps.go.id

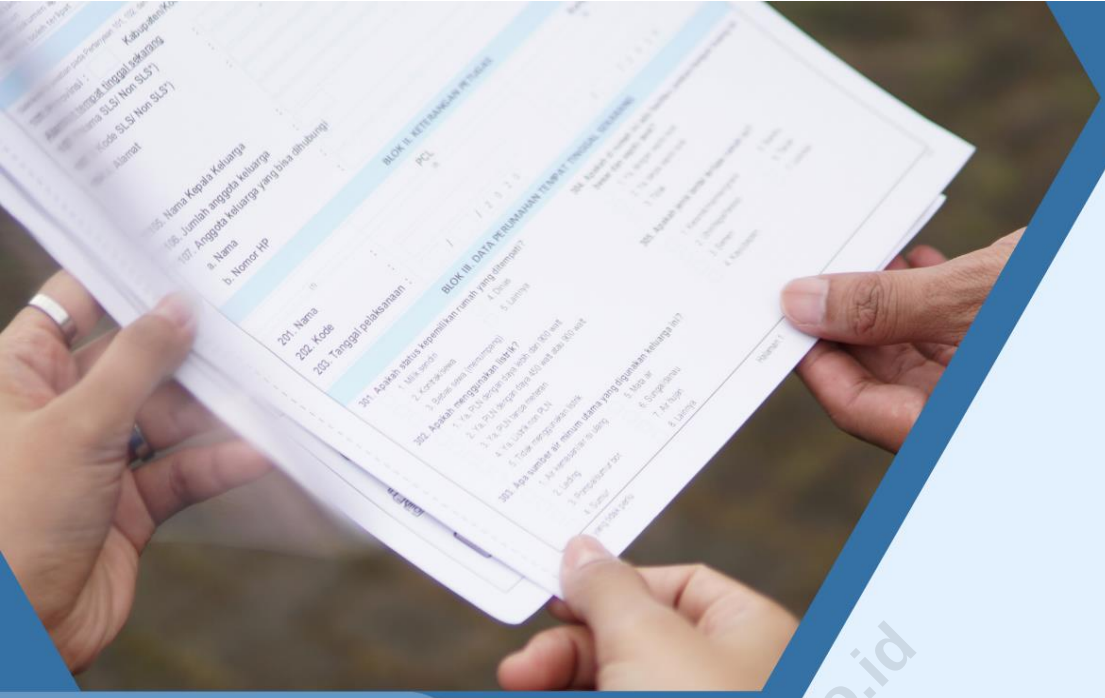

https://www.bps.go.id

BAB 2

PELAKSANAAN *LONG FORM* SP2020

https://www.bps.go.id

BAB 2 PELAKSANAAN *LONG FORM* SP2020

2.1 Pemutakhiran

Pemutakhiran *Long Form* SP2020 berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada periode 15 s.d. 31 Mei 2022. Pemutakhiran dilakukan secara *door to door* di setiap keluarga/rumah tangga sesuai cakupan wilayah sampel yang menjadi tugas Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dengan menggunakan moda PAPI.

Gambar 57 Pelaksanaan Pemutakhiran *Long Form* SP2020

Pada saat pemutakhiran, PPL melakukan identifikasi status keberadaan keluarga yang tercantum pada daftar pemutakhiran. Hasil identifikasi meliputi keluarga ditemukan, keluarga tidak ditemukan, atau keluarga baru. Selain itu, PPL juga mengumpulkan data pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan kejadian kematian yang terjadi dalam lima tahun terakhir sekaligus memperbarui titik dan nomor bangunan tempat tinggal penduduk dalam peta WB-2020. Setelah proses pemutakhiran selesai, BPS Kabupaten/Kota melakukan penarikan sampel sebanyak 16 rumah tangga melalui aplikasi web *coolsis Long Form* SP2020.

2.2 Pendataan Rumah Tangga

Pendataan *Long Form* SP2020 dilaksanakan dengan menggunakan moda PAPI dan CAPI. Namun demikian, disiapkan moda CATI dan CAWI sebagai mitigasi. Pada saat pendataan, PPL melakukan wawancara tatap muka menggunakan daftar SP2020-C2 sesuai dengan konsep dan prosedur yang telah ditetapkan. Pendataan *Long Form* SP2020 mencakup seluruh bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal yang berpenghuni.

Lebih lanjut, pendataan *Long Form* SP2020 dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan strategi khusus sebagai berikut:

1. Beberapa provinsi menerapkan strategi terkait jadwal pendataan dengan metode 2-1-2, yakni 2 hari pendataan dan 1 hari pemeriksaan. Setelah 2 hari pendataan, PPL menyerahkan dokumen kepada Kortim untuk diperiksa, sehingga jika ditemukan kesalahan dapat segera diinfokan kepada PPL agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.
2. Dalam hal menjaga kualitas data, tim BPS Provinsi membuat aplikasi *monitoring*, seperti tim BPS Provinsi Sumatera Utara membuat aplikasi MONDOK, tim BPS Provinsi Riau membuat aplikasi SIMPEL, tim BPS Provinsi Sumatera Selatan membuat *dashboard* MUSI Sumsel, tim BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat aplikasi SITANGKAP, tim BPS Kepulauan Riau membuat aplikasi AMARAN LF SP2020, tim BPS Provinsi Jawa Barat membuat aplikasi MON-LFSP2020, tim BPS Provinsi Bali membuat aplikasi SMART BS dan SIMOGLONG, tim BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat aplikasi SIMOVAL, dan masih banyak lainnya, ada juga yang memanfaatkan *google sheet* dan *monitoring* secara manual.
3. Terkait isu keamanan yang terjadi di beberapa daerah seperti di Papua, tim BPS Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua melakukan koordinasi dengan aparat keamanan (Komandan Distrik Militer dan Polisi Resor) serta mengoptimalkan petugas lokal yang berkualitas.

https://www.bps.go.id

Gambar 58 Pelaksanaan Pendataan *Long Form* SP2020

https://www.bps.go

2.3 Verifikasi Kematian Maternal

Verifikasi kematian maternal dilakukan oleh Kortim dengan mengunjungi rumah tangga yang terindikasi ada kematian maternal selama periode 1 Januari 2017 s.d. saat pendataan. Moda pendataan yang digunakan adalah PAPI dan CAPI, ditambah CATI sebagai mitigasi. Informasi yang diverifikasi melalui kuesioner SP2020-V adalah siapa yang meninggal; umur ketika meninggal; bulan dan tahun lahir almarhum/almarhumah; bulan dan tahun meninggal; apakah meninggal pada masa kehamilan/masa keguguran/pengguguran/saat persalinan/masa dua bulan setelah persalinan/keguguran/pengguguran; tempat meninggal; dan penyebab meninggal.

2.4 Penjaminan Kualitas

Kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) juga dilakukan pada pendataan *Long Form* SP2020 sebagai *early warning system* untuk mendeteksi kesalahan SOP di awal pemutakhiran dan pendataan rumah tangga sampel. PK *Long Form* SP2020 dilaksanakan oleh pegawai BPS Pusat dan Provinsi dengan menggunakan moda CAPI dan PAPI di 117 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi. Dalam pelaksanaannya, PK *Long Form* SP2020 didukung oleh teknologi informasi, antara lain untuk memonitor progres kegiatan PK dibangun *dashboard*; untuk melakukan entri rumusan tindak lanjut PK yang telah disusun oleh BPS Kabupaten/Kota

digunakan *Integrated Collection System* (ICS); dan untuk melakukan entri rekomendasi tindak lanjut PK yang telah disusun oleh petugas PK digunakan *Knowledge Management System* (KMS). Ketiga aplikasi ini digunakan oleh lima *stakeholders*, yakni Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, Bidang Analisis dan Kualitas Data, Bidang Manajemen Pendataan, dan Koseka.

2.5 Monitoring dan Evaluasi

Berbeda dengan *Short Form* SP2020, pendataan dan pengolahan *Long Form* SP2020 dilakukan secara ban berjalan. Dengan demikian *monitoring* dan evaluasi tidak hanya terkait progres pendataan lapangan, namun juga kualitas data. Salah satu inovasi pada pendataan *Long Form* SP2020 adalah *Dashboard Long Form* SP2020. *Dashboard* tersebut menggunakan sistem *dynamic weighting* yang memungkinkan penimbang atau bobot dihitung secara otomatis berdasarkan data yang masuk, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara *real time*.

Selain itu, *monitoring* terkait pemasukan dan kualitas data mikro dapat dilakukan melalui fitur eksplorasi yang terdapat pada *sandbox*. Pengguna *sandbox* adalah perwakilan dari tiap provinsi yang menguasai cara pemrosesan data dengan menggunakan sintaks SQL. Setiap pengguna hanya dapat mengakses dan mengeksplorasi data *Long Form* SP2020 wilayahnya saja menggunakan akun terdaftar. Namun demikian, pengguna *sandbox* dapat saling berkolaborasi dalam pembuatan *script* eksplorasi data.

https://www.bps.go.id

2.6 Layanan Komunikasi Pelaksanaan *Long Form* SP2020 (CATI)

Moda CATI dan CAWI merupakan moda alternatif yang disiapkan sebagai mitigasi jika pendataan secara tatap muka tidak berhasil dilakukan. Pelaksanaan mitigasi dilakukan secara bertahap, yaitu jika pendataan dengan moda CAPI/PAPI tidak berhasil dilakukan maka pendataan dialihkan ke moda CATI. Selanjutnya, jika moda CATI juga tidak berhasil dilakukan, maka pendataan dialihkan ke moda CAWI. Keberadaan moda alternatif ini merupakan inovasi BPS sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendataan dan mengurangi nonrespon.

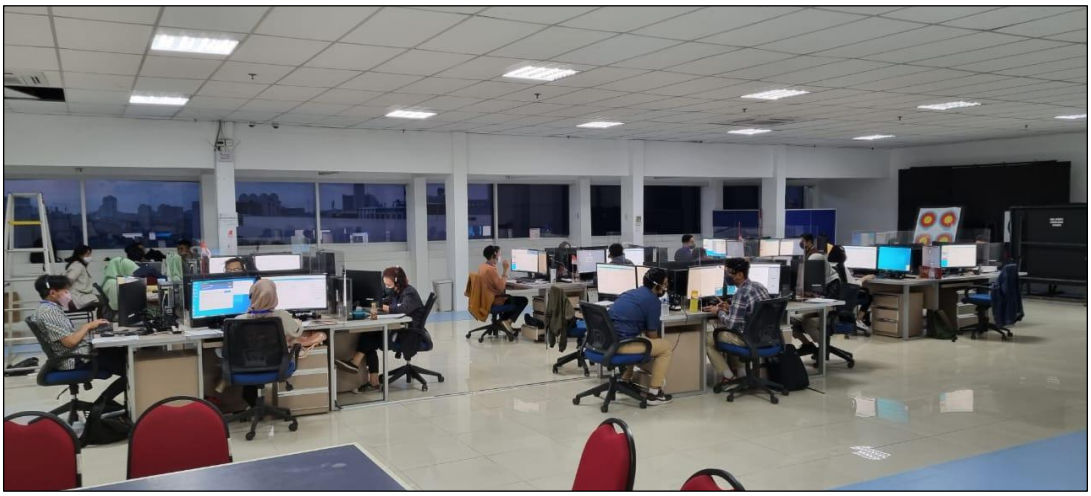

Gambar 59 Ruang *Call Center* BPS Pusat di Gedung 5 Lantai 8

Pendataan CATI-CAWI terselenggara dengan dukungan dari pihak penyedia jasa, dengan menggunakan *dedicated call center system* yang terintegrasi dengan sistem pendataan di BPS. Instrumen yang digunakan pada pendataan CATI-CAWI terdiri dari kuesioner C2-CATI, C2-CAWI, dan V-CATI. Ketiga instrumen tersebut merupakan instrumen SP2020-C2 dan SP2020-V yang telah disesuaikan berdasarkan estimasi waktu ideal untuk wawancara melalui telepon.

Pendataan CATI-CAWI dilakukan oleh petugas CATI-CAWI di ruang *call center* BPS Pusat selama 30 hari (7 Juni – 6 Juli 2022). Petugas CATI-CAWI dibagi menjadi tiga grup yang terdiri dari satu orang Koseti (Koordinator Supervisor CATI), 6-7 orang Supervisor CATI, dan 18-21 orang petugas CATI-CAWI. Setiap hari kerja dibagi menjadi 2 shift dengan masing-masing selama 7 jam. Selain berperan sebagai petugas pendataan CATI-CAWI, mereka juga berperan sebagai *call center* yang bertugas untuk menerima telepon dari responden dan masyarakat yang memerlukan informasi terkait kegiatan *Long Form* SP2020. Progres pendataan CATI-CAWI dipantau secara *real time* oleh tim BPS Pusat melalui *wallboard* yang disediakan oleh penyedia jasa.

https://www.bps.go.id

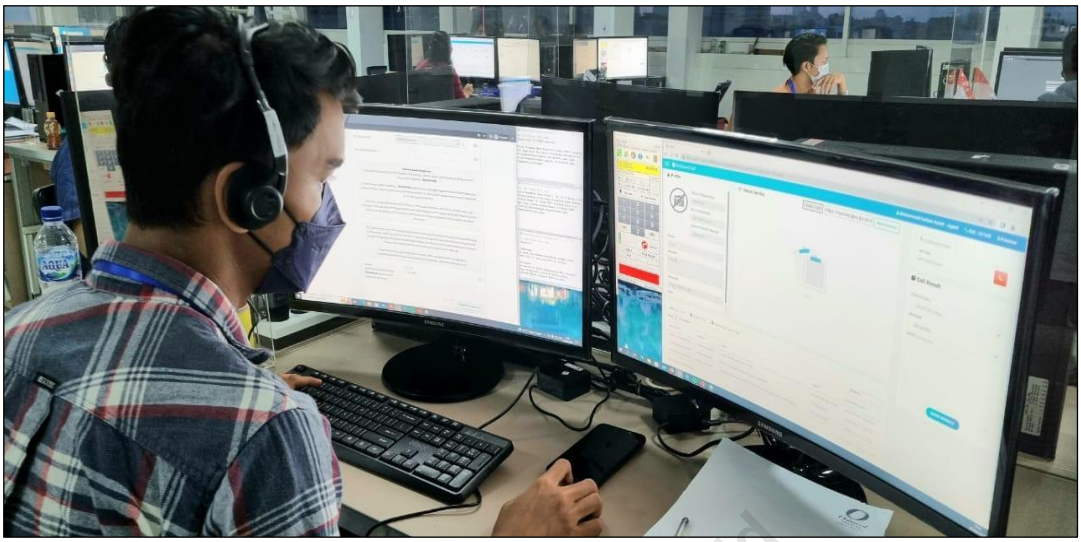

Gambar 60 Petugas CATI-CAWI Sedang Mewawancara Responden

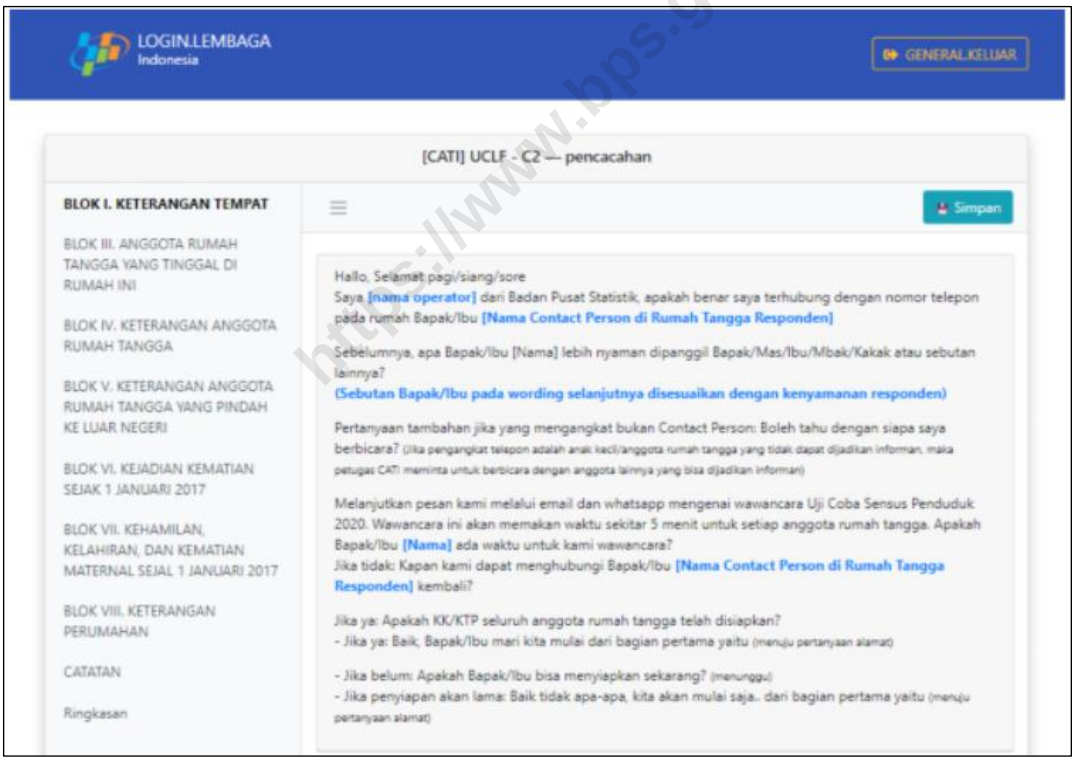

LOGIN.LEMBAGA
Indonesia

GENERAL.KELUAR

[CATI] UCLF - C2 — pencacahan

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

BLOK III. ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG TINGGAL DI RUMAH INI

BLOK IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA

BLOK V. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG PINDAH KE LUAR NEGERI

BLOK VI. KEJADIAN KEMATIAN SEJAK 1 JANUARI 2017

BLOK VII. KEHAMILAN, KELAHIRAN, DAN KEMATIAN MATERNAL SEJAL 1 JANUARI 2017

BLOK VIII. KETERANGAN PERUMAHAN

CATATAN

Ringkasan

Simpan

Hallo, Selamat pagi/siang/sore
Saya **[nama operator]** dari Badan Pusat Statistik, apakah benar saya terhubung dengan nomor telepon pada rumah Bapak/Ibu **[Nama Contact Person di Rumah Tangga Responden]**

Sebelumnya, apa Bapak/Ibu [Nama] lebih nyaman dipanggil Bapak/Mas/Ibu/Mbak/Kakak atau sebutan lainnya?
(Sebutan Bapak/Ibu pada wording selanjutnya disesuaikan dengan kenyamanan responden)

Pertanyaan tambahan jika yang mengangkat bukan Contact Person: Boleh tahu dengan siapa saya berbicara? (Jika pengangkat telepon adalah anak kecil/anggota rumah tangga yang tidak dapat dijadikan informan, maka petugas CATI meminta untuk berbicara dengan anggota lainnya yang bisa dijadikan informan)

Melanjutkan pesan kami melalui email dan whatsapp mengenai wawancara Uji Coba Sensus Penduduk 2020. Wawancara ini akan memakan waktu sekitar 5 menit untuk setiap anggota rumah tangga. Apakah Bapak/Ibu **[Nama]** ada waktu untuk kami wawancara?
Jika tidak: Kapan kami dapat menghubungi Bapak/Ibu **[Nama Contact Person di Rumah Tangga Responden]** kembali?

Jika ya: Apakah KK/KTP seluruh anggota rumah tangga telah disiapkan?
- Jika ya: Baik, Bapak/Ibu mari kita mulai dari bagian pertama yaitu (menuju pertanyaan alamat)

- Jika belum: Apakah Bapak/Ibu bisa menyiapkan sekarang? (menunggu)
- Jika penyiapan akan lama: Baik tidak apa-apa, kita akan mulai saja.. dari bagian pertama yaitu (menuju pertanyaan alamat)

Gambar 61 Tangkapan Layar Halaman Muka Kuesioner C2-CATI

https://www.bps.go.id

Gambar 62 Tangkapan Layar *Wallboard* CRM (*Customer Relationship Management*) BPS

www.bps.go.id

Gambar 63 Pengawasan Proses Pendataan CATI-CAWI oleh Deputi Bidang Statistik Sosial

2.7 Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020

Makna dibalik angka yang dipublikasikan oleh BPS merupakan suatu hal yang menarik untuk dieksplorasi dan didalami. Kajian kualitatif menjadi salah satu cara untuk memahami makna dibalik angka-angka tersebut. Pada tahun 2022, tema yang diangkat pada Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020 adalah "Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia: Mewujudkan

Kesejahteraan Penduduk dan Lingkungan Berkelanjutan". Tema ini salah satunya dilatarbelakangi oleh fakta tentang besarnya biaya akibat bencana alam dan kerusakan lingkungan yang semakin sering terjadi dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan penduduk, namun juga memerhatikan keberlanjutan lingkungan menjadi suatu keharusan. Tema ini juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas nomor dua (pembangunan ekonomi yang berkelanjutan), komitmen Indonesia pada level global (*Paris Agreement*), target capaian SDGs, dan isu prioritas dalam Presidensi G20.

Lebih lanjut, kajian kualitatif *Long Form* SP2020 ini dilakukan di 34 provinsi oleh 34 orang statistisi BPS berkolaborasi dengan 68 orang peneliti ilmu sosial BRIN, dengan komposisi 1 orang statistisi BPS dan 2 orang peneliti BRIN untuk satu provinsi. Selain itu, ada 5 orang perumus dari BRIN yang turut memperkuat tim dalam hal membangun konsep kajian, instrumen penelitian, analisis data kualitatif dari 34 provinsi, dan evaluasi selama kajian berlangsung. Dari kolaborasi tersebut, dihasilkan 34 kertas kerja (*working paper*) dari masing masing provinsi dan satu naskah kebijakan (*policy paper*) dengan judul "Penguatan Praktik Ekonomi Hijau di Indonesia: Dimensi Sosial Demografis".

Gambar 64 Peta Praktik Ekonomi Hijau di 34 Provinsi

Pelaksanaan kajian kualitatif dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yang dimulai dari studi kepustakaan dan dilanjutkan dengan pemilihan isu terkait ekonomi hijau di masing-masing provinsi (berdasarkan 5 sektor *National Determined Contribution (NDC)* yaitu energi, limbah, pertanian, kehutanan dan industri), penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan,

analisis data hasil penelitian lapangan, penyusunan kertas kerja dan naskah kebijakan, diseminasi hasil penelitian dan pelaporan. Selain itu, dilakukan *monitoring* dan evaluasi di setiap tahapan kegiatan tersebut.

Metode pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (DKT/ FGD), pengamatan langsung, dan tinjauan literatur. Pengumpulan data kualitatif di setiap lokasi kajian dilakukan dalam dua tahap. Pertama, para peneliti dan statistisi melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) dengan mengidentifikasi praktik-praktik ekonomi hijau di semua sektor pada masing-masing provinsi. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan FGD untuk menangkap isu-isu ekonomi hijau di masing-masing provinsi tersebut. Kedua, setelah pemetaan dilakukan pertemuan bersama perumus maupun semua peneliti dan statistisi, baik secara daring maupun luring, untuk menentukan sektor yang didalami pada tahapan lapangan selanjutnya.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 3

PENGOLAHAN *LONG FORM* SP2020

https://www.bps.go.id

BAB 3 PENGOLAHAN *LONG FORM* SP2020

3.1 Infrastruktur Pengolahan

Kegiatan *Long Form* SP2020 dilakukan dengan menggunakan beberapa moda pengumpulan data atau *multi-mode data collection* yaitu pengumpulan data dengan menggunakan PAPI, CAPI, CATI, dan CAWI. Moda utama adalah CAPI dan PAPI, sedangkan CATI dan CAWI merupakan moda non tatap muka sebagai mitigasi. -Pengumpulan data dengan menggunakan PAPI, membutuhkan tahapan pengolahan sebelum informasinya dapat dimanfaatkan. Berbeda dengan moda CAPI, CATI, dan CAWI yang langsung mengirim data ke server setelah melewati proses validasi. Dukungan infrastruktur pengolahan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengolahan hasil pendataan *Long Form* SP2020 ini. Gambar 65 merupakan infrastruktur yang digunakan pada proses pengolahan *Long Form* SP2020 untuk moda pengolahan PAPI.

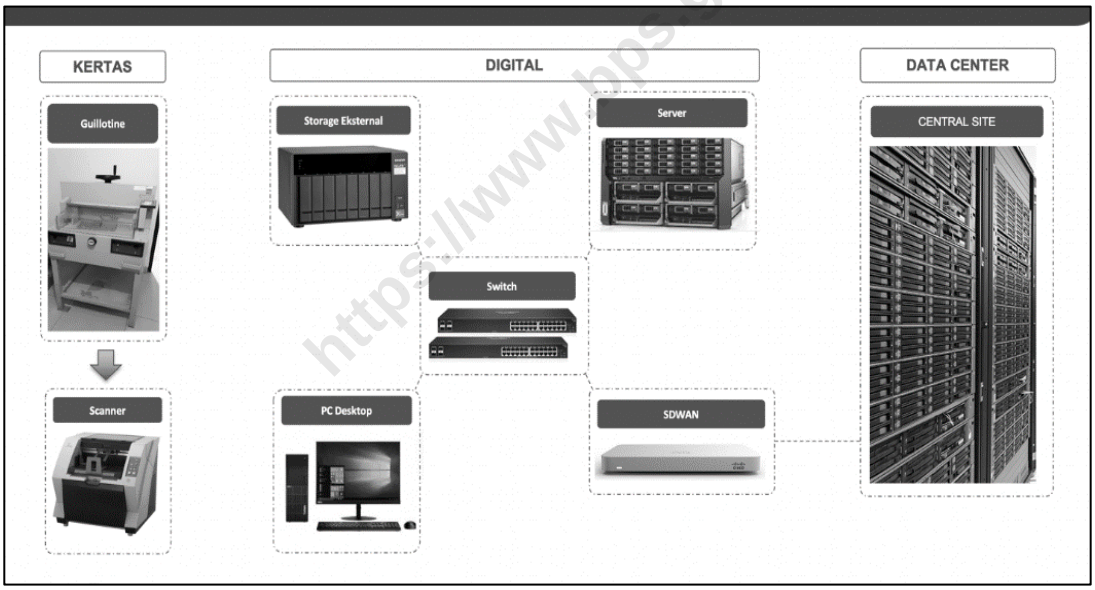

Gambar 65 Infrastruktur Pengolahan *Long Form* SP2020

Beberapa perangkat yang digunakan antara lain *Guillotine*, *Scanner*, *Storage External* (QNAP), *Switch*, *Server*, PC Dekstop, SDWAN, dan *Server Central Site*. *Guillotine* digunakan untuk memotong dokumen SP2020-C2 sebelum dilakukan pemindaian (*scan*). Dokumen yang diolah adalah Dokumen SP2020-RC2 dan Dokumen-C2. Dokumen sudah terpotong tersebut selanjutnya dipindai dengan *scanner* Fujitsu fi-5950 (105 ppm, resolusi 300 dpi). Infrastruktur berikutnya adalah *Storage External* (QNAP) sebagai media penyimpanan data yang dihubungkan ke jaringan sehingga dapat memberi kemudahan *back-up* dan akses data. *Switch*

digunakan untuk menunjang entri data yang berbasis *Client-Server*. Server yang digunakan pada pengolahan *Long Form* SP2020 ini adalah Dell PowerEdge VRTX dengan teknologi share infrastructure yang menggabungkan fungsi server, storage dan switch dalam satu chassis (Boks). Spesifikasi minimum komputer yang digunakan dalam pengolahan dokumen SP2020-C2 adalah Windows 7 yang sudah terinstall .NET Framework 4.0 dan Report Viewer versi 12.0. SDWAN adalah bentuk aplikasi spesifik dari teknologi *software-defined networking* (SDN) yang diaplikasikan pada koneksi WAN (*wide area network*).

3.2 Aplikasi Pengolahan

Terdapat beberapa dukungan aplikasi pada pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengolahan. Dalam moda pengumpulan data PAPI, pendataan dilakukan menggunakan kuesioner dengan mengunjungi responden. Setelah itu dokumen diolah menggunakan *data capture* dan entri data. Beberapa aplikasi yang mendukung dalam metode pengolahan PAPI antara lain Aplikasi Pemutakhiran, *Web Monitoring*, SP2020-C2 *Data Capture*, SP2020-C2 Validasi *Inhouse,* SP2020-C2 Data Entri, dan *Dashboard Long Form* SP2020 C2. Alur pengolahan dapat dilihat pada Gambar 66 di bawah ini.

https://www.bps.go.id

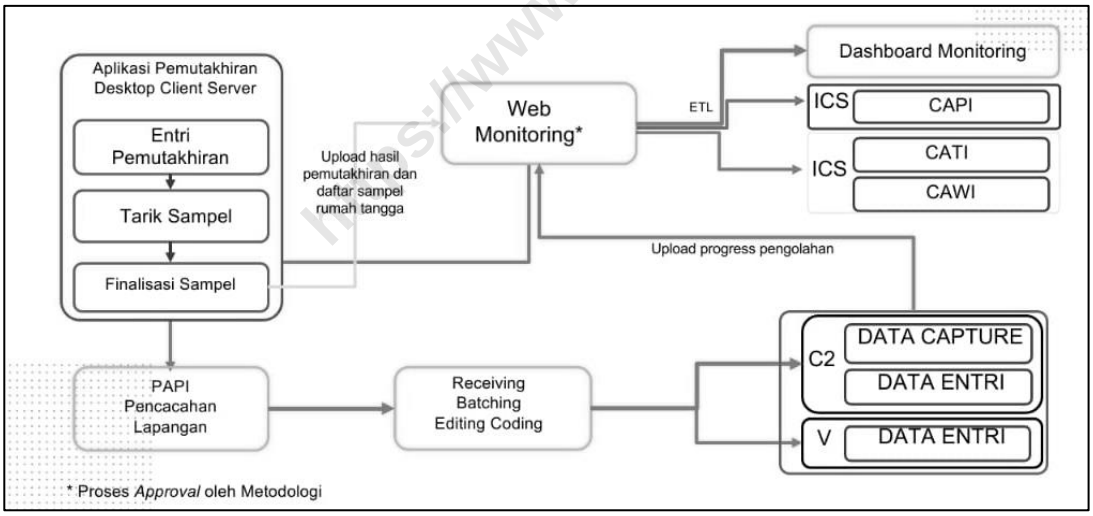

Gambar 66 Diagram Alur Pengolahan *Long Form* SP2020

Aplikasi Pemutakhiran

Aplikasi pemutakhiran merupakan aplikasi desktop yang digunakan untuk melakukan entri data pemutakhiran, penarikan sampel, dan finalisasi sampel. Keluaran dari aplikasi ini adalah Daftar Sampel Rumah Tangga (DSRT). Hasil pemutakhiran dan DSRT diunggah pada *web monitoring*. Pada *web monitoring*

terdapat menu *Web Bridging* yang digunakan untuk menjembatani hasil pemutakhiran dengan aplikasi CAPI.

Moda Pengolahan Wilayah PAPI

Pada wilayah PAPI, moda pengolahan dilakukan dengan *data capture* dan/atau data entri. Aplikasi SP2020-C2 *Data Capture* merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah dokumen SP2020-C2 dengan tahapan *scan*, *recognition*, *validation*, dan *export*. Setelah dokumen melalui proses pengolahan *data capture*, akan masuk ke tahapan *Staging*. Pada tahapan ini dilakukan proses transfer dari database *data capture* ke database validasi. Dokumen akan mengalami proses pengecekan kelengkapan dan perbaikan ID wilayah. Jika sudah sesuai akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengecekan *rule* validasi dengan menggunakan fitur yang terdapat pada aplikasi *Validasi Inhouse*. Untuk wilayah PAPI dengan metode entri data, pengolahan dilakukan tanpa menggunakan *scanner*. Proses input data dan validasi hanya dilakukan menggunakan aplikasi SP2020-C2 Data Entri. Untuk memantau progres pengolahan PAPI disediakan *Dashboard Long Form* SP2020-C2, sedangkan untuk melakukan manajemen dokumen hasil pencacahan dapat menggunakan aplikasi SIPMEN.

Moda Pengolahan Wilayah CAPI

Dalam metode pengumpulan data CAPI, pendataan dilakukan dengan menggunakan gawai dan mengunjungi setiap responden. Aplikasi pengumpulan data yang digunakan adalah FASIH. Meskipun pengumpulan data dilakukan dengan moda CAPI, tetapi untuk pemutakhiran tetap menggunakan aplikasi pemutakhiran yang sama yang digunakan pada moda PAPI. Di sinilah peran menu *web bridging* diperlukan untuk memasukkan DSRT hasil tarik sampel pada aplikasi pemutakhiran sebagai dasar pendataan lapangan dengan aplikasi CAPI. Tahapan pengelolaan survei (pengelolaan sampel dan penugasan) dilakukan dengan aplikasi FASIH-*Survey Management*. Selain itu dibutuhkan juga aplikasi SOBAT dalam proses rekrutmen petugas di mana hanya petugas yang sudah terdaftar yang dapat melakukan pendataan. Sementara itu, untuk pendataan lapangan, petugas menggunakan FASIH-*Mobile,* baik untuk pendataan SP2020-C2 maupun SP2020-V.

https://www.bps.go.id

Gambar 67 Tampilan Aplikasi FASIH-Mobile Versi 2.2.0

https://www.bps.go.id

Aplikasi Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan *monitoring* dan evaluasi pada saat pelaksanaan *Long Form* SP2020, terdapat aplikasi *dashboard monitoring* yaitu *Dashboard Long Form* SP2020 dan *Sandbox*. *Dashboard Long Form* SP2020 menampilkan semua progres pendataan seperti tahap persiapan (rekrutmen petugas, distribusi logistik, dan pelatihan petugas), tahap pendataan (pemutakhiran, pendataan ruta, verifikasi kematian, dan pendataan CATI-CAWI), tahapan penjaminan kualitas, tahapan pengolahan, dan hasil tabulasi serta indikator hasil pendataan. Salah satu inovasi dari *dashboard* ini adalah dilengkapi dengan sistem *dynamic weighting* yaitu penghitungan bobot yang dinamis di mana tabel dan indikator yang disajikan akan sesuai dengan data yang telah masuk ke server. *Sandbox* merupakan salah satu wadah untuk melakukan eksplorasi data khususnya untuk mendukung proses reviu dan pengecekan data *Long Form* SP2020 khususnya dalam melihat anomali data.

Gambar 68 Tampilan *Dashboard Long Form* SP2020

https://www.bps.go.id

3.3 Pelaksanaan Pengolahan

3.3.1 Persiapan

Sebelum pengolahan data dilaksanakan, terdapat beberapa persiapan sistem yang perlu dilakukan, baik untuk moda CAPI maupun PAPI. Untuk moda CAPI, terdapat beberapa persiapan, yaitu alokasi sampel yang berasal dari hasil penarikan sampel pada aplikasi pemutakhiran, proses *assignment* petugas, dan *support system*. Sementara untuk moda PAPI, tahapan persiapan pada umumnya meliputi tahapan instalasi berbagai piranti lunak *prerequisities,* misalnya Windows Server 2016, SQL Server 2019 R2, Kofax Capture 11.0, Kofax Transformation Module 6.5, serta sinkronisasi lisensi Kofax Capture.

3.3.2 Pengolahan Pra Komputer

Pengelolaan dokumen lapangan Long Form SP2020 terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap pengolahan data pra-komputer dan tahap pengolahan data dengan komputer. Tahap pertama yaitu pengelolaan data sebelum data dimasukkan ke dalam komputer, terdiri dari beberapa langkah penting mencakup penerimaan dokumen (receiving), pengelompokkan dokumen (batching), serta penyuntingan atau pengkodean dokumen (editing dan coding) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Kegiatan editing dan coding dilaksanakan di BPS

Kabupaten/Kota. Selanjutnya, tahap kedua adalah pengolahan data menggunakan komputer. Proses ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari memasukkan data ke dalam sistem (data capture maupun data entry) hingga penghitungan indikator hasil SP2020. Proses capture atau entry data ini hanya dilakukan pada wilayah PAPI dan dilakukan di BPS Provinsi.

3.3.3 *Data Capture* dan Data Entri

Pengolahan data hasil pendataan wilayah PAPI dilakukan menggunakan data capture dan entri data dengan aplikasi berbasis desktop. Proses pengolahan dokumen SP2020-C2, SP2020-RC2, dan SP2020-V ini dilakukan di BPS Provinsi. Pengolahan dokumen SP2020-C2 dapat diolah dengan *data capture* dan entri data. Terdapat 24 provinsi yang mengimplementasikan *data capture* dan 5 provinsi yang mengimplementasikan data entri. Sementara itu, pengolahan dokumen SP2020-V hanya dilakukan dengan entri data di BPS Provinsi. Aplikasi data capture yang digunakan berbasis desktop yang dikembangkan dengan Kofax Capture 11.0 dan Kofax Transformation Module 6.5. Tahapan pengolahan data capture meliputi *scan, recognition, correction, validation, dan export*. Aplikasi ini menggunakan infrastruktur dan lisensi khusus dalam pengolahan dengan metode data *capture*. Terkait data entri, aplikasi data entri meliputi entri dan validasi, master (operator, petugas, dan wilayah), *report, revalidasi, dan export data*.

https://www.bps.go.id

3.3.4 Integrasi dan Eksplorasi

Oleh karena pendataan *Long Form* SP2020 menggunakan beberapa moda, yaitu CAPI, PAPI, CAWI, dan CATI, maka perlu dilakukan integrasi data hasil pengumpulan data dari berbagai moda tersebut. Sebelum integrasi data dilakukan dengan penyiapan struktur data standar untuk penyimpanan *raw data* final hasil pengumpulan data. Selanjutnya, eksplorasi dilakukan terhadap data hasil integrasi untuk mengidentifikasi kewajaran data, baik dengan melakukan tabulasi indikator maupun pengecekan anomali. Kegiatan eksplorasi kualitas data hasil pendataan *Long Form* SP2020 dapat dilakukan melalui wadah *data sandboxing* yang ada di *platform* INDAH (Indonesia Data Hub). Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi data selama pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pendataan. Pengguna *Sandbox* adalah perwakilan dari tiap provinsi yang menguasai cara pemrosesan data dengan menggunakan sintaks SQL.

3.3.5 Revalidasi dan Imputasi

Revalidasi data merupakan tahapan proses penerapan aturan validasi terakhir terhadap data yang ada. Pada moda pengolahan PAPI, revalidasi data dilakukan dalam dua tahapan proses yaitu:

1. Revalidasi menggunakan aplikasi *inhouse* entri dan validasi yang dilakukan saat pengiriman data ke pusat.
2. Revalidasi pada level *dashboard* dilakukan pada data yang sudah dikompilasi pada level nasional.

Revalidasi terhadap data CAPI dilakukan pada tahap pengumpulan data dimana setiap provinsi melakukan pengecekan data melalui fitur *sandboxing* dan hasil identifikasi anomali yang ada digunakan untuk bahan perbaikan data. Pada tahapan ini, tiap BPS Provinsi dapat melakukan pengecekan data sesuai dengan kebutuhan sehingga *output* dari hasil identifikasi anomali antar daerah dapat beragam sesuai dengan banyaknya eksplorasi yang dilakukan terhadap data.

Selanjutnya, berdasarkan aturan validasi yang ada, dilakukan identifikasi kembali terkait dengan bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan data dan dibuat aturan imputasinya. Dalam pengolahan data, imputasi dilakukan jika masih terdapat isian dari variabel yang berada di luar kategori, *missing value*, dan tidak konsisten. Jika ditemukan kondisi isian data yang terdeteksi sebagai anomali, maka rule perbaikan atau imputasi data akan diterapkan pada variabel tersebut.

https://www.bps.go.id

3.3.6 Penghitungan Indikator

Penghitungan indikator dilakukan sejak tahap pengumpulan data melalui fitur *dynamic weighting* yang terdapat pada *Dashboard Long Form* SP2020. *Weight* atau bobot yang digunakan akan berubah sesuai dengan data yang masuk ke repositori pusat. Dengan demikian, BPS Pusat maupun BPS Daerah dapat melakukan *monitoring* dan evaluasi kewajaran data dengan cepat tanpa harus menunggu semua data lengkap dan terkumpul. Untuk finalisasi indikator dan tabulasi, maka data yang digunakan adalah data yang telah direvalidasi serta diimputasi jika terdapat variabel yang perlu perbaikan.

3.4 Kendala dan Tindak Lanjut

Moda PAPI dan CAPI dalam pelaksanaannya menemui kendala yang beragam. Penggunaan perangkat *data capture* yang sudah usang misalnya *scanner* menarik lebih dari satu dokumen secara bersamaan, *error umbrella*, dan hasil *capture* dokumen yang kurang bagus menjadi kendala dalam pengolahan moda PAPI. Permasalahan lainnya adalah kompleksitas pengolahan *data capture,* baik dari sisi

infrastruktur, tahapan pengolahan *(recognition, correction, validation, export), troubleshooting* yang rumit dan kurang fleksibel, maupun kegagalan proses transfer ke *database* validasi. Selain itu terdapat permasalahan *human error* tahap input panel *scan*, perbaikan *correction,* dan *validation*. Permasalahan selanjutnya menyangkut ketidaksempurnaan aplikasi, kegagalan proses perbaikan ID, perbedaan master kode, ketidaklengkapan dokumen, serta ketidaksesuaian aturan validasi yang diterapkan dalam aplikasi *inhouse* data entri/validasi.

Berbagai permasalahan pengolahan moda PAPI tersebut harus cepat diatasi agar proses pengolahan tidak mengalami keterlambatan. *Scanner* dibersihkan atau diperbaiki secara berkala jika ada yang bermasalah, termasuk melakukan pengaturan ulang *driver scanner* untuk mengatasi *error umbrella*. Pengaturan ulang *VirtualReScan* (VRS) dilakukan untuk mengatasi hasil pemindaian dokumen yang kurang bagus. Kompleksitas infrastruktur membutuhkan petunjuk instalasi yang jelas sebagai panduan dalam melakukan pengaturan perangkat. Tahapan pengolahan yang panjang harus dilakukan dengan baik dan berpedoman pada SOP atau petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Aplikasi juga senantiasa diperbarui untuk mengatasi *error* program maupun saat adanya penambahan fungsi yang diperlukan dalam proses pengolahan ini.

Sebagaimana moda PAPI, pendataan moda CAPI juga mengalami beberapa kendala. Data persiapan terlambat diterima, sehingga proses *assignment* CAPI menjadi terkendala dan menyebabkan keterlambatan waktu mulai pendataan CAPI. Selain itu, aplikasi FASIH yang masih dalam tahap pengembangan awal memungkinkan munculnya berbagai permasalahan pada saat penggunaan aplikasi termasuk *loading* aplikasi yang lama saat membuka *e-form* serta *error/bug* aplikasi. Selain itu, petugas yang belum terbiasa dengan *behaviour* aplikasi membutuhkan waktu yang lebih lama daripada wawancara biasa menggunakan PAPI.

Dengan melihat berbagai permasalahan pendataan dengan moda CAPI, berbagai langkah tindak lanjut perlu dilakukan. Perlunya pemahaman mengenai tata cara rekrutmen petugas yang baik dengan menggunakan aplikasi SOBAT, sehingga *database* mitra dapat lebih mudah dikelola. Petugas wilayah CAPI harus memenuhi kriteria petugas dan mempunyai gawai sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, fungsi pengawas harus dilakukan dengan baik untuk setiap sampel yang telah di-*submit* pencacah. Fungsi pengawasan pada *role* pengawas harus dijalankan yaitu memeriksa data yang ter-*submit* oleh pencacah sebelum melakukan *approval*. *Subject Matter* perlu mengkaji lebih lanjut terkait variabel-variabel yang boleh diberikan *remark*, sehingga tidak akan membuka peluang adanya anomali data. Ketersediaan sumber daya manusia sebagai *IT-agent* di BPS Kabupaten/Kota untuk CAPI sangat diperlukan. Selain itu, dari sisi aplikasi diperlukan pengembangan FASIH secara berkelanjutan.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 4

ANALISIS DAN DISEMINASI HASIL *LONG FORM* SP2020

https://www.bps.go.id

BAB 4 ANALISIS DAN DISEMINASI HASIL *LONG FORM* SP2020

4.1 Seremonial Rilis

4.1.1 Rilis Hasil *Long Form* SP2020

Long Form SP2020 mengusung misi besar sebagai *benchmark* indikator kependudukan Indonesia, sehingga kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan parameter kependudukan serta karakteristik penduduk Indonesia yang akurat dan berkualitas. Data yang dihasilkan dapat memotret pergeseran demografi (*demographics shifting*) yang terjadi di Indonesia. Indikator demografi yang dihasilkan akan dapat memberikan *insight* mengenai transisi demografi serta tren kependudukan global lainnya. Pasca kegiatan lapangan dan proses pengolahan data hasil LF SP2020, sebagai bagian dari kegiatan diseminasi hasil kegiatan, BPS melakukan *launching*/rilis data hasil *Long Form* SP2020. Rilis ini menjadi salah satu momen penting yang ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak untuk mengetahui kondisi terkini parameter kependudukan di Indonesia.

Dalam kegiatan seremonial rilis tersebut, BPS mengundang berbagai pihak baik dari Kementerian/Lembaga, para pakar/akademisi/praktisi di bidang kependudukan, wartawan media cetak maupun elektronik serta pihak-pihak lain yang terkait. Selain melakukan diseminasi data, *launching Long Form* SP2020 juga dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan literasi data statistik kependudukan kepada masyarakat khususnya data kependudukan hasil *Long Form* SP2020. Rilis dikemas dalam bentuk *talkshow* dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten untuk memberikan *insight* terkait optimalisasi pemanfaatan data hasil *Long Form* SP2020 sebagai penguatan statistik hayati menuju semangat Satu Data Kependudukan Indonesia.

Gambar 69 Rilis Hasil *Long Form* SP2020

https://www.bps.go.id

4.1.2 Rilis Data Mikro *Long Form* SP2020

Data mikro *Long Form* SP2020 dirilis pada tanggal 19 Juni 2023. Data mikro *Long Form* SP2020 disediakan sampai dengan level kabupaten/kota. Akan tetapi ada beberapa variabel seperti tingkat kesulitan/gangguan, informasi kematian secara general pada blok VI, dan informasi kematian maternal pada blok VII yang secara agregat tidak layak ditampilkan sampai dengan level kabupaten/kota (hanya bisa ditampilkan pada level nasional dan level provinsi) karena mempertimbangkan kecukupan sampel. Variabel-variabel tersebut masih dapat digunakan untuk kepentingan analisis dengan unit analisis individu maupun rumah tangga. Selain itu, terdapat beberapa variabel yang tidak dipublikasikan seperti nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan, suku, agama, kode bahasa daerah yang digunakan, kepemilikan lahan pertanian, dan nonpertanian. Namun untuk data mikro terkait suku, bahasa, dan agama dapat diperoleh melalui permintaan khusus.

Data mikro *Long Form* SP2020 dapat diaskses oleh masyarakat melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada website pst.bps.go.id atau datang langsung ke PST BPS di seluruh Indonesia. Akses data mikro dapat dilakukan dengan skema Rp. 0,00 (nol rupiah) maupun berbayar. Pengguna data yang tidak termasuk dalam bagian pihak-pihak penerima tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2019, akan dikenakan biaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

https://www.bps.go.id

4.1.3 Rilis Hasil Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020

Diseminasi kajian hasil kolaborasi antara BPS dan BRIN dilaksanakan melalui tiga kegiatan utama yakni (1) seminar hasil kajian yang dilaksanakan di tujuh region; (2) menjadi bagian dari kegiatan Presidensi G20 yang bersifat populer yaitu *Indonesia Research and Innovation Expo* (InaRI Expo); dan (3) Film Dokumenter berjudul 'Semai'.

Diseminasi hasil kajian di tujuh region merupakan seminar draf kajian kualitatif yang dilaksanakan di Kota Palembang (Region Sumatra), Semarang (Region Jawa), Makasar (Region Sulawesi), Ambon (Region Maluku dan Maluku Utara), Balikpapan (Region Kalimantan), Kupang (Region Bali Nusra), dan Manokwari (Region Papua). Diseminasi mengundang akademisi, praktisi, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lokasi penelitian. Selain itu perwakilan dari informan kunci di lokasi penelitian turut diundang untuk memverifikasi hasil analisis dari masing-masing tim di lokasi kajian.

Gambar 70 Diseminasi Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020 di Region Penelitian

Kegiatan selanjutnya adalah keikutsertaan rangkaian kegiatan presidensi G20 yaitu InaRI Expo yang dilaksanakan pada 27 s.d. 30 Oktober 2022. Terdapat tiga kegiatan yang dilakukan oleh tim BPS-BRIN dalam pameran ini. Pertama, penyerahan kertas kerja dan naskah kebijakan oleh perwakilan dari BRIN, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Mego Pinandito, kepada Deputi Bidang Statistik, Ateng Hartono, pada 27 Oktober 2022. Acara tersebut termasuk dalam kegiatan *opening ceremony* InaRI Expo yang dihadiri juga oleh Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI serta *Minister for Science and Technology* India. Kertas kerja dari setiap provinsi dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/456KOW sementara kertas kebijakan dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/3ZmJRrO

https://www.bps.go.id

Gambar 71 Penyerahan Kertas Kerja dan Naskah Kebijakan dari BRIN kepada BPS

Gambar 72 Kepala BRIN dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS dalam Acara *Opening Ceremony* InaRi Expo 2022

Kegiatan yang ketiga adalah pameran hasil penelitian kajian kualitatif yang dikemas dalam *mini talkshow*, poster hasil penelitian, contoh produk ekonomi hijau dan pojok interaktif yaitu permainan roda berputar mengenai pengetahuan dari berbagai macam provinsi. Antusiasme peserta pameran sangat baik dengan banyaknya yang berkujung ke stan pameran. Selain itu juga antusiasme dari para perserta G20 dari berbagai negara terlihat dengan mengunjungi area stan pameran kegiatan ini.

Gambar 73 Pameran Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020 di InaRI Expo 2022

Kegiatan diseminasi selanjutnya dikemas dalam bentuk film dokumenter berjudul "Semai" yang merupakan kolaborasi tim dokumentasi BPS dan BRIN (https://youtu.be/K27ygyMmhB0?si=tsMWZ2sal7fVFHFI). Film ini bercerita mengenai lima karakter yang aktif dalam praktik ekonomi hijau di lima lokasi yang berbeda di Indonesia. Karakter ini diangkat oleh tim peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tema-tema kajian kualitatif yang dilakukan. Film pendek 'Semai' telah menjadi salah satu finalis dalam *Handle Climate Change Film Festival* (HCCFF) 2023, yang merupakan festival film terkemuka di China yang berfokus pada perubahan iklim. Strategi diseminasi hasil penelitian yang dilakukan dengan berbagai sarana diharapkan dapat memperluas target audiensi dari berbagai kalangan dan dengan tujuan agar praktik-praktik baik ekonomi hijau di Indonesia dapat diketahui khalayak dan dapat diduplikasi sehingga memberikan perubahan perilaku dan lingkungan ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

4.2 Ragam Produk Diseminasi *Long Form* SP2020

Pelaksanaan diseminasi atau *launching* hasil *Long Form* SP2020 diselenggarakan serentak baik di tingkat BPS pusat maupun BPS provinsi pada Januari 2023. Ragam produk diseminasi dari hasil *Long Form* SP2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 Ragam Produk Diseminasi Hasil *Long Form* SP2020

Produk Diseminasi Hasil *Long Form* SP2020	Level Penyajian	Rilis
(1)	(2)	(3)
Berita Resmi Statistik (BRS) dan Infografis	Nasional dan Provinsi	Januari 2023
Buklet	Nasional dan Provinsi	Januari 2023
Leaflet	Nasional dan Provinsi	Januari 2023
Website Sensus Penduduk	Nasional dan Provinsi	Januari 2023
Publikasi Proyeksi Penduduk 2020-2050	Nasional	Januari 2023
Publikasi Penduduk Indonesia Hasil *Long Form* SP2020	Nasional dan Provinsi	Juli 2023
Publikasi Kajian Fertilitas Remaja Umur 10-14 tahun di Indonesia (Hasil *Long Form* SP2020)	Nasional	Desember 2023
Publikasi Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020	Nasional	Desember 2023
Publikasi Mortalitas di Indonesia	Nasional	Januari 2024
Publikasi Pembangunan Kependudukan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Wilayah	Nasional	Januari 2024
Analisis Tematik Kependudukan Hasil *Long Form* SP2020	Nasional dan Provinsi	Juli 2023
Data Mikro	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Juni 2023

https://www.bps.go.id

4.2.1 Berita Resmi Statistik (BRS) dan Infografis

Salah satu *output* dari hasil *Long Form* SP2020 disajikan dalam bentuk BRS, yang memuat data dan informasi mengenai indikator penting di antaranya fertilitas, mortalitas, mobilitas, disabilitas, pendidikan, dan perumahan.

Gambar 74 Berita Resmi Statistik Hasil *Long Form* SP2020

4.2.2 Buklet

Istilah buklet berasal dari buku dan leaflet, artinya media buklet merupakan perpaduan antara leaflet dengan buku atau sebuah buku dengan format (ukuran) kecil seperti leaflet. Struktur isinya seperti buku (ada pendahuluan, isi, penutup) hanya saja cara penyajian isinya lebih singkat daripada sebuah buku. Produk diseminasi *Long Form* SP2020 berupa buklet baik yang dihasilkan oleh BPS pusat maupun BPS provinsi berisi indikator-indikator penting hasil LF SP2020, yang mencakup fertilitas, mortalitas, mobilitas, disabilitas, pendidikan, perumahan, dan estimasi parameter kependudukan SDGs Hasil *Long Form* SP2020.

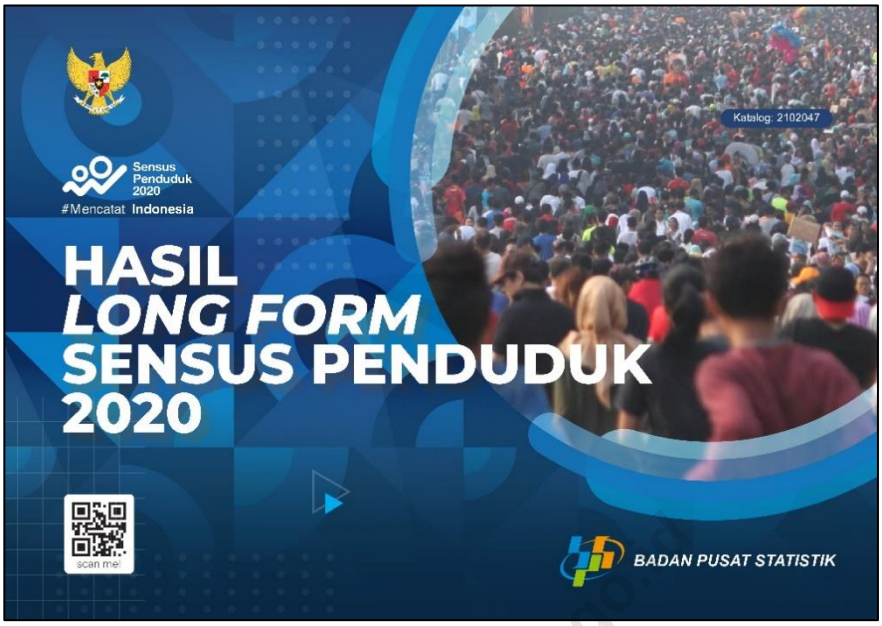

Gambar 75 Buklet Hasil *Long Form* SP2020

https://www.bps.go.id

4.2.3 Leaflet

Leaflet merupakan media cetak informasi yang dicetak pada selembar kertas dan memiliki dua lipatan atau lebih. Kertas yang digunakan adalah *art paper* atau *art carton* dan dilipat namun tidak dijahit. Ilustrasi dan bahasa yang digunakan singkat, sederhana, serta mudah dipahami, dan terdiri dari satu lembar yang dengan cetakan kedua sisinya. Dari lipatan yang membentuk beberapa bagian, leaflet seolah-olah merupakan panel atau halaman tersendiri.

Leaflet hasil *Long Form* SP2020 adalah media cetak untuk mengumumkan dan menyebarluaskan secara cepat hasil pendataan *Long Form* SP2020 yang diselenggarakan oleh BPS. Leaflet hasil *Long Form* SP2020 memuat data dan informasi mengenai indikator penting di antaranya fertilitas, mortalitas, disabilitas, pendidikan, mobilitas, dan perumahan.

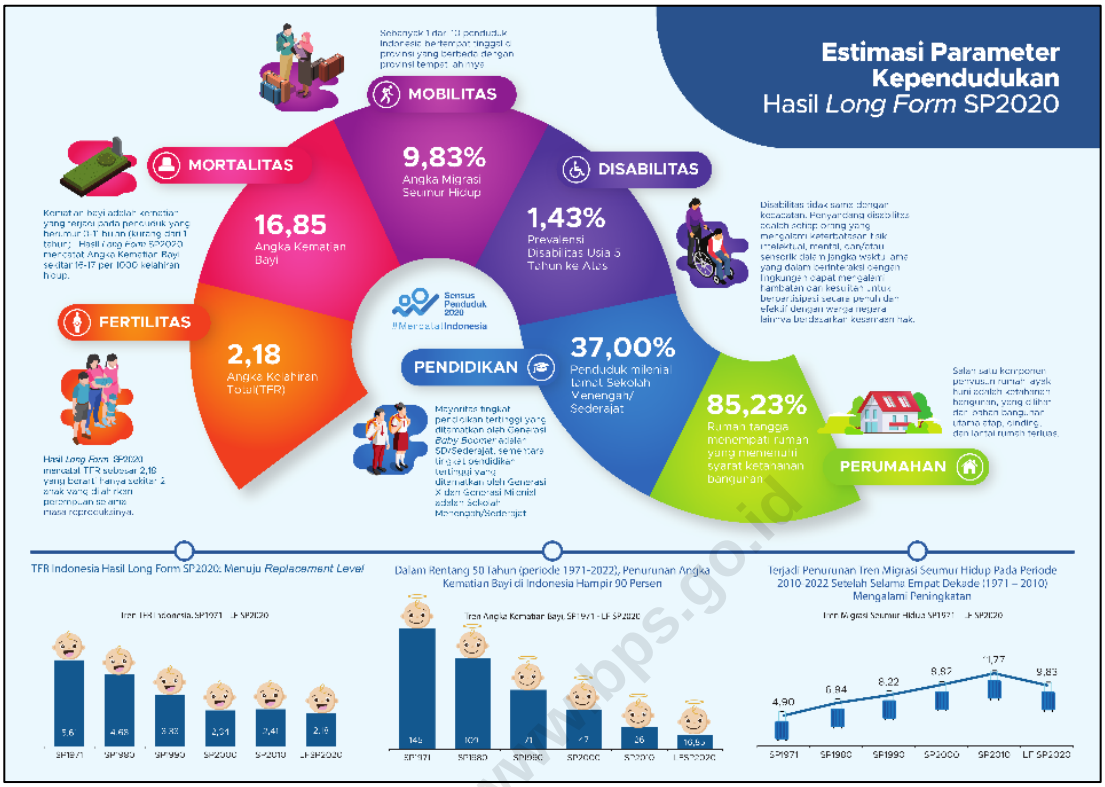

Gambar 76 *Leaflet* Hasil *Long Form* SP2020

https://www.bps.go.id

4.2.4 *Website* Sensus Penduduk

Website Long Form SP2020 dapat diakses melalui tautan berikut ini: https://sensus.bps.go.id/main/index/LFSP2020. *Website* ini dibangun untuk mendiseminasikan hasil *Long Form* SP2020 secara menyeluruh serta mudah diakses oleh masyarakat luas. *Website* ini dikembangkan sendiri secara internal BPS dalam arti tidak menggunakan paket aplikasi diseminasi yang telah ada seperti CensusInfo ataupun DevInfo. Pertimbangannya, sumber daya yang tersedia di BPS memadai untuk mengembangkan sendiri produk yang dikehendaki. Selain itu, dengan pendekatan ini maka pengembangan *website* LFSP2020 merupakan wahana peningkatan kapasitas SDM internal BPS khususnya Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Website LFSP2020 merupakan bagian dari rencana besar (*grand design*) diseminasi hasil LFSP2020 yang mencakup antara lain:

a. Penyajian data (Tabel, *Query Builder,* Tabel perbandingan antar wilayah dan kegiatan);
b. Dokumentasi instrumen sensus (kuesioner, manual, dan lainnya);

c. Dokumentasi Komprehensif *Long Form* SP2020;
d. Metadata (deskripsi lengkap terkait *Long Form* SP2020);
e. Media (foto, video, serta dokumenatsi terkait kisah-kisah pelaksanaan *Long Form* SP2020 di seluruh Indonesia);
f. Produk lain yang terkait dengan *Long Form* SP2020 (Berita Resmi, Publikasi, Infografis, Leaflet serta dokumen lainnya);

Website *Long Form* SP2020 dirancang dapat menyajikan data *Long Form* SP2020 dalam berbagai topik bahasan menurut wilayah geografis serta dilengkapi dengan perbandingan antar kegiatan. Dengan demikian pengunjung *website* ini memiliki keleluasaan untuk memilih topik dan wilayah geografis yang diinginkan.

Website ini difasilitasi dengan sejumlah fitur untuk mempermudah pengguna dalam mengeksplorasi data *Long Form* SP2020 dengan lebih fleksibel. Dengan tersedianya fitur *Query Builder* diharapkan dapat semakin mempermudah pengguna data untuk memanfaatkan data hasil *Long Form* SP2020 kapanpun dan di manapun.

Seluruh konten di dalam *website* resmi BPS juga dapat diakses dengan menggunakan mekanisme *machine-to-machine* melalui Web API (webapi.bps.go.id). Seluruh tabel statistik dalam *website* sensus BPS dapat diakses dalam beberapa format berbeda, termasuk dalam bentuk JSON yang bersifat *machine-friendly*.

https://www.bps.go.id

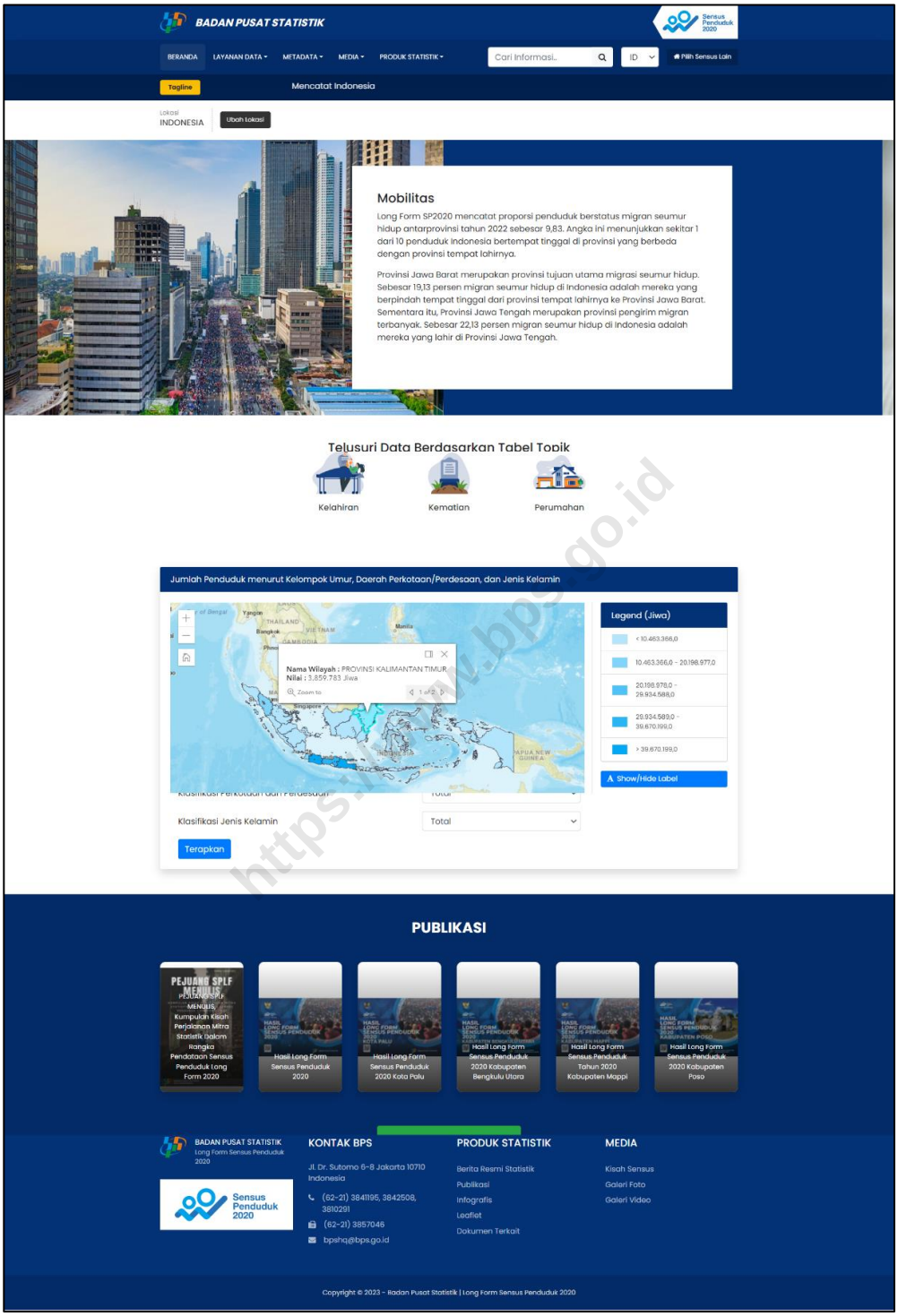

Gambar 77 Tampilan *Website* Sensus Penduduk

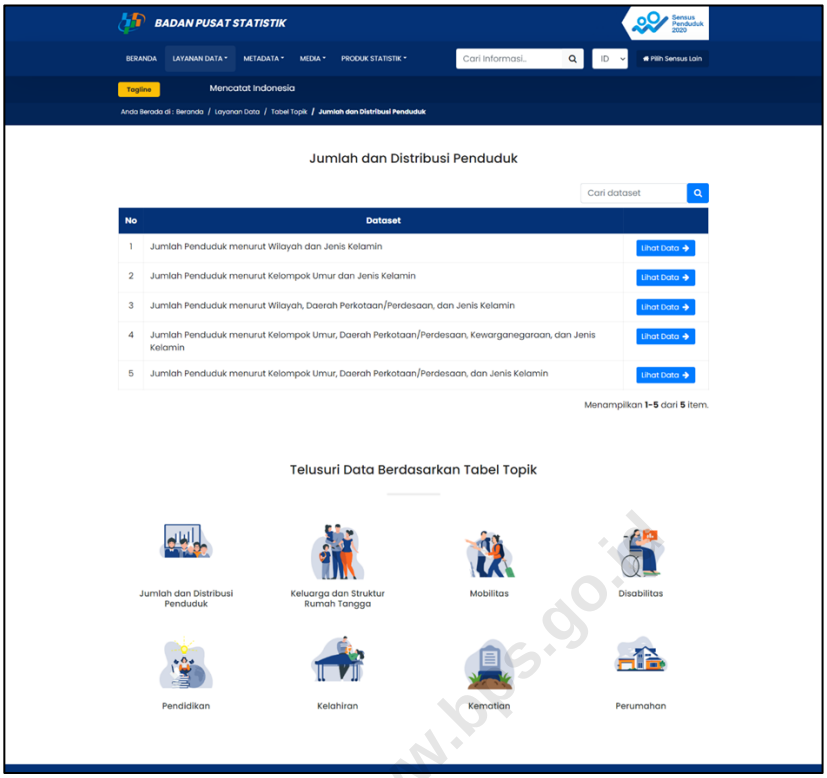

Gambar 78 Tabulasi Data Hasil *Long Form* SP2020 pada *Website* Sensus

https://www.bps.go.id

4.2.5 Publikasi Proyeksi Penduduk 2020-2050

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang.

Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 hasil *Long Form* SP2020 ini menyajikan proyeksi penduduk pada periode 2020 hingga 2050. BPS menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia. Informasi jumlah dan struktur umur penduduk hasil SP2020 serta parameter demografi hasil *Long Form* SP2020 digunakan untuk memutakhirkan proyeksi penduduk yang telah diterbitkan sebelumnya.

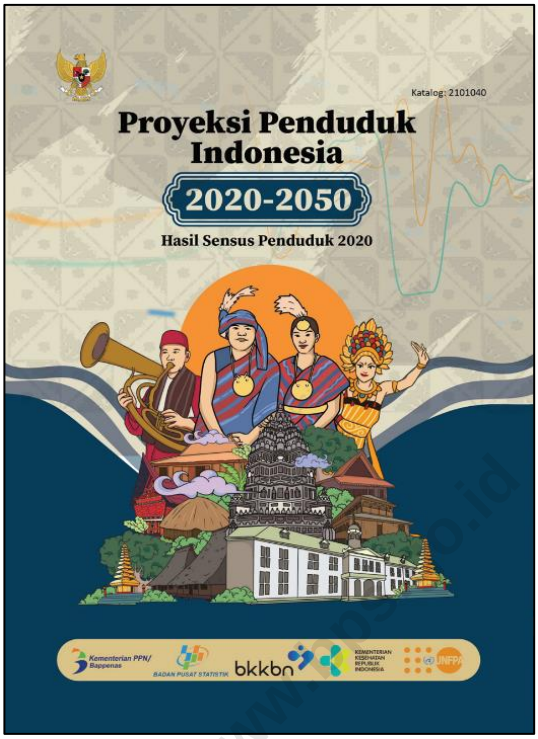

Gambar 79 Publikasi Proyeksi Penduduk 2020-2050 Hasil SP2020

https://www.bps.go.id

4.2.6 Publikasi Penduduk Indonesia Hasil *Long Form* SP2020

Publikasi Penduduk Indonesia Hasil *Long Form* SP2020 rilis pada bulan Juli 2023. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Publikasi ini disajikan secara lengkap yang mencakup penjelasan umum kegiatan SP2020, konsep dan definisi yang digunakan pada setiap variabel, data jumlah dan distribusi penduduk, serta indikator fertilitas, mortalitas, mobilitas, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan, dan perumahan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, *monitoring*, evaluasi program pembangunan seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan RPJMN bidang kependudukan.

Gambar 80 Publikasi Penduduk Indonesia Hasil *Long Form* SP2020

https://www.bps.go.id

4.2.7 Publikasi Kajian Fertilitas Remaja Umur 10-14 Tahun di Indonesia (Hasil *Long Form* SP2020)

Angka fertilitas remaja umur 10–14 tahun dan 15–19 tahun diperlukan untuk menjawab kebutuhan data terkait pemenuhan SDGs target 3.7 terutama indikator 3.7.2. Selain itu, informasi mengenai angka fertilitas remaja dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan mengenai kesehatan reproduksi remaja dan pembentukan keluarga. Di Indonesia, angka fertilitas remaja umur 15–19 tahun telah tersedia secara periodik, namun informasi mengenai angka fertilitas remaja umur 10–14 tahun belum banyak tersedia. Publikasi Kajian Fertilitas Remaja 10-14 Tahun di Indonesia Hasil *Long Form* SP2020 ini merupakan upaya BPS untuk mengisi kekosongan informasi mengenai angka fertilitas remaja 10-14 tahun di Indonesia. Publikasi ini menyajikan informasi karakteristik remaja perempuan umur 10-14 tahun, angka fertilitas remaja umur 10–14 tahun yang dihitung dengan beberapa metode dan sumber data, serta rekomendasi metode penghitungan yang digunakan untuk menghasilkan angka fertilitas remaja 10-14 tahun. Publikasi ini rilis pada bulan Desember 2023.

4.2.8 Publikasi Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020

Publikasi Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020 dirilis pada Desember 2023. Publikasi ini menyajikan kegiatan pelaksanaan SP2020 baik *short form* (SP Onilne dan SP September 2020) maupun *long form* mulai dari tahapan persiapan hingga diseminasi. Buku dokumentasi ini mendeskripsikan berbagai tantangan, kendala, proses perencanaan yang berisi rapat-rapat dan sosialisasi, inovasi dan strategi pada proses pengumpulan data, proses pengolahan data, serta diseminasi dan publisitas dari kegiatan SP2020.

4.2.9 Publikasi Mortalitas di Indonesia

Publikasi Mortalitas di Indonesia menampilkan pembahasan Hasil *Long Form* SP2020 khususnya indikator kematian. Berbagai indikator kematian yang ditampilkan yaitu angka kematian kasar, angka kematian menurut kelompok umur tertentu, angka kematian anak, angka kematian bayi, angka kematian ibu, serta angka kematian penduduk usia lanjut. Di dalam publikasi ini juga disajikan beberapa karakteristik penduduk usia lanjut yang mencakup jenis kelamin, tingkat pendidikan, status bekerja, tempat tinggal dan beberapa data lainnya. Publikasi Mortalitas di Indonesia direncanakan rilis pada Januari 2024.

https://www.bps.go.id

4.2.10 Publikasi Pembangunan Kependudukan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Wilayah

Penduduk dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga harus diintegrasikan secara selaras. Penduduk sebagai subyek pembangunan, maknanya pembangunan kependudukan perlu dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dalam kaitan mendukung penyelesaian isu-isu strategis nasional yang salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, maka karakteristik serta parameter kependudukan hingga level terendah akan memudahkan pemerintah dalam melakukan evaluasi capaian pembangunan khususnya di bidang kependudukan di setiap wilayah demi mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah.

Publikasi Pembangunan Kependudukan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Wilayah menyajikan analisis deskriptif dan inferensia antara indikator kependudukan hasil *Long Form* SP2020 dan kemiskinan Indonesia di tahun 2022. Analisis diuraikan secara komprehensif ke dalam 7 (tujuh) bab yang membahas indikator kelahiran, kematian, migrasi, serta indikator sosial lainnya, seperti pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, dan perumahan, ketika dikaitkan dengan kemiskinan, serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Analisis

keterkaitan antara parameter kependudukan dan kemiskinan ini diharapkan dapat memberikan insight dalam rangka mewujudkan penduduk Indonesia yang lebih sejahtera. Publikasi ini direncanakan untuk terbit pada Januari 2024.

4.2.11 Analisis Tematik Kependudukan Hasil *Long Form* SP2020

Hasil pendataan *Long Form* SP2020 dianalisis dan dipublikasikan dalam publikasi analisis tematik kependudukan. Analisis ini bertujuan menganalisis tema yang menarik dan bermanfaat bagi pemerintah mengenai isu kependudukan di Indonesia. Selain itu, analisis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang potensi kependudukan untuk mendukung perencanaan maupun evaluasi hasil pembangunan dari sisi kependudukan, baik RPJMN maupun SDGs pada berbagai pilar, di antaranya pilar penilaian kualitas penduduk (dari angka fertilitas dan mortalitas), isu migrasi, disabilitas, gender, dan isu lainnya.

Penulisan analisis tematik kependudukan dimulai dari perancangan mini proposal yang memuat latar belakang, tujuan, metode yang akan digunakan untuk analisis, dan sumber data yang digunakan. Kegiatan perancangan mini proposal analisis tematik kependudukan sudah dilakukan pada tahun 2021 oleh BPS Pusat bersama tim analisis BPS Provinsi, namun masih secara umum untuk setiap tema. Pembahasan tema mengoptimalkan variabel *Long Form* SP2020 yang tersedia.

Penyusunan mini proposal mengacu pada hal berikut:

1. Pembahasan tema mengoptimalkan variabel *Long Form* SP2020 Lanjutan yang tersedia dan difokuskan pada indikator kependudukan yang tertuang dalam RPJMN, SDGs, dan isu kependudukan yang sedang berkembang.
2. Publikasi menggunakan format penulisan ilmiah populer.
3. Pembahasan tiap tema tidak terlalu panjang (fokus pada mencari jawaban pertanyaan penelitian temuan utama dan usulan pemecahan masalah)
4. Disusun di tingkat nasional dan provinsi. Tim analisis provinsi dapat membahas tema tambahan yang relevan di daerah.

Terdapat 12 tema analisis yang diulas pada publikasi analisis tematik kependudukan. Tema-tema yang serumpun disatukan dalam satu publikasi, sehingga ada lebih dari satu publikasi analisis tematik kependudukan yang dihasilkan. Tema-tema ini merupakan contoh tema analisis di tim analisis BPS Pusat. Adapun tim analisis BPS Provinsi diberikan keleluasaan untuk melakukan eksplorasi tema khas daerah yang dapat disesuaikan dengan isu dalam RPJMD, SDGs, atau isu strategis lainnya di wilayah masing-masing. Berikut daftar tema analisis yang disusun oleh tim analisis BPS Pusat:

https://www.bps.go.id

1. Tingkat fertilitas remaja
2. Kematian maternal
3. Kematian bayi dan balita dan pembangunan kesehatan wilayah
4. Akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan
5. Akses hunian layak dan aman
6. Perkembangan teknologi digital, pandemi Covid-19, dan ketenagakerjaan
7. Perkembangan migrasi antarprovinsi dan karakteristik migran
8. Clusterisasi wilayah pekerja migran Indonesia, Tingkat Pembangunan Desa, dan Kondisi Rumah Tangga
9. Penutur Bahsa Indonesia dan Bahasa Daerah
10. Pluralitas, penguasaan bahasa Indonesia, dan capaian pembangunan manusia
11. Kepemilikan NIK dan Pembangunan Wilayah
12. Struktur penduduk, pembangunan manusia, dan pemberdayaan gender

Penulisan analisis tematik kependudukan ini dilakukan pada level nasional dan provinsi. Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi tim analisis BPS Pusat dan BPS Daerah dalam merancang analisis maupun perwajahan dan tata letak publikasi diwujudkan dalam bentuk kegiatan *workshop* yang dilakukan 3 kali, dalam bentuk daring dan luring. Di samping kegiatan *workshop*, untuk memperkuat pemahaman terkait isu demografi dilakukan kegiatan *capacity building* dengan pemaparan dan diskusi bersama narasumber. Publikasi analisis tematik kependudukan level nasional dan provinsi diterbitkan secara serentak melalui *website* BPS pada tanggal 29 September 2023. Publikasi analisis tematik kependudukan disusun oleh beberapa tim (Lampiran 18).

Publikasi analisis tematik kependudukan pada level nasional disajikan dalam 3 publikasi. Masing-masing publikasi terdiri dari beberapa tema yang serumpun. Buku 1 menyajikan tema fertilitas remaja, kematian maternal, kematian bayi, dan penyandang disabilitas. Buku 2 menyajikan tema migrasi dan ketenagakerjaan. Adapun buku 3 menyajikan tema pembangunan manusia dan pembangunan wilayah. Rincian bahasan di masing-masing tema dapat dilihat pada Lampiran 19.

https://www.bps.go.id

Gambar 81 Publikasi Analisis Tematik Kependudukan

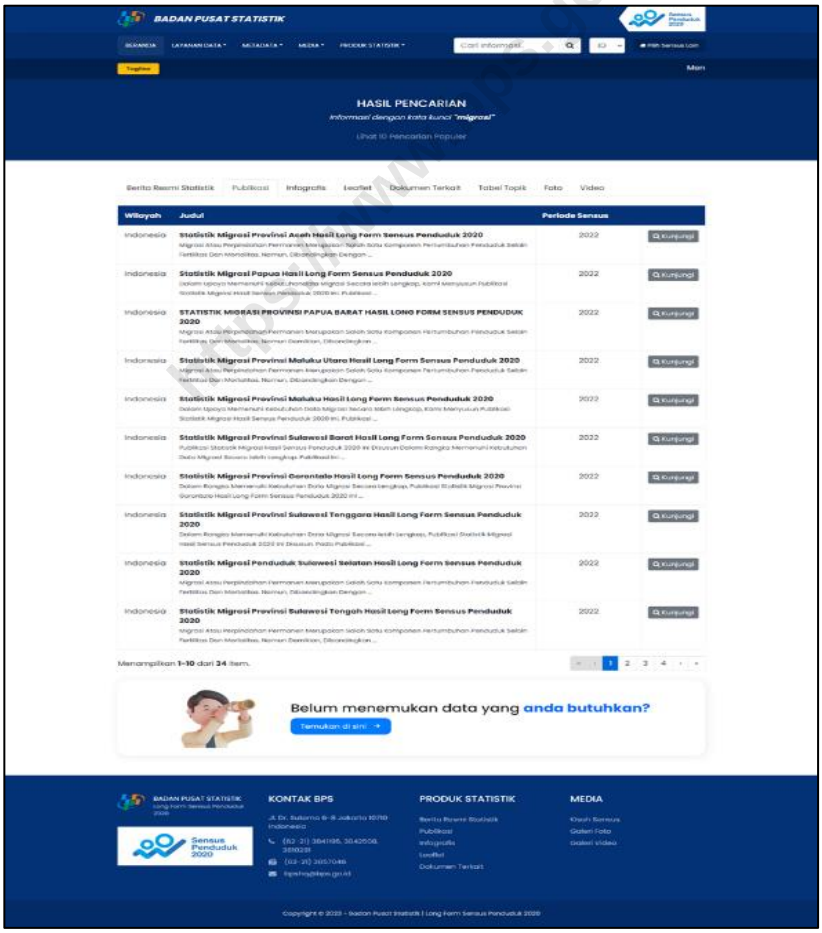

Gambar 82 Publikasi Tematik Hasil *Long Form* SP2020 pada *Website* Sensus

4.2.12 Analisis Kajian Kualitatif Hasil *Long Form* SP2020

Hasil analisis kajian kualitatif menyoroti pentingnya dimensi sosial demografi dalam praktik ekonomi hijau. Dimensi sosial demografi dalam praktik ekonomi hijau yang merupakan hasil analisis dari 34 provinsi menghasilkan empat hal penting yaitu pengaruh dari jumlah dan tingkat kepadatan penduduk, generasi muda yang merupakan agen ekonomi hijau, peran lansia dalam ekonomi hijau, dan peran srikandi ekonomi hijau.

Tabel 15 Ragam Produk Diseminasi Analisis Kualitatif Hasil *Long Form* SP020

Produk Diseminasi Hasil SP2020	Level Penyajian	Rilis
(1)	(2)	(3)
Policy Paper Penguatan Praktik Ekonomi Hijau di Indonesia: Dimensi Sosial Demografi	Nasional	Desember 2022
Kertas Kerja Mendunia Bersama Kopi Arabika Organik Gayo	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan di Sumatera Utara	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Budaya Lebah Galo-Galo : Praktik *Green Economy* dalam Keberlanjutan Lingkungan dan Kesejahteraan Penduduk di Sumatera Barat	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Praktik Ekonomi Hijau Berbasis Kelompok Tani pada Perkebunan Kelapa Sawit Bersertifikat di Provinsi Riau	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pohon Asuh dan Dana Karbon dalam Praktik Ekonomi Hijau untuk Menjaga Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jambi	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pertanian Terintegrasi sebagai Praktik Ekonomi Hijau di Ekosistem Rawa Gambut Sumatera Selatan	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Menuju Eko-Sosiopreneurship: Praktik Ekonomi Hijau Sektor Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Biogas Sangun Ratu: Praktik Pengolahan Limbah Ternak sebagai Perwujudan Kemandirian Energi dan Pangan	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Ekowisata di Lahan Eks Tambang Timah Provinsi Bangka Belitung Praktek Hijau untuk Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Penduduk	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pembangunan Ekonomi Hijau Sektor Kehutanan dalam Perspektif Sosial-Demografi di Kepulauan Riau: Pemetaan Praktik, Aktor, dan Faktor	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja *Waste into Wellbeing*: Aksi Ekonomi Hijau di DKI Jakarta	Provinsi	Desember 2022

https://www.bps.go.id

Lanjutan Tabel 15

Produk Diseminasi Hasil SP2020	Level Penyajian	Rilis
(1)	(2)	(3)
Kertas Kerja Praktik Pengelolaan Limbah Menuju Ekonomi Hijau: Kasus Jawa Barat	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Praktik Ekonomi Hijau melalui Konservasi Ekosistem Mangrove di Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Menanam Harapan di Tanah Gersang: Praktik Ekonomi Hijau di Kabupaten Gunungkidul	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Praktik Pengelolaan Limbah di Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, dan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja *Small Changes Matter*: Praktik Ekonomi Hijau dalam Pengurangan Sampah Perkotaan di Provinsi Banten	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Menggiatkan Pertanian Organik Berbasis Komunitas: Menuju Bali yang Hijau, Tangguh dan Sejahtera	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pemanfaatan Potensi Energi baru Terbaharukan (EBT) berbasis Masyarakat di Provinsi NTB: Sebuah Analisis Praktik Ekonomi Hijau	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Praktik Ekonomi Hijau Energi Baru Terbarukan di Negeri Seribu Bukit: Studi Kualitatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Tembawang: Kearifan Lokal dalam Praktik Ekonomi Hijau pada Sektor Kehutanan yang Berkelanjutan di Kalimantan Barat	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pembangunan Ekonomi Hijau berbasis Wilayah Perdesaan di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Praktik Ekonomi Hijau dalam Bingkai #SaveMeratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Mengolah Sampah menjadi Energi: Praktik Ekonomi Hijau *Waste to Energy* di Kalimantan Timur	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Praktik Pembangunan Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Utara: Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Tane'Olen (Dayak Kenyah Oma'Lungh) dan Lunang Tlang Ota Ine (Dayak Punan Adiu)	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia: Biogas Babi sebagai Praktik *Green Economy* "Kasus di Desa Tumaluntung Provinsi Sulawesi Utara".	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Ekonomi Hijau di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah: Potret dan Peran Mangrove sebagai *Green Barrier* Bencana Tsunami	Provinsi	Desember 2022

https://www.bps.go.id

Lanjutan Tabel 15

Produk Diseminasi Hasil SP2020	Level Penyajian	Rilis
(1)	(2)	(3)
Kertas Kerja Perwujudan Kesejahteraan Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan melalui Bank Sampah Tanah Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pembangunan Ekonomi Hijau di Sulawesi Tenggara: Analisis Praktik Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Tanaman Kopi Pabuto di Lahan Miring: Upaya Konservasi dengan Pola Agroforestri oleh Transmigran sebagai Praktik Ekonomi Hijau di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk dan Lingkungan Berkelanjutan Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Karampuang Mamuju Sulawesi Barat	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Industri Rumahan "*Zero Waste*" di Wilayah Kepulauan: Kajian Praktik Ekonomi Hijau di Provinsi Maluku	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Mewujudkan Praktik Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan di Dalam Praktik *Fair Trade* Tuna di Maluku Utara	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Praktik Hijau Menjaga Hutan dan Mengelola Komoditas Unggulan Daerah Non-Deforestasi di Provinsi Papua Barat	Provinsi	Desember 2022
Kertas Kerja Pembangunan Ekonomi Hijau Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk dan Lingkungan Berkelanjutan di Provinsi Papua	Provinsi	Desember 2022
Studi Kasus Pengolahan pangan Lokal Sagu dan Buah Merah		
Film Dokumenter "Semai"	Nasional	Desember 2022

https://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2012). *Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2010 Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Pedoman Pelatihan Long Form SP2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Pedoman Petugas Pendataan Lapangan Wilayah CAPI Long Form SP2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Pedoman Petugas Pendataan Lapangan Wilayah PAPI Long Form SP2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota Long Form SP2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 86 Tahun 2021 tentang Masterplan dan Network Planning Sensus Penduduk Tahun 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Suplemen Pedoman Pelatihan Long Form SP2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Suplemen Pedoman Petugas Pendataan Lapangan Wilayah CAPI Long Form SP2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Suplemen Pedoman Petugas Pendataan Lapangan Wilayah PAPI Long Form SP2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Suplemen Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota Long Form SP2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

United Nations. (2017). *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses Revision 3*. New York: United Nations.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

LAMPIRAN

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

LAMPIRAN

Bagian 1 *Short Form* SP2020

Lampiran 1 Jadwal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) SP2020

Kode Wilayah	Provinsi	Jadwal Pelaksanaan PK (September 2020)									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tidak Dapat Melaksanakan PK SP2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Aceh	■									
12	Sumatera Utara										
	Gelombang I: Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Labuhan Batu, Asahan, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Begadai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Tanjung Balai, Binjai, Padangsidimpuan, Gunungsitoli					■					
	Gelombang II: Simalungun, Karo, Deli Serdang, Langkat, Nias Selatan, Labuhan Batu Selatan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan									■	
13	Sumatera Barat										
	Kep. Mentawai		■								
	Kab./Kota lainnya	■									
14	Riau	■									
15	Jambi	■									
16	Sumatera Selatan	■									

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

Kode Wilayah	Provinsi	Jadwal Pelaksanaan PK (September 2020)									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tidak Dapat Melaksanakan PK SP2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Bengkulu										
18	Lampung										
19	Kep. Bangka Belitung										
21	Kep. Riau										
31	Dki Jakarta										
32	Jawa Barat										
33	Jawa Tengah										
	Kota Salatiga										
	Kab./Kota lainnya										
34	DI Yogyakarta										
35	Jawa Timur										
36	Banten										
51	Bali										
	Kabupaten Gianyar										
	Kab./Kota lainnya										
52	Nusa Tenggara Barat										
53	Nusa Tenggara Timur										
61	Kalimantan Barat										
62	Kalimantan Tengah										
63	Kalimantan Selatan										
	Kab. Hulu Sungai Utara										
	Kab./Kota lainnya										
64	Kalimantan Timur										
	Kab. Mahakam Ulu										
	Kab./Kota lainnya										
65	Kalimantan Utara										

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

Kode Wilayah	Provinsi	Jadwal Pelaksanaan PK (September 2020)									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tidak Dapat Melaksanakan PK SP2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
71	Sulawesi Utara										
	Kota Manado										
	Kab./Kota lainnya										
72	Sulawesi Tengah										
	Kab. Banggai										
	Kab./Kota lainnya										
73	Sulawesi Selatan										
74	Sulawesi Tenggara										
75	Gorontalo										
76	Sulawesi Barat										
81	Maluku										
82	Maluku Utara										
	Kabupaten Pulau Taliabu										
	Kab./Kota lainnya										
91	Papua Barat										
	Kab. Tambrauw										
	Kab. Maybrat										
	Kab. Pegunungan Arfak										
	Kab./Kota lainnya										

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

Kode Wilayah	Provinsi	Jadwal Pelaksanaan PK (September 2020)									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tidak Dapat Melaksanakan PK SP2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
94	Papua										
	Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Kepulauan Yapen, Paniai, Tolikara, Keerom, Supiori, Jayapura										
	Nabire, Mimika										
	Biak Numfor										
	Boven Digoel										
	Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Sarmi, Waropen, Puncak, Deiyai										
	Mamberano Raya, Nduga, Lani Jaya, Mamberano Tengah, Yalimo, Dogiyai, Intan Jaya										

https://www.bps.go.id

Lampiran 2 Jenis Dokumen Penjaminan Kualitas (PK) SP2020

No	Jenis Dokumen	Keterangan & Kegunaan	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PK.SP2020-SOP dalam bentuk aplikasi CAPI PK	Instrumen ini digunakan petugas PK untuk proses pemeriksaan persiapan pelaksanaan lapangan, pelaksanaan tata laksana Petugas Sensus pada tahapan pemeriksaan daftar penduduk dan prosedur verifikasi lapangan. Instrumen ini dikemas dalam bentuk aplikasi CAPI yang dipasang pada perangkat tablet/smartphone berbasis android.	Petugas PK SP2020
2	Buku Pedoman Petugas Penjaminan Kualitas SP2020	Buku ini berisi panduan lengkap bagi petugas PK SP2020 untuk melakukan kegiatan penjaminan kualitas pada tahap pendataan lapangan SP2020. Buku ini diberikan dalam bentuk softcopy.	Petugas PK SP2020
3	Peta SP2020-WS	Dokumen ini digunakan sebagai instrumen pendukung bagi petugas PK SP2020 dalam melakukan pemeriksaan SOP Petugas Sensus.	Petugas PK SP2020
4	Dokumen SP2020-DP1 atau SP2020-DP2	Dokumen ini digunakan sebagai instrumen pendukung petugas PK SP2020 dalam melakukan pemeriksaan SOP Petugas Sensus berkaitan dengan dokumen SP2020-DP1 (pada zona 1) dan SP2020-DP2 (pada zona 2 atau zona 3).	Petugas PK SP2020
5	Dokumen SP2020-DPD	Dokumen ini digunakan sebagai instrumen pendukung petugas PK SP2020 dalam melakukan pemeriksaan SOP Petugas Sensus berkaitan dengan dokumen SP2020-DPD (Daftar Penduduk Desa). Dokumen ini digunakan hanya pada wilayah sampel PK yang memiliki dokumen SP2020-DPD.	Petugas PK SP2020

https://www.bps.go.id

Lampiran 3 Rancangan Tabulasi Analisis SP2020

Tabel	Judul
(1)	(2)
Tabel 1.	Jumlah Penduduk Menurut Kesesuaian Alamat KK/KTP dengan Tempat Tinggal dan Wilayah
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Menurut Umur Tunggal, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Kelompok Umur
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Tempat Lahir
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Migrasi Seumur Hidup
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Wilayah, Kewarganegaraan dan Kelompok Umur
Tabel 9.	Jumlah Penduduk WNI Menurut Kelompok Umur dan Suku Bangsa
Tabel 10.	Jumlah Penduduk WNI Menurut Wilayah dan Suku Bangsa
Tabel 11.	Jumlah Penduduk Menurut Umur Tunggal dan Agama
Tabel 12.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama
Tabel 13.	Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Agama
Tabel 14.	Jumlah Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Tunggal dan Status Perkawinan
Tabel 15.	Jumlah Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
Tabel 16.	Jumlah Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Wilayah dan Status Perkawinan
Tabel 17.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Hubungan dengan Kepala Keluarga
Tabel 18.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin
Tabel 19.	Jumlah Anak Usia 0-17 tahun Menurut Wilayah dan Status Tinggal Saat Ini
Tabel 20.	Jumlah Pasangan Suami Istri Menurut Wilayah dan Status Tinggal
Tabel 21.	Jumlah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Ijazah/Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tabel 22.	Jumlah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Wilayah dan Ijazah/Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tabel 23.	Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Aktivitas yang Biasa Dilakukan
Tabel 24.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Aktivitas yang Biasa Dilakukan
Tabel 25.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Aktivitas yang Biasa Dilakukan
Tabel 26.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 3

Tabel	Judul
(1)	(2)
Tabel 27.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan
Tabel 28.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Ijazah/Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan
Tabel 29.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan
Tabel 30.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Wilayah dan Status Pekerjaan
Tabel 31.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan dan Status Pekerjaan
Tabel 32.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Ijazah/Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan
Tabel 33.	Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Secara Informal Menurut Sektor Usaha, Jenis Kelamin dan Wilayah
Tabel 34.	Jumlah Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Jenis Lantai Terluas Rumah
Tabel 35.	Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah dan Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal
Tabel 36.	Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah dan Sumber Air Minum yang Digunakan
Tabel 37.	Jumlah Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Septic Tank
Tabel 38.	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah yang Ditempati
Tabel 39.	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah yang Ditempati dan Sumber Penerangan Utama
Tabel 40.	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah yang Ditempati dan Sumber Air Minum yang Digunakan
Tabel 41.	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah yang Ditempati dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Tabel 42.	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah yang Ditempati dan Jenis Lantai Terluas

https://www.bps.go.id

Lampiran 4 Tim Penulis Analisis Profil Penduduk Hasil *Short Form* SP2020

No.	Nama	Jabatan	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Moh Edy Mahmud S.Si., M.P.	Deputi Neraca dan Analisis Statistik	Pengarah
2.	Dr. Muchammad Romzi	Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik	Penanggung Jawab
3.	Wisnu Winardi, S.ST., M.E.	Statisti Ahli Madya	Penyunting
4.	Ema Tusianti, S.ST., S.AB., M.T., M.Sc.	Statistisi Ahli Muda	Pengolah Data dan Penulis Naskah (Pendahuluan)
5.	I Gusti Ngurah Agung Rama Gunawan, S.ST., M.T.	Statistisi Ahli Muda	Pengolah Data dan Penulis Naskah (Profil Anak)
6.	Dede Yoga Paramartha, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Pengolah Data, Penulis Naskah (Profil Usia Anak) dan Penata Letak
7.	Syukriyah Delyana, S.ST.	Statistisi Ahli Pertama	Pengolah Data, Penulis Naskah (Profil Usia Produktif), dan Pemeriksa Aksara
8.	Dyah Retno Prihatinningsih, B.St.	Statistisi Penyelia	Pengolah Data dan Penulis Naskah (Profil Lansia)
9.	Adi Nugroho, S.ST	Statistisi Ahli Muda	Pengolah Data
10.	Fenny Awwaliyah, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Pemeriksa Aksara
11.	Dewi Widyawati, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Pemeriksa Aksara
12.	Zulhan Rudyansyah, S.E.	Pranata Komputer Muda	Penata Letak
13.	Dimas Hari Santoso, S,Si., M.Ec., M.E.	Statistisi Ahli Muda	Penata Letak

https://www.bps.go.id

Lampiran 5 Daftar Narasumber dalam Kegiatan Analisis Profil Penduduk SP2020

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Materi
Workshop Analisis Profil Online 27-28 September dan 4-5 Oktober 2021			
1.	Joko Parmiyanto MEDC	Direktorat Sistem Informasi Statistik	Penjelasan tentang Data SP2020
2.	I Dewa Gede Karma Wisana, Ph.D	Akademisi Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	Keterkaitan indikator kependudukan yang dihasilkan dari SP2020 dengan indikator lain dan relevansinya dengan isu yang sedang berkembang
3.	Dra. Omas Bulan Samosir, Ph.D	Akademisi Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	Usia Harapan Hidup (UHH) dari sisi gambaran umum, metodologi penghitungan UHH, faktor yang mempengaruhi UHH, dan dampak kejadian luar biasa seperti perang, bencana alam, dan pandemi terhadap UHH.
Workshop Analisis Profil Tatap Muka 11-13 Mei 2022			
4.	Atalia Praratya	Bunda Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Jawa Barat	Penyiapan Generasi Penerus yang Tangguh
5.	Nashrul Wajdi	Direktorat Sistem Informasi Statistik	Konfirmasi Data Hasil SP2020
6.	Dr. Bagus Sumargo, M.Si	Pakar sistem dinamik dari Asosiasi Ahli Sistem Dinamik Indonesia	Penerapan Sistem Dinamik untuk Analisis Kependudukan
7.	Ferry Hadiyanto, SE., MA	pakar ekonomi kependudukan dari Universitas Padjajaran	Tantangan dan peluang Tenaga Kerja pada Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0
8.	Dr. Tukino, M.Si.	pakar kesejahteraan sosial dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Kesejahteraan dan Produktivitas Lansia
Capacity Building Online			
9.	Prov. Dr. Multamia RMT Lauder, S.S., Mse., DEA (31 Januari 2022)	Guru besar lingustik Universitas Indonesia	Tata Bahasa dan Gaya Bahasa yang Baik untuk Publikasi Resmi Pemerintah
10.	Dr. Slamet Sutomo (6 April 2022)	Pakar	Tatacara Analisis Data yang Baik untuk Publikasi Resmi Pemerintah

https://www.bps.go.id

Lampiran 6 Kegiatan Pendampingan Penyusunan Publikasi dan Supervisi FGD Analisis SP2020 di Provinsi

Provinsi	Tanggal	Tim Pendampingan BPS Pusat
(1)	(2)	(3)
Jawa Barat	18/05/2022	Yoyo Karyono & Syukriyah Delyana
Riau	23/05/2022	Dimas Hari Santoso & Bayu Dwi Kurniawan
DKI Jakarta	20/05/2022	Ema Tusianti & Dyah Retno Prihatinningsih
Jawa Timur	18/05/2022	Ema Tusianti & Dyah Retno Prihatinningsih
Bengkulu	02/06/2022	Wisnu Winardi & Dimas Hari Santoso
Lampung	02/06/2022	Yoyo Karyono & Adi Nugroho
Nusa Tenggara Barat	03/06/2022	Ema Tusianti & Dyah Retno Prihatinningsih
Jawa Tengah	31/05/2022	Ema Tusianti & Syukriyah Delyana
Maluku Utara	14/06/2022	Yoyo Karyono & Zulhan Rudiyansyah
Gorontalo	10/08/2022	Ema Tusianti
Bali	06/09/2022	I Gusti Ngurah Agung Rama Gunawan
Kalimantan Tengah	08/09/2022	Wisnu Winardi
Jawa Timur	13/09/2022	Muchammad Romzi & Wisnu Winardi

https://www.bps.go.id

Lampiran 7 Rincian Tema yang Dibahas pada Analisis Profil Penduduk Indonesia

No	Bahasan
1.	Dinamika Penduduk di Indonesia
a.	Jumlah Penduduk Indonesia Peringkat Keempat Dunia
b.	Sebaran Penduduk dan Pembangunan Antarwilayah
c.	Perubahan Struktur Penduduk Indonesia
d.	Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi
e.	Implikasi Perubahan Struktur Umur Penduduk pada Masa yang Akan Datang
f.	Kesimpulan
g.	Referensi
2.	Anak Investasi Masa Depan Bangsa
a.	Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pondasi Daya Saing Bangsa
b.	Struktur Penduduk dan Persebaran Anak Indonesia
c.	Membangun Generasi Berpengetahuan
d.	Menyiapkan Generasi Berumur Panjang dan Hidup Sehat
e.	Pekerja Anak dan Ekonomi Keluarga
f.	Perkawinan Anak
g.	Kesimpulan
h.	Referensi
3.	Penduduk Usia Produktif sebagai Aktor Utama Pembangunan Nasional
a.	Perkembangan Jumlah Penduduk USia Produktif di Indonesia
b.	Sebaran Penduduk Usia Produktif di Indonesia
c.	Kualitas Penduduk Usia Produktif di Indonesia
d.	Penduduk Usia Produktif dalam Pasar Tenaga Kerja
e.	Penduduk Usia Produktif menurut Generasi
f.	Kesimpulan
g.	Referensi
4.	Penduduk Lanjut Usia di Indonesia
a.	Lansia Indonesia dalam Perbandingan Internasional
b.	Sebaran Lansia di Indonesia
c.	Lansia Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif (SMART) dan Tantangan yang Dihadapi
d.	Lansia dalam Perlindungan Keluarga dan Negara
e.	Menyongsong Era Pasca-Bonus Demografi
f.	Kesimpulan
g.	Referensi

https://www.bps.go.id

Bagian 2 *Long Form* SP2020

Lampiran 8 Jadwal Pelaksanaan Uji Coba Penjaminan Kualitas (PK) *Long Form* SP2020

No	Jenis PK	Tanggal	Jumlah Petugas PK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PK *Long Form* SP2020 Pelaksanaan Lapangan (CAPI/PAPI)	Minggu III Februari–II Maret 2021	4
2	PK *Long Form* SP2020 *Editing*	Minggu I Maret 2021	1

https://www.bps.go.id

Lampiran 9 Jenis Dokumen Uji Coba Penjaminan Kualitas (PK) *Long Form* SP2020 Pendataan Lapangan

No	Jenis Dokumen	Keterangan & Kegunaan	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
1	UC.PK.SP2020-C2	Digunakan untuk memeriksa isian (konten) Kuesioner UC.SP2020-C2	Petugas Uji Coba PK *Long Form* SP2020 Pendataan Lapangan
2	UC.PK.SP2020-SOP	Digunakan untuk memeriksa SOP PPL, Kortim dan BPS Kabupaten/Kota	Petugas Uji Coba PK *Long Form* SP2020 Pendataan Lapangan
3	Buku Pedoman Petugas Uji Coba Penjaminan Kualitas *Long Form* SP2020 Pendataan Lapangan	Digunakan sebagai panduan bagi Petugas Uji Coba PK *Long Form* SP2020 Pendataan Lapangan dalam melakukan kegiatan PK pada Tahap Pengumpulan Data	Petugas Uji Coba PK *Long Form* SP2020 Pendataan Lapangan

https://www.bps.go.id

Lampiran 10 Jenis Dokumen Uji Coba Penjaminan Kualitas (PK) *Long Form* SP2020 *Editing*

No	Jenis Dokumen	Keterangan & Kegunaan	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
1	UC.PK.SP2020-E.C2	Instrumen ini digunakan untuk proses pemeriksaan isian (konten) kuesioner UC.SP2020-C2.	Petugas Uji Coba PK *Long Form* SP2020 *Editing*
2	Buku Pedoman Petugas Uji Coba Penjaminan Kualitas *Long Form* SP2020 *Editing*	Buku ini berisi panduan lengkap bagi Petugas Uji Coba PK *Long Form* SP2020 *Editing* untuk melakukan kegiatan penjaminan kualitas pada tahap *Editing* dalam Sensus Penduduk 2020	Petugas Uji Coba PK *Long Form* SP2020 *Editing*
3	Petunjuk pengisian UC.PK.SP2020-E.C2	Instrumen ini berisi petunjuk ringkas pengisian Kuesioner UC.PK.SP2020-E.C2	Petugas Uji Coba PK *Long Form* SP2020 *Editing*

https://www.bps.go.id

Lampiran 11 Jadwal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pemutakhiran *Long Form* SP2020

No	Kegiatan	Waktu
(1)	(2)	(3)
1	Rekrutmen Petugas PK (Pusat dan Provinsi)	Minggu I Maret 2022
2	Rekrutmen Petugas Tindak Lanjut	Minggu I Maret 2022
3	Refreshing Innas/*Sit in Long Form* SP2020	14–16 Maret 2022
4	Pelatihan Petugas PK Pemutakhiran *Long Form* SP2020	9–10 Mei 2022
5	*Briefing* Mekanisme Tindak Lanjut PK Pemutakhiran *Long Form* SP2020	17–18 Mei 2022
6	Pelaksanaan PK Pemutakhiran *Long Form* SP2020	19–24 Mei 2022
7	Pelaksanaan Tindak Lanjut PK Pemutakhiran *Long Form* SP2020	23–31 Mei 2022
8	Pelaporan Kegiatan Pemutakhiran *Long Form* SP2020 oleh BPS Daerah	22 Juni–8 Juli 2022
9	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pemutakhiran *Long Form* SP2020	Juli–September 2022

https://www.bps.go.id

Lampiran 12 Jadwal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020

No	Kegiatan	Waktu
(1)	(2)	(3)
1	Rekrutmen Petugas PK (Pusat dan Provinsi)	Minggu I Maret 2022
2	Rekrutmen Petugas Tindak Lanjut	Minggu I Maret 2022
3	Refreshing Innas/*Sit in Long Form* SP2020	14–16 Maret 2022
4	*Briefing*/Pelatihan Petugas PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020	30–31 Mei dan 2 Juni 2022
5	Pelaksanaan PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020 dari BPS Pusat	6–14 Juni 2022
6	Pelaksanaan PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020 dari BPS Provinsi	7–13 Juni 2022
7	Pelaksanaan Tindak Lanjut PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020	13–22 Juni 2022
8	Pelaksanaan Supervisi Tindak Lanjut PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020	19–22 Juni 2022
9	Pelaporan Kegiatan PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020 oleh BPS Daerah	22 Juni–8 Juli 2022

https://www.bps.go.id

Lampiran 13 Jadwal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pendataan CATI *Long Form* SP2020

No	Kegiatan	Waktu
(1)	(2)	(3)
1	Rekrutmen Petugas PK CATI	Mei 2022
2	*Briefing*/Pelatihan Petugas PK CATI *Long Form* SP2020	9 Juni 2022
3	Pelaksanaan PK CATI *Long Form* SP2020	- Tahap Pertama: 15–17 Juni 2022 - Tahap Kedua: 27–29 Juni 2022
4	Penyampaian Rekomendasi Tindak Lanjut pada Bidang Manajemen Pendataan	Dua hari setelah PK CATI tahap pertama selesai
5	Pelaksanaan Instruksi Tindak Lanjut PK CATI *Long Form* SP2020 oleh Bidang Manajemen Pendataan	Setelah diterimanya rekomendasi tindak lanjut

https://www.bps.go.id

Lampiran 14 Dokumen yang Digunakan pada Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pemutakhiran *Long Form* SP2020

No	Jenis Dokumen	Kegunaan	Digunakan oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Buku 9A Pedoman Petugas Penjaminan Kualitas Pemutakhiran *Long Form* SP2020	Pedoman Petugas Penjaminan Kualitas Pemutakhiran *Long Form* SP2020	Petugas PK Pemutakhiran *Long Form* SP2020
2	Buku 9C Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas *Long Form* SP2020 BPS Daerah	Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas *Long Form* SP2020	BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota
3	PK LF.SP2020-DSRT	Daftar Sampel Rumah Tangga PK Pemutakhiran	Petugas PK Pemutakhiran *Long Form* SP2020
4	PK LF.SP2020-P	Kuesioner PK Pemutakhiran	Petugas PK Pemutakhiran *Long Form* SP2020
5	PK LF.SP2020-SOP.P	Kuesioner PK SOP Tahap Pemutakhiran	Petugas PK Pemutakhiran *Long Form* SP2020
6	PK LF.SP2020-INSTRUKSI.P	Rumusan Instruksi Tindak Lanjut PK Pemutakhiran	BPS Kabupaten/Kota
7	PK LF.SP2020-FB.INSTRUKSI.P	Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut PK Pemutakhiran	Koseka

https://www.bps.go.id

Lampiran 15 Dokumen yang Digunakan pada Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020

No	Jenis Dokumen	Kegunaan	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Buku 9B Pedoman Petugas Penjaminan Kualitas Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020	Pedoman Petugas Penjaminan Kualitas Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020	Petugas PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020
2	Buku 9C Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas *Long Form* SP2020 BPS Daerah	Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas *Long Form* SP2020	BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/ Kota
3	PK LF.SP2020-DSRT.C2	Daftar Sampel Rumah Tangga PK Pendataan Rumah Tangga Sampel	Petugas PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020
4	PK LF.SP2020-C2	PK Konten SP2020-C2	Petugas PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020
5	PK LF.SP2020-SOP.C2	Kuesioner PK SOP Tahap Pendataan Rumah Tangga Sampel	Petugas PK Pendataan Rumah Tangga Sampel *Long Form* SP2020
6	PK LF.SP2020-INSTRUKSI.C2	Rumusan Instruksi Tindak Lanjut PK Pendataan Rumah Tangga Sampel	BPS Kabupaten/Kota
7	PK LF.SP2020-FB.INSTRUKSI.C2	Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut PK Pendataan Rumah Tangga Sampel	Koseka

https://www.bps.go.id

Lampiran 16 Dokumen yang Digunakan pada Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Pendataan CATI *Long Form* SP2020

No	Jenis Dokumen	Kegunaan	Digunakan oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Buku 9D Petugas Penjaminan Kualitas Pendataan CATI *Long Form* SP2020	Pedoman Petugas Penjaminan Kualitas Pendataan CATI *Long Form* SP2020	Petugas PK CATI *Long Form* SP2020
2	PK.SP2020-DSRT.CATI	Daftar Sampel Rumah Tangga PK Pendataan Rumah Tangga Sampel CATI	Petugas PK CATI *Long Form* SP2020
3	PK.SP2020-C2.CATI	Kuesioner PK Konten SP2020-C2 CATI	Petugas PK CATI *Long Form* SP2020
4	PK.SP2020-SOP.CATI	Kuesioner PK SOP Tahap Pendataan Rumah Tangga Sampel menggunakan CATI	Petugas PK CATI *Long Form* SP2020
5	PK.SP2020- INSTRUKSI.CATI	Rumusan Instruksi Tindak Lanjut PK Pendataan Rumah Tangga Sampel	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
6	LK PK Pendataan CATI *Long Form* SP2020	Lembar Kerja PK Konten SP2020-C2 CATI	Petugas PK CATI *Long Form* SP2020

https://www.bps.go.id

Lampiran 17 Daftar Narasumber dan Materi yang Disampaikan dalam Penulisan Analisis Tematik Kependudukan III

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Materi
Workshop Analisis Tematik Kependudukan I 26-30 September 2022			
1.	Dr. Sukamdi	Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM	Isu Kependudukan Terkini dan Keterkaitan Pembangunan Wilayah, Peristiwa Kependudukan, dan Pembangunan Manusia.
2.	Dr. Agus Joko Pitoyo	Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM	Pentingnya Data Kependudukan yang Berkualitas
Workshop Analisis Tematik Kependudukan III 12-13 September 2023			
3.	Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., M.S.	Pakar Ketenagakerjaan dan Produktivitas Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia (APRODI)	Pemanfaatan Bonus Demografi melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
4.	M. Sairi Hasbullah, M.A.	Pakar Statistik dan Kepenulisan Publikasi Ilmiah Populer JSH Center	Bagaimana Menyampaikan Analisis Hasil *Long Form* SP2020 Agar Mudah Dipahami Pembaca"
Capacity Building Online 10 Agustus 2023			
5.	Endang L. Achadi (10 Agustus 2023)	FKM UI	Analisis Tematik Kematian Maternal Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (dan PODES)
6.	Dr. Ferry Hadiyanto, SE, MA (15 Agustus 2023)	Dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dari Unpad	Migrasi dan Ketenagakerjaan

https://www.bps.go.id

Lampiran 18 Tim Penulis Analisis Tematik Kependudukan Hasil *Long Form* SP2020

Tema	Penulis
Buku 1: Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, Dan Penyandang Disabilitas	
Tingkat Fertilitas Remaja Indonesia Mengalami Penurunan Signifikan	Dwi Trisnani SST., M.Si.
	Ema Tusianti SST, SAB, M.T., M.Sc
	Fenny Afifatul Awwaliyah S.Tr.Stat.
	Putricia Synthesa SST, M.E.K.K
	Sri Wahyuni SST., SE., M.Si.
Analisis Faktor Risiko Kematian Ibu di Indonesia	Apriliani Nurida Dwi Aswarawati S.Si, M.Sc
	Diah Ikawati MAPS
	Putu Rima Ayu Padini S.Tr.Stat.
Kematian Bayi dan Pembangunan Kesehatan Wilayah	Dendi Handiyatmo SST, M.Si.
	Uray Naviandi SST, M.Si
	Wida Siddhikara Perwitasari S.Tr.Stat.
Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan dan Ketenagakerjaan	Dede Yoga Paramartha S.Tr.Stat
	Karuniawati Dewi Ramadani S.Si, M.E.K.K
	Yeni Rachmawati SST, M.Si
Buku 2: Migrasi dan Ketenagakerjaan	
Migran Muda, Siapakah Mereka?	Dyah Retno Prihatinningsih B.St
	Fajar Santoso Putra SST, M.E.K.K.
	Heru Irawan SST, M.Si.
	Viane Dorthea Tiwa SST
Migrasi dan Ketimpangan Pembangunan	Bayu Dwi Kurniawan S.Tr.Stat.
	Desta Febriana Indriyantika S.Tr.Stat.
	Dr. Erie Sadewo SST, M.Si
	Parwoto SST,M.Stat
Pulang Kampung dan Kehidupan Para Migran	F. Tri Ayuningrum SST
	Winida Albertha SST, M.Sc
	Yuniarti S.Si
Klasterisasi Pekerja Migran Indonesia	Bayu Dwi Kurniawan S.Tr.Stat.
	Farakh Khoirotun Nasida S.Tr.Stat.
	Monica Windi Triasturi SST
	Putri Ilhami Firdaus S.Tr.Stat.
	Yeshri Rahayu S.Si, M.Sc, MT

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 18

Tema	Penulis
Buku 3: Pembangunan Manusia dan Pembangunan Wilayah	
Profil Pengguna Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah di Nusantara	Dewi Widyawati S.Tr.Stat.
	Dimas Hari Santoso S.Si, M.Ec., M.E.
	I Gusti Ngurah Agung Rama Gunawan SST.,MT
	Putri Wahyu Handayani SST, M.S.E
Struktur Penduduk, Pemberdayaan Gender, dan Pembangunan Manusia	Valent Gigih Saputri SST, M.Ec.Dev.
	Rizky Dwi Yuniarvi SST
	Fenny Afifatul Awwaliyah S.Tr.Stat.
	Yogo Aryo Jatmiko SST, M.Stat
Peluang Kepemilikan Rumah di Perkotaan	Ema Tusianti SST, SAB, M.T., M.Sc
	Mayang Sari S.Si, M.KM, M.Biomed.Sc
	Rida Agustina SST, M.Si
Komuter dan Kondisi Perumahannya di Sepuluh Wilayah Metropolitan	Eva Yugiana SST,M.E.K.K
	Mega Silviliyana SST, M.E.K.K.
	Nur Amalia Ramadhani S.ST, M.E.K.K.
	Nurarifin SST, M.Ec.Dev, M.Ec.

https://www.bps.go.id

Lampiran 19 Rincian Tema yang Dibahas pada Analisis Tematik Kependudukan Buku 1 (Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas)

No	Bahasan
Tingkat Fertilitas Remaja Indonesia Mengalami Penurunan Signifikan	
a.	Penurunan Tingkat Fertilitas Remaja dalam Agenda Pembangunan Global
b.	Posisi Tingkat Fertilitas Remaja Indonesia di Tingkat Global
c.	Gambaran Fertilitas Remaja Antarwilayah
d.	Profil Remaja dan Rumah Tangga yang Pernah Melahirkan
e.	Usia Perkawinan Pertama dan Tingkat Fertilitas Remaja
f.	Pembangunan Infrastruktur, Sarana Prasarana Pendidikan/Keterampilan dan Ekonomi dan Keterkaitannya dengan Tingkat Fertilitas Remaja
g.	Kesimpulan
h.	Referensi
Analisis Faktor Risiko Kematian Ibu di Indonesia	
a.	Gambaran Kematian Ibu di Indonesia
b.	Karakteristik Kematian Ibu di Indonesia
c.	Profil Rumah Tangga dengan Kasus Kematian Ibu
d.	Pembangunan Pelayanan Kesehatan Ibu di Indonesia
e.	Gambaran Ketersediaan atau Akses Pelayanan Kesehatan Ibu di Indonesia
f.	Gambaran Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu di Indonesia
g.	Kesimpulan
h.	Referensi
Kematian Bayi dan Pembangunan Kesehatan Wilayah	
a.	Angka Kematian Bayi Indonesia di antara Negara ASEAN
b.	Disparitas Angka Kematian Bayi di Indonesia
c.	Pembangunan Kesehatan dan Kematian Bayi
d.	Profil Rumah Tangga dengan Kasus Kematian Bayi
e.	Kondisi Lingkungan dan Kematian Bayi
f.	Kesimpulan
g.	Referensi
Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan dan Ketenagakerjaan	
a.	Penyandang Disabilitas Adalah Subjek dan Objek Pembangunan
b.	Tantangan Mewujudkan Pembangunan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
c.	Penyandang Disabilitas di Indonesia Dibandingkan Negara Lain
d.	Karakteristik Penduduk Penyandang Disabilitas di Indonesia
e.	Capaian Pendidikan Penyandang Disabilitas
f.	Peluang Disabilitas dalam Pasar Tenaga Kerja
g.	Kesimpulan
h.	Referensi
i.	Lampiran

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 19

No.	Bahasan
Migran Muda, Siapakah Mereka?	
a.	Migrasi di Usia Muda, Memanfaatkan Momentum Bonus Demografi
b.	Karakteristik Migran Muda
c.	Ke Mana Tujuan Migran Muda
d.	Kesimpulan
e.	Daftar Pustaka
Migrasi dan Ketimpangan Pembangunan	
a.	Pembangunan Antardaerah di Indonesia
b.	Profil Migran Risen Indonesia
c.	Migran Risen dan Keterkaitan dengan Pembangunan
d.	Dampak Migrasi Terhadap Kemiskinan
e.	Kesimpulan
f.	Daftar Pustaka
g.	Lampiran
Pulang Kampung dan Kehidupan Para Migran	
a.	Pulang Kampung Bagian dari Budaya, Kegagalan, dan Kesuksesan
b.	Migrasi Pulang Kampung dalam Sensus Penduduk 2020
c.	Fakta Bahwa Migrasi Masih Menjadi Tren
d.	Intensitas Migrasi Pulang Kampung dan Covid-19
e.	Arus Migrasi Pulang Kampung
f.	Karakteristik Demografi Migran Pulang Kampung
g.	Mengapa Pulang Kampung?
h.	Aktivitas Migran di Kampung
i.	Kesimpulan
j.	Daftar Pustaka
Klasterisasi Pekerja Migran Indonesia	
a.	Migrasi Internasional Terjadi Karena Alasan Pekerjaan
b.	Karakteristik Pekerja Migran Indonesia
c.	Sentra Pengirim Pekerja Migran Indonesia
d.	Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Wilayah Pekerja Migran Indonesia
e.	Kesimpulan
f.	Daftar Pustaka

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 19

No.	Bahasan
Profil Pengguna Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah di Nusantara	
a.	Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Bangsa
b.	Dinamika Penutur Bahasa Indonesia
c.	Indonesia Kaya akan Bahasa Daerah
d.	Penggunaan Bahasa di Daerah Perbatasan
e.	Kesimpulan
f.	Daftar Pustaka
g.	Lampiran
Struktur Penduduk, Pemberdayaan Gender, dan Pembangunan Manusia	
a.	Struktur Penduduk dan Pembangunan Manusia di Indonesia
b.	Pemberdayaan Gender dan Pembangunan Manusia di Indonesia
c.	Pengaruh Struktur Penduduk dan Pemberdayaan Gender terhadap Capaian Pembangunan Manusia
d.	Kesimpulan
e.	Daftar Pustaka
Peluang Kepemilikan Rumah di Perkotaan	
a.	Pembangunan Perumahan Sebagai Bagian dari Upaya Peningkatan Kesejahteraan
b.	Rakyat
c.	Kondisi Perumahan Di Perkotaan Indonesia
d.	Kepemilikan Rumah di Perkotaan
e.	Profil Rumahtangga Yang Memiliki Rumah Milik Sendiri, Berkualitas, dan Memiliki Sertifikat Tanah di Perkotaan
f.	Profil Rumahtangga Yang Memiliki Rumah Milik Sendiri Berkualitas dan Memiliki Sertifikat Tanah di 27 Kota Besar
g.	Peluang Kepemilikan Rumah Berkualitas dan Memiliki Sertifikat Tanah di 27 Kota
h.	Besar
i.	Kesimpulan
	Daftar Pustaka
	Lampiran
Komuter dan Kondisi Perumahannya di Sepuluh Wilayah Metropolitan	
a.	Urgensi Analisis Komuter dan Kondisi Perumahannya
b.	Komuter dan Karakteristiknya di Wilayah Metropolitan
c.	Pola dan Moda Transportasi Komuter di Wilayah Metropolitan
d.	Perbandingan Kondisi Perumahan Komuter di Wilayah Metropolitan
e.	Kondisi Perumahan Komuter Menurut Keberadaan Sarana dan Prasarana Kondisi Lingkungan dan Keamanan
f.	Kesimpulan
g.	Daftar Pustaka

https://www.bps.go.id

Lampiran 20 Kumpulan Foto SP2020

Lanjutan Lampiran 20

bps.go.id

https://www.bps.go.id

ST2023
SENSUS PERTANIAN

#bangga melayani bangsa
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

https://www.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Laman: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id